T 11
BIL
S 04

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

BILIVSON
L4D002118

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
2004

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

BILIVSON
L4D001206

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 23 Maret 2004

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 23 Maret 2004

Pembimbing Pendamping	Pembimbing Utama
Ir. Fadjar Hari Mardiansjah, MT, MDP	Prof. Dr.Ir. Sugiono Soetomo, DEA

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

NO EYE HAS SEEN,
NO EARS HAS HEARD,
NO MIND HAS CONCEIVED
WHAT GOD HAS PREPARED FOR THOSE WHO LOVE HIM

(1 Corinthian 2 : 9)

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Ayah dan Ibu : Lewy Bungken dan Agustine Turui
Kakak dan Adikku tercinta : Mila Silvani, Sari Sahayanie dan Anugerahnu
Aji Rario dan Parunadi, serta Aka, Yola, Jose dan Ucha

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebut dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 23 Maret 2004

BILIVSON
NIM L4D 002118

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya jugalah tesis ini dapat diselesaikan.

Substansi yang diangkat sebagai dasar tesis ini adalah berkaitan dengan **Struktur Ruang sebagai Arahan Pengembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Barito Selatan**. Tema ini perlu dibahas mengingat sampai dengan saat ini struktur ruang senantiasa hanya dilihat dari dimensi fisik pelayanan. Padahal struktur ruang berangkat dari aktivitas-aktivitas ekonomi yang berinteraksi dengan wadahnya, yaitu ruang itu sendiri. Hal ini menjadi menarik karena permasalahan spasial Kabupaten Barito Selatan yang cukup kompleks sebelum maupun pascapemekaran.

Dalam penulisan tesis ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir Sugiono Soetomo, DEA selaku Mentor dan Ketua Program yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam proses penulisan tesis.
2. Bapak Ir. Fadjar Hari Mardiansjah, MT, MDP selaku Co-Mentor yang selama ini telah meluangkan waktu untuk membimbing, mendorong dan memberikan masukan selama proses penulisan tesis.
3. Bapak Ir. Holi Bina Wijaya, MUM selaku Pembahas dan Bapak Drs. PM Brotosunaryo, MSP selaku Penguji yang telah banyak memberikan masukan untuk kelayakan dan ketajaman tesis.
4. Kepala Balai Pendidikan Diploma dan Magister Pengembangan Wilayah Departemen Kimpraswil beserta staf yang telah memberikan kesempatan dan dorongan untuk menyelesaikan studi.
5. Ayahanda Lewy Bungken dan Ibunda Agustine atas segala kasih sayang, kesabaran dan doanya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di MPPWK ini.
6. Aji Rario dan Parunadi sekeluarga atas dukungan dan doanya bagi penulis.
7. Rekan-rekan di Buntok yang telah banyak membantu terutama ketika survai dan mendoakan penulis dalam studi.
8. Penghuni Asrama Keluarga yang bahu-membahu dengan keragamannya : Malla, Hasto, Encik, Yunil, Engga, Safar dan Meidy.
9. Teman-teman MPPWK 2 yang telah bekerjasama selama studi.

Tiada gading yang tak retak. Penyusun menyadari bahwa tesis yang dikerjakan sebatas kemampuan ini, masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penyusun mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Semarang, Maret 2004

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
LEMBAR PERNYATAAN iii
LEMBAR PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan dan Sasaran Studi 9
1.3.1 Tujuan Studi 9
1.3.2 Sasaran Studi 9
1.4 Hasil dan Manfaat Studi 10
1.4.1 Hasil Studi 11
1.4.2 Manfaat Studi 11
1.5 Ruang Lingkup Studi 12
1.5.1 Ruang Lingkup Substansial 12
1.5.2 Ruang Lingkup Spasial 13
1.6 Kerangka Pemikiran 13
1.7 Pendekatan dan Metode Studi 17
1.7.1 Pendekatan Studi 17
1.7.2 Kerangka Analisis 19
1.7.3 Teknik Analisis 20
1.7.3.1 Analisis Kuantitatif 20
1.7.3.2 Analisis Kualitatif 28
1.7.4 Metode Pengambilan Sampel 29
1.8 Sistematika Pembahasan 31

BAB II STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH

2.1 Struktur Ruang 32
2.1.1 Pengertian dan Peran Struktur Ruang 32
2.1.2 Sistem Hirarki Kota 38
2.1.3 Keterkaitan Wilayah dalam Struktur Ruang 42
2.2 Wilayah dan Konsep-Konsep Pengembangan Wilayah 45
2.2.1 Wilayah dan Pengembangan Wilayah 45
2.2.2 Konsep Kutub Pertumbuhan 48
2.2.3 Konsep Simpul Jasa Distribusi 51
2.2.4 Konsep Agropolitan 53
2.2.5 Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal 55
2.3 Pengembangan Wilayah Tepi Sungai 57
2.4 Struktur Ruang sebagai Arahan Pengembangan Ekonomi Wilayah .. 60
2.4.1 Kajian Teoretis Ekonomi Wilayah 60
2.4.2 Pengembangan Ekonomi Wilayah..... 61
2.4.3 Struktur Ruang dalam Perspektif Ekonomi Wilayah 63
2.4.4 Struktur Ruang dalam Konteks Pengembangan Ekonomi Wilayah 65
2.5 Kesimpulan Kajian Pustaka 68

BAB III KAJIAN UMUM WILAYAH DAN STRUKTUR RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN

3.1 Kajian Umum Wilayah 71
3.1.1 Fisik Alam 71
3.1.2 Kependudukan 73
3.1.3 Ekonomi Wilayah 74
3.1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 74
3.1.3.2 Produk Domestik Regional Bruto..... 74
3.1.3.3 Pendapatan Regional Per Kapita 79
3.1.3.4 Posisi Struktur Ekonomi Kabupaten Barito Selatan Secara Regional 79
3.1.4 Kebijakan Pembangunan Daerah 80
3.2 Struktur Ruang Kabupaten Barito Selatan 83
3.2.1 Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 83
3.2.2 Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan 84
3.2.3 Sistem Hirarki Kota Sebelum Pemekaran 88
3.2.4 Pola Pemanfaatan Ruang 91
3.2.5 Sebaran Fasilitas di Ibukota Kecamatan 93
3.2.5.1 Fasilitas Ekonomi 93

3.2.5.2 Fasilitas Sosial 94
3.2.5.3 Fasilitas Pemerintahan 98
3.2.6 Jaringan Transportasi 98
3.2.6.1 Transportasi Sungai 98
3.2.6.2 Transportasi Darat..... 103

BAB IV ANALISIS STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

4.1 Analisis Peran Kebijakan Struktur Ruang dan Ekonomi Wilayah 107
4.1.1 Analisis Peran Kebijakan Struktur Ruang 108
4.1.2 Analisis Peran Kebijakan Ekonomi Wilayah 111
4.2 Analisis Struktur Ruang Fisik 114
4.2.1 Analisis Ruang Fisik 114
4.2.2 Analisis Sistem Hirarki Kota 116
4.2.3 Analisis Wilayah Pengaruh 124
4.2.4 Analisis Identifikasi Struktur Ruang Fisik 127
4.3 Analisis Struktur Ruang Ekonomi 130
4.3.1 Analisis Ekonomi Basis 130
4.3.2 Analisis Prospek Ekonomi 134
4.3.3 Analisis Identifikasi Struktur Ruang Ekonomi 142
4.4 Analisis Interaksi Wilayah 170
4.4.1 Analisis Jaringan Transportasi 172
4.4.1.1 Transportasi Sungai 172
4.4.1.2 Transportasi Darat..... 178
4.4.2 Analisis Interaksi Ekonomi 183
4.4.3 Analisis Interaksi Sosial Budaya 197
4.5 Analisis Struktur Ruang sebagai Arahan Pengembangan Ekonomi Wilayah 206
4.5.1 Analisis Struktur Ruang dalam Pengembangan Ekonomi Wilayah 206
4.5.2 Analisis Keunggulan dan Kelemahan Struktur Ruang 214
4.5.3 Analisis Kebutuhan Pengembangan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Keunggulan dan Kelemahan Struktur Ruang 222

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan 229
5.2 Rekomendasi 232

DAFTAR PUSTAKA 234
LAMPIRAN 239

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1	Perbandingan Kondisi Kabupaten Barito Selatan Sebelum dan Sesudah Pemekaran	5
Tabel I.2	Kategori Sektor/ Sub Sektor Ekonomi Berdasarkan Nilai LQ dan Shift Share	27
Tabel I.3	Distribusi Pengambilan Sampel Penelitian	30
Tabel II.1	Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah	61
Tabel III.1	Luas Wilayah Kab. Barito Selatan berdasarkan Kelas Ketinggian	72
Tabel III.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Selatan 1997-2002	73
Tabel III.3	PDRB Kabupaten Barito Selatan Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha 1998-2002	76
Tabel III.4	Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku dan Kontribusi Tiap Sektor/ Sub Sektor Tahun 2000-2002	77
Tabel III.5	PDRB Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2000 Atas Dasar Harga Konstan 1993	80
Tabel III.6	Perwilayahan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	83
Tabel III.7	Perwilayahan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan	84
Tabel III.8	Administrasi dan Kependudukan Menurut Wilayah Pengembangan Tahun 2001	86
Tabel III.9	Hirarki Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	88
Tabel III.10	Orde dan Ranking Kota di Kabupaten Barito Selatan Sebelum Pemekaran	90
Tabel III.11	Pemanfaatan Ruang Kabupaten Barito Selatan	91
Tabel III.12	Arus Angkutan Sungai Keluar-Masuk Dermaga Tahun 2002	101
Tabel III.13	Arus Penumpang Keluar-Masuk Dermaga Tahun 2002	102
Tabel III.14	Arus Barang yang Masuk Dermaga Tahun 2002	103
Tabel III.15	Arus Barang Keluar Dermaga Tahun 2002	103
Tabel III.16	Jumlah Kendaraan dan Penumpang Menurut Trayek di Terminal Sanggu Tahun 2002	105
Tabel III.17	Arus Barang yang Masuk Jembatan Timbang di Pasar Panas Tahun 2001-2002	106

Tabel IV.1	Diskrepansi Struktur Ruang Kabupaten Barito Selatan	108
Tabel IV.2	Hasil Scalogram Fasilitas dan Jumlah Penduduk IKK	119
Tabel IV.3	Ranking dan Nilai Ibukota Kecamatan Berdasarkan Fasilitas dan Jumlah Penduduk	122
Tabel IV.4	Jumlah Penduduk dan Jarak antar Ibukota Kecamatan	126
Tabel IV.5	Indeks Gravitasi antar Ibukota Kecamatan	126
Tabel IV.6	Data dan Perhitungan LQ Sektor/ Sub Sektor Ekonomi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2002	132
Tabel IV.7	Hasil Perhitungan Shift and Share Terhadap PDRB 2000-2002 Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha	134
Tabel IV.8	Kriteria Sektor/ Sub Sektor Berdasar Nilai KPP dan KPK	137
Tabel IV.9	Kategori Sektor/ Sub Sektor Berdasar Nilai LQ dan Shift Share	138
Tabel IV.10	Hirarki Sektor/ Sub Sektor Menurut Kategori	140
Tabel IV.11	Kontribusi Sektor/ Sub Sektor Ekonomi PDRB Tahun 2000-2002 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)	143
Tabel IV.12	Peran Ekonomi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan	144
Tabel IV.13	Peran Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	145
Tabel IV.14	Peran Ekonomi Sub Sektor Peternakan	146
Tabel IV.15	Nilai Hasil dan Lahan Produksi Sub Sektor Kehutanan	146
Tabel IV.16	Peran Ekonomi Sub Sektor Kehutanan	147
Tabel IV.17	Nilai Sub Sektor Perikanan Berdasar Produksi dan Pengembangan	147
Tabel IV.18	Peran Ekonomi Sub Sektor Perikanan	148
Tabel IV.19	Hirarki Kecamatan Berdasar Peran Ekonomi Sektor Pertanian	148
Tabel IV.20	Peran Ekonomi Sub Sektor Pertambangan	149
Tabel IV.21	Peran Ekonomi Sub Sektor Penggalian	150
Tabel IV.22	Hirarki Kecamatan Berdasar Peran Ekonomi Sektor Pertambangan dan Penggalian	150
Tabel IV.23	Peran Ekonomi Sub Sektor Industri Non Migas	151
Tabel IV.24	Hirarki Kecamatan Berdasar Peran Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	151
Tabel IV.25	Peran Ekonomi Sub Sektor Listrik	152
Tabel IV.26	Peran Ekonomi Sub Sektor Air Bersih	152
Tabel IV.27	Hirarki Kecamatan Berdasar Peran Ekonomi Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	153
Tabel IV.28	Peran Ekonomi Sektor Bangunan/ Konstruksi	153
Tabel IV.29	Peran Ekonomi Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	154

Tabel IV.30	Peran Ekonomi Sub Sektor Hotel	154
Tabel IV.31	Peran Ekonomi Sub Sektor Restoran	155
Tabel IV.32	Hirarki Kecamatan Berdasar Peran Ekonomi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	156
Tabel IV.33	Peran Ekonomi Sub-Sub Sektor Angkutan Jalan Raya	157
Tabel IV.34	Peran Ekonomi Sub-Sub Sektor Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	157
Tabel IV.35	Peran Ekonomi Sub-Sub Sektor Jasa Perangkutan	158
Tabel IV.36	Peran Ekonomi Sub Sektor Pengangkutan	158
Tabel IV.37	Peran Ekonomi Sub Sektor Komunikasi	159
Tabel IV.38	Hirarki Kecamatan Berdasar Peran Ekonomi Sektor Angkutan dan Komunikasi	159
Tabel IV.39	Peran Ekonomi Sub Sektor Lembaga Keuangan Non Bank	160
Tabel IV.40	Peran Ekonomi Sub Sektor Sewa Bangunan	161
Tabel IV.41	Hirarki Kecamatan Berdasar Peran Ekonomi Sektor Keuangan	161
Tabel IV.42	Peran Ekonomi Sub Sektor Pemerintahan Umum	162
Tabel IV.43	Jumlah Jasa Sub Sektor Swasta Menurut Kecamatan	163
Tabel IV.44	Peran Ekonomi Sub Sektor Swasta	163
Tabel IV.45	Hirarki Kecamatan Berdasar Peran Ekonomi Sektor Jasa-Jasa	164
Tabel IV.46	Peran Ekonomi Sektor/ Sub Sektor Ekonomi Menurut Kecamatan	164
Tabel IV.47	Aktivitas Masyarakat dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan	200
Tabel IV.48	Pandangan Masyarakat Terhadap Fasilitas Kesehatan	203
Tabel IV.49	Interaksi Sosial Budaya	204
Tabel IV.50	Sintesis Struktur Ruang Secara Fisik, Ekonomi dan Interaksi Wilayah	208
Tabel IV.51	Penentuan Hirarki Berdasarkan Struktur Ruang Fisik dan Ekonomi	210
Tabel IV.52	Penentuan Hirarki Berdasarkan Interaksi Wilayah	210
Tabel IV.53	Hirarki Unit Spasial Berdasarkan Struktur Ruang Fisik, Struktur Ruang Ekonomi dan Interaksi Wilayah	211
Tabel IV.54	Fungsi Orde Kota dan Keunggulan Ekonomi	219
Tabel IV.55	Kelemahan dalam Struktur Ruang Barito Selatan	221
Tabel IV.56	Kebutuhan Pengembangan Sarana dan Prasarana	225

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Peta Provinsi Kalimantan Tengah	14
Gambar 1.2	Peta Kabupaten Barito Selatan	15
Gambar 1.3	Kerangka Pikir Penelitian	17
Gambar 1.4	Kerangka Analisis	20
Gambar 1.4	Alur Pikir Teknik Analisis	22
Gambar 2.1	Keteraturan Ruang	35
Gambar 2.2	Struktur Ruang dalam Hirarki Permukiman	36
Gambar 2.3	Hubungan Fungsional Subsistem Permukiman	37
Gambar 2.4	Sistem Hirarki Kota Model Christaller	39
Gambar 2.5	Sistem Hirarki Kota Model Pred	40
Gambar 2.6	Struktur Dasar Pengembangan Wilayah Poernomosidi	52
Gambar 2.7	Permukiman Tepi Sungai	59
Gambar 2.8	Sistem Ekonomi Wilayah Nodal	63
Gambar 2.9	Kedudukan Penataan Ruang dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	67
Gambar 2.10	Pendekatan Teoretis Struktur Ruang dan Pengembangan Ekonomi Wilayah	70
Gambar 3.1	Peta Kondisi Fisik Alam dan Kependudukan	75
Gambar 3.2	Peta Struktur Ruang Kalimantan Tengah	85
Gambar 3.3	Peta Struktur Ruang Barito Selatan	87
Gambar 3.4	Peta Pemanfaatan Ruang	92
Gambar 3.5	Fasilitas Ekonomi Ibukota Kecamatan	95
Gambar 3.6	Fasilitas Ekonomi Kota Buntok	96
Gambar 3.7	Fasilitas Sosial Ibukota Kecamatan	99
Gambar 3.8	Fasilitas Pemerintahan	100
Gambar 4.1	Peta Ruang Fisik	117
Gambar 4.2	Scalogram Menurut Fasilitas Tahun 1998 Sebelum Pemekaran	118
Gambar 4.3	Hasil Analisis Scalogram Kabupaten Barito Selatan Menurut Fasilitas	120

Gambar 4.4	Jumlah Penduduk Ibukota Kecamatan Tahun 2002 dan 2012	121
Gambar 4.5	Peta Analisis Sistem Hirarki Kota	125
Gambar 4.6	Peta Analisis Wilayah Pengaruh	128
Gambar 4.7	Peta Analisis Identifikasi Struktur Ruang Fisik	131
Gambar 4.8	Kuadran Sektor Menurut Kategori dari Hasil Analisis Shift and Share	137
Gambar 4.9	Peta Analisis Peran Ekonomi	166
Gambar 4.10	Peta Analisis Struktur Ruang Ekonomi	171
Gambar 4.11	Peta Analisis Jaringan Transportasi Sungai	179
Gambar 4.12	Peta Analisis Jaringan Transportasi Darat	182
Gambar 4.13	Aktivitas Ekonomi di Kota Rantau Kujang, Jenamas	185
Gambar 4.14	Aktivitas Ekonomi di Kota Mengkatip, Dusun Hilir	187
Gambar 4.15	Aktivitas Ekonomi di Kota Bangkuang, Karau Kuala	189
Gambar 4.16	Aktivitas Ekonomi di Kota Buntok, Dusun Selatan	191
Gambar 4.17	Aktivitas Ekonomi di Kota Pendang, Dusun Utara	193
Gambar 4.18	Aktivitas Ekonomi di Kota Tabak Kanilan, Gunung Bintang Awai	195
Gambar 4.19	Peta Analisis Interaksi Ekonomi	198
Gambar 4.20	Peta Analisis Interaksi Sosial Budaya	205
Gambar 4.21	Komparasi Identifikasi Struktur Ruang Fisik dan Ekonomi	207
Gambar 4.22	Peta Analisis Struktur Ruang dalam Pengembangan Ekonomi Wilayah	215
Gambar 4.23	Peta Analisis Keunggulan Ekonomi Struktur Ruang	223
Gambar 4.24	Peta Analisis Kebutuhan Pengembangan Sarana dan Prasarana	228

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

LAMPIRAN A : Kuesioner dan Wawancara 239

LAMPIRAN B : Data Fasilitas dan Sektor Ekonomi Kabupaten Barito Selatan

Tabel B.1 : Jumlah Fasilitas Ekonomi Kabupaten Barito Selatan tahun 2002 252

Tabel B.2 : Jumlah Fasilitas Sosial Kabupaten Barito Selatan tahun 2002 253

Tabel B.3 : Jumlah Fasilitas Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan tahun 2002 254

Tabel B.4 : Jumlah Produksi dan Luas Lahan Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2002 255

Tabel B.5 : Jumlah Produksi dan Luas Lahan Sub Sektor Perkebunan tahun 2002 255

Tabel B.6 : Jumlah Produksi dan Populasi Ternak tahun 2002 256

Tabel B.7 : Jumlah Produksi dan Luas Lahan Sub Sektor Kehutanan tahun 2002 256

Tabel B.8 : Jumlah Produksi dan Luas Lahan Sub Sektor Perikanan tahun 2002 257

Tabel B.9 : Jumlah Tenaga Kerja dan Potensi Pertambangan tahun 2002 257

Tabel B.10 : Jumlah Produksi dan Potensi Penggalian tahun 2002 258

Tabel B.11 : Jumlah Tenaga Kerja dan Produksi Industri Kecil dan Menengah tahun 2002 258

Tabel B.12 : Jumlah Pelanggan PLN, Non PLN dan PDAM tahun 2002 259

Tabel B.13 : Jumlah Pedagang Besar dan Eceran tahun 2002 259

Tabel B.14 : Jumlah Hotel Melati, Kamar dan Rata-rata Malam Kamar tahun 2002 260

Tabel B.15 : Jumlah Kendaraan dan Penumpang Jalan Raya tahun 2002 260

Tabel B.16 : Jumlah Kapal, Barang dan Penumpang Angkutan Sungai tahun 2002 261

Tabel B.17 : Jumlah Jasa Perangkutan tahun 2002 261

Tabel B.18 : Jumlah Jasa Komunikasi tahun 2002 262

Tabel B.19 : Jumlah Sewa Bangunan tahun 2002 262

Tabel B.20 : Jumlah Pegawai Menurut Golongan tahun 2002 263

Tabel B.21 : Jumlah Tenaga Kerja pada Sub Sektor Jasa Hiburan dan Rekreasi tahun 2002 263
Tabel B.22 : Jumlah Tenaga Kerja pada Sub Sektor Jasa Sosial Kemasyarakatan tahun 2002 264
Tabel B.23 : Jumlah Tenaga Kerja pada Sub Sektor Jasa Hiburan dan Rekreasi tahun 2002 265

LAMPIRAN C : Hasil Analisis Scalogram

Tabel C.1 : Perhitungan Scalogram Fasilitas Ekonomi 266
Tabel C.2 : Perhitungan Scalogram Fasilitas Sosial 267
Tabel C.3 : Perhitungan Scalogram Fasilitas Pemerintahan 268

ABSTRAK

Kabupaten Barito Selatan sebelum pemekaran adalah wilayah yang mengalami disparitas antara wilayah daratan dan wilayah tepi sungai, sedangkan dalam konteks regional mengalami ketertinggalan dalam pembangunan Kalimantan Tengah, sehingga hubungan dengan Palangka Raya cenderung bersifat formal-administratif. Pascapemekaran, wilayah Barito Selatan menjadi hinterland kabupaten baru Barito Timur dan berada pada bentang wilayah tepi Sungai Barito yang relatif tertinggal.

Akumulasi permasalahan tersebut memerlukan suatu kajian mengenai bagaimana bentuk struktur ruang yang menjadi arahan pengembangan ekonomi wilayah Barito Selatan. Struktur ruang adalah organisasi ruang yang mengalokasikan obyek fisik dan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Sebagai bagian dari tahap perencanaan ruang, struktur ruang merupakan matra spasial perencanaan pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan penelitian, dilakukan pendekatan dengan memadukan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif yang mengintegrasikan struktur ruang secara fisik dan ekonomi dengan terjadinya interaksi wilayah.

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa struktur ruang secara fisik berbeda dengan struktur ruang secara ekonomi, yang masing-masing dipengaruhi pula oleh interaksi wilayah. Struktur ruang Barito Selatan terdiri dari 2 unit atau wilayah pengembangan, yaitu Wilayah Utara dan Selatan. Wilayah Utara berpusat pada Kota Buntok sebagai Kota Orde I yang bertumpu pada jalur darat dan sungai. Sedangkan Wilayah Selatan adalah wilayah yang tertinggal dengan pusat pertumbuhan Kota Rantau Kujang sebagai Kota Orde II yang bertumpu pada jalur sungai.

Wilayah Utara dalam struktur ruang memiliki keunggulan ekonomi sektor tersier berpusat di Kota Orde I, sedangkan wilayah pengaruhnya memiliki keunggulan sektor pertanian serta pertambangan dan penggalian. Wilayah Selatan dalam struktur ruang memiliki keunggulan ekonomi sektor pertanian, yaitu sub sektor perikanan dan kehutanan, kemudian industri pengolahan serta angkutan dan komunikasi. Untuk mengoptimalkan keunggulan ekonomi dan mengatasi kelemahan dalam struktur ruang hasil identifikasi, arahan yang digunakan adalah arahan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana yang bersifat inter dan intra wilayah, sesuai teori Azis agar melakukan investasi langsung pada sektor produktif atau penanaman modal pada aspek social-overhead.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tidak efektifnya kebijakan struktur ruang yang ada serta terjadinya perbedaan mendasar antara struktur ruang fisik dengan struktur ruang ekonomi. Hal tersebut membentuk struktur ruang Barito Selatan yang asimetris di mana Wilayah Selatan merupakan wilayah tertinggal, sehingga arahan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana ditujukan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Berkaitan dengan kesimpulan tersebut, rekomendasi penelitian ini adalah meninjau dan merevisi kebijakan struktur ruang, memproritaskan pengembangan jalan Buntok-Tabak Kanilan-Patas I serta terminal angkutan di Kecamatan Gunung Bintang Awai sebagai fokus Wilayah Utara, kemudian melakukan kerjasama antar wilayah dengan Kabupaten Barito Timur dalam hal pengembangan jalan dan sarana angkutan Buntok-Bangkuang serta Buntok-Rantau Kujang sebagai fokus pembangunan Wilayah Selatan.

ABSTRACT

South Barito Regency before split is region that have disparity between upland and river basin area, while in regional context is left behind in development of Central Kalimantan, so that relation with Palangka Raya tend to have the character of formal-administrative. After split of region, South Barito Regency become hinterland from new regency, East Barito, and reside in unfolding river basin of Barito which relative drop behind.

Problems accumulation needs a study about spatial structure form becoming regional economic development directive of South Barito. Spatial structure is spatial organization which alocating physical objects and economic activities in a region. As part of spatial planning phases, spatial structure represents dimention of spatial planning of regional development. To reach the target of research, approaches to be used in this study are not only quantitative but also qualitative analysis techniques, which integrating physical and economic spatial structure and regional interactions.

From result of research, obtained that physical spatial structure different from economic spatial structure, where each also influenced by regional interactions. Spatial structure of South Barito Regency consists of 2 units or development area. North Area is centre on Buntok as Primary Order City, which based on river as well as road networks. Meanwhile, South Area is region which left behind with growth center of Rantau Kujang as Secondary Order City, based on river linkages.

North Area in spatial structure have excellence of tertiary economic sectors center in Primary Order City, while its hinterlands have advantages at agriculture and also mining and quarrying sector. South Area in spatial structure have excellence of agriculture sector, that is fisheries and forestry sub sector, then manufacturing sector, and transportation and communication sub sector. To be optimal these economic advantages and overcome weakness in identified spatial structure, directive that used is development requirement of facilities and infrastructure having the character of inter and intra region, according to Azis theory that doing direct investment at productive sector or cultivation of capital in social-overhead aspect.

Conclusion in this research is not effective policy of existing spatial structure and also elementary difference between physical and economic spatial structure. It shapes asymmetrical spatial structure of South Barito Regency where South Area represent left behind region, so that development requirement directive of facilities and infrastructure addresed to link this gap. Relate to the conclusion, this research recommends to evaluate and then revise policy of spatial structure, priority development street of Buntok-Tabak Kanilan-Patas I and also terminal of transport in Gunung Bintang Awai District as regional focus of North Area, then do regional cooperation with East Barito Regency in development of street and transport facilities of Buntok-Bangkuang, and Buntok-Rantau Kujang as development focus of South Area.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menandai dimulainya era otonomi daerah, yang bertumpu pada paradigma desentralisasi dengan menitikberatkan kewenangan pada daerah kabupaten dan kota. Hal ini dipandang sebagai suatu pencerahan, karena pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan yang kontekstual sesuai kebutuhan daerahnya.

Proses pembangunan daerah dimulai dari tahap perencanaan pembangunan. Menurut Poppe dalam Riyadi dan Bratakusumah (2003 : 26), perencanaan pembangunan daerah membutuhkan pengetahuan intersektoral yang luas dan kemampuan merencanakan tiga bidang utama, yaitu : (1) perencanaan sumber daya alam (2) perencanaan sosial ekonomi (3) perencanaan fisik dan infrastruktur. Kondisi tersebut mengharuskan suatu kajian perencanaan secara komprehensif dan terpadu dengan memasukkan kajian terhadap aspek spasial. Hal itu dimaksudkan untuk memadukan perencanaan spasial yang berdimensi fisik ekonomi dan nonspasial yang berdimensi sosial politik dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (Munir, 2002 : 215).

Sehubungan dengan itu, Usman dalam Munir (2002 : 217) memandang perlunya dimensi spasial dalam pembangunan daerah untuk memberikan watak atau ciri tersendiri, serta memiliki pola dan spirit yang sesuai dengan potensi dan kondisi yang dimilikinya. Semangat membangun daerah secara komprehensif-terpadu seperti ini perlu diwujudnyatakan pada suatu daerah dengan tantangan sosial ekonomi dan geografis yang kompleks seperti di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Kabupaten Barito Selatan yang berada di bagian Timur Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Kabupaten Barito Utara merupakan wilayah Daerah Aliran Sungai Barito. Selama ini kedua kabupaten ini lebih kuat hubungannya secara emosional fungsional dengan Kota Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan. Hubungan dengan ibukota provinsi, yaitu Kota Palangka Raya, cenderung bersifat formal administratif (Kompas, 11 Oktober 2002).

Hal tersebut terjadi karena belum adanya jalur transportasi darat langsung antara Kota Buntok (Barito Selatan) dan Kota Muara Teweh (Barito Utara) dengan Kota Palangka Raya. Jalan provinsi Palangka Raya – Buntok – Ampah sepanjang 251,25 km masih dalam tahap penyelesaian. Untuk mencapai Kota Palangka Raya harus menempuh perjalanan 12 jam dari Buntok dan 18 jam dari Muara Teweh melalui Kota Banjarmasin terlebih dahulu.

Dalam Padu Serasi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1999, Buntok sebagai ibukota Kabupaten Barito Selatan ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Pembangunan (WP) Bagian Timur, yang meliputi Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Selatan sendiri.

Kedekatan geografis dengan wilayah Kalimantan Selatan dan orientasi kuat Sungai Barito yang membujur dari Utara ke Selatan menuju Kota Banjarmasin, memperkuat peranan Kota Banjarmasin terhadap Wilayah Timur Kalimantan Tengah. Tidak adanya akses langsung Wilayah Timur terhadap Kota Palangka Raya dan posisi geografis yang kurang menguntungkan menyebabkan pertumbuhan Wilayah Timur dalam konstelasi regional Kalimantan Tengah relatif lebih tertinggal di banding Wilayah Pembangunan Tengah, Selatan dan Barat

Dalam konteks kebijakan ruang mikro, berdasarkan POLDAS Kabupaten Barito Selatan 2001-2005, Barito Selatan dibagi menjadi 4 wilayah pembangunan, yaitu :

- Wilayah Pembangunan Bagian Barat dengan pusat pengembangan di Kota Buntok.
- Wilayah Pembangunan Bagian Timur dengan pusat pengembangan di Kota Tamiang Layang.
- Wilayah Pembangunan Bagian Tengah dengan pusat pengembangan di Kota Ampah.
- Wilayah Pembangunan Bagian Selatan dengan pusat pengembangan di Kota Rantau Kujang.

Dilihat dari aspek topografis, perwilayahan pembangunan di atas dapat dibagi ke dalam 2 wilayah yang sangat berbeda, yaitu daerah daratan (Tengah sampai Timur) dan daerah aliran sungai (Utara hingga Selatan). Kebijakan pembangunan Barito Selatan selama ini lebih terkonsentrasi pada Kawasan Tengah yang bertumpu pada koridor Buntok-Ampah-Tamiang Layang dan berorientasi ke Kota Banjarmasin dengan akses transportasi darat. Kawasan Timur, termasuk Kecamatan Gunung Bintang Awai, lebih banyak mendapat tetesan dari pembangunan Kawasan Tengah dengan posisinya sebagai jalur penghubung. Sementara Kawasan Utara-Selatan di sepanjang DAS Barito terkesan menjadi wilayah belakang, yang hanya mendapatkan *spread effect* dari pembangunan daerah daratan. Akibatnya terjadi disparitas wilayah antara daerah daratan dan daerah aliran sungai (Renstra Barito Selatan 2001-2005).

Pada tanggal 10 April 2002, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi terluas ketiga di Indonesia mengalami pemekaran daerah pada tingkat kabupaten. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 5 Tahun 2002, wilayah Kalimantan Tengah mengalami pemekaran dari 5 kabupaten dan 1 kota menjadi 13 kabupaten dan 1 kota.

Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang mengalami pemekaran. Kabupaten Barito Selatan dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu

Kabupaten Barito Selatan sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Barito Timur. Akibat pemekaran daerah tersebut, wilayah Kabupaten Barito Selatan mengalami pengurangan luas sebanyak 6 kecamatan di bagian Tengah dan Timur dari sebelumnya 12 kecamatan. Luas wilayah berkurang dari 12.664 km^2 menjadi 8.830 km^2.

Pemekaran daerah ini membagi wilayah Barito Selatan–Barito Timur berdasarkan kondisi wilayah, di mana daerah daratan masuk wilayah administratif Kabupaten Barito Timur sedang daerah aliran sungai (DAS) Barito ditambah Kecamatan Gunung Bintang Awai di bagian Utara masuk wilayah administratif Kabupaten Barito Selatan. Pembagian wilayah ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kawasan daerah perbukitan/ pegunungan dengan kemiringan 15 sampai dengan 25 % dan berbatu-batu yang terdiri dari Kecamatan Dusun Timur, Benua Lima, Petangkep Tutui, Awang, Pematang Karau dan Dusun Tengah masuk wilayah Kabupaten Barito Timur. Wilayah Pembangunan Tengah dan Timur ini masuk bentang kawasan yang berorientasi pada jalur transportasi darat.
2. Kawasan dataran rendah yang terdiri dari danau dan rawa-rawa yang dilewati alur Sungai Barito secara langsung dengan ketinggian 10 sampai dengan 50 m dari permukaan laut, terdiri dari Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara, Dusun Hilir, Karau Kuala dan Jenamas. Kecamatan-kecamatan ini masuk wilayah Kabupaten Barito Selatan. Satu kecamatan lagi, Kecamatan Gunung Bintang Awai di bagian Utara terletak pada daerah berbukit-bukit. Wilayah Pembangunan Barat dan Selatan ini termasuk dalam bentang kawasan yang berorientasi terutama pada jalur transportasi sungai.

Pemekaran daerah ini menyebabkan rentang kendali pemerintahan lebih pendek dan terkonsentrasi sebagian besar di daerah aliran sungai (DAS) Barito yang sebelumnya

terkesan terpinggirkan dalam pembangunan daerah. Sementara dalam konteks regional, posisi Kabupaten Barito Selatan relatif semakin terpencil setelah pemekaran daerah. Dalam hubungan jalur darat menuju Kota Banjarmasin sebagai pusat orientasi DAS Barito, Kabupaten Barito Selatan berada di wilayah belakang Kabupaten Barito Timur.

Realita yang ada menunjukkan hubungan Kota Buntok dengan kecamatan di sepanjang DAS Barito melalui akses jalan darat belum optimal. Antara Buntok dengan Pendang sebagai ibukota Kecamatan Dusun Utara masih berupa jalan tanah yang terhalang Sungai Barito. Antara Buntok dan Bangkuang sebagai ibukota Kecamatan Karau Kuala dihubungkan jalan darat dengan badan jalan yang masih rendah, sehingga jika musim hujan sebagian jalan dilanda banjir. Sedangkan untuk mencapai Mengkatip dan Rantau Kujang harus melalui jalan negara Buntok-Ampah-Kelanis yang berjarak 160 km, dan dari Kelanis harus naik motor getek atau *speed boat* (Banjarmasin Post, 18 Juli 2003).

Selengkapnya mengenai komparasi kondisi wilayah Barito Selatan sebelum dan sesudah pemekaran ditunjukkan dalam tabel I.1

TABEL I.1
PERBANDINGAN KONDISI KABUPATEN BARITO SELATAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN

Komponen	Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran
Luas wilayah	12.664 km2	8.830 km2
Jumlah kecamatan	12	6
Jumlah penduduk	187.200	113.195
Geografis/ topografis	Daratan dan Daerah Aliran Sungai	Dominasi Daerah Aliran Sungai
Orientasi wilayah	Orientasi Kota Banjarmasin	Hinterland Kabupaten Barito Timur dengan orientasi Kota Banjarmasin
Bentang wilayah	Berorientasi transportasi darat dan sungai	Masih dominan transportasi sungai
PDRB atas dasar harga konstan 1993	406.352,23 juta (2001)	263.728,00 juta (2002)
Laju pertumbuhan PDRB	2,48 %	2,73 %

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2002, diolah

Posisi regional Barito Selatan pascapemekaran adalah kesulitan aksesibilitas, yaitu masih dominannya pengaruh transportasi sungai bagi sebagian besar ibukota kecamatan. Posisi ini menciptakan peran Kota Buntok sangat sentralistis dalam sistem hirarki kota Kabupaten Barito Selatan, karena merupakan pintu gerbang jalur darat sekaligus pusat transportasi sungai.

Dari fakta-fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah memberikan peluang dan tantangan bagi pembangunan daerah Barito Selatan. Peluang, karena wilayah yang dilayani berada dalam rentang kendali lebih pendek dan karakteristik cenderung homogen (wilayah daerah aliran sungai). Tantangan, karena merupakan wilayah yang relatif tertinggal dalam konsep pengembangan wilayah sebelumnya, adanya kesulitan aksesibilitas dan menjadi *hinterland* dari kabupaten baru.

Ditinjau dari aspek ekonomi wilayah, selama ini Renstra Barito Selatan 2001-2005 menyebutkan kekayaan sumber daya alam dan potensi juga lebih banyak mengalir ke daerah luar. Bagian Selatan (daerah aliran sungai) serta bagian Timur lebih banyak mengalir ke Kalimantan Selatan, sedangkan bagian Utara mengalir ke Kabupaten Barito Utara. Setelah pemekaran, tentunya potensi ekonomi daerah harus benar-benar dioptimalkan berdasar rentang kendali yang ada. Hal ini memerlukan kajian peran ekonomi yang diemban setiap unit spasial serta aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalamnya.

Kendala-kendala yang dihadapi Kabupaten Barito Selatan dan dinamika wilayah yang terjadi membutuhkan suatu intervensi ruang sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Intervensi ruang tersebut seyogyanya dimulai dari suatu evaluasi perencanaan tata ruang, yang terdiri dari 2 aspek : struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang (pasal 14 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1992).

Riyadi dan Bratakusumah (2003 : 338) menyatakan bahwa suatu perencanaan pembangunan daerah harus mengakomodasikan keadaan struktur ruang dari wilayah perencanaannya. Struktur ruang tersebut menurut Ginandjar Kartasasmita (1996 : 428) pada hakikatnya merupakan hasil suatu proses mengalokasikan obyek-obyek fisik dan aktivitas pada kawasan di suatu wilayah.

Berkaitan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi Barito Selatan sebelum dan sesudah pemekaran, diperlukan suatu kajian mengenai bagaimana sebenarnya struktur ruang yang terbentuk, tidak saja ditinjau dari aspek fisik melainkan juga aspek ekonomi wilayah. Keterkaitan struktur ruang fisik dengan struktur ruang secara ekonomi yang ditunjang nilai interaksi wilayah akan memberikan arahan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Barito Selatan.

2. Rumusan Masalah

Dinamika perkembangan wilayah, baik eksternal maupun internal, sangat dipengaruhi oleh instrumen kebijakan. Kebijakan pembangunan seharusnya mampu mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan keruangan yang terjadi, dan melakukan intervensi untuk mengarahkan sesuai tujuan yang diharapkan. Perkembangan wilayah Kabupaten Barito Selatan selama ini menunjukkan terjadinya sejumlah fenomena yang perlu dicermati, yaitu :

1. Dalam konteks regional, tidak adanya hubungan jalan darat yang menghubungkan Wilayah Pembangunan Tengah dengan Wilayah Pembangunan Timur menyebabkan ketertinggalan Kawasan Timur dalam pembangunan wilayah Kalimantan Tengah. Lebih kuatnya hubungan Barito Selatan terhadap Kota Banjarmasin dibandingkan dengan Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi

Kalimantan Tengah menyebabkan terserapnya potensi wilayah Barito Selatan ke Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemekaran daerah tahun 2002 lebih mempertegas lagi permasalahan-permasalahan wilayah Barito Selatan. Dengan terbentuknya Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan berada dalam rentang kendali wilayah DAS Barito yang selama ini lebih tertinggal dibanding wilayah daratan yang masuk wilayah Barito Timur. Ditinjau dari orientasi jalur darat, Kabupaten Barito Selatan menjadi *hinterland* Kabupaten Barito Timur terhadap Kota Banjarmasin dan Palangka Raya.
3. Secara ekonomi, pemekaran daerah juga memerlukan kajian mengenai sejauh mana peran ekonomi setiap unit spasial dalam wilayah administrasi Barito Selatan, termasuk aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini dibutuhkan untuk mengoptimalkan lokalitas dan menyelaraskan pengembangan wilayah nodal dengan wilayah administratif Barito Selatan.
4. Ketiga hal tersebut di atas tentunya membutuhkan kajian kembali terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, khususnya aspek struktur ruang sebagai bagian dari penataan ruang untuk menyikapi dinamika perkembangan wilayah tersebut. Struktur ruang eksisiting perlu dikaji kembali, tidak hanya aspek fisik tetapi juga aktivitas-aktivitas ekonomi dalam ruang. Hal itu diperlukan agar sebagai intervensi spasial, suatu kebijakan struktur ruang dapat menjadi matra spasial kebijakan ekonomi wilayah Barito Selatan yang kontekstual untuk mengoptimalkan potensi dan mengatasi permasalahan-permasalahan kewilayahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dirumuskan pertanyaan studi sebagai berikut : **Bagaimana struktur ruang sebagai arahan pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Barito Selatan ?**

Untuk dapat menjawab *research question* tersebut, dapat disusun 2 (dua) *research question* yang lebih operasional sebagai berikut :

1. Bagaimana struktur ruang Kabupaten Barito Selatan dikaji dari aspek fisik, ekonomi dan interaksi wilayah ?
2. Bagaimana arahan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana struktur ruang hasil identifikasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Barito Selatan ?

1.3 Tujuan dan Sasaran Studi

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka ditetapkan tujuan dan sasaran studi sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Studi

Tujuan studi ini adalah mengkaji struktur ruang Kabupaten Barito Selatan secara fisik, ekonomi dan interaksi wilayah, serta mengkaji kebutuhan sarana dan prasarana berdasar keunggulan dan kelemahan struktur ruang hasil identifikasi yang merupakan arahan pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Barito Selatan.

1.3.2 Sasaran Studi

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Mengkaji peran kebijakan struktur ruang dan ekonomi Kabupaten Barito Selatan eksisting dengan menganalisis :
   a. RTRWP Kalimantan Tengah dan RTRWK Barito Selatan
   b. POLDAS 2001-2005, Renstra 2001-2005 dan Repetada 2002

2. Mengidentifikasi struktur ruang fisik Kabupaten Barito Selatan dengan menganalisis :
   a. Ruang fisik meliputi sumberdaya alam, penduduk, permukiman dan jaringan
   b. Sistem hirarki kota berdasar fasilitas dan jumlah penduduk
   c. Wilayah pengaruh dari pusat pertumbuhan hasil identifikasi
3. Mengidentifikasi struktur ruang ekonomi Kabupaten Barito Selatan dengan menganalisis :
   a. Ekonomi basis
   b. Prospek ekonomi
   c. Sistem hirarki ekonomi berdasar ekonomi basis dan prospek ekonomi
4. Mengkaji terjadinya interaksi wilayah sebagai penunjang struktur ruang dengan menganalisis :
   a. Jaringan transportasi
   b. Interaksi ekonomi
   c. Interaksi sosial budaya
5. Mengkaji struktur ruang sebagai arahan pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Barito Selatan, dengan menentukan :
   a. Struktur ruang berdasar aspek fisik, ekonomi dan interaksi wilayah
   b. Keunggulan dan kelemahan struktur ruang hasil identifikasi
   c. Arahan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana wilayah berdasar keunggulan dan kelemahan struktur ruang

1.4 Hasil dan Manfaat Studi

Hasil dan manfaat studi yang diharapkan dengan tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1.4.1 Hasil Studi

Hasil yang diharapkan dari adanya studi ini adalah :

1. Teridentifikasinya struktur ruang Kabupaten Barito Selatan berdasarkan hirarki pelayanan secara fisik, hirarki fungsional secara ekonomi dan ditunjang nilai-nilai interaksi wilayah.
2. Teridentifikasinya keunggulan dan kelemahan setiap unit struktur ruang sebagai input bagi arahan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana struktur ruang hasil identifikasi.

1.4.2 Manfaat Studi

Manfaat yang diharapkan dari studi mengenai struktur ruang sebagai arahan pengembangan ekonomi wilayah di Kabupaten Barito Selatan ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, studi ini dapat menjadi masukan untuk menyusun kebijakan struktur ruang yang bersinergi dengan aktivitas-aktivitas ekonomi intra dan inter wilayah., sehingga mewujudkan keselarasan dengan kebijakan ekonomi wilayah dan selanjutnya mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya Kabupaten Barito Selatan.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks pengembangan wilayah, studi ini dapat memberikan informasi mengenai signifikansi struktur ruang sebagai wujud intervensi spasial yang tidak hanya didasarkan pada aspek pelayanan fisik, tapi juga ditopang oleh aspek ekonomi berbasis wilayah.
3. Bagi masyarakat, studi ini mengintroduksi keberadaan struktur ruang dalam mengalokasikan aktivitas-aktivitas sosial ekonomi masyarakat sehari-hari ke dalam suatu tatanan ruang.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup studi ini dibagi dalam 2 bagian, yaitu ruang lingkup substansial sebagai batasan dari materi yang akan dikaji serta ruang lingkup spasial sebagai batasan fisik dari ruang studi.

1.5.1 Ruang Lingkup Substansial

Kajian studi ini dibatasi pada substansi studi sebagai berikut :

- Struktur ruang secara fisik adalah organisasi ruang yang terbentuk dari kesatuan komponen fisik yang membentuk hirarki pelayanan. Komponen struktur ruang tersebut terdiri atas : Wujud ruang fisik, sistem hirarki kota berdasarkan fasilitas pelayanan dan jumlah penduduk serta wilayah pengaruhnya.
- Struktur ruang secara ekonomi adalah organisasi ruang yang terbentuk dari peran sektor ekonomi yang membentuk hirarki ekonomi wilayah. Komponen struktur ruang secara ekonomi tersebut terdiri dari : sektor/ sub sektor ekonomi dalam setiap unit spasial (kecamatan).
- Interaksi wilayah adalah aktivitas-aktivitas masyarakat dan keterhubungan aktivitas tersebut yang mendukung struktur ruang fisik dan ekonomi. Interaksi wilayah terdiri atas aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial budaya serta jaringan transportasi sebagai penghubung fisik aktivitas.
- Arahan pengembangan ekonomi wilayah adalah arahan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana struktur ruang hasil identifikasi berdasarkan keunggulan dan kelemahan struktur ruang.

1.5.2 Ruang Lingkup Spasial

Dalam studi ini, ruang lingkup secara spasial dibatasi pada wilayah administrasi Kabupaten Barito Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Barito Utara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Selatan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kapuas
- Sebelah Timur : Kabupaten Barito Timur

Unit-unit spasial meliputi 6 kecamatan di Kabupaten Barito Selatan, yaitu : Kecamatan Jenamas, Dusun Hilir, Dusun Selatan, Dusun Utara, Karau Kuala dan Gunung Bintang Awai. Sedangkan untuk melihat struktur ruang eksisting, dilakukan komparasi terhadap wilayah administrasi sebelum pemekaran yang mencakup wilayah Barito Timur.

Peta administrasi Kalimantan Tengah dan peta administrasi Kabupaten Barito Selatan ditunjukkan dalam Gambar 1.1 dan 1.2.

1.6 Kerangka Pemikiran

Perencanaan regional pada umumnya disusun berdasarkan pertimbangan pengembangan kegiatan ekonomi pada wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi itu kemudian dijabarkan ke dalam bentuk perencanaan spasial *(spatial planning)*, terutama dalam menentukan lokasi-lokasi dari aktivitas ekonomi (Tjahjati, 1997 : 396). Menurut Glasson (1977 : 147), sistem hirarki adalah suatu cara yang relatif efisien untuk pengadministrasian dan pengalokasian sumber daya dalam suatu daerah. Kebulatan sistem hirarki yang mengorganisasikan aktivitas ekonomi serta pelayanan fisik akan membentuk struktur ruang.

Kabupaten Barito Selatan mengalami akumulasi permasalahan-permasalahan kewilayahan, baik sebelum maupun sesudah pemekaran. Sebelum pemekaran, Barito

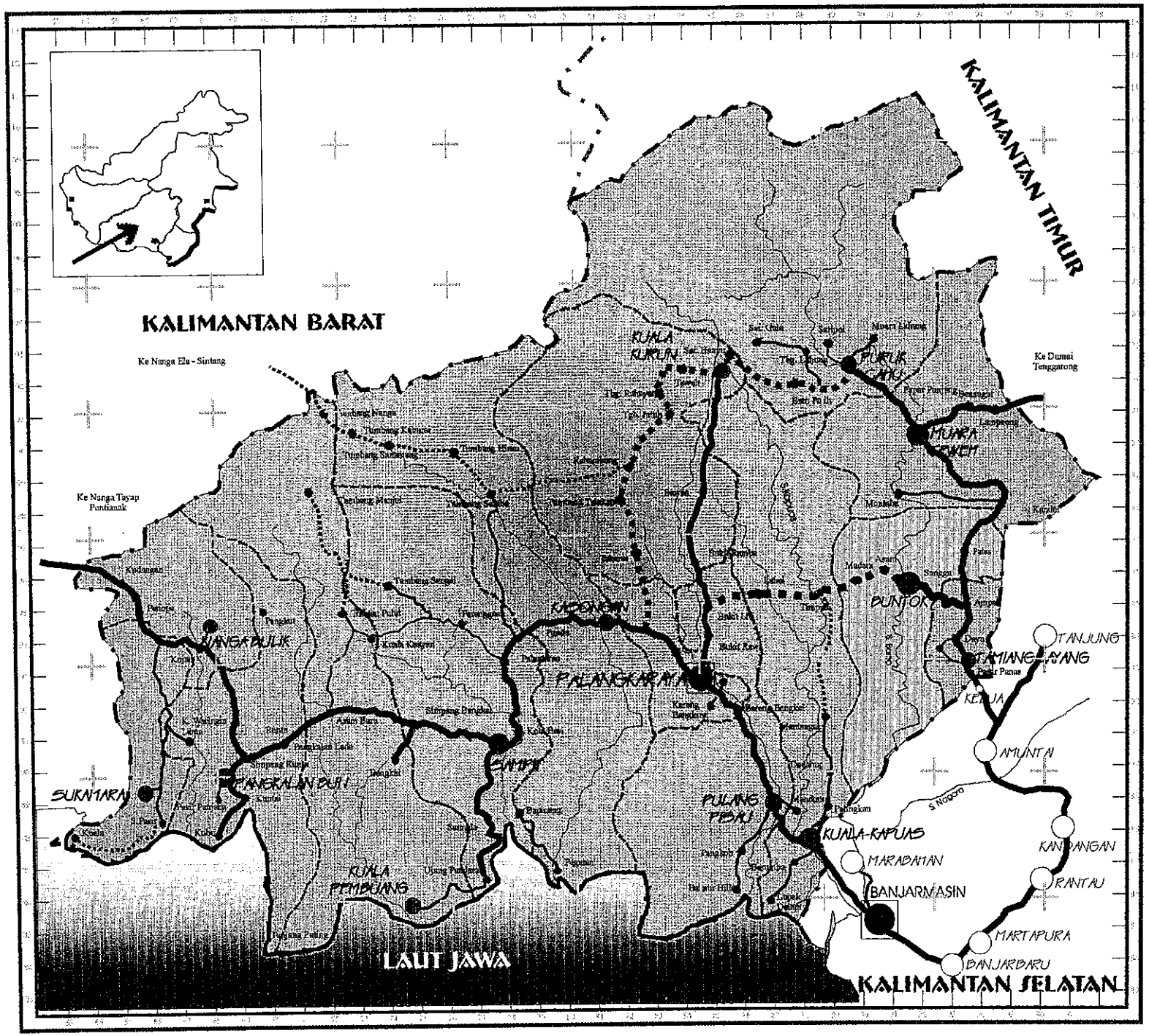

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

LEGENDA :

- Jalan Nasional
- Jalan Propinsi
- Garis Pantai
- Batas Kabupaten
- Batas Propinsi
- Jalan Lokal
- Jalan Tanah
- Ibukota Propinsi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Sungai

INSERT

SUMBER :
RTRW PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PETA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
1.1	14	1 : 2.750.000	

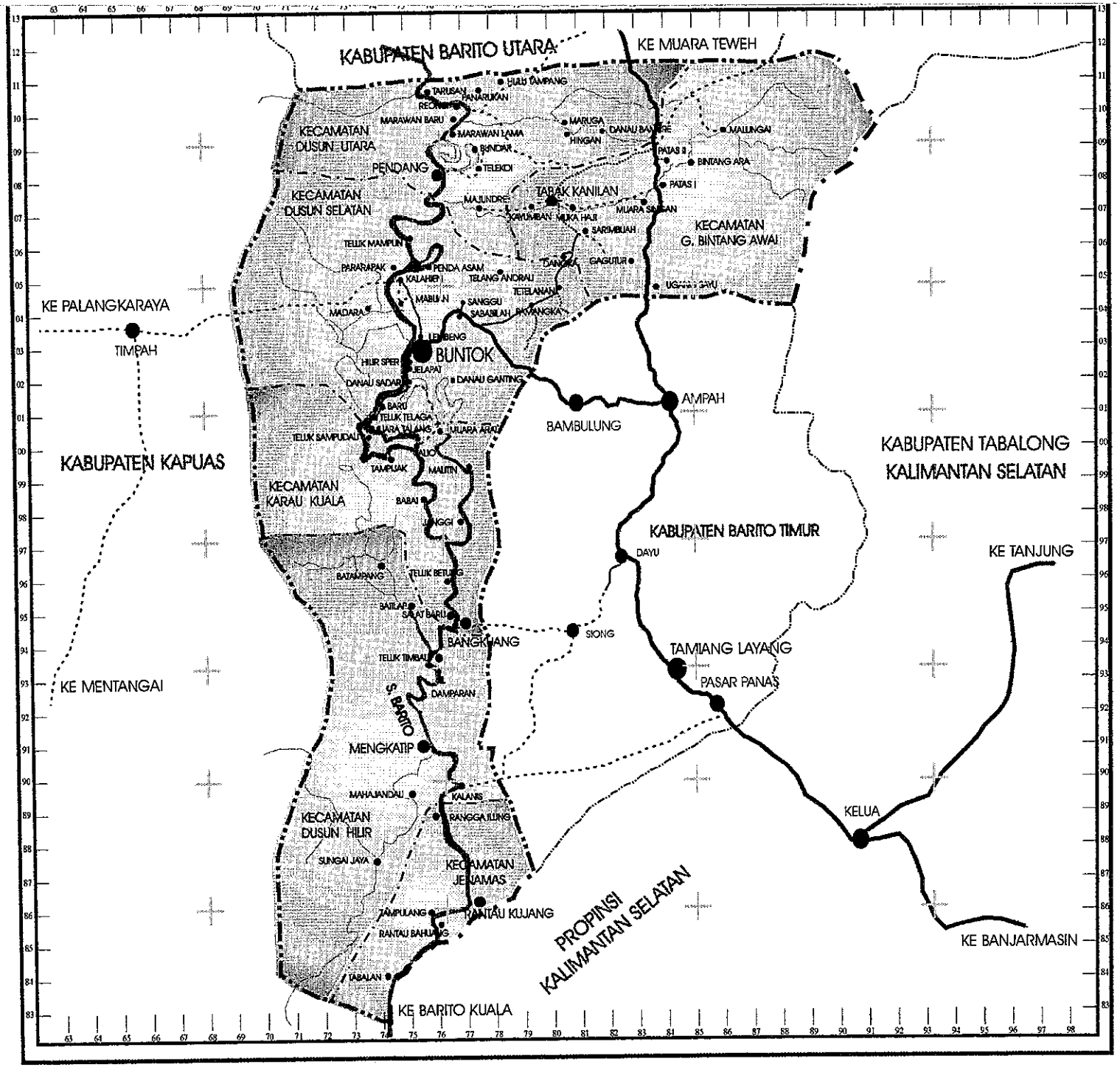

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN
PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

LEGENDA

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- IBUKOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KECAMATAN
- DESA
- JALAN NASIONAL
- JALAN PROVINSI
- JALAN ASPAL
- JALAN BATU
- JALAN TANAH
- DANAU
- SUNGAI

INSERT

SUMBER :
RTRW KABUPATEN BARITO SELATAN

PETA KABUPATEN BARITO SELATAN

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
1.2	15	1 : 750.000	

Selatan menghadapi permasalahan dengan adanya disparitas antara pembangunan wilayah daratan dibanding wilayah daerah aliran sungai. Sementara dalam konstelasi regional, Barito Selatan yang termasuk unit Wilayah Pembangunan (WP) Bagian Timur Kalimantan Tengah juga tertinggal dibanding WP Tengah, Selatan maupun Barat.

Pemekaran daerah dapat dikatakan memperbesar tantangan wilayah yang dihadapi Barito Selatan. Wilayah administrasi yang dilayani terkonsentrasi pada wilayah daerah aliran Sungai Barito sementara dilihat dari simpul pelayanan, Barito Selatan menjadi *hinterland* Barito Timur dengan orientasi Kota Banjarmasin.

Kajian ini didasarkan pada konsep struktur ruang sebagai tahap awal dalam perencanaan pembangunan daerah. Struktur ruang diperlukan untuk menjembatani permasalahan-permasalahan kewilayahan yang mempengaruhi aktivitas ekonomi di wilayah Barito Selatan tersebut, sehingga kontekstual sebagai matra spasial kebijakan ekonomi wilayah. Berdasarkan hal tersebut, kajian komprehensif terhadap struktur ruang dalam studi ini melibatkan aspek fisik, ekonomi dan interaksi wilayah.

Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah menganalisis peran kebijakan struktur ruang dan kebijakan ekonomi wilayah. Analisis kebijakan struktur ruang dilakukan dengan mengkaji RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan RTRW Kabupaten Barito Selatan. Analisis kebijakan ekonomi wilayah dilakukan dengan mengkaji POLDAS, Renstra dan Repetada Barito Selatan.

Selanjutnya, mengidentifikasi struktur ruang secara fisik dengan menganalisis ruang fisik, sistem hirarki dan wilayah pengaruhnya. Kemudian mengidentifikasi struktur ruang secara ekonomi dengan mencari sektor basis dan prospek ekonomi wilayah.

Untuk melihat keterkaitan antar wilayah, dilakukan analisis interaksi fisik, ekonomi dan sosial-budaya. Dengan mengkomparasikan struktur ruang secara fisik dan ekonomi

yang didukung input hasil analisis interaksi wilayah, diperoleh struktur ruang Barito Selatan dalam pengembangan ekonomi wilayah. Selanjutnya berdasarkan *review* peran kebijakan struktur ruang dan kebijakan ekonomi eksisting, dikaji bagaimana bentuk dan peran struktur ruang sebagai arahan pengembangan ekonomi wilayah Barito Selatan. Kesimpulan dan rekomendasi diharapkan menjadi masukan dan perbandingan bagi pemerintah daerah untuk mengkaji efektivitas kebijakan struktur ruang yang digunakan selama ini.

Kerangka pemikiran ditunjukkan pada Gambar 1.3

1.7 Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Studi

Pendekatan dan metode pelaksanaan studi ini menjelaskan mengenai pendekatan yang dilakukan, kerangka analisis, teknik analisis, serta metode pengambilan sampel.

1.7.1 Pendekatan Studi

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan keruangan *(spatial approach)* dan pendekatan ekonomi basis *(economic based approach)* dalam konteks wilayah.

Pendekatan keruangan dilakukan untuk mengkaji bagaimana struktur ruang fisik Kabupaten Barito Selatan yang berkaitan dengan identifikasi sistem hirarki kota serta wilayah pengaruh. Struktur ruang ini sangat terkait dengan pengembangan ekonomi wilayah, karena perencanaan dan pengembangan suatu wilayah biasanya berhubungan dengan pertumbuhan perekonomian wilayah tersebut. Oleh karenanya, dalam studi ini pendekatan berdasar alokasi aktivitas dan potensi ekonomi merupakan pendekatan utama yang digunakan untuk menentukan struktur ruang.

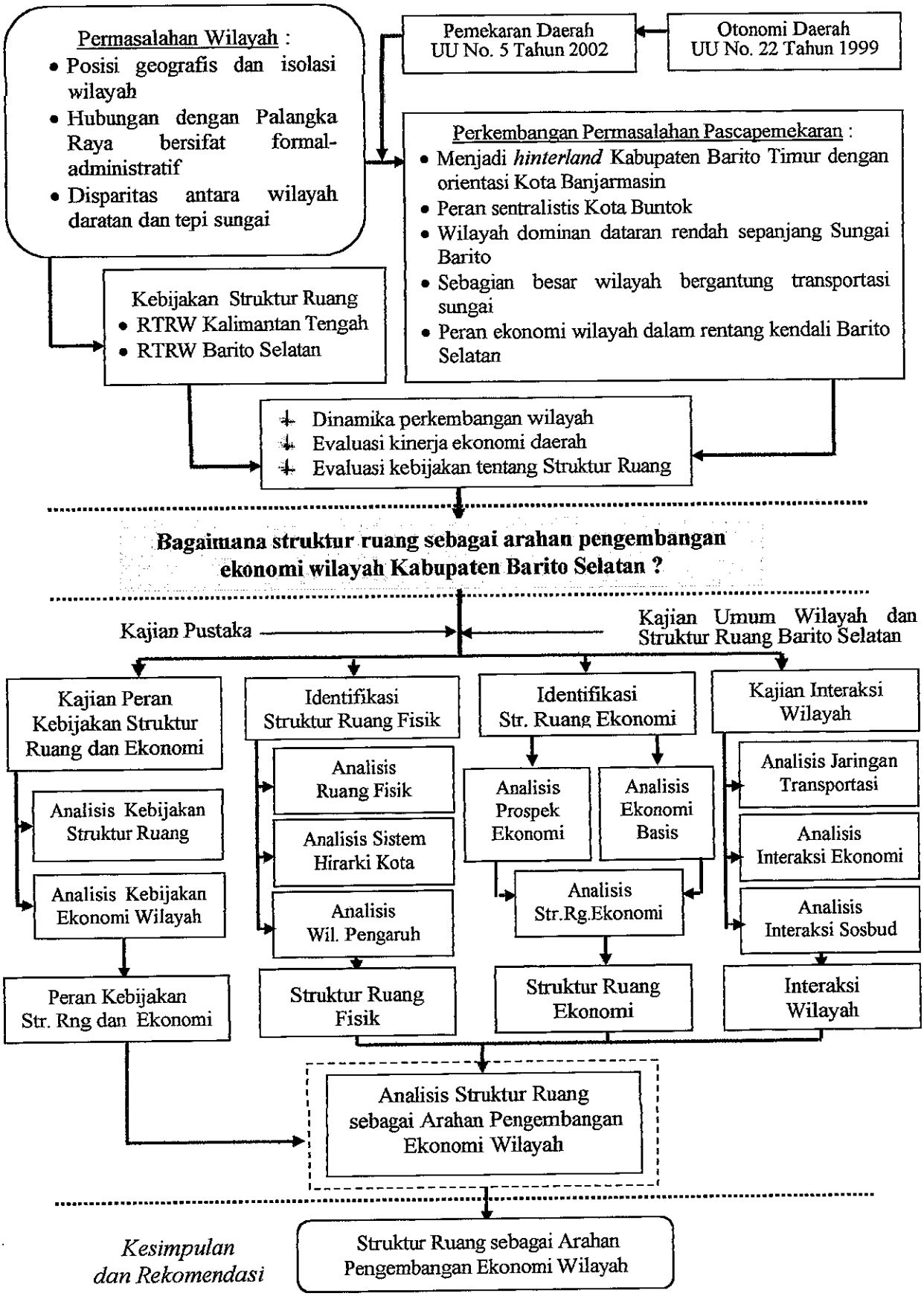

GAMBAR 1.3
KERANGKA PEMIKIRAN STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Teknik yang digunakan untuk melakukan pendekatan spasial maupun ekonomi tersebut adalah melalui melalui metode survai. Pendekatan survai menurut Arikunto (2002 : 93) adalah bagian dari metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan fenomena dan menentukan kesamaan status dengan cara membandingkannya dalam standard yang sudah ditetapkan.

1.7.2 Kerangka Analisis

Kerangka analisis dilakukan untuk menjawab tujuan dan sasaran studi. Kerangka analisis yang dilakukan untuk menjawab tujuan dan sasaran tersebut adalah :

1. Analisis Peranan Kebijakan Struktur Ruang dan Ekonomi

   Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peran kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan ruang dan ekonomi.

2. Analisis Struktur Ruang Fisik

   Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur ruang Kabupaten Barito Selatan secara fisik berdasarkan analisis ruang fisik, sistem hirarki kota serta wilayah pengaruh.

4. Analisis Struktur Ruang Ekonomi

   Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur ruang ekonomi berdasarkan hirarki peran sektor/ sub sektor ekonomi setiap unit spasial (kecamatan).

5. Analisis Interaksi Wilayah

   Analisis ini bertujuan untuk mengukur tingkat interaksi antar wilayah berdasarkan aktivitas sosial-budaya dan ekonomi masyarakat serta keterhubungan aktivitas.

6. Analisis Struktur Ruang sebagai Arahan Pengembangan Ekonomi Wilayah

   Analisis ini mengkomparasikan struktur ruang secara fisik, ekonomi dan interaksi wilayah. Dengan melihat peran kebijakan struktur ruang dan ekonomi eksisting,

diperoleh hasil akhir dalam studi ini, yaitu struktur ruang sebagai arahan pengembangan ekonomi wilayah.

Kerangka analisis dapat dilihat dalam Gambar 1.4

1.7.3 Teknik Analisis

Berdasarkan kerangka analisis, teknik analisis yang digunakan dalam studi ini adalah mengkombinasikan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan alat analisis : Scalogram Guttman, Model Gravitasi, *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share*, menggunakan data sekunder. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data primer hasil kuesioner dan wawancara serta hasil observasi lapangan.

Alur Pikir Teknik Analisis dijelaskan dalam Gambar 1.5

1.7.3.1 Analisis Kuantitatif.

Analisis kuantitatif dalam studi ini menggunakan Metode Scalogram Guttman, Model Gravitasi, *Location Quotient* dan *Shift and Share Analysis.*

1. Analisis Struktur Ruang Fisik

A. Metode Scalogram

Alat analisis Scalogram Guttman digunakan untuk menentukan hirarki kota berdasarkan sebaran fasilitas dan prasarana perkotaan yang dimiliki suatu daerah sebagai indikator keberadaan suatu daerah sebagai pusat pertumbuhan. Tujuan digunakannya analisis Scalogram adalah untuk mengidentifikasi kota-kota kecamatan yang dapat dikelompokkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan fasilitas kota yang tersedia. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa jika suatu kota mempunyai berbagai

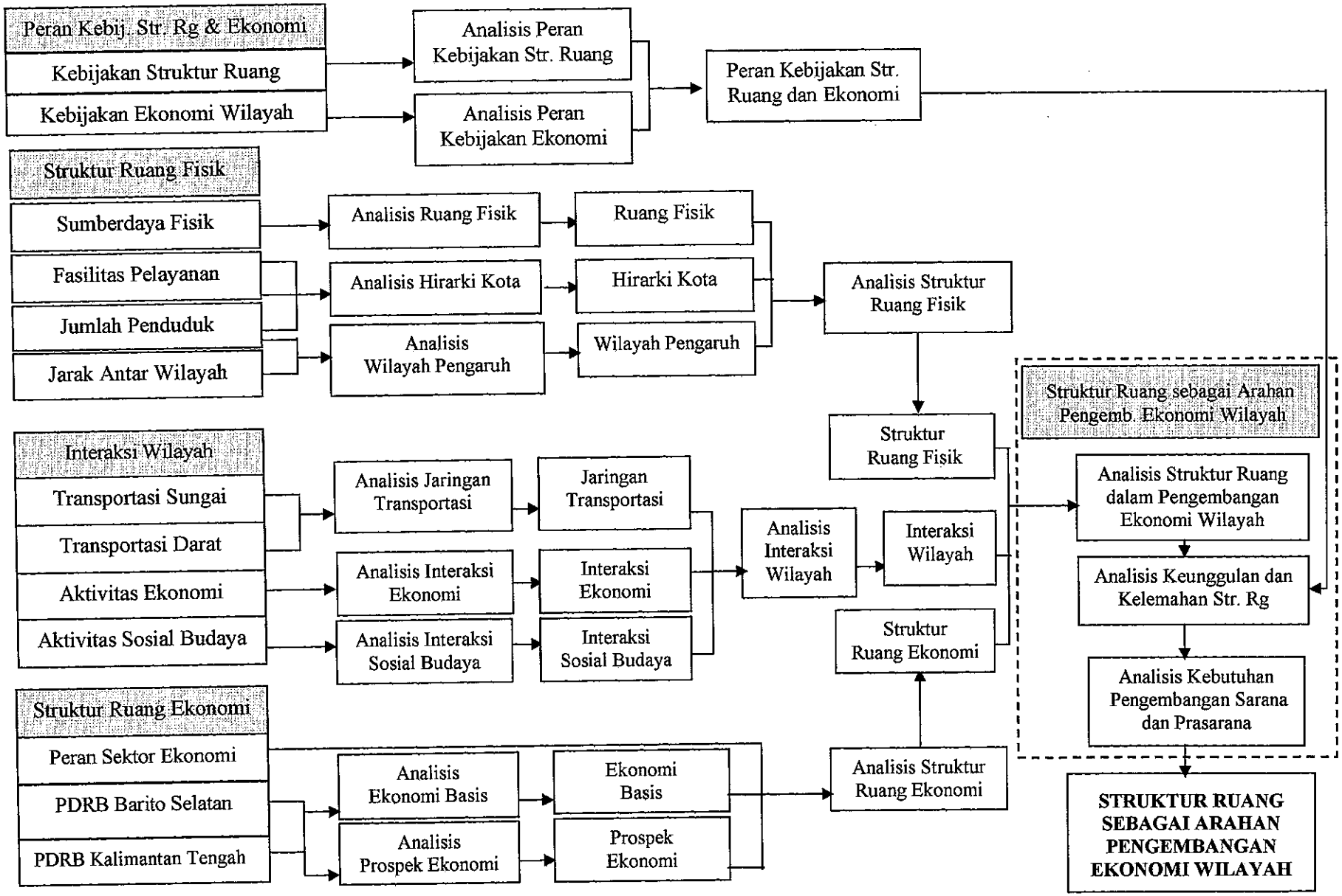

GAMBAR 1.4 KERANGKA ANALISIS

Sumber : Hasil Analisis, 2004

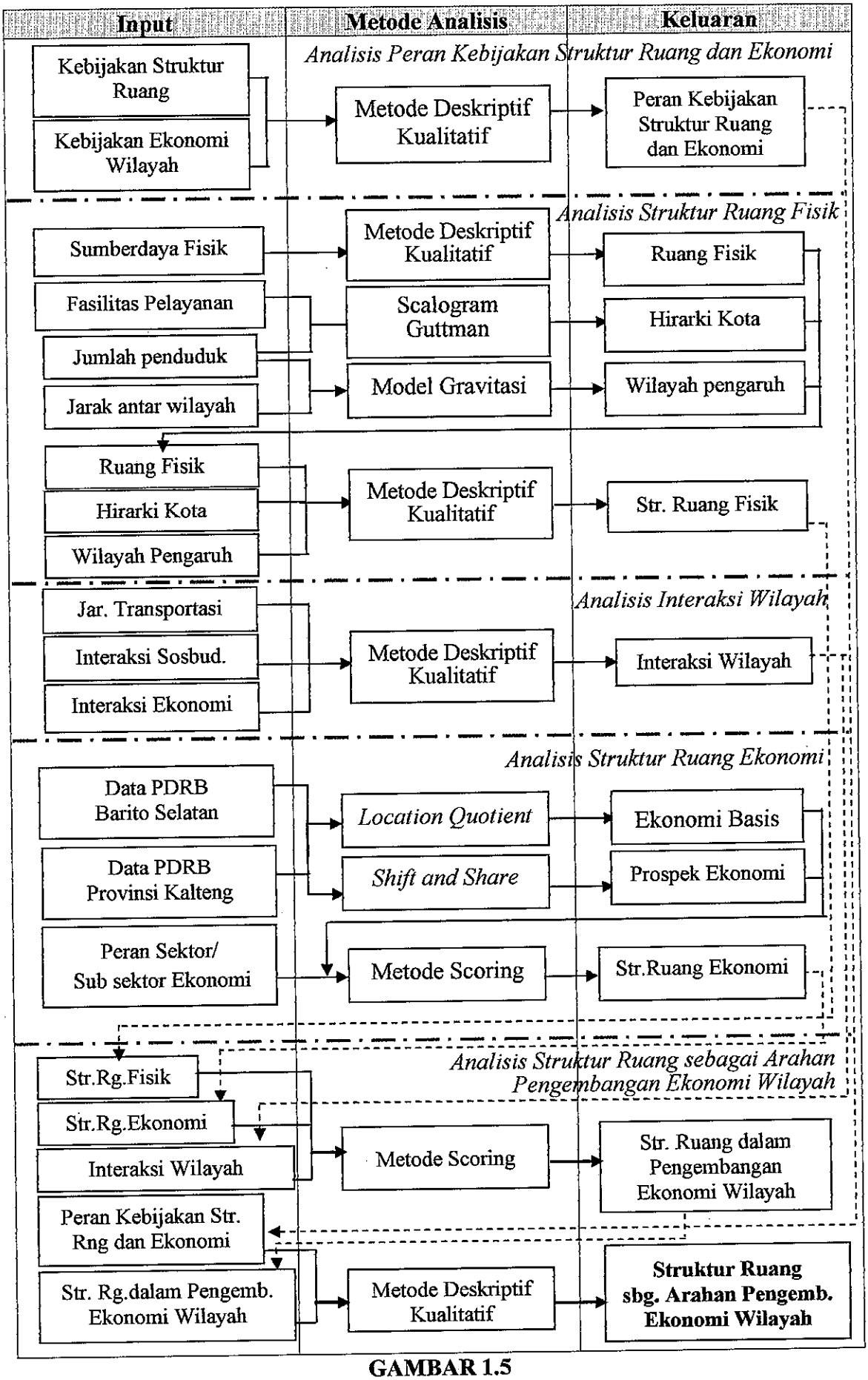

GAMBAR 1.5
ALUR PIKIR TEKNIK ANALISIS

Sumber : Hasil Analisis, 2004

fasilitas yang relatif lebih lengkap dibandingkan dengan kota lainnya, maka kota tersebut mampu berperan sebagai suatu pusat pertumbuhan pada kawasan tersebut.

Untuk menentukan pusat-pusat pertumbuhan di sebuah wilayah, menurut Metode Scalogram Guttman dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Rondinelli, 1985 : 115) :

- Mengurutkan kota berdasarkan jumlah penduduk di sebelah kiri tabel kerja
- Membuat urutan fasilitas dan prasarana yang didasarkan pada frekuensi
- Menggambarkan baris dan kolom yang membentuk matriks berdasarkan fasilitas/ prasarana kota
- Memberikan tanda (1) pada keberadaan fasilitas/ prasarana dan tanda (0) pada ketidakberadaan suatu fasilitas/ prasarana
- Menyusun kembali baris dan kolom berdasarkan frekuensi kelengkapan fasilitas dan jumlah fasilitas/ prasarana di setiap kota
- Menetapkan sistem hirarki kota sesuai peringkat kelengkapan fasilitas/ prasarana

Menurut Singarimbun (1995 : 118), sebagai alat uji kelayakan penggunaan Metode Scalogram ini digunakan uji hitung reproduksi dengan koefisien reproduksi (Kr). Rumus Kr adalah :

$$\mathbf{Kr} = \frac{\textbf{Jumlah Kesalahan (e)}}{\textbf{Jumlah observasi x jumlah variabel}}$$

Syarat terpenuhinya Kr adalah jika nilai Kr > 0,90

Fasilitas yang akan menjadi indikator penilaian terdiri atas : fasilitas ekonomi, fasilitas sosial dan fasilitas pemerintahan. Masing-masing fasilitas diberikan nilai sesuai komponen yang dimilikinya.

B. Gravitation Model

Metode analisis model gravitasi ini digunakan untuk: (1) mengukur kekuatan keterkaitan antara sentra komoditas dengan pusat pengembangan wilayah (2) menentukan kekuatan setiap pusat kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi (sentra-sentra komoditas) dalam sistem jaringan jasa, distribusi dan transportasi.

Indeks ini berlaku relatif artinya jika indeks gravitasi suatu daerah *hinterland* (daerah A) dengan pusat pertumbuhan X lebih besar dibandingkan dengan indeks gravitasi daerah A dengan pusat pertumbuhan Y, maka daerah A tersebut akan dikategorikan sebagai daerah *hinterland*nya pusat pertumbuhan X. Posisi sebagai *hinterland* dari suatu daerah akan ditentukan berdasarkan besarnya indeks yang dihitung. Di samping itu indeks gravitasi ini tidak berlaku secara kardinal, misalnya indeks yang dicapai kecamatan A sebesar 20 dan indeks yang dicapai kecamatan B sebesar 10, ini tidak berarti bahwa hubungan kedekatan dari kecamatan A sebesar dua kali lipat dari kecamatan B.

Formulasi rumus untuk menentukan indeks gravitasi (Warpani, 1984: 113) sebagai berikut:

$$I_{12} = \frac{P_1 P_2}{d_{12}^{\,2}}$$

di mana:

I_{12} = Interaksi antara kecamatan 1 dengan kecamatan 2 (indeks gravitasi)

P_1 = Jumlah penduduk pada wilayah pertama (ribuan jiwa)

P_2 = Jumlah penduduk pada wilayah kedua (ribuan jiwa)

d_{12} = Jarak ibukota kecamatan 1 dengan kecamatan 2 (km) dengan asumsi bahwa 1 km jarak darat equivalen dengan jarak 1 km jarak sungai.

2. Analisis Struktur Ruang Ekonomi

A. Location Quotient

Analisis ini digunakan untuk menentukan sektor-sektor basis ekonomi yang layak dikembangkan dalam suatu wilayah. Permintaan dari luar wilayah akan mempengaruhi sektor basis dan non basis. Adanya sektor basis dalam suatu wilayah akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah

Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghitung koefisien LQ dapat berbentuk satuan jumlah pekerja, hasil produksi atau satuan lainnya. Dalam studi ini digunakan satuan hasil produksi berupa data PDRB untuk menghitung LQ. Persamaan matematisnya adalah sebagai berikut (Warpani, 1984 : 68) :

$$LQ = \frac{Si / Ni}{S / N} = \frac{Si / S}{Ni / N}$$

Dimana :

Si = Jumlah buruh sektor ekonomi i di daerah yang diselidiki

S = Jumlah buruh seluruh sektor kegiatan ekonomi di daerah yang diselidiki

Ni = Jumlah sektor kegiatan ekonomi i di daerah acuan yang lebih luas, di mana daerah yang di selidiki menjadi bagiannya

N = Jumlah seluruh buruh di daerah acuan yang lebih luas

Dari hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ) terdapat 3 kemungkinan hasil yang diperoleh :

- Jika LQ > 1, disebut sektor basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi dari pada tingkat wilayah acuan
- Jika LQ < 1, disebut sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari pada tingkat wilayah acuan

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Jika LQ = 1, maka tingkat spesialisasi daerah sama dengan tingkat wilayah acuan.

Kekurangan Metode :

Nilai LQ dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nilai hasil perhitungannya bias karena tingkat disagregasi peubah spesialisasi, pemilihan peubah acuan, pemilihan entitas yang diperbandingkan, pemilihan tahun dan kualitas data.

B. Shift and Share

Analisis *Shift and Share* bertujuan menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lebih besar (Arsyad, 1999 : 139). Perhitungannya didasarkan pada data PDRB ataupun tenaga kerja dalam dua satuan waktu.

Penggunaan metode ini dalam analisis secara umum dibagi dalam tiga bagian besar, yaitu Komponen Pertumbuhan Wilayah (KPW), Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP) dan Komponen Pergeseran atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPK).

a. Komponen Pertumbuhan Wilayah Acuan (KPW), yaitu mengukur kinerja perubahan ekonomi pada perekonomian acuan, dalam studi ini adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP), yaitu mengukur perbedaan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi acuan dengan pertumbuhan agregat. Apabila komponen ini pada salah satu sektor wilayah acuan bernilai positif, berarti sektor tersebut tergolong berkembang dalam perekonomian Kabupaten Barito Selatan.
c. Komponen Pergeseran atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPK), yaitu mengukur kinerja sektor-sektor lokal terhadap sektor-sektor yang sama pada perekonomian Kalimantan Tengah. Apabila komponen ini pada salah satu sektor positif, maka daya

saing sektor lokal meningkat dibandingkan sektor yang sama pada ekonomi acuan, dan apabila negatif terjadi sebaliknya.

Pergeseran Netto (PN) dihitung dengan rumus (Ma`rif, 2000) :

$$\mathbf{PN = KPP + KPK}$$

Kekurangan Metode :

1. Asumsi yang digunakan bahwa sektor-sektor ekonomi acuan tumbuh dengan tingkat yang sama
2. Pergeseran posisi sektor dianggap linier.

Hasil analisis LQ dan *Shift Share* kemudian ditabulasikan untuk mengidentifikasi kategori sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Barito Selatan dalam bentuk tabel berikut:

TABEL I.2
KATEGORI SEKTOR/ SUB SEKTOR EKONOMI
BERDASARKAN NILAI LQ DAN SHIFT SHARE

Sektor/ Sub Sektor	LQ		SHIFT-SHARE					Kategori
	Basis	Non Basis	Unggul	Agak Unggul	Agak Mundur	Mundur	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Metode pembobotan :

Per sektor/ sub sektor

- Basis = 3
- Non Basis = 1
- Unggul = 3
- Agak Unggul = 2
- Agak Mundur = 1
- Mundur = 0

Kategori :

Strategis = 5-6
Kurang Strategis = 3-4
Mundur = 1-2

C. Metode Scoring

Dari hasil analisis *Location Quotient* dan *Shift and Share*, diperoleh sektor ekonomi unggulan yang memberikan kontribusi bagi perekonomian Kabupaten Barito Selatan. Kemudian dengan berdasarkan nilai kategori setiap sektor/ sub sektor, kontribusi rata-rata dan besarnya nilai peran sektor/ sub ekonomi setiap unit spasial, disusun suatu hirarki struktur ruang ekonomi menurut Metode Scoring.

1.7.3.2 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yang dilakukan dalam studi ini dilakukan dengan mendeskripsikan atau menyimpulkan hasil data primer dan sekunder yang telah dikompilasikan dengan cara : (1) Mendeskripsikan langsung persepsi atau pendapat narasumber (2) Menginterpretasikan kondisi atau korelasi permasalahan yang ada (3) Memperhatikan kecenderungan dan arah perkembangan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

Analisis yang menggunakan metode kualitatif dalam studi ini adalah :

1. Analisis peranan kebijakan struktur ruang dan kebijakan ekonomi wilayah. Alat pendukung analisis adalah hasil wawancara terhadap pihak eksekutif maupun legislatif Kabupaten Barito Selatan.
2. Analisis interaksi wilayah. Metode pengumpulan data adalah kuesioner yang didasarkan pada 2 aspek, yaitu aspek interaksi ekonomi dan sosial budaya untuk masyarakat umum, sedang untuk dunia usaha hanya aspek interaksi ekonomi saja.
3. Analisis struktur ruang sebagai arahan pengembangan ekonomi wilayah. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif dan deskriptif-kualitatif sebagai hasil sintesis analisis sebelumnya.

1.7.4 Metode Pengambilan Sampel

Sampling yang diambil dalam studi ini adalah jenis *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama besar untuk diambil sebagai sampel (Sugiarto et al : 46).

Selanjutnya Sugiarto et al (2001 : 10) menyatakan bilamana sampel sebesar 10 persen dari populasi masih dianggap besar, maka alternatif yang bisa digunakan adalah mengambil sampel sebanyak 30, dengan pertimbangan ukuran sampel tersebut telah dapat memberikan ragam yang stabil sebagai pendugaan ragam populasi. Kartono dalam Chair (2002 : 55) menegaskan bahwa secara prinsip tidak ada peraturan yang tertata dan absolut untuk menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari suatu populasi. Berdasarkan pandangan tersebut di atas dan diintegrasikan dengan kebutuhan data, jumlah sampel yang diambil dalam studi ini menggunakan perhitungan :

$$S = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan :

S = Jumlah minimal responden yang diperbolehkan

N = Jumlah populasi

e = Margin error

(Slovin dalam Kusmayadi dan Endar Sugiarto, 2000 : 74)

Dalam studi ini, derajat kesesuaian yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah 10 %. Kabupaten Barito Selatan adalah batasan spasial secara makro, yang terdiri dari unit spasial berupa 6 kecamatan. Jumlah penduduk Barito Selatan tahun 2002 adalah sebesar 113.095 orang. Dalam hal ini dilakukan pemilihan dengan kriteria tertentu,

yaitu penduduk Barito Selatan yang berusia 35 tahun ke atas. Alasan pemilihan sampling adalah kemungkinan usia minimal penduduk yang telah mempunyai anak sampai tingkat perguruan tinggi. Jumlah penduduk Barito Selatan yang berusia 35 tahun ke atas menurut data tahun 2002 adalah sebesar 31.801 orang. Apabila dilakukan perhitungan jumlah sampel dengan *error estimate* sebesar 0,1 dan derajat keakuratan yang diharapkan sebesar 90 %, maka jumlah sampel adalah sebesar :

$$S = \frac{31.801}{31.801 \times (0,01) + 1}$$

$$S = 99,68$$

Dari hasil perhitungan diperoleh 99,68 sampel yang dibulatkan menjadi 100 buah sampel. Berdasarkan unit spasial dalam studi, yaitu 6 kecamatan, maka 100 sampel tersebut dibagi secara proporsional menurut jumlah penduduk. Sedangkan untuk pedagang, mengacu pada jumlah pedagang tahun 2002 yakni sebesar 5.547 orang. Dengan asumsi bahwa jumlah sampel minimal yang diperkenankan adalah 30 orang (Sugiarto et al, 2001 : 10), maka berdasarkan proporsi jumlah pedagang ditetapkan pembagian sampel per kecamatan.

Selengkapnya, distribusi pengambilan sampel di 6 kecamatan dengan obyek sampel masyarakat dan pedagang adalah sebagai berikut :

TABEL I.3
DISTRIBUSI PENGAMBILAN SAMPEL PENELITIAN

No	Lokasi Sampel	Obyek Sampel			
		Penduduk > 35 th	Jumlah Sampel	Pedagang	Jumlah Sampel
1	Jenamas	2.865	9	983	5
2	Dusun Hilir	4.968	16	1.095	6
3	Karau Kuala	3.617	11	802	4
4	Dusun Selatan	11.685	37	2.021	11
5	Dusun Utara	5.001	16	173	1
6	Gunung Bintang Awai	3.665	11	493	3
	Jumlah	**31.801**	**100**	**5.547**	**30**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Sedangkan pemilihan sampel untuk wawancara pejabat instansi di Kabupaten Barito Selatan ditentukan secara khusus sesuai kebutuhan data, yaitu :

- Wawancara Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana Bappeda Barito Selatan (1 responden)
- Wawancara Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Barito Selatan (1 responden)
- Wawancara Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (1 responden).

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam studi ini dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang studi, permasalahan dan rumusan masalah, tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat studi, ruang lingkup substansial dan spasial, kerangka pemikiran, serta metode dan pendekatan studi.

Bab II Struktur Ruang sebagai Arahan Pengembangan Ekonomi Wilayah, yang menjelaskan tentang kajian pustaka yang relevan untuk mengkaji materi struktur ruang sebagai arahan pengembangan ekonomi wilayah.

Bab III Kajian Umum Wilayah dan Struktur Ruang Kabupaten Barito Selatan, yang menjelaskan data dan informasi tentang Kabupaten Barito Selatan, yaitu mengenai kondisi umum wilayah dan struktur ruang eksisting.

Bab IV Analisis Struktur Ruang sebagai Arahan Pengembangan Ekonomi Wilayah Kabupaten Barito Selatan, yang berisikan analisis secara sistematis mengenai struktur ruang sebagai arahan pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Barito Selatan untuk menjawab tujuan dan sasaran studi.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil temuan dan rekomendasi yang diusulkan berdasarkan kesimpulan tersebut.

BAB II
STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH

2.1. Struktur Ruang

Struktur ruang sebagai bagian dari upaya penataan ruang memerlukan definisi yang jelas, termasuk peranannya dalam sistem kewilayahan. Berkaitan dengan komponen pembentuk struktur ruang, perlu dijelaskan mengenai sistem hirarki kota-kota serta keterkaitan wilayah yang membentuk struktur ruang.

2.1.1 Pengertian dan Peran Struktur Ruang

Struktur ruang menurut Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang adalah merupakan tatanan komponen pembentuk rona ruang yang terdiri dari : (1) komponen hayati dan non hayati (2) komponen lingkungan alam (3) komponen lingkungan buatan (4) komponen lingkungan sosial. Kesemua komponen pembentuk rona ruang tersebut secara hirarki dan fungsional berhubungan satu sama lain membentuk tata ruang dalam wujud struktural ruang yang meliputi adanya :

1. Hirarki pusat pelayanan, seperti pusat kota, pusat lingkungan maupun pusat pemerintahan.
2. Hirarki prasarana jalan, seperti jalan arteri, kolektor dan lokal, dan prasarana kota lainnya.
3. Rancang bangun kota seperti ketinggian bangunan, jarak antar bangunan, garis langit dan lain sebagainya (Penjelasan pasal 14 ayat 2 UU No. 24 Tahun 1992).

Variabel independen dalam struktur ruang adalah variabel-variabel yang mempengaruhi perkembangan struktur ruang, yaitu : kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah serta nilai ekonomi, baik perekonomian secara nasional maupun lokal. Sedangkan variabel dependen adalah komponen-komponen struktur ruang tersebut, yang secara rinci dibagi ke dalam : (1) Pusat aktivitas, meliputi : pusat pemerintahan, pusat perkantoran, pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, pusat rekreasi dan olahraga, serta pusat pendidikan (2) Jaringan transportasi, meliputi : transportasi sungai/ air dan transportasi darat

Penggunaan istilah "struktur" mengandung konotasi kerangka umum dalam arti kebijakan menyeluruh yang strategis dengan perspektif jangka panjang (Budihardjo, 1999 : 68). Menurut Kamus Tata Ruang (1997 : 103), struktur adalah susunan, batasan; sesuatu (badan fisik atau non fisik) yang bersatu secara teratur serta pasti; tatanan yang menunjukkan keterkaitan antar bagian dan memperlihatkan sifat seluruh benda; rangka bangunan.

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996 : 428), struktur ruang pada hakikatnya merupakan hasil dari suatu proses yang mengalokasikan obyek-obyek fisik dan aktivitas ke suatu kawasan di suatu wilayah. Wawasan sistem tata ruang tersebut didasarkan pada kerangka konseptual yang mengemukakan adanya kaitan antara 3 proses: (1) Proses yang mengalokasikan aktivitas pada suatu kawasan sesuai dengan hubungan fungsional tertentu (2) Proses pengadaan atau ketersediaan fisik yang menjawab kebutuhan akan ruang bagi aktivitas (3) Kaitan antara bagian-bagian permukaan bumi, tempat berbagai aktivitas dilakukan dengan bagian atas ruang (angkasa) dan bagian dalam tempat adanya sumber daya yang perlu dilihat dalam wawasan yang integratif.

John Glasson (1978 : 148) lebih spesifik membagi struktur ruang di hampir semua daerah ke dalam 3 unsur pokok :

- Kelompok lokasi industri jasa atau tersier, termasuk pelayanan administrasi, keuangan, perdagangan eceran dan besar, dan pelayanan jasa-jasa lainnya. Ada kecenderungan untuk mengelompok menjadi sistem tempat sentral, tersebar secara seragam pada hamparan daerah yang terhubungkan secara mudah dengan pasar-pasar terbesar.
- Lokasi-lokasi yang memencar dengan spesialisasi industri seperti manufakturing, pertambangan dan rekreasi, cenderung mengelompok menjadi "cluster" atau aglomerasi menurut lokalisasi sumber daya fisik dan sifat fisik.
- Pola jaringan pengangkutan, yang dapat menimbulkan pola permukiman linear.

Pengertian-pengertian di atas mengarahkan makna struktur ruang pada suatu keteraturan ruang. Keteraturan ruang ini, menurut Rodrigue (**http://people.hofstra.edu/html**, 10 Desember 2003), muncul dari adanya kecenderungan aktivitas-aktivitas untuk beraglomerasi dalam mengambil keuntungan dari skala ekonomi (*economies of scale*). Organisasi dari aktivitas tersebut secara esensial bersifat hirarkis, dihasilkan dari hubungan antara aglomerasi dan aksesibilitas pada tingkat lokal, regional dan global.

Hal ini dapat dijelaskan dengan mencontohkan suatu lokasi A yang mempunyai seperangkat kelengkapan spasial seperti letak, atribut (ketersediaan sumber daya) dan ketentuan yang membatasi geografinya. Untuk berinteraksi dengan lokasi B maka konsep jarak, relativitas dan skala harus dipertimbangkan selain juga kelengkapan spasial lokasi B. Dalam kasus ini, skala geografis lain ataupun bagian-bagiannya hanya dapat dicapai melalui lokasi tingkat menengah. Setiap perubahan pada lokasi A akan secara nyata mempengaruhi lokasi B dan sebaliknya (Gambar 2.1).

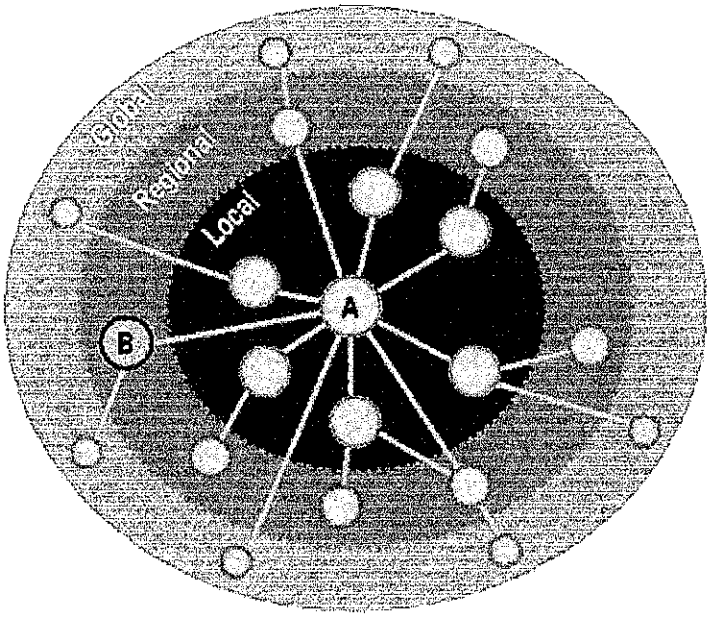

GAMBAR 2.1 KETERATURAN RUANG

Sumber : Rodrigue, http://people.hofstra.edu/html 10 Desember 2003

Dalam konteks nasional, struktur ruang disusun atas dasar arahan-arahan : (1) Pengembangan sistem permukiman (2) Pengembangan jaringan transportasi (3) Pengembangan energi dan jaringan kelistrikan (4) Pengembangan jaringan telekomunikasi (5) Pengembangan prasarana dan sarana air baku (Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).

Perkembangan struktur ruang suatu wilayah tergantung kepada beberapa karakteristik, yaitu : fungsi dan peranan wilayah, topografi wilayah, penduduk, geografi lokasi serta ukuran fisik wilayah yang saling mempengaruhi (Doxiadis, 1968 : 301-307). Sementara menurut Yunus (2001 : 162), struktur ruang kota regional dipengaruhi oleh jangkauan penetrasi penggunaan lahan perkotaan, kemudian kemudahan transportasi dan komunikasi dari dan ke daerah sekitar kota utama, kondisi topografis, kondisi hidrografis serta *zoning regulations*.

Keperluan akan struktur ruang didasarkan pada kebutuhan untuk mengorganisasikan ruang secara fungsional. Hal ini telah diidentifikasi oleh Doxiadis dalam konteks permukiman manusia. Menurut Doxiadis (1968 : 295-296), untuk dapat berfungsi secara layak, sebuah permukiman harus mempunyai dimensi sosial spesifik yang diekpresikan dalam bentuk masyarakat, baik skala minor ataupun mayor. Oleh karenanya seluruh masyarakat dan semua unit permukiman manusia cenderung untuk **berhubungan dengan yang lainnya dalam cara yang hirarkis.** Setiap komunitas dari tingkat yang lebih tinggi secara tertib melayani jumlah tertentu dari masyarakat yang lebih rendah, sesuai dengan fungsi spesifik dalam unit permukiman manusia.

Organisasi ruang hirarkis berdasarkan fungsi ini digambarkan Doxiadis sebagai berikut :

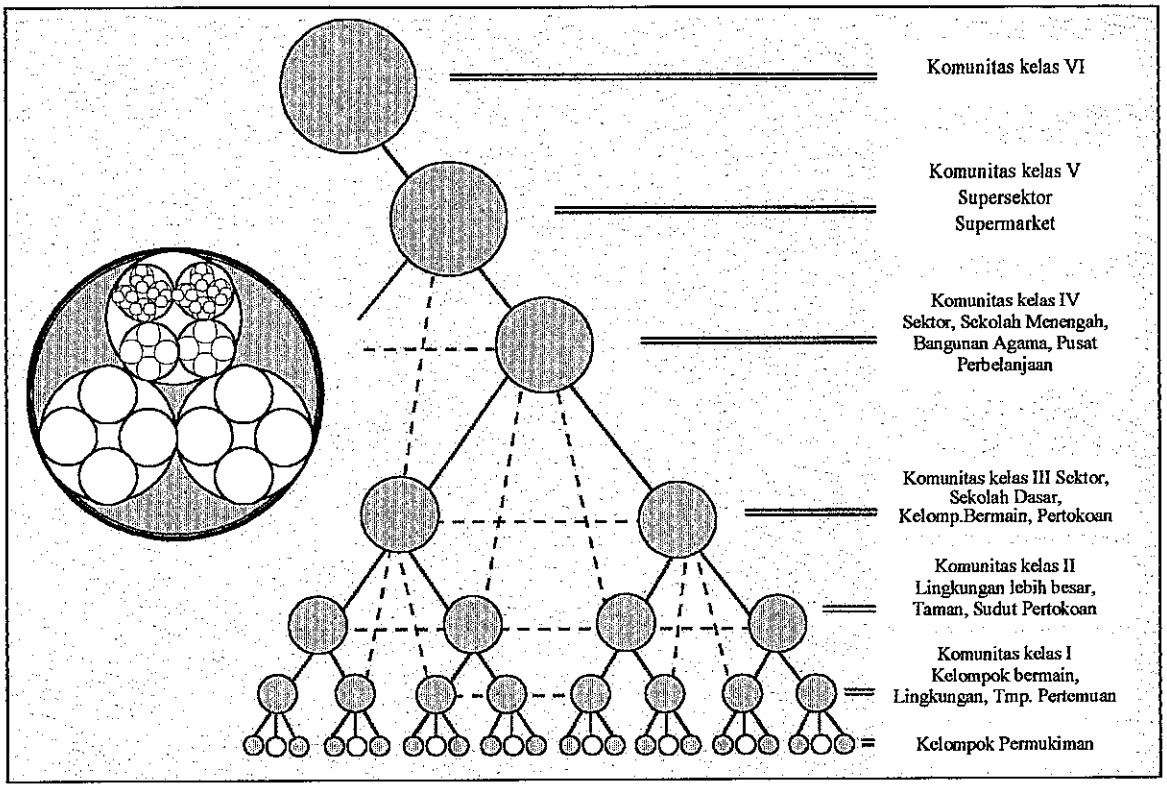

GAMBAR 2.2
STRUKTUR RUANG DALAM HIRARKI PERMUKIMAN

Keterangan : Garis menerus merepresentasikan struktur hirarkis, garis putus-putus menyatakan kemungkinan hubungan lainnya.
Sumber : Doxiadis (1968 : 296), digambar kembali

Sementara Rondinelli secara lebih riil mengklasifikasikan kedudukan kota-kota dalam lingkup wilayah homogen yang dicontohkan pada DAS Bicol, Phillipina, yakni di Provinsi Camarine Sur dan Alpay. Dasar kefungsian organisasi ruang menurut Rondinelli adalah permukiman primer, sekunder dan tersier di mana setiap kota mempunyai peran spesifik sesuai karakter yang dimilikinya. Hal ini ditunjukkan dalam gambar 2.3 berikut :

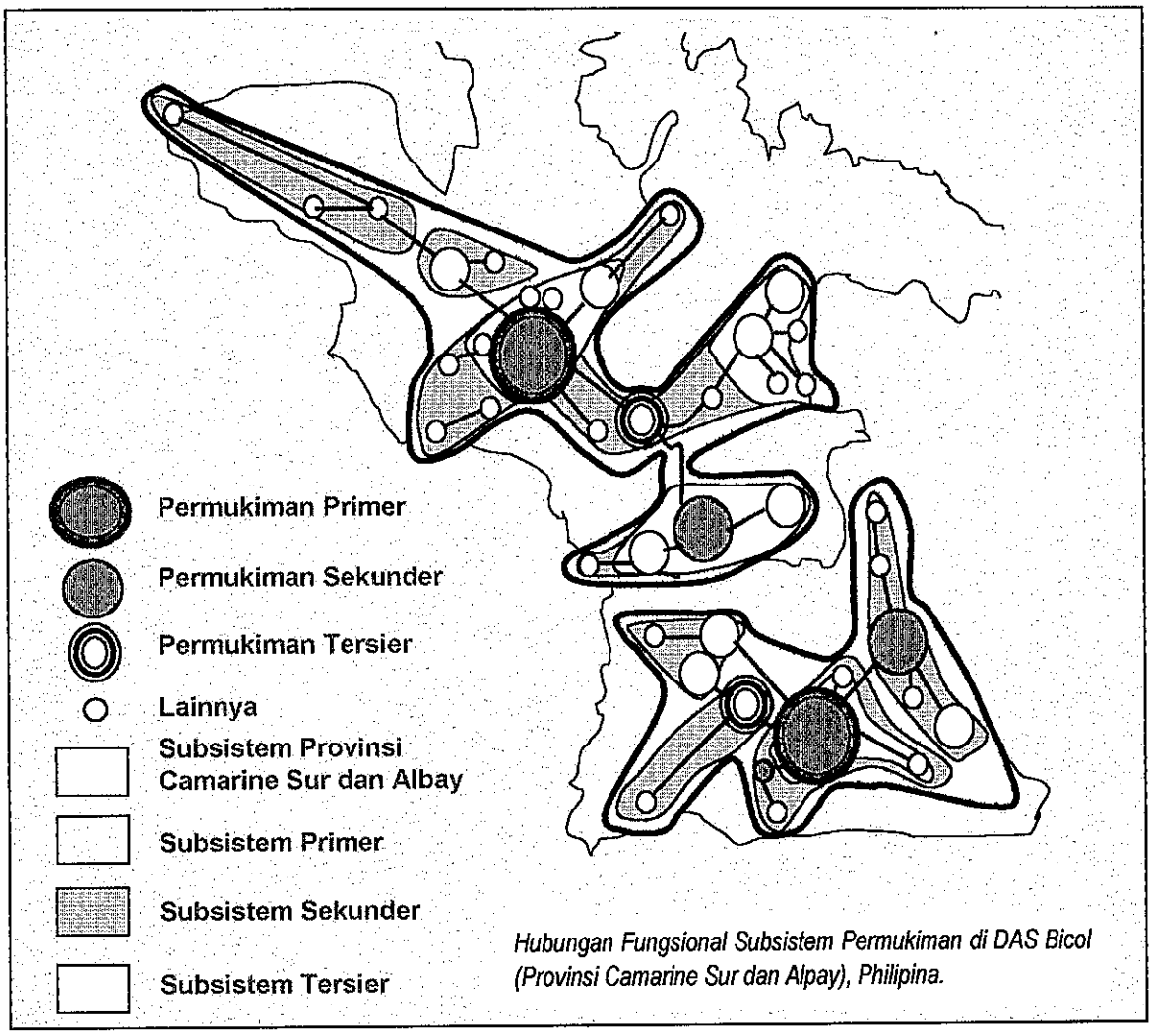

GAMBAR 2.3
HUBUNGAN FUNGSIONAL SUBSISTEM PERMUKIMAN

Sumber : Rondinelli (1985 : 192), digambar kembali

Dari kedua upaya mengorganisasikan ruang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi ruang yang mewujudkan suatu struktur ruang lahir dari **adanya**

kesatuan fungsi yang diemban setiap unit ruang, mulai dari mikro hingga level makro yang sesuai dengan karakteristik ruang tersebut. Oleh karenanya struktur ruang sangat berkaitan dengan tatanan yang bersifat hirarkis.

Dalam studi ini, struktur ruang yang dimaksud adalah struktur ruang secara fisik dan secara ekonomi. Struktur ruang fisik adalah organisasi ruang yang terbentuk dari kesatuan komponen fisik yang membentuk hirarki pelayanan. Komponen struktur ruang tersebut terdiri atas : ruang fisik, sistem hirarki kota serta wilayah pengaruhnya. Struktur ruang secara ekonomi adalah organisasi ruang yang terbentuk dari peran ekonomi yang membentuk hirarki ekonomi wilayah. Komponen struktur ruang secara ekonomi tersebut terdiri dari : sektor/ sub sektor ekonomi dalam setiap unit spasial.

2.1.2 Sistem Hirarki Kota

Dalam struktur ruang suatu wilayah terdapat sistem kota-kota sebagai komponennya yang berinteraksi secara fungsional. Perbedaan kondisi dan potensi wilayah menyebabkan diperlukannya hirarki kota, baik dilihat dari fungsi kota sebagai pusat pelayanan tertentu maupun ketersediaan fasilitas dan prasarana kota.

Hirarki kota adalah suatu urutan peringkat kota atas dasar ukuran peranan maupun fungsi kota tersebut, dalam kedudukannya terhadap kota lainnya. Asumsi dasar yang digunakan dalam sistem hirarki kota adalah bahwa pertumbuhan wilayah tidak terjadi secara acak, melainkan muncul dalam urutan yang logis. Sebagai konsekuensinya adalah ukuran dan fungsi kota tersebut akan terkait dengan keteraturan secara menyeluruh (Ritohardoyo dan Murtomo, 1992 : 28).

Menurut Jean-Paul Rodrigue (**http://people.hofstra.edu/html,** 10 Desember 2003), ada 2 paradigma utama yang mendasari lahirnya sistem hirarki kota, yaitu :

1. **Model Christaller**. Menurut model ini, suatu hubungan yang dominan diletakkan di antara beberapa keteraturan hirarki. Hubungan ini menyatakan sebuah pusat dari tingkatan yang lebih rendah harus bergantung pada pusat di tingkat yang lebih tinggi bagi barang dan pelayanan yang tidak tersuplai (Gambar 2.4).

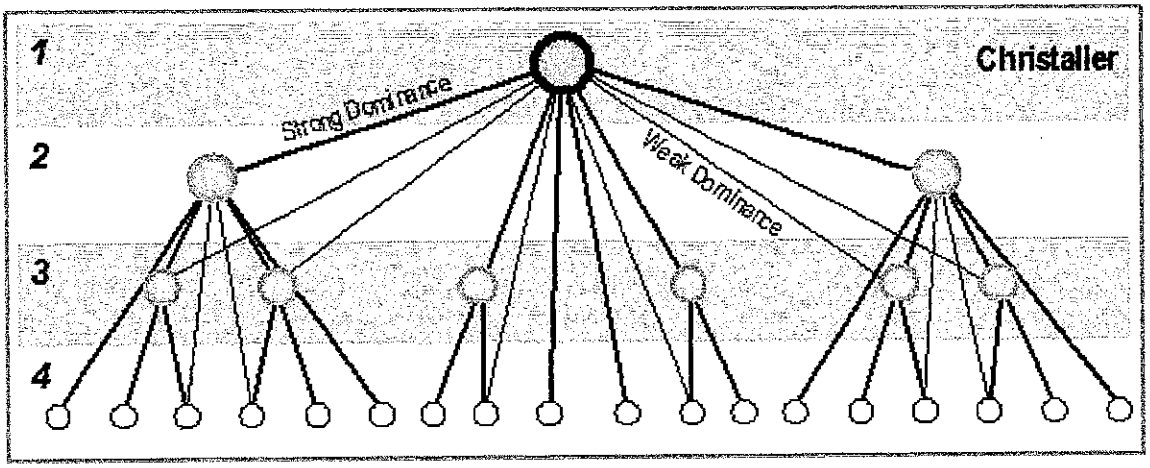

GAMBAR 2.4
SISTEM HIRARKI KOTA MODEL CHRISTALLER

Sumber : Rodrigue, people.hofstra.edu/ 10 Desember 2003

2. **Model Pred**. Model Christaller diadaptasi oleh Pred untuk memberikan nilai fleksibelitas. Struktur hirarkis menjadi kurang kaku, tetapi lebih kompleks. Pusat-pusat dari tingkatan yang sama tidak memerlukan level hirarkis yang sama. Beberapa pusat menawarkan lebih beragam barang dan jasa dibanding pusat lainnya, walaupun dengan ukuran yang sama. Interdependensi menyatakan bahwa tempat pusat *(central places)* dapat menukarkan barang dan jasa yang serupa. Komplementaritas memungkinkan beberapa pusat dari tingkatan yang sama untuk memfokuskan aktivitas secara spesifik dan menyuplai sendiri kebutuhan barang dan jasa yang tidak diperoleh dari pusat lainnya. (Gambar 2.5).

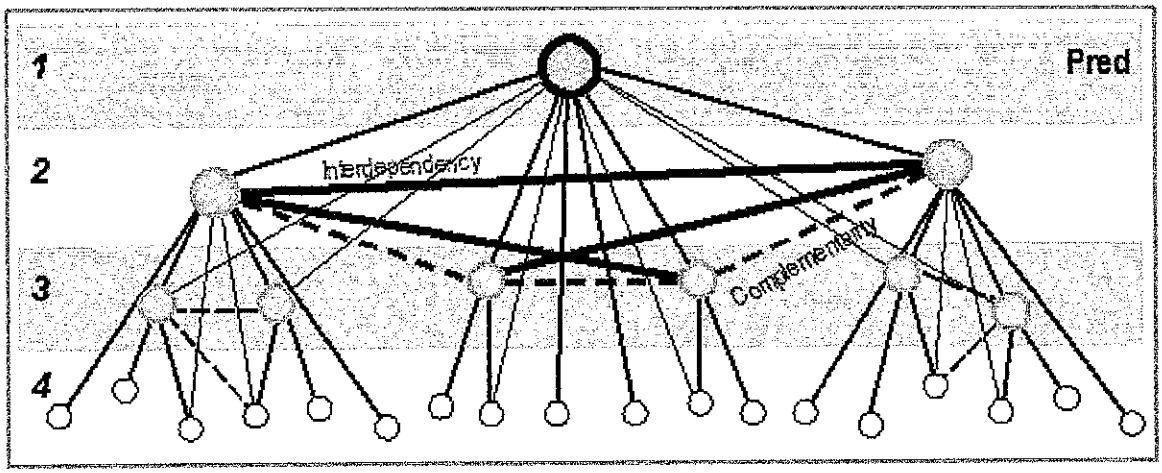

GAMBAR 2.5
SISTEM HIRARKI KOTA MODEL PRED

Sumber : Rodrigue, http:// people.hofstra.edu/html 10 Desember 2003

Dari kedua paradigma tersebut dikembangkan sistem hirarki kota yang dimaksudkan untuk menjelaskan kemajuan yang diperoleh titik-titik pertumbuhan ke seluruh wilayah, sehingga diharapkan tidak terjadi pemusatan pada daerah pusat dan juga diharapkan mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dengan perdesaan. Sistem hirarki kota akan membantu pencapaian pembangunan secara menyebar dan merata, selain juga mampu mereduksi perbedaan wilayah desa dan kota.

Kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan kota-kota ke dalam kelas tertentu harus sama, misalnya dengan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah atau jenis-jenis fungsi kota yang sama. Pengertian ranking berbeda dengan istilah orde dalam sistem kota-kota. Ranking adalah struktur kota secara individual dalam sistem kota-kota, sedangkan orde adalah kelompok kota-kota dalam tatanan hirarki yang ada (Yunus, 1978).

Menurut Yunus (1978), klasifikasi hirarki kota terbagi atas 5 bagian, yaitu :

1. Hirarki kota berdasarkan jumlah penduduk

   Klasifikasi jenis ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan interval tertentu atau tanpa menggunakan interval tertentu.

2. Hirarki kota berdasarkan komparasi jumlah penduduk kota tertentu dengan kota prima.

   Klasifikasi yang memposisikan ranking kota-kota tertentu dibanding suatu kota yang dianggap kota prima.

3. Hirarki kota berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk

   Klasifikasi atas dasar tingkat pertumbuhan penduduk juga menggunakan 2 cara, yaitu berdasar suatu interval tertentu atau tanpa interval tertentu.

4. Hirarki kota berdasarkan fungsi politik-administratif

   Klasifikasi ini mempertimbangkan fungsi kota dalam kaitannya dengan administrasi pemerintahan. Semakin rendah ranking suatu kota berarti semakin sempit pula wilayah pelayanannya secara politik-administratif.

5. Hirarki kota berdasarkan sifat pengelompokkan kota

   Klasifikasi hirarki kota ini dibedakan atas 3 jenis, yaitu : pengelompokkan kota-kota dalam suatu wilayah yang mengindikasikan adanya kondisi prima suatu kota, pengelompokkan kota-kota dalam suatu wilayah secara tersebar dan pengelompokkan kota-kota dalam suatu wilayah secara teratur.

Kota hirarki (orde I) merupakan pusat yang tidak berada dalam sub ordinasi kota-kota lainnya dalam suatu wilayah. Kota orde I melayani seluruh wilayah pengaruhnya melalui kota-kota hirarki yang lebih rendah yang ada dalam sub ordinasinya. Dalam hubungan keluar, kota orde I memiliki fasilitas pelayanan yang terlengkap dan kemampuan pelayanan tertinggi. Kota-kota orde II adalah kota-kota yang berada dalam sub ordinasi kota orde I. Kota-kota orde II memiliki fasilitas pelayanan yang setingkat lebih rendah dari hirarki kota orde I. Kota-kota orde III pada prinsipnya mempunyai ciri-ciri yang sejalan dengan uraian di atas (Adisasmita, 1993 : 58).

Hirarki kota sebenarnya dapat juga ditentukan berdasar kegiatan arus barang ke dan dari masing-masing kota. Antara simpul (kota) yang satu dengan simpul-simpul lainnya terdapat hubungan fungsional, yang dicerminkan oleh arus barang dan perjalanan. Susunan simpul-simpul secara optimal disebut sebagai konfigurasi normatif. Konfigurasi secara normatif ini sangat bermanfaat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan jaringan kota atau simpul yang serasi. Sedangkan wilayah pengaruh atau wilayah pelayanan merupakan luas jangkauan pelayanan masing-masing pusat atau simpul yang bersangkutan, yang pada hakekatnya merupakan fungsi tingkat kegiatan di pusat atau simpul tersebut dan respons penduduk di daerah-daerah belakangnya.

Dalam studi ini, yang dimaksud dengan hirarki sistem kota-kota adalah klasifikasi yang ditentukan oleh fasilitas dan prasarana ibukota kecamatan, baik fasilitas/ prasarana ekonomi, sosial maupun pemerintahan serta jumlah penduduk.

2.1.3 Keterkaitan Wilayah dalam Struktur Ruang

Sistem hirarki kota antara pusat pertumbuhan dan wilayah pengaruhnya membentuk suatu struktur yang mengarahkan aktivitas manusia penghuni ke dalam bentuk interaksi-interaksi. Menurut Bendavid-Val (1991 : 140), pembangunan adalah proses interaksi antar wilayah yang terjadi akibat adanya keterkaitan sistem jaringan fisik, sosial, teknologi, politik, institusi dan ekonomi. Lebih lanjut Rondinelli dan Ruddle sebagaimana dikutip oleh Gore (1984 : 154) menyatakan, proses interaksi ini dapat diidentifikasi sebagai proses pembangunan wilayah. Selengkapnya Rondinelli dan Ruddle menulis :

> " ....Settlements of various sizes, specializing in different economics and social functions, must be linked to each other through a network of physical, economic, technological, social and administrative interaction. The linkages – patterns of transaction among groups and organizations located in spatially dispersed communities with sufficient threshold sizes of population to support their own specialized activities – are the primary means of expanding the system of exchange and transforming underdeveloped societies."

Bendavid-Val (1991) dan Rondinelli (1985) selanjutnya membedakan keterkaitan antar wilayah tersebut atas 7 komponen, di mana tidak terdapat perbedaan yang terlalu mendasar antara keduanya.

1. Kategori keterkaitan antar wilayah menurut Bendavid-Val :

No	Kategori Keterkaitan	Elemen
1	Transportasi	↓ Jaringan jalan, sungai dan perhubungan udara
2	Komunikasi	↓ Jaringan telegram, surat kabar, dan lain-lain ↓ Jenis infrastruktur
3	Sumber daya alam	Sungai, drainase, arah angin, zona iklim dan hasil buatan manusia seperti jaringan irigasi dan lain-lain
4	Ekonomi	↓ Rantai aliran produk barang jadi dan setengah jadi ↓ Keterkaitan produksi ↓ Pola belanja konsumen ↓ Pola kepemilikan kegiatan ekonomi ↓ Aliran pendapatan ↓ Aliran modal ↓ Sistem finansial formal dan informal ↓ Migrasi musiman
5	Sosial	↓ Kelompok etnis dan agama ↓ Pola kekerabatan ↓ Keterkaitan antar kelas masyarakat
6	Pelayanan umum	↓ Jaringan utilitas ↓ Jaringan pendidikan & pelatihan ↓ Sistem diseminasi informasi dan hasil penelitian ↓ Pelayanan transportasi perseorangan ↓ Keterkaitan pelayanan kesehatan
7	Institusi	↓ Keterkaitan pemerintahan ↓ Sistem anggaran sesuai tingkatan pembangunan ↓ Pola kewenangan

Sumber : Bendavid-Val, 1991 : 141

2. Keterhubungan utama dalam pengembangan ruang menurut Rondinelli :

No	Tipe	Elemen-elemen
1	Keterhubungan fisik	↓ Jaringan jalan ↓ Jaringan transportasi, sungai dan air ↓ Jaringan rel kereta api ↓ Ketergantungan ekologis
2	Keterhubungan ekonomi	↓ Pola pemasaran ↓ Aliran bahan baku dan bahan setengah jadi ↓ Keterkaitan produksi ke depan dan belakang ↓ Pola konsumsi dan belanja ↓ Pendapatan

Bersambung ...

... Lanjutan

No	Tipe	Elemen-elemen
		↓ Aliran komoditas lintas sektoral dan regional
3	Keterhubungan pergerakan populasi	↓ Migrasi permanen atau temporer yang melakukan perjalanan dalam rangka bekerja
4	Keterhubungan teknologi	↓ Keterkaitan teknologi ↓ Sistem Irigasi ↓ Sistem Telekomunikasi
5	Keterhubungan interaksi sosial	↓ Pola berkunjung ↓ Pola kekerabatan ↓ Ritus, ritual dan aktivitas keagamaan ↓ Interaksi kelompok sosial
6	Keterhubungan pelayanan jasa	↓ Jaringan aliran energi ↓ Jaringan kredit dan finansial ↓ Jaringan pendidikan, pelatihan dan perluasannya ↓ Sistem pelayanan kesehatan ↓ Pola pelayanan profesi, perdagangan dan teknik ↓ Sistem pelayanan transportasi
7	Keterhubungan administrasi, politik dan organisasi	↓ Hubungan struktural ↓ Budget pemerintahan ↓ Ketergantungan organisasi ↓ Pola pengawasan keuangan dan persetujuan ↓ Pola transaksi antar jurisdiksi ↓ Rantai keputusan politik formal

Sumber : Rondinelli, 1985 : 143

Interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakekatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain, oleh karenanya terjadi penawaran dan permintaan antar wilayah. Interaksi wilayah tersebut berwujud keterhubungan dan ketergantungan, baik antar pusat maupun antara pusat dengan wilayah yang mengitarinya.

Interaksi antara masing-masing pusat dan wilayah pelayanannya menimbulkan ketidakseimbangan struktural di wilayah bersangkutan. Interaksi penduduk di daerah perkotaan lebih tinggi intensitasnya dibandingkan dengan di luar daerah perkotaan (daerah belakang). Interaksi tersebut menunjukkan korelasi negatif terhadap jarak. Semakin jauh jarak antara 2 penduduk, semakin rendah interaksinya. Berdasar korelasi tersebut dapat

dinyatakan pula bahwa semakin lengkap fasilitas pelayanan yang tersedia di suatu daerah perkotaan akan semakin jauh wilayah pelayanan (wilayah pengaruhnya).

Dalam studi ini, keterkaitan atau interaksi antar wilayah yang dimaksud adalah integrasi antara konsep interaksi menurut Rondinelli dan Bendavid-Val, yaitu : keterhubungan fisik, keterhubungan ekonomi dan keterhubungan sosial budaya. Keterhubungan fisik adalah keberadaan jaringan transportasi, yaitu jalan raya (darat) dan air (sungai). Keterhubungan ekonomi meliputi : pola konsumsi dan belanja, aliran barang dan jasa, serta pola pemasaran. Keterhubungan sosial budaya meliputi : aktivitas pendidikan, kesehatan dan peribadatan.

2.2 Wilayah dan Konsep-Konsep Pengembangan Wilayah

Bagian ini bermaksud menjelaskan pengertian wilayah, pengembangan wilayah dan konsep-konsep pengembangan wilayah yang relevan, baik Konsep Pengembangan dari Atas maupun Konsep Pengembangan dari Bawah.

2.2.1 Wilayah dan Pengembangan Wilayah

Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (UU No. 24 Tahun 1992 pasal 1). Jayadinata (2000 : 13) merinci lagi definsi wilayah (*region*) tersebut ditinjau dari pandangan geografi sebagai suatu kesatuan alam, yaitu alam yang homogen dengan masyarakat serta kebudayaannya yang serba sama serta mempunyai ciri khas. Secara umum, menurut Budiharsono (2001 : 14-15), wilayah terbagi atas 4 jenis, yaitu : wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah perencanaan dan wilayah administratif.

Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama dan dibatasi berdasarkan keseragamannya secara internal. Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat dan wilayah belakangnya. Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik. Adapun wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja, namun cukup kecil untuk memungkinkan persoalan-persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai suatu kesatuan (Budiharsono, 2001: 15-16).

Selain istilah wilayah formal terdapat istilah wilayah fungsional (*functional region*). Wilayah ini didefinisikan sebagai suatu bagian dari permukaan bumi, di mana beberapa keadaan alam yang berlawanan memungkinkan timbulnya bermacam-macam kegiatan, yang hasilnya berbeda dan saling mengisi dalam keperluan kehidupan penduduk.

Pengembangan wilayah menurut Syarifuddin Akil (2003) adalah rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara lebih spesifik, Nelson dalam Bingham (1993 : 27) menyatakan bahwa **pengembangan wilayah** merupakan suatu proses perubahan dalam produktivitas wilayah yang berkaitan dengan populasi penduduk, tingkat pendapatan, kesempatan kerja serta nilai tambah industri. Secara garis besar hal tersebut dijabarkan dalam 4 proses, yaitu : (1) Proses pemanfaatan sumber daya alam (2) Proses pemanfaatan sumber daya manusia

(3) Proses pemanfaatan sumber daya buatan (4) Proses mempertahankan nilai kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup.

Berdasar definisi di atas, menjadi jelas bahwa pengembangan wilayah merupakan upaya memanfaatkan segenap potensi wilayah, baik alam maupun buatan dan sumber daya manusia yang akan menghasilkan peningkatan produktivitas wilayah dalam wujud perkembangan fisik, sosial ekonomi dan juga politik.

Dalam pengembangan wilayah, terdapat dua pendekatan yang umum dipakai, yaitu konsep Pengembangan Wilayah dari Atas (*development from above*) dan konsep Pengembangan Wilayah dari Bawah (*development from below*). Konsep Pengembangan dari Atas bertujuan untuk mencapai integrasi fungsional di mana wilayah maju diperluas kepada wilayah tertinggal dan sumberdaya wilayah tertinggal dibuat lebih aksesibel terhadap wilayah maju. Sedangkan konsep Pengembangan dari Bawah merupakan antitesis dari konsep Pengembangan dari Atas. Esensi konsep ini adalah melihat pembangunan sebagai proses mobilisasi sumber daya daerah secara maksimum, yang bertujuan untuk menciptakan otonomi wilayah melalui integrasi semua aspek kehidupan suatu wilayah, baik sumberdaya, lansekap, kultur maupun iklim (Weaver dalam Bingham, 1993 : 52).

Dalam mengkaji struktur ruang Kabupaten Barito Selatan, konsep-konsep pengembangan wilayah yang relevan untuk dikemukakan adalah Konsep Pembangunan Dari Atas dari Perroux, Hirchman, John Friedman, Poernomo Hadjisarosa, serta Konsep Pembangunan dari Bawah yaitu Konsep Agropolitan dan Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal.

2.2.2 Konsep Kutub Pertumbuhan

Bagian ini menjelaskan perkembangan *mainstream* Kutub Pertumbuhan yang mewarnai Konsep Pembangunan dari Atas. Dimulai dari Perroux (1950), dikembangkan oleh Hirschman dengan Konsep Pembangunan Tidak Seimbang (1958), kemudian Boudeville dengan Konsep Kutub Pembangunan yang Terlokalisasikan (1961) dan Friedman dengan Konsep Daerah Inti (1964).

Konsep Kutub Pertumbuhan Perroux

Teori kutub pertumbuhan pertama kali diperkenalkan oleh Perroux pada tahun 1950 dengan teorinya *pole de croisanse* yang menyatakan bahwa :

> " growth does not appear everywhere and all at once; it appears in points or development poles, with variable intensities; it spreads along diverse channels and with varying terminal effects to the whole of the economy. "
> (Perroux dalam Glasson, 1977 : 171).

Kutub pertumbuhan regional terdiri dari satu kumpulan industri-industri yang mengalami kemajuan dan saling berhubungan, serta cenderung menimbulkan aglomerasi yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor ekonomi eksternal. Faktor-faktor eksternal itu seperti turunnya biaya produksi, pembangunan pasar bagi pekerja urban dan akses pasar yang lebih besar.

Menurut Arsyad (1999: 147-148), inti dari konsep kutub pertumbuhan Perroux adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses pembangunan akan muncul industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama (*prime mover*) dalam pembangunan suatu daerah.
2. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah, sehingga mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya
3. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif, yaitu industri yang tergantung dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif. Diharapkan dari ide ini adalah munculnya *trickle down effect* dan *spread effect*.

Menurut Kadariah (1985 : 24), kutub pertumbuhan bermakna sebagai berikut:

1. Secara fungsional, *growth pole* digambarkan sebagai suatu kelompok perusahaan cabang industri atau unsur-unsur dinamis yang merangsang kehidupan ekonomi.
2. Secara geografis, diartikan sebagai suatu *pole atraction* yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berkumpul di suatu tempat tanpa adanya hubungan antara usaha-usaha tersebut.

Konsep Pembangunan Tidak Seimbang

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep Kutub Pertumbuhan Perroux dibahas oleh Hirschman (1958) yang mengemukakan konsep Pembangunan Tidak Seimbang. Hirschman berpendapat bahwa pola pembangunan tak seimbang adalah lebih tepat untuk mempercepat pembangunan. Pembangunan dilakukan pada sektor–sektor tertentu yang dapat memberikan konstribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1999 : 97).

Teori ini dipandang sesuai untuk negara atau daerah sedang berkembang yang masih rendah pendapatan dan ketersediaan kapitalnya, karena ketidakseimbangan tersebut akan mendorong kemajuan ekonomi lebih cepat dan biaya ekspansi dapat diminimumkan. Dengan adanya kesulitan dan kelangkaan, bersama–sama dengan perkembangan yang tidak seimbang, justru akan ada dorongan yang kuat untuk kemajuan teknologi dan dapat menarik investor baru.

Selanjutnya Hirschman juga mengemukakan bahwa dalam sektor produktif, mekanisme pendorong pembangunan (*inducement mechanism*) yang tercipta sebagai akibat adanya hubungan berbagai industri dalam penyediaan *input* yang digunakan sebagai bahan mentah dalam industri lainnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu: keterkaitan ke belakang (*backward linkage effects*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage effects*).

Konsep Kutub Pembangunan yang Terlokalisasikan

Konsep kutub pertumbuhan yang terlokalisasikan *(localized poles of development)* dikemukakan oleh Boudeville (1961). Teori Boudeville mengemukakan impak pembangunan dari adanya kutub pembangunan yang terlokalisasikan pada tata ruang geografis (Boudeville dalam Adisasmita, 1993 : 35).

Boudeville menyatakan bahwa kutub pertumbuhan regional sebagai kelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di daerah perkotaan akan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi daerah sekitar. Hubungan positif ini diharapkan dapat mengangkat pertumbuhan daerah sekitarnya yang mempunyai keterbatasan dalam sumbernya. Konsep tata ruang polarisasi yang timbul berkaitan dengan pengertian hirarki, yang di kemudian hari menjadi landasan studi pusat kota dan ketergantungannya

Hubungan antara teori Tempat Sentral dan teori Boudeville dalam konteks perencanaan dan pengawasan pembangunan yang merupakan implikasi penting mengerucut pada dua persoalan yang relevan, yakni :

1. Bagaimana merintis proses pembangunan di wilayah-wilayah yang terbelakang secara terus menerus ? Ini terkait dengan pengaruh *backward and forward linkage.*
2. Bagaimana mengarahkan proses urbanisasi agar mampu menciptakan distribusi pusat kota yang secara geografis menjadi pendorong percepatan pembangunan ? Ini terkait pemilihan lokasi yang tepat bagi pendirian perusahaan industri maupun jasa (Adisasmita, 1993 : 37-38).

Konsep Daerah Inti

John Friedman mengemukakan teori daerah inti berdasarkan analisis aspek tata ruang, lokasi, persoalan kebijaksanaan dan perencanaan pengembangan wilayah. Di sekitar daerah inti terdapat daerah pinggiran (*periphery regions*). Secara garis besar daerah inti

UPT-PUSTAK-UNDIP

melaksanakan fungsi pelayanan terhadap daerah sekitar tersebut dengan sejumlah fungsi khusus yang dijalankannya, seperti pusat perdagangan, pusat industri, pusat pemerintahan dan lain sebagainya.

Friedman mengedepankan 5 preposisi utama berkaitan dengan peranan daerah inti dalam pembangunan keruangan, yaitu :

1. Daerah inti mengatur keterhubungan dan ketergantungan daerah di sekitarnya melalui sistem penyediaan, pasar dan daerah administratif
2. Daerah inti meneruskan secara sistematis dorongan inovasi ke daerah sekitar dalam wilayah pengaruhnya
3. Daerah inti cenderung punya pengaruh positif dalam proses pembangunan sistem spasial, tetapi mungkin berupa pengaruh negatif jika penyebaran pembangunan wilayah inti gagal ditingkatkan dan interaksi wilayah menjadi berkurang
4. Hirarki daerah inti dalam sistem spasial ditetapkan atas dasar kedudukan fungsionalnya dalam suatu sistem ruang yang meliputi karakteristik dan prestasinya
5. Kemungkinan inovasi akan ditingkatkan ke semua lingkup sistem spasial dengan mempertukarkan informasi

(Adisasmita, 1993 : 47-48).

Bersama Alonso, Friedmann mengembangkan klasifikasi daerah inti dan daerah pinggiran menjadi daerah metropolitan (*metropolitan region)*, poros pembangunan *(development axis*), daerah perbatasan *(frontier region*), serta daerah tertekan *(depressed region).* Klasifikasi tersebut memberikan pelajaran bahwa suatu kebijaksanaan nasional pengembangan wilayah harus berangkat dari kesadaran bahwa masalah dan metode pembangunan tidak seragam untuk setiap wilayah.

2.2.3 Konsep Simpul Jasa Distribusi

Poernomosidi Hadjisarosa dalam Adisasmita (1993 : 51-52) menekankan signifikansi peranan pusat-pusat sebagaimana teori tempat sentral, kutub pertumbuhan maupun teori daerah inti. Selanjutnya ia menggunakan istilah simpul jasa distribusi yang umumnya secara fisik berwujud kota. Menurutnya, pengembangan wilayah dimungkinkan

oleh adanya pertumbuhan modal, yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam (Gambar 2.6).

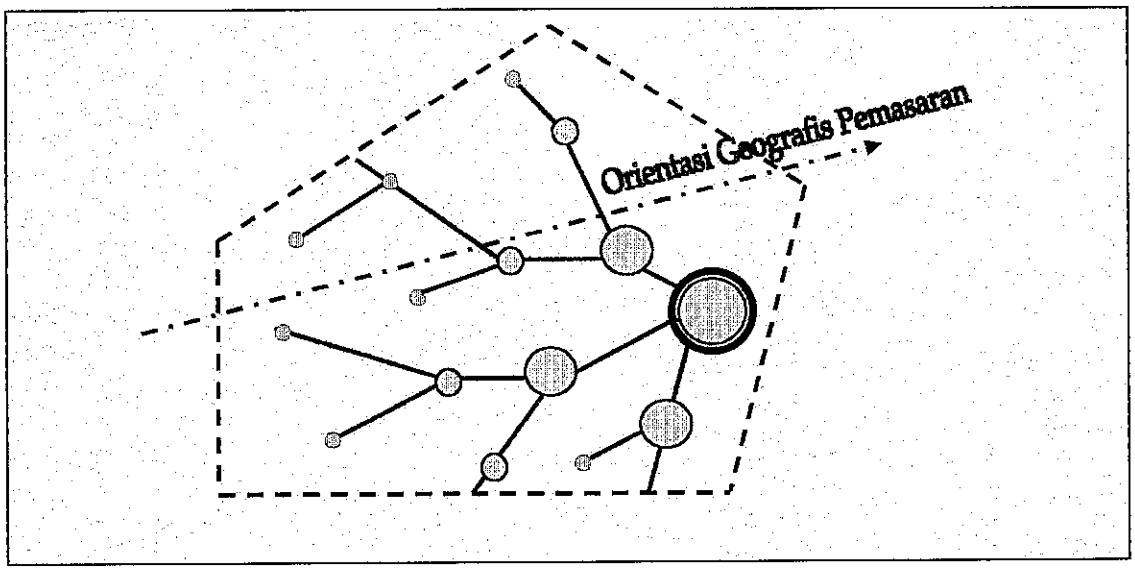

GAMBAR 2.6
STRUKTUR DASAR PENGEMBANGAN WILAYAH POERNOMISIDI

Sumber : Adisasmita, 1993 : 53

Kota-kota sebagai "simpul jasa distribusi" besar berinteraksi dengan simpul kecil dan daerah belakang dalam wilayah pengaruhnya. Tingkat interaksi dilihat atas dasar tingkat kepadatan arus barang. Semakin kuat karakter simpul berarti jangkauan wilayah pengaruhnya semakin luas dan jauh.

Hirarki setiap simpul ditentukan oleh kedudukannya dalam hubungan fungsional antar simpul berdasar mekanisme arus distribusi barang. Fungsi primer simpul adalah sebagai pusat pelayanan jasa distribusi bagi wilayah pengembangan (eksternal), sementara fungsi sekunder adalah bagi kehidupan masyarakat di dalam simpul (internal). Antara simpul-simpul dari tingkatan orde distribusi sama maupun berbeda terdapat keterhubungan dan ketergantungan.

Konsep ini lebih kontekstual di Indonesia karena menggunakan pendekatan realistik, di mana analisisnya bertitik tolak dari kehidupan masyarakat pada umumnya dan

pembangunan ekonomi pada khususnya. Hal itu dapat dilihat dalam pengembangan aktivitas manusia dan pemanfaatan sumber daya alam suatu struktur ruang yang menimbulkan pertumbuhan modal untuk tahapan pembangunan selanjutnya.

Poernomosidi menyanggah teori tempat sentral yang mengemukakan seluruh wilayah terbagi habis dan seluruh bagian wilayah mendapatkan jasa pelayanan. Wilayah dapat saja terbagi habis secara administratif, tapi tidak otomatis sebagai wilayah pengembangan. Dalam kenyataannya beberapa bagian wilayah administrasi tidak terjangkau pelayanan distribusi, karena munculnya hambatan geografis atau tidak tersedianya prasarana.

Konsep simpul jasa distribusi berupaya memformulasikan struktur pengembangan wilayah secara nasional melalui penyebaran orientasi, tingkat perkembangan serta interaksi antara satuan-satuan wilayah pengembangan melalui simpul-simpulnya. Dengan demikian pola distribusi dalam konsepsi Poernomosidi lebih lengkap dan kontekstual (Adisasmita, 1993 : 54-55).

2.2.4 Konsep Agropolitan

Menurut Arsyad (1999 : 111), daerah-daerah di negara berkembang pada umumnya merupakan daerah pertanian, karena itu cara pembangunan terbaik adalah mengembangkan sektor pertanian, tetapi penekanan pembangunan pada sektor pertanian tersebut tidak dimaksudkan untuk mengabaikan pembangunan sektor lain, seperti sektor industri.

Agropolitan adalah suatu wilayah yang dapat didefinisikan sebagai areal perdesaan yang mempunyai kepadatan populasi efektif paling tidak 200 jiwa per kilometer persegi dan jumlah penduduk berkisar 50.000 sampai 150.000 jiwa. Wilayah/ distrik *agropolitan* ini dapat berupa suatu pusat kota atau daerah pedesaan yang mempunyai populasi menyebar (Friedmann dan Douglass, 1975 : 185; Rondinelli, 1985: 9).

Dalam konteks nasional, menurut Soenarno (2003) kawasan agropolitan diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya membentuk Kawasan Agropolitan. Kawasan tersebut terkait dengan sistem pusat-pusat permukiman nasional dan sistem permukiman pada tingkat Propinsi (RTRW Propinsi) dan Kabupaten (RTRW Kabupaten).

Strategi pengembangan yang dilakukan dalam agropolitan adalah dengan menyusun suatu sistem perekonomian terpadu yang mandiri dan mempunyai ketergantungan yang minimal dengan *metropolis*, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan.

Kunci keberhasilan pengembangan agropolitan adalah dengan memposisikan wilayah ini dalam suatu unit pemerintahan yang mempunyai otonomi sendiri dan mampu merencanakan pemanfaatan akan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah pusat lebih berperan untuk mendorong melalui dukungan material, keuangan, dan sumber daya teknis terhadap inisiatif pembangunan yang berasal dari daerah. Komponen-komponen pokok dari pendekatan konsep agropolitan adalah : (1) Kondisi dasar bagi realisasinya (2) Kerangka kerja wilayah (3) Perluasan wilayah (4) Peranan pemerintah (Friedmann dan Weaver, 1979: 194)

Secara lebih teknis, Soenarno (2003) merumuskan bahwa dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan secara terintegrasi, perlu disusun *Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan* yang akan menjadi acuan penyusunan program pengembangan. Adapun muatan yang terkandung didalamnya adalah : (1) Penetapan pusat agropolitan (2) Penetapan unit-unit kawasan pengembangan (3) Penetapan sektor unggulan (4) Dukungan sistem infrastruktur (5) Dukungan sistem kelembagaan.

Pengembangan kawasan agropolitan menjadi sangat penting dalam konteks pengembangan wilayah mengingat :

1. Kawasan dan sektor yang dikembangkan sesuai dengan keunikan lokal.
2. Pengembangan kawasan agropolitan dapat meningkatkan pemerataan, mengingat sektor yang dipilih merupakan basis aktivitas masyarakat.
3. Keberlanjutan dari pengembangan kawasan dan sektor menjadi lebih pasti mengingat sektor yang dipilih mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif dibandingkan dengan sektor lainnya.
4. Penetapan pusat agropolitan terkait dengan sistem pusat-pusat nasional, provinsi, dan kabupaten (RTRW Provinsi/ Kabupaten) sehingga dapat menciptakan pengembangan wilayah yang serasi dan seimbang (Soenarno, 2003).

Kendala yang ditemui dalam pengembangan konsep ini diantaranya adalah tidak meratanya potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah akibatnya ada daerah yang berkembang lebih pesat dibanding daerah sekitarnya, sehingga kota yang kurang beruntung tersebut akan berperan sebagai daerah pendukung. Kondisi tersebut membawa konsekuensi adanya perbedaan peran dan fungsi dari kota.

2.2.5 Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal

Konsep pengembangan ekonomi lokal berusaha mengembangkan dan meningkatkan peran elemen-elemen *endogenous development* dalam kehidupan sosial ekonomi lokal dan melihat keterkaitan serta integrasinya secara fungsional dan spasial dengan wilayah yang lebih luas.

Konsep ini pada dasarnya beranggapan bahwa pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh bertumbuhkembangnya wiraswasta lokal yang ditopang oleh kelembagaan di wilayah tersebut yang meliputi industri, universitas, asosiasi kegiatan usaha, pemerintah

daerah, pengusaha lokal dan lainnya. Masalahnya adalah bagaimana memobilisasi potensi-potensi kelembagaan tersebut dan menjadikannya sebagai faktor pendorong pengembangan wilayah.

Perekonomian lokal dapat dibagi menjadi dua sektor perekonomian, yaitu sektor basis dan non basis. Sektor basis mempunyai peranan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah melalui *efek multiplier*. Artinya bahwa suatu daerah dapat berkembang apabila mampu mengembangkan sektor basisnya (Glasson, 1977 : 82).

Teori Pengembangan Ekonomi Lokal pada intinya mengemukakan bagaimana mengembangkan perekonomian lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki, sejauh mana industri tersebut menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan menumbuhkan perekonomian lokal serta bagaimana keberlanjutannya pada masa yang akan datang.

Tujuan dari pengembangan ekonomi lokal adalah :

1. Memperkuat posisi kompetitif wilayah dan lokalitas dengan mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam.
2. Mewujudkan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi lokal dengan menghargai kesempatan yang tersedia bagi produksi dan jasa lokal.
3. Memperbaiki tingkat pekerjaan dan pilihan karir jangka panjang bagi penduduk lokal.
4. Meningkatkan partisipasi kelompok minoritas dan kurang beruntung dalam ekonomi lokal
5. Memperbaiki lingkungan fisik sebagai komponen kebutuhan dari perbaikan iklim pengembangan usaha dan mempertinggi kualitas kehidupan penduduk.

(OECD dalam Blakely, 1994 : 42).

Local economic development sebagai model, menekankan pada bagaimana merumuskan *endogeneous development policies* dengan sebanyak mungkin menggunakan aspek lokalitas dalam pembangunan, baik berupa sumber daya menusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan kelembagaan. Indikator yang sering digunakan adalah besarnya kesempatan kerja di daerah tersebut.

2.3 Pengembangan Wilayah Tepi Sungai

Wilayah Kabupaten Barito Selatan sebagian besar (78,11 %) dibelah oleh Sungai Barito yang membujur dari Utara ke Selatan, kecuali Kecamatan Gunung Bintang Awai. Kondisi ini memberikan karakteristik khusus bagi struktur ruang Kabupaten Barito Selatan, karena pengaruh Sungai Barito sangat besar bagi perkembangan wilayah yang juga mempengaruhi sosial-ekonomi masyarakatnya.

Sejarah peradaban manusia di lembah sungai telah melahirkan kota-kota penting di dunia. Menurut Zulkifli Mulki (Kompas, 12 Maret 2003) hampir semua kota di Kalimantan sejak dulu pengembangan permukiman penduduknya berpusat atau mengacu pada sistem aliran sungai. Bahkan tingkat pelayanan transportasi sungai di Pulau Kalimantan hingga saat ini masih cukup signifikan, yaitu 33 %, sedangkan transportasi jalan raya sebesar 44 %, sisanya transportasi laut dan udara (Djakapermana, **http://rudyct.tripod.com**, 28 Juni 2003). Selain transportasi, peranan sungai-sungai tersebut bagi aktivitas sehari-hari bagi masyarakat Kalimantan masih sangat besar, mulai dari pekerjaan rumah tangga sampai kepada hal yang bersifat ekonomi seperti sumber mata pencaharian (penangkapan dan budidaya ikan).

Keterkaitan sungai dengan Suku Dayak sebagai penduduk asli dan mayoritas di Provinsi Kalimantan Tengah sangat erat. Identifikasi pengelompokan Suku Dayak seringkali didasarkan atas sungai-sungai besar yang melewati permukimannya (Usop et al, 1979 : 7-8). Bahkan menurut Tjilik Riwut (1979 : 211), panggilan untuk Orang Dayak lebih akrab berdasar aliran sungai, misalnya jika berasal dari Sungai Barito, disebut *"Oloh Barito"* (Orang Barito) dan seterusnya.

Karakter fisik yang berbeda dari wilayah-wilayah yang dilewati sungai menjadikan sungai sebagai *edges* (batas) suatu kawasan (Kevin Lynch dalam Chair, 2002 : 29).

Pemanfaatan sungai menimbulkan serangkaian ruang aktivitas di sepanjang tepinya. Aktivitas yang berbeda ini menandai suatu kawasan berbeda dengan kawasan lainnya.

Kondisi Fisik Dasar

Wilayah tepi sungai yang termasuk Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/ kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu titik (outlet). Oleh karena itu, pengelolaan DAS merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah yang menempatkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan yang pada dasarnya merupakan usaha-usaha penggunaan sumberdaya alam secara rasional untuk mencapai tujuan produksi pertanian yang optimum dalam waktu yang tidak terbatas (Sitti Marwah, **http://rudyct.tripod.com**, 16 Januari 2004).

Chair (2002 : 159-160) yang meneliti permukiman di sekitar aliran Sungai Martapura menyimpulkan bahwa permukiman yang dekat dengan aliran sungai sebagian besar kondisi fisik bangunan maupun lingkungannya tidak layak sebagai hunian, sementara kondisi yang menjauhi aliran sungai keadaannya lebih baik seperti kualitas bangunan dan aktivitas penghuninya.

Kondisi Sosial-Ekonomi

Berdasarkan penelitian Usop dan kawan-kawan tahun 1997 mengenai profil kebudayaan Suku Dayak yang tinggal di tepi sungai di Kalimantan, dapat disimpulkan masyarakat di tepi sungai berprofesi sebagian besar di sektor pertanian. Umumnya petani masih memiliki pendidikan yang rendah. Setiap wilayah tepi sungai besar dihuni oleh masyarakat dari kekerabatan Suku Dayak yang berbeda, tetapi peranan sungai juga mendorong terjadinya interaksi sehingga kini sudah tidak terjadi segregasi etnis lagi.

Sementara Chair (2000 : 159) yang meneliti penduduk di tepi Sungai Martapura menemukan fakta bahwa sebagian masyarakat adalah golongan ekonomi lemah yang berprofesi sebagai pedagang/ nelayan dan buruh.

Pola Pemanfaatan Ruang

Menurut Chapin dalam Yunus (2001 : 173), unsur-unsur utama perilaku manusia serta dinamika perilaku manusia dalam proses imbal dayanya telah mengakibatkan terciptanya pola-pola keruangan tertentu dalam suatu wilayah/ kota. Pola pemanfaatan ruang di sepanjang sungai mempunyai kecenderungan pola linier dengan orientasi mengikuti pola aliran sungai tersebut (Wikantiyoso, **http://www. mintakat.unmer.ac.id/,** 10 Desember 2003).

Eksistensi permukiman tepi air di beberapa bagian wilayah Indonesia, khususnya yang berakar historis, budaya dan tradisi, kebanyakan merupakan cikal bakal perkembangan suatu kota. Hal itu menjadikan kota-kota tersebut berkembang menjadi kota tepi air. Kedudukan kawasan perumahan/ permukiman ini menjadi salah satu bagian yang integral dari kota induknya, dimana orientasi kegiatan berbasis darat dan air, seperti perdagangan, pelabuhan dan transportasi, dan perikanan (Gambar 2.7).

Tipe memanjang (linier) di sepanjang sungai, di mana sungai menjadi sarana pergerakan dan sumber kehidupan. Orientasi ke arah daratan tempat tanah garapan pertanian

GAMBAR 2.7 PERMUKIMAN TEPI SUNGAI

Sumber : Wikantiyoso, http://www. mintakat.unmer.ac.id/, 10 Desember 2003

Pola permukiman, aktivitas keseharian dan aksesibilitas transportasi mempengaruhi struktur ruang di wilayah daerah aliran sungai atau wilayah tepi sungai. Morfologi fisik

wilayah cenderung mengikuti pola aliran sungai yang umumnya linier, sedangkan pemanfaatan lahan lebih terkonsentrasi di sepanjang tepi sungai yang mudah diakses transportasi sungai. Permukiman lebih mendekat ke arah aliran sungai besar, sedangkan lahan pertanian cenderung ada di belakang atau menjauhi aliran sungai besar.

2.4. Struktur Ruang dan Pengembangan Ekonomi Wilayah

Untuk menjelaskan keterkaitan struktur ruang dalam pengembangan ekonomi wilayah, secara sistematis dibahas mengenai kajian teoretis ekonomi wilayah, pengembangan ekonomi wilayah, struktur ruang dari perspektif ekonomi wilayah serta struktur ruang dalam konteks pengembangan ekonomi wilayah.

2.4.1. Kajian Teoretis Ekonomi Wilayah

Hakikat yang paling utama dan pertama dari teori ekonomi menurut Todaro (1994 : 51) adalah mampu menjelaskan ciri-ciri hakiki dari suatu proses ekonomi sebagai realitas kehidupan sehari-hari yang mencerminkan keberadaan suatu bangsa atau wilayah negara tertentu. Lebih spesifik mengenai ekonomi wilayah, menurut Haeruman (Tjahjati, 1997 : 248) bangun teori ekonomi wilayah merupakan derivasi teori ekonomi dengan memasukkan unsur-unsur ruang terutama aspek interaksi antar kegiatan.

Teori-teori ekonomi wilayah yang sering digunakan adalah Teori Ekonomi Neo Klasik, Teori Basis Ekonomi, Teori Lokasi, Teori Tempat Sentral dan Teori Kausasi Kumulatif (Arsyad, 1999 : 115-118). Teori-teori tersebut di atas dapat digunakan dalam melihat permasalahan ekonomi wilayah, namun tidak dapat menjelaskan permasalahan secara komprehensif. Masing-masing mempunyai keterbatasan dan keunggulannya masing-masing. Arsyad menjelaskan timbulnya paradigma baru teori pembangunan ekonomi daerah sebagai berikut :

TABEL II.1
PARADIGMA BARU TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

No	Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
1	Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan = semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan `kondisi` penduduk lokal
2	Basis Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga ekonomi baru
3	Aset-Aset Lokasi	Keunggulan komparatif berdasar pada aset fisik	Keunggulan kompetitif berdasarkan kualitas lingkungan
4	Sumberdaya Pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Sumber : Arsyad, 1999 : 119

Tuntutan paradigma baru yang bersandar pada pengetahuan teori-teori ekonomi wilayah membuat perencana dan pengambil keputusan harus menyusun siasat dan program pembangunan secara lebih terstruktur, efisien, efektif dan memahami implikasi eksternalitas dari setiap keputusan. Dengan demikian pengembangan ekonomi wilayah dalam konteks kekinian merupakan sinergi dari semua komponen, tidak hanya masalah lokalitas, tetapi lebih kepada penguatan kapasitas sumberdaya manusia yang tinggal dan beraktivitas dalam ruang.

2.4.2 Pengembangan Ekonomi Wilayah

Pengembangan ekonomi wilayah adalah suatu usaha mengembangkan dan meningkatkan hubungan interdependensi dan interaksi antara sistem ekonomi *(economic system)*, sistem masyarakat *(social system)*, lingkungan hidup *(environment)* dan sumberdaya alam *(ecosystem)*. Tujuan pengembangan ekonomi wilayah adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mendorong pemerataan pertumbuhan dengan mengurangi disparitas regional (Tukiyat dalam Ambardi, 2002 : 123).

Dalam konteks daerah sebagai wilayah administratif, perencanaan pembangunan ekonomi daerah dapat didefinisikan sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia dan memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggungjawab (Arsyad, 1999 : 127).

Perekonomian wilayah mencakup sejumlah hal, antara lain variabel utama makro ekonomi seperti PDRB/ total output, tingkat harga dan kesempatan kerja yang membentuk struktur ekonomi wilayah. Perekonomian wilayah digunakan untuk mengukur daya dukung potensi ekonomi serta struktur ekonomi terhadap kegiatan usaha (investasi).

Perekonomian wilayah terdiri atas 2 aspek :

1. Variabel Potensi, yang meliputi : potensi fisik dan non-fisik dari suatu daerah/ wilayah seperti penduduk, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya sosial. Faktor penduduk yang dianalisis adalah kemampuan hidup yang ditunjukkan oleh indikator PDRB per kapita. Potensi ekonomi juga dapat dilihat dari kecepatan pertumbuhan ekonomi, yaitu rata-rata pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan dalam suatu periode/ tahun terhadap periode/ tahun sebelumnya. Indikator IPM pun dapat digunakan sebagai identifikasi potensi ekonomi.
2. Variabel Struktur Ekonomi, di mana jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah/ wilayah digunakan untuk mengukur struktur ekonomi wilayah yang bersangkutan. Semuanya tercakup dalam PDRB. Basis struktur perekonomian terlihat dari kontribusi sektor-sektor ekonomi tertentu terhadap nilai bruto seluruh sektor yang ada dalam wilayah tersebut, yakni berupa nilai tambah sektoral (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2002 : 10).

Perubahan struktur ekonomi ditandai dengan adanya perubahan persentase sumbangan berbagai sektor ekonomi yang disebabkan intensitas kegiatan manusia dan perubahan teknologi (Sukirno, 1985 : 77). Menurut Sjahrir dalam Hastuti (1999 : 27), perubahan struktur ekonomi mengandung beberapa ciri, yaitu : (1) Pertumbuhan ekonomi meningkat melebihi pertumbuhan penduduk (2) *Share* sektor primer menurun (3) *Share* sektor sekunder meningkat (4) *Share* sektor jasa–jasa lebih kurang konstan sehingga sebuah negara menjadi negara industri maju (5) Konsumsi pangan menurun

2.4.3. Struktur Ruang dalam Perspektif Ekonomi Wilayah

Pengertian yang paling ideal dalam melakukan analisis mengenai ekonomi ruang adalah melihat wilayah dalam pengertian nodal (Sukirno, 1982 : 2), karena ciri yang paling jelas dari perekonomian ruang adalah tidak homogen (Richardson, 2001 : 59). Perekonomian ruang yang tidak mempunyai uniformitas membawa ekonomi ke dalam konsep nodal yang terdiri atas satuan-satuan heterogen, tetapi terkait secara fungsional.

Anwar dan Setia Hadi (1996 : 61) menggambarkan sistem ekonomi wilayah dalam konsep nodal sebagai berikut :

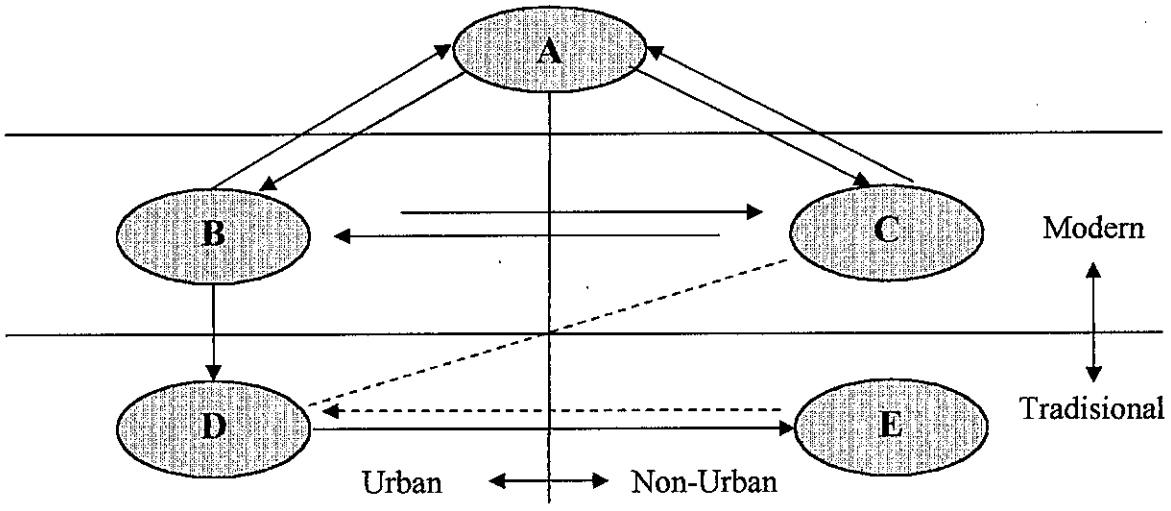

GAMBAR 2.8 SISTEM EKONOMI DALAM WILAYAH NODAL

Sumber : Anwar dan Setia Hadi, 1996 : 61

Dalam Gambar 2.2 di atas, (1) Wilayah A menyangkut hubungan dengan kegiatan luar negeri, (2) Wilayah B adalah wilayah bercirikan ekonomi industri besar dan industri jasa modern, (3) Wilayah C adalah wilayah bercirikan ekonomi industri ekstraktif dan penghasil bahan primer, (4) Wilayah D adalah wilayah bercirikan ekonomi usaha kecil dan perkotaan, sedang (5) Wilayah E adalah wilayah bercirikan ekonomi industri kecil dan sektor primer tradisional. Sebagian besar penduduk Indonesia yang berbasis agraris berlokasi di wilayah E.

Dalam praktek pembangunan nasional, ekonomi ruang lebih mengacu pada pengertian wilayah secara administratif dari suatu negara. Jadi, ekonomi ruang berada dalam batas administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan sebagainya. Upaya yang harus dilakukan adalah menyesuaikan bentuk perencanaan yang sesuai batas wilayah administratif dengan konsep nodal yang fungsional.

Bentuk struktur penyebaran kegiatan ekonomi dalam ruang ditentukan oleh corak penentuan lokasi dari penanaman modal. Dalam suatu ruang ekonomi yang belum berkembang, spesialisasi kawasan dari kegiatan ekonomi ditentukan oleh keuntungan dalam kekayaan alam, jarak ke pasar dan ke sumber bahan mentah, tersedianya tenaga kerja, keadaan alam dan sebagainya. Spesialisasi tersebut akan berpusat di kota yang berfungsi sebagai sumber kredit dan modal sebagai pusat perdagangan, tempat untuk memproses bahan mentah dan pusat komunikasi antara daerah sekitar dengan wilayah luar. (Sukirno, 1982 : 158).

Karakteristik aktivitas ekonomi dalam wilayah meliputi informasi mengenai dimensi perusahaan, konsentrasi dan distribusi dari aktivitas ekonomi, nilai tambah, PDRB, produktivitas, karakteristik lahan pertanian, investasi dan akumulasi modal serta karakteristik industri campuran. Sedangkan karakteristik hubungan aktivitas-lokasi

meliputi lokasi industri dan jasa komersial, aliran dan keterhubungan perdagangan intra-inter regional serta hubungan ekonomi dengan wilayah lain (Bendavid-Val, 1991 : 23-28).

Von Boventer dalam Daldjoeni (1997 : 139) akhirnya menyimpulkan bahwa terdapat relasi yang kompleks antara struktur ruang dan perekonomian. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 3 faktor, yaitu : (1) keuntungan, jika ada konsentrasi keruangan dari produksi dan konsumsi (2) pengaruh dari transportasi barang, dan (3) pentingnya sumberdaya alam.

Dengan demikian jelas bahwa perekonomian dalam ruang tidak terlepas dari adanya struktur hirarkis dalam suatu wilayah, karena tidak homogennya wilayah tersebut dan tuntutan jenjang pelayanan. Konsekuensinya harus ada organisasi ruang secara fungsional, yaitu pembedaan dan pembagian fungsi kota, baik sebagai pusat pertumbuhan maupun sebagai wilayah belakang.

Berdasarkan hal tersebut, struktur ruang ditinjau dari aspek ekonomi wilayah adalah sistem hirarki dalam wilayah berdasarkan keterkaitan aktivitas ekonomi dengan aspek ruang (lokasi) dan populasi (wilayah). Dalam studi ini, struktur ruang secara ekonomi dibatasi pada hirarki wilayah berdasarkan peran ekonomi setiap unit spasial (kecamatan) dalam wilayah administrasi (kabupaten).

2.4.4. Struktur Ruang dalam Konteks Pengembangan Ekonomi Wilayah

Perencanaan regional pada umumnya disusun berdasarkan pertimbangan pengembangan kegiatan ekonomi pada wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam bentuk perencanaan spasial *(spatial planning)*, terutama dalam menentukan lokasi-lokasi dari kegiatan ekonomi (Tjahjati, 1997 : 396).

Struktur ruang sebagai bagian penataan ruang daerah kabupaten/ kota diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota sebagai penjabaran RTRW Provinsi.

Materi yang diatur dalam RTRW Kabupaten memuat 4 bagian pokok, yaitu: (1) Tujuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten (2) Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten (3) Rencana umum tata ruang wilayah, serta (4) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Selain rencana tata ruang yang mengatur matra ruang pada umumnya, unsur ruang juga muncul dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah. Menurut Surat Edaran Mendagri dan Otonomi Daerah c.q. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) No. 050/ 1240/ II/ Bangda, dokumen perencanaan tersebut meliputi :

1. Pola Dasar Pembangunan (Poldas). Poldas merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan induk yang memuat pernyataan politis berupa visi, misi, arah dan strategi pembangunan daerah.
2. Program Pembangunan Daerah (Propeda). Berfungsi sebagai perencanaan manajerial komprehensif, disusun sebagai penjabaran Poldas dan Propenas.
3. Rencana Strategis (Renstra Daerah). Berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta mengacu pada Poldas dan Propeda.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahun.
5. Pada level instansi/ dinas, diperlukan Renstra Instansi sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999. (Riyadi dan Bratakusumah, 2003 : 260-261).

Hal-hal tersebut di atas menjelaskan bahwa dokumen perencanaan daerah sebenarnya selaras dengan rencana tata ruang, karena baik RTRWP maupun RTRWK adalah jembatan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan menjadi matra ruang dari Poldas pembangunan daerah. Dengan demikian Propeda dan Repetada yang disusun

seyogyanya mengacu kepada Poldas sebagai kerangka makro dan RUTR sebagai matra ruang pembangunan (lihat Gambar 2.9).

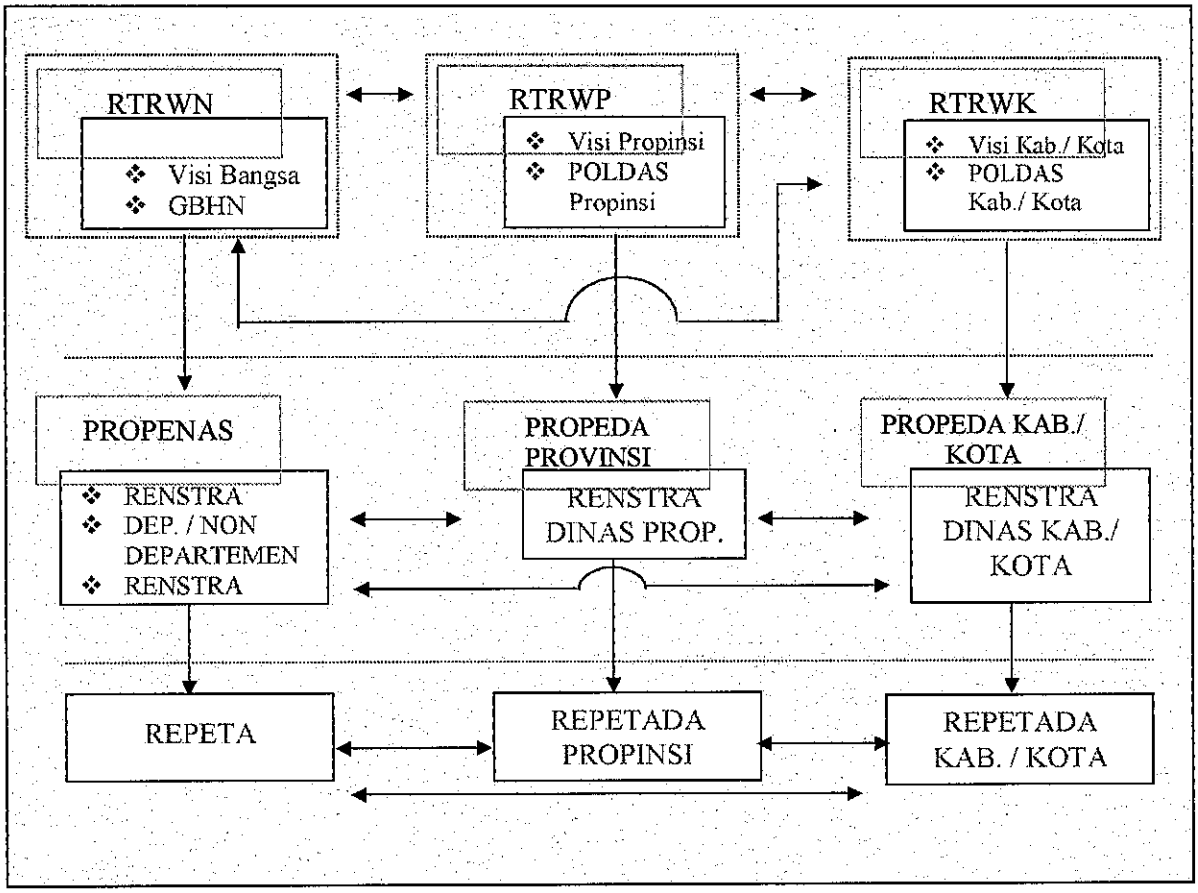

GAMBAR 2.9
KEDUDUKAN PENATAAN RUANG DALAM
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Sumber : Akil, 2002

Dalam pembangunan ekonomi wilayah, struktur ruang merupakan suatu organisasi keruangan yang hirarkis fungsional sebagai arahan pembangunan. Usman dalam Munir (2002 : 217) menyatakan bahwa dimensi spasial dalam pembangunan daerah dapat memberikan watak atau ciri tersendiri, serta memiliki pola dan spirit sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimilikinya.

Dengan demikian dalam konteks pengembangan ekonomi wilayah, struktur ruang adalah suatu intervensi manusia terhadap ruang wilayah, baik secara fisik yang bersifat

pelayanan maupun secara ekonomi. Kebijakan struktur ruang adalah matra spasial dari kebijakan pembangunan ekonomi wilayah, sehingga merupakan hasil proses alokasi obyek fisik dan aktivitas ekonomi manusia ke dalam tatanan ruang yang memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah.

2.5 Kesimpulan Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan berkaitan dengan struktur ruang sebagai arahan pengembangan ekonomi wilayah :

1. Struktur ruang suatu wilayah adalah bagian dari perencanaan ruang yang lahir dari makna keteraturan ruang. Keteraturan ruang ini perlu diorganisasikan untuk mengintegrasikan setiap fungsi yang diemban unit-unit ruang yang sesuai dengan karakteristik ruang tersebut. Oleh karenanya struktur ruang sangat berkaitan dengan tatanan yang bersifat hirarkis. Struktur ruang terbentuk dari sistem hirarki kota, yang membagi peran kota sebagai pusat pertumbuhan dan wilayah belakang. Antara pusat dan wilayah belakang terdapat keterkaitan/ keterhubungan, di mana menurut Bendavid-Val dan Rondinelli, terbagi atas 7 kategori yang tidak begitu berbeda antara keduanya. Keterhubungan antar wilayah yang diterapkan dalam studi ini berupa : keterhubungan fisik, sosial budaya dan ekonomi.
2. Konsep-konsep pengembangan wilayah yang berkaitan dengan struktur ruang berangkat dari Teori-teori Kutub Pertumbuhan. Teori tersebut belum operasional sebagai alat untuk perencanaan pembangunan, karena asumsi-asumsi yang digunakan belum realistis. Operasionalisasi pusat pertumbuhan yang lebih relevan adalah *Konsep Simpul Jasa dan Distribusi* Poernomosidi melalui pembagian wilayah pembangunan. Dikaitkan dengan pengembangan wilayah yang berbasis pertanian seperti Kabupaten

Barito Selatan, konsep Satuan Wilayah Pembangunan Poernomosidi dapat diintegrasikan dengan *Model Agropolitan* dan *Pengembangan Ekonomi Lokal.* Diperlukan adanya peningkatan peran elemen-elemen lokal sebagai upaya untuk mengusahakan optimasi sumber daya bagi penduduk wilayah setempat, sedangkan operasionalisasinya dapat dengan menentukan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis pertanian yang diadopsi dari konsep agropolitan.

3. Wilayah tepi sungai sebagai obyek studi mempunyai karakter yang khas dilihat dari aspek fisik dasar, sosial-ekonomi masyarakat dan pemanfaatan ruangnya. Pola permukiman, aktivitas sehari-hari dan aksesibilitas transportasi mempengaruhi struktur ruang di wilayah daerah aliran sungai. Struktur ruang pada wilayah daerah aliran sungai terkait pola alamiah sungai tersebut sebagai dasar penentuan hirarki pusat pertumbuhan dan wilayah pengaruhnya.
4. Dalam perencanaan pembangunan wilayah harus ada sinergi antara rencana spasial dan perencanaan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, struktur ruang adalah wujud intervensi manusia untuk menata ruang sehingga dapat tercapai tujuan pengembangan wilayah. Struktur ruang yang berangkat dari permasalahan dan potensi wilayah akan memberikan arahan spasial yang jelas bagi strategi pengembangan ekonomi wilayah tersebut.

Pendekatan teoretis yang diterapkan dalam studi ini dijelaskan pada Gambar 2.10.

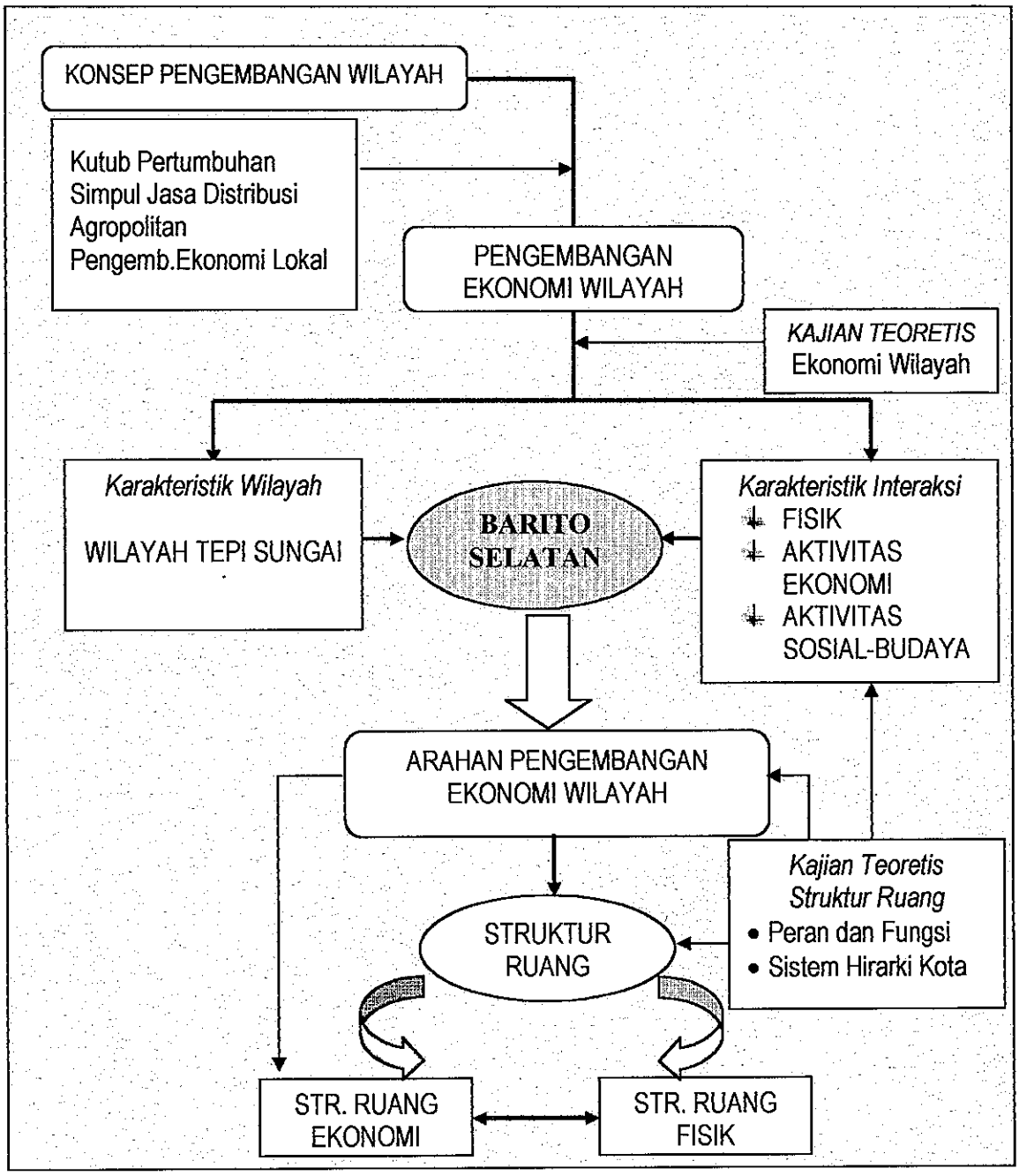

GAMBAR 2.10
PENDEKATAN TEORETIS
STRUKTUR RUANG DAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH
Sumber : Hasil Analisis, 2004

BAB III
KAJIAN UMUM WILAYAH DAN STRUKTUR RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN

3.1 Kajian Umum Wilayah

Kajian umum wilayah Barito Selatan dimaksudkan untuk mendeskripsikan kondisi eksisting yang meliputi kondisi fisik alam, kependudukan, ekonomi wilayah dan kebijakan pembangunan daerah Barito Selatan. Sedangkan struktur ruang Barito Selatan menjelaskan mengenai kebijakan struktur ruang itu sendiri, sistem hirarki kota serta faktor-faktor yang mempengaruhi struktur ruang, yaitu pola pemanfaatan ruang, sebaran fasilitas dan jaringan transportasi

3.1.1 Fisik Alam

Secara geografis Kabupaten Barito Selatan terletak di wilayah Timur Provinsi Kalimantan Tengah, terletak di antara 1°20` Lintang Utara, 1°35 Lintang Selatan dan 114°- 115° Bujur Timur. Kabupaten Barito Selatan beribukota di Buntok, sebuah kota yang berada di tepi Sungai Barito dan juga menjadi pintu gerbang jalur transportasi darat menuju Kota Banjarmasin melalui Kabupaten Barito Timur.

Batas-batas administratif Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Barito Utara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Selatan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kapuas
- Sebelah Timur : Kabupaten Barito Timur

Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah sebesar 8.830 km^2 , yang meliputi enam kecamatan : Kecamatan Jenamas, Dusun Utara, Dusun Selatan, Dusun Hilir, Karau Kuala dan Gunung Bintang Awai. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah

dengan ketinggian berkisar antara 0-100 meter dari permukaan air laut, kecuali Kecamatan Gunung Bintang Awai yang merupakan daerah perbukitan (lihat Tabel III.1)

TABEL III.1
LUAS WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BERDASARKAN KELAS KETINGGIAN

No	Kecamatan	Kelas Ketinggian					Luas total	% thdp Luas Barito Selatan
		0-7	7-25	25-100	100 - 500	> 500		
1	Jenamas	65,00	5,80	-	-	-	70,80	8,02
2	Dusun Hilir	144,10	62,40	-	-	-	206,50	23,39
3	Karau Kuala	-	76,15	33,75	-	-	109,90	12,45
4	Dusun Selatan	-	110,58	72,32	-	-	182,90	20,71
5	Dusun Utara	-	42,83	76,77	-	-	119,60	13,54
6	G.B. Awai	-	0,70	145,69	40,63	6,28	193,30	21,89
Barito Selatan		**209,10**	**298,46**	**328,53**	**40,63**	**6,28**	**883,00**	**100,00**

Sumber : Revisi RTRW Barito Selatan 1998, diolah

Tabel III.1 menunjukkan bahwa wilayah Barito Selatan secara garis besar berada pada dataran rendah, yaitu dari 0-100 m di atas permukaan laut yang mencakup 94,69 %. Sisanya sebesar 5,31 % adalah perbukitan, yang sebagian besar merupakan wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai.

Salah satu karakteristik wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah dialiri oleh Sungai Barito. Aliran sungai ini membujur dari Utara ke Selatan dengan lebar rata-rata 200 m lebih, yang berhulu di Kabupaten Murung Raya dan bermuara di Laut Jawa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Anak Sungai Barito di bagian hulu Kabupaten Barito Selatan mendekati perbatasan Kabupaten Tabalong (Kalimantan Selatan) dengan lebar antara 50-75 m. Di bagian Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, lebar anak Sungai Barito relatif hanya sekitar 50 m, berawa dan didominasi gambut. Jadi secara keseluruhan wilayah Barito Selatan masih termasuk dalam kawasan DAS Barito.

3.1.2 Kependudukan

Jumlah penduduk Barito Selatan tahun 2002 adalah 113.195 orang, 57. 417 orang laki-laki (51 %) dan 55.778 orang perempuan (49 %). Sebelum pemekaran, jumlah penduduk seluruhnya adalah 184.810 orang (Barito Selatan dalam Angka 2001). Kepadatan penduduk Barito Selatan tergolong jarang, dengan rata-rata 12,92 orang per km perseginya. Dari 6 kecamatan pascapemekaran, Kecamatan Dusun Selatan adalah yang terpadat dengan total 41.052 jiwa (36,27 %) dan kepadatan 22,45 jiwa/ km^2.

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Barito Selatan rata-rata hanya 1,20 % per tahun. Angka pertumbuhan penduduk yang relatif lambat ini merata di hampir semua kecamatan, kecuali Kecamatan Jenamas yang mencapai 13,08 %. Dengan keadaan tersebut, hingga tahun 2013 nanti diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan hanya bertambah menjadi 128.711 jiwa. Perkembangan penduduk Barito Selatan dari tahun 1997 hingga 2002 ditunjukkan dalam Tabel III.2.

TABEL III.2
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN BARITO SELATAN 1997-2002

Kecamatan	Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2002						
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	r
Jenamas	7.436	7.536	11.385	11.006	11.362	11.349	13,08
Dusun Hilir	13.852	13.928	13.883	15.282	15.339	15.461	2,67
Karau Kuala	13.815	13.882	13.979	13.744	14.094	14.337	0,51
Dusun Selatan	39.095	39.352	39.823	40.221	40.607	41.052	0,95
Dusun Utara	15.284	15.349	15.383	14.364	14.755	14.887	-0,81
G.B Awai	17.013	16.081	17.017	14.707	15.388	16.109	-2,15
Barito Selatan	**106.495**	**106.128**	**111.470**	**109.324**	**111.545**	**113.195**	**1,20**

Sumber : Barito Selatan dalam Angka 2002

Berdasarkan Tabel III.2, terlihat bahwa dari segi kependudukan, permasalahan yang dihadapi Barito Selatan adalah pertumbuhan penduduk yang cukup rendah dan kepadatan penduduk yang masih kurang. Terjadi kesenjangan yang cukup tinggi antara

Kecamatan Dusun Selatan dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Tetapi dilihat dari pertumbuhan, Kecamatan Dusun Selatan relatif stagnan. Angka pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir justru terjadi di Kecamatan Jenamas, yaitu rata-rata 13,08 % per tahun. Kecamatan lain di luar Dusun Selatan pertumbuhan penduduknya relatif fluktuatif.

Kondisi fisik alam dan kependudukan Barito Selatan secara spasial ditunjukkan dalam Gambar 3.1.

3.1.3. Ekonomi Wilayah

Untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi wilayah, diperlukan deskripsi mengenai terjadinya laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan regional per kapita, indikator Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Selatan serta posisi relatif terhadap struktur ekonomi regional Kalimantan Tengah.

3.1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Barito Selatan sempat mengalami pertumbuhan minus (-4,98 %) akibat krisis pada tahun 1998. Pada tahun 1999 pertumbuhan sudah positif walaupun masih di bawah 1 %, yakni sebesar 0,97 %. Tahun 2002 laju pertumbuhan kian membaik, yaitu sebesar 2,73 %, namun masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan Tengah sebesar 3,27 %. Laju pertumbuhan penduduk Barito Selatan sendiri adalah sebesar 1,5 % (Barito Selatan dalam Angka 2002).

3.1.3.2 Produk Domestik Regional Bruto

Dilihat dari komposisi PDRB atas harga konstan 1993, perekonomian Kabupaten Barito Selatan pascapemekaran meningkat 2,73 % dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar

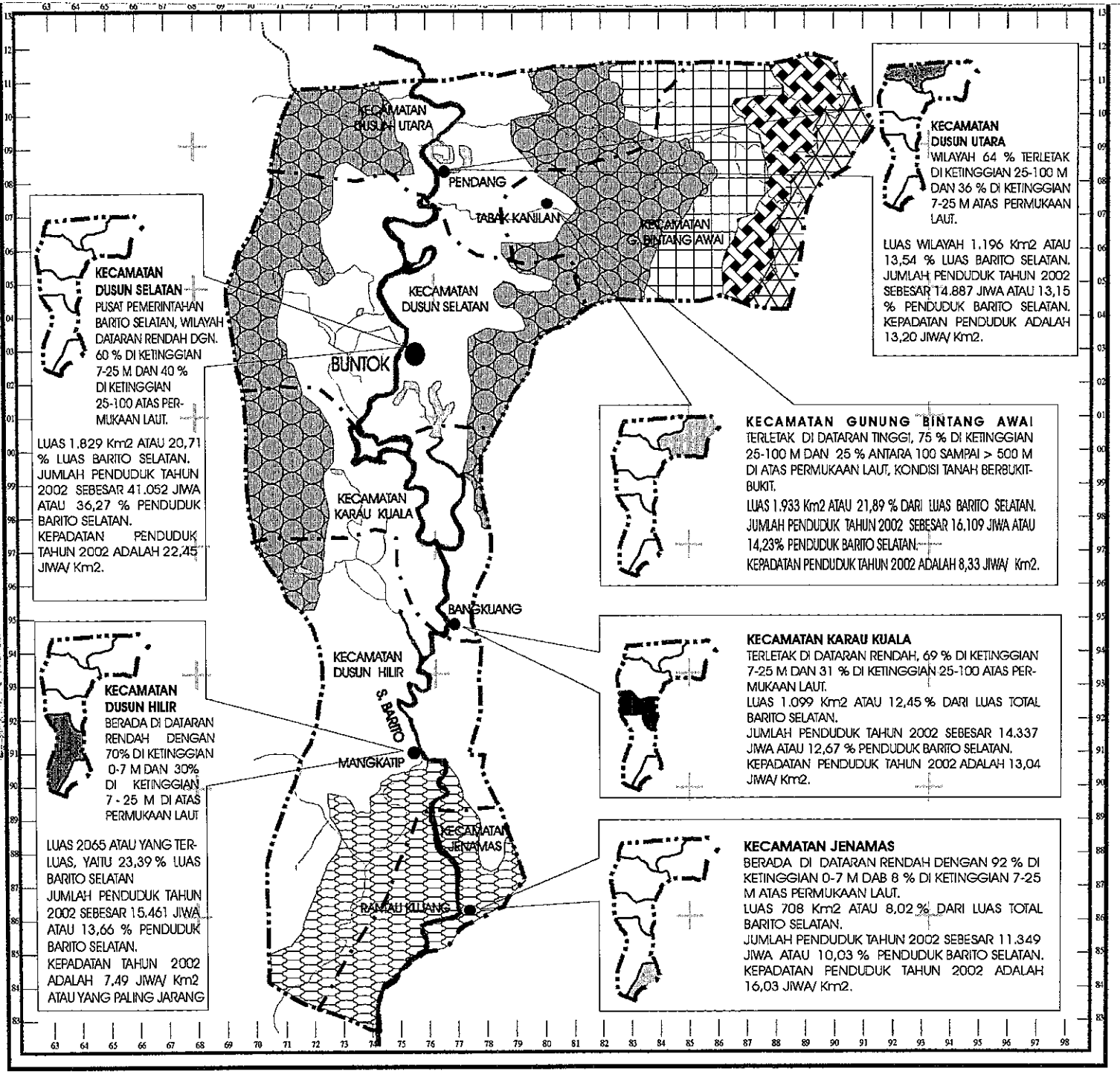

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

KAJIAN STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMB. EKONOMI WILAYAH KAB. BARITO SELATAN

LEGENDA

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- IBUKOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KECAMATAN
- DANAU
- SUNGAI
- 0 - 7 M
- 7 - 25 M
- 25 - 50 M
- 50 - 100 M
- 100 - 500 M
- > 500 M

INSERT

SUMBER :
RTRW KAB. BARITO SELATAN

PETA KONDISI FISIK ALAM & KEPENDUDUKAN

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
3.1	75	1 : 750.000	

263.728 juta rupiah. Kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, yakni sebesar 39,35 %, kemudian disusul oleh sektor pengangkutan dan komunikasi (16,38 %), sektor perdagangan, restoran dan hotel (14,16%) dan sektor jasa-jasa (12,51 %). Hal ini ditunjukkan dalam Tabel III.3.

TABEL III.3
PDRB KABUPATEN BARITO SELATAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 MENURUT LAPANGAN USAHA 1998-2002

No	Lapangan Usaha	1998	1999	2000	2001	2002*
1	Pertanian	172.043,90	170.625,77	175.852,19	177.942,58	103.766,66
2	Pertambangan & Penggalian	1.499,54	1.435,44	1.314,96	1.335,20	1.073,73
3	Industri Pengolahan	20.187,16	20.983,59	21.992,89	22.584,60	15.653,77
4	Listrik dan Air Bersih	1.349,40	1.404,01	1.590,42	1.832,38	1.389,25
5	Bangunan/ Konstruksi	29.143,94	29.289,12	29.389,29	30.305,78	18.888,23
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	51.195,83	52.587,05	53.637,71	54.773,77	37.348,91
7	Pengangkutan dan Telekomunikasi	48.636,62	49.286,55	50.411,91	52.726,01	33.004,06
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perumahan	14.026,11	14.079,73	13.736,31	14.305,92	9.417,77
9	Jasa-jasa	47.576,00	49.286,55	50.411,91	52.726,01	33.004,06
Jumlah		**385.658,50**	**389.411,88**	**396.515,13**	**406.352,23**	**263.728,00**

Sumber : Barito Selatan dalam Angka 2002

** PDRB setelah terjadi pemekaran*

Untuk mengetahui lebih jelas perbedaan PDRB Barito Selatan sebelum dan setelah pemekaran telah dilakukan revisi data PDRB sejak tahun 2000, walaupun pemekaran terjadi tahun 2002. Dengan demikian dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi riil yang dapat menjadi kajian bagi perencanaan pembangunan daerah selanjutnya. Hal ini ditunjukkan dalam PDRB Barito Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2000-2002 yang dirinci ke dalam sub sektor berikut kontribusinya (lihat Tabel III.4).

TABEL III.4
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS HARGA BERLAKU
DAN KONTRIBUSI TIAP SEKTOR/ SUB SEKTOR 2000-2002

Sektor/ Sub Sektor	2000	Kontribusi	2001	Kontribusi	2002	Kontribusi
1 *Pertanian*	285.047,84	47,73	317.360,25	46,69	335.164,46	44,82
Tanaman Bahan Makanan	28.068,82	4,70	33.714,00	4,96	36.941,38	4,94
Perkebunan	48.911,41	8,19	60.494,89	8,90	66.105,62	8,84
Peternakan dan Hasil-hasilnya	9.555,34	1,60	11.283,32	1,66	12.114,38	1,62
Kehutanan	141.060,76	23,62	146.479,19	21,55	147.391,60	19,71
Perikanan	57.451,50	9,62	65.388,85	9,62	72.686,27	9,72
2 *Pertambangan dan Penggalian*	1.797,63	0,30	2.146,98	0,32	2.879,27	0,39
Pertambangan Non Migas	239,68	0,04	268,37	0,04	369,14	0,05
Penggalian	1.557,95	0,26	1.878,61	0,28	2.510,13	0,34
3 *Industri Pengolahan*	32.047,95	5,37	37.253,37	5,48	44.874,81	6,00
Industri Non Migas	32.047,95	5,37	37.253,37	5,48	44.874,81	6,00
4 *Listrik dan Air Bersih*	1.777,84	0,30	2.578,53	0,38	3.709,32	0,50
Listrik	1.066,70	0,18	1.628,54	0,24	2.596,52	0,35
Air Bersih	711,14	0,12	599,99	0,14	1.112,80	0,15
5 *Bangunan/ Konstruksi*	45.629,97	7,46	51.454,16	7,57	54.492,20	7,29
6 *Perdagangan, Hotel dan Restoran*	91.546,92	15,33	103.930,73	15,29	113.865,68	15,23
Perdagangan Besar dan Eceran	83.067,03	13,91	94.210,59	13,86	103.697,77	13,87
Hotel	3.403,90	0,57	3.806,49	0,56	4.037,26	0,54
Restoran	5.075,99	0,85	5.913,65	0,87	6.130,65	0,82
7 *Pengangkutan dan Komunikasi*	65.961,35	11,05	80.526,96	11,85	91.677,47	12,26
Pengangkutan	63.752,69	10,68	78.216,48	11,51	88.387,25	11,82

Bersambung ...

... Lanjutan

Sektor/ Sub Sektor	2000	Kontribusi	2001	Kontribusi	2002	Kontribusi
- Angkutan jalan raya	11.043,30	1,85	14.270,60	2,10	18.843,98	2,52
- Angkutan air	51.217,05	8,58	62.247,00	9,16	67.898,16	9,08
- Angkutan udara	179,08	0,03	203,87	0,03	0,00	0,00
- Jasa penunjang angkutan	1.253,56	0,21	1.495,01	0,22	1.495,55	0,20
Komunikasi	2.208,66	0,37	2.310,48	0,34	3.290,22	0,44
8 *Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan*	15.863,14	2,66	18.134,58	2,67	22.947,21	3,07
Bank	3.637,79	0,61	4.618,55	0,68	5.531,25	0,74
Lembaga keuangan bukan bank & jasa penunjang keuangan	2.385,43	0,40	2.513,03	0,37	4.185,81	0,56
Sewa bangunan	9.839,92	1,65	11.003,00	1,62	13.230,15	1,77
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 *Jasa - Jasa*	57.499,80	9,63	66.372,64	9,76	78.154,81	10,45
Pemerintahan Umum	47.767,23	8,00	54.675,82	8,04	64.244,00	8,59
Swasta	9.732,57	1,63	11.696,82	1,72	13.910,81	1,86
- Sosial Kemasyarakatan	3.164,58	0,53	3.672,26	0,54	4.487,36	0,60
- Hiburan dan Rekreasi	119,42	0,02	136,01	0,02	224,37	0,03
- Perorangan dan Rumah Tangga	6.448,57	1,08	7.888,55	1,16	9.199,08	1,23
TOTAL	**597.172,44**	**100,00**	**679.758,20**	**100,00**	**747.765,23**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan

Tabel III.4 memperlihatkan 5 sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar, yaitu sub sektor kehutanan (19,71 %), sub sektor perdagangan besar dan eceran (13,87 %), sub sektor pengangkutan (11,82 %), sub sektor perikanan (9,72 %) dan sub sektor perkebunan (8,84 %). Walaupun memberikan kontribusi terbesar, sub sektor kehutanan terus mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Subsektor perdagangan besar dan eceran relatif fluktuatif, sementara subsektor pengangkutan dan perikanan menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Dengan demikian secara umum peranan sektor pertanian adalah sangat dominan bagi Kabupaten Barito Selatan di masa mendatang, terutama sub sektor kehutanan dan perikanan.

3.1.3.3 Pendapatan Regional Per Kapita

Pendapatan regional per kapita atas dasar harga berlaku selama tahun 1994 sampai tahun 2002 selalu mengalami kenaikan. Selama kurun waktu tersebut, kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 1998 sebesar 49,10 %. Tahun 2002 terjadi kenaikan pendapatan regional per kapita sebesar 9,79 %, yaitu dari 5,79 juta rupiah pada tahun 2001 menjadi 6,42 juta rupiah pada tahun 2002.

Pendapatan regional per kapita atas dasar harga konstan 1993 dari tahun 1994 sampai 2002 juga selalu menunjukkan adanya kenaikan. Kenaikan terbesar terjadi tahun 1995 sebesar 13,93 %. Tahun 1998 terjadi penurunan sebesar 5,37 % dan tahun 2002 naik kembali menjadi 2,52 % (Barito Selatan dalam Angka 2002).

3.1.3.4 Posisi Struktur Ekonomi Kabupaten Barito Selatan Secara Regional

Berdasarkan data tahun 1999, dengan total PDRB atas dasar harga konstan 1993 sebesar Rp. 389.595 juta menempatkan Barito Selatan pada urutan ke-4 seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah sebelum pemekaran. Sedangkan PDRB

per kapita sebesar Rp. 2.328.724, - juga berada di posisi ke-4 setelah Barito Utara, Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur.

Untuk pendapatan per kapita, Barito Selatan berada pada urutan ke-3 setelah Kotawaringin Barat dan KotawaringinTimur dengan laju pertumbuhan 0,97 persen di bawah Kabupaten Kotawaringin Barat. Selengkapnya lihat Tabel III.5.

TABEL III.5
PDRB KABUPATEN BARITO SELATAN DAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2000
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993

No	Kab. / Kota	PDRB (Juta Rp)	Distribusi (%)	PDRB Per Kapita (Rp)	Pendapatan Per Kapita (Rp)
1	Kotawaringin Barat	1.866.224,06	18,47	3.159.480	2.946.246
2	Kotawaringin Timur	2.869.372,38	28,41	5.590.529	5.224.405
3	Kapuas	2.140.340,16	21,19	3.983.510	2.989.336
4	Barito Selatan	969.755,40	9,60	5.782.681	5.087.557
5	Barito Utara	1.449.482,25	14,34	9.121.978	9.062.508
6	Palangka Raya	807.975,29	7,99	4.393.558	4.105.824
Kalimantan Tengah		**10.103.149,54**	**100,00**	**5.338.623**	**4.902.646**

Sumber : REPETADA Barito Selatan 2002

3.1.4 Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Selatan di bidang ekonomi direpresentasikan dalam Pola Dasar (Poldas) dan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Barito Selatan 2001-2005 serta Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) 2002.

Pola Dasar Kabupaten Barito Selatan 2001-2005

Prioritas pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Barito Selatan untuk jangka pendek, yaitu untuk kurun waktu 1-2 tahun, adalah program-program untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama terjadinya krisis ekonomi. Seiring dengan

upaya pemulihan ekonomi, dilaksanakan program pembangunan ekonomi jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun. Program ini dimaksudkan untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan berdasar ekonomi kerakyatan.

Pembangunan sistem ekonomi kerakyatan terutama dilakukan melalui berbagai upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan, pembangunan ketenagakerjaan, pengembangan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi, pembangunan pertanian pangan dan agribisnis, pembangunan sarana dan prasarana perdesaan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Kabupaten Barito Selatan 2001-2005

Dalam Renstra Daerah secara umum terdapat 5 strategi berikut kebijakan pembangunan, yaitu : (1) Strategi Peningkatan Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat (2) Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat (3) Strategi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (4) Strategi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah (5) Strategi Pengembangan Wilayah.

Strategi pembangunan ekonomi yang erat kaitannya dengan penelitian ini adalah :

1. Strategi peningkatan ekonomi masyarakat
2. Strategi pengembangan wilayah, yang bertumpu pada strategi kebijakan : (a) Membagi wilayah Kabupaten Barito Selatan ke dalam 4 SWP (b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dengan beorientasi pada fungsi tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup (c) Mengembangkan secara sinergis beberapa keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif masing-masing wilayah pengembangan.

Dari strategi daerah tersebut, yang menjadi program prioritas daerah Kabupaten Barito Selatan adalah : (1) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (2) Peningkatan Ekonomi Rakyat (3) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

(4) Peningkatan Prasarana dan Sarana Ekonomi (5) Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Alam.

Adapun Program Peningkatan Ekonomi Rakyat mencakup upaya-upaya mengembangkan potensi pertanian dan industri, yaitu : (1) Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi tanaman pangan (2) Intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi perkebunan (3) Pendayagunaan fungsi hutan (4) Kantong produksi ternak (5) Budidaya dan penangkapan ikan (6) Penataan pertambangan rakyat (7) Sentra perindustrian, yaitu industri kerajinan dan pengolahan hasil pertanian dalam arti luas.

Sedangkan Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Ekonomi mencakup upaya-upaya :

a. Mempercepat pemerataan kegiatan pembangunan dengan membagi wilayah Kabupaten Barito Selatan secara spasial ke dalam 4 Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)
b. Peningkatan Prasarana dan Sarana Ekonomi
c. Peningkatan Kerjasama Regional.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 2002

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Barito Selatan tahun 2002 secara spesifik membahas mengenai 9 bidang pembangunan. Kesembilan bidang tersebut dijabarkan ke dalam sub bidang, yang berisikan tentang : (1) tantangan, kendala, peluang (2) tujuan dan sasaran (3) kebijaksanaan dan langkah-langkah (4) program dan proyek. Kemudian dari proyek tersebut direncanakan besaran dana proyek dan sumber dananya.

Dalam Repetada 2002 yang disusun sebelum pemekaran, bidang ekonomi diturunkan ke dalam 12 sub bidang pembangunan, 27 program dan 53 proyek. Adapun sumber dana sebagian besar direncanakan dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana Daerah Lainnya (DDL), serta sebagian kecil dari DAK dan sumber lainnya.

3.2. Struktur Ruang Kabupaten Barito Selatan

Untuk melihat struktur ruang Barito Selatan berarti meninjau kembali struktur ruang sebelum pemekaran tahun 2002, karena kebijakan struktur ruang dalam RTRWP Kalimantan Tengah dan RTRWK Barito Selatan tersebut belum direvisi. Kemudian juga meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya struktur ruang, yaitu pola pemanfaatan ruang, sebaran fasilitas dan jaringan transportasi.

3.2.1 Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Paduserasi RTRW Kalimantan Tengah tahun 1999, dalam hirarki sistem kota yang ada Kota Buntok sebagai ibukota Kabupaten Barito Selatan merupakan kota orde II yang mempunyai skala pelayanan sub-regional. Termasuk kota orde II adalah Kota Pangkalan Bun, Muara Teweh, Ampah dan Pulang Pisau.

Perwilayahan pembangunan Kalimantan Tengah ditunjukkan pada Tabel III.6.

TABEL III.6
PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Wilayah Pembangunan	Pusat Pengembangan	Sub Pusat Pengembangan
1	WP Timur • Kab. Barito Selatan • Kab. Barito Utara	Buntok	⊥ Tamiang Layang ⊥ Ampah ⊥ Jenamas ⊥ Muara Teweh ⊥ Puruk Cahu
2	WP Tengah • Kab. Kapuas • Kota Palangka Raya • Wilayah Katingan	Palangka Raya	⊥ Kuala Kapuas ⊥ Pulang Pisau ⊥ Kasongan ⊥ Tumbang Samba ⊥ Kuala Kurun ⊥ Tewah ⊥ Pegatan
3	WP Selatan • Kab. Kotawaringin Timur • DAS Seruyan dan Mentaya	Sampit	⊥ Samuda ⊥ Kuala Pembuang ⊥ Parenggean ⊥ Kota Besi
4	WP Barat • Kab. Kotawaringin Barat • DAS Jelai, Arut, Lamandau dan Kumai	Pangkalan Bun	⊥ Kumai ⊥ Sukamara ⊥ Nanga Bulik

Sumber : POLDAS Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, Kota Buntok mempunyai kedudukan cukup strategis karena menjadi pusat pengembangan WP Bagian Timur yang merupakan wilayah DAS Barito. Sedangkan tiga kota kecamatan yang terdiri dari Ampah, Tamiang Layang dan Rantau Kujang ditetapkan sebagai Sub-Pusat Pengembangan. Struktur ruang Kalimantan Tengah ini ditunjukkan dalam Gambar 3.2.

3.2.2 Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan

Dalam Padu Serasi RTRW Kabupaten Barito Selatan tahun 1999 sebelum terjadinya pemekaran, kebijaksanaan perwilayahan membagi wilayah administrasi yang terdiri dari 12 kecamatan ke dalam 4 Wilayah Pembangunan, yaitu:

1. Wilayah Pembangunan Barat dengan pusat pertumbuhan Kota Buntok
2. Wilayah Pembangunan Tengah dengan pusat pertumbuhan Kota Ampah
3. Wilayah Pembangunan Timur dengan pusat pertumbuhan Kota Tamiang Layang
4. Wilayah Pembangunan Selatan dengan pusat pertumbuhan Kota Rantau Kujang.

Selengkapnya perwilayahan pembangunan ditunjukkan dalam Tabel III.7.

TABEL III.7
PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARITO SELATAN

No	Wilayah Pembangunan	Pusat Pengembangan	Sub Pusat Pengembangan
1	WP Timur	Tamiang Layang	⊥ Kecamatan Dusun Timur* ⊥ Kecamatan Banua Lima* ⊥ Kecamatan Petangkep Tutui* ⊥ Kecamatan Awang*
2	WP Tengah	Ampah	⊥ Kecamatan Dusun Tengah* ⊥ Kecamatan Pematang Karau*
3	WP Barat	Buntok	⊥ Kecamatan Dusun Utara ⊥ Kecamatan Gng.Bintang Awai ⊥ Kecamatan Dusun Selatan
4	WP Selatan	Rantau Kujang	⊥ Kecamatan Jenamas ⊥ Kecamatan Dusun Hilir ⊥ Kecamatan Karau Kuala

Sumber : Revisi RTRW Barito Selatan tahun 1998
**Kecamatan yang masuk wilayah administratif Kabupaten Barito Timur berdasar UU No. 5 Tahun 2002*

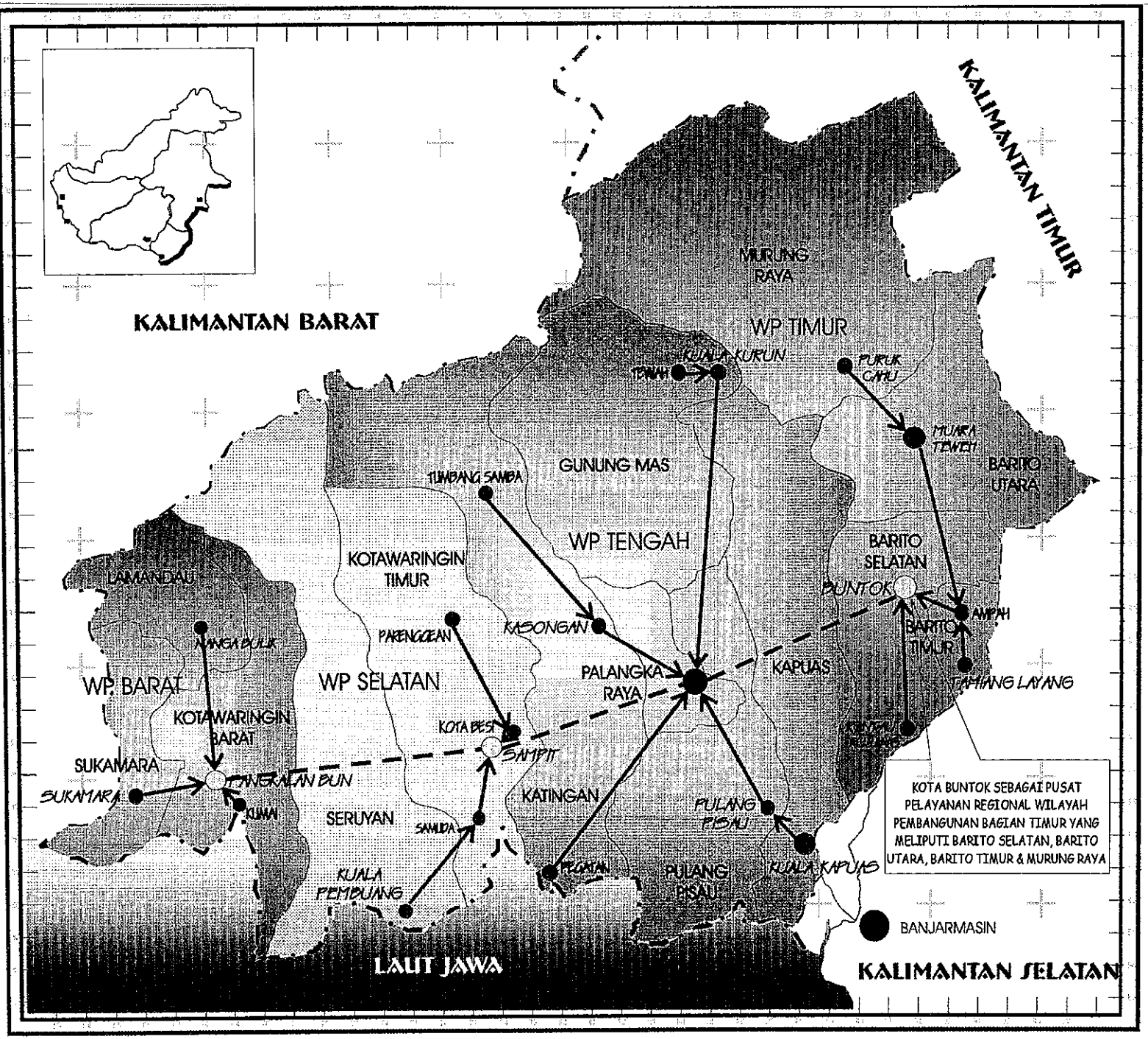

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

LEGENDA :

- Garis Pantai
- Batas Kabupaten
- Batas Propinsi
- Kota Orde I — Pusat Pelayanan Regional
- Kota Orde II — Pusat Pelayanan Regional
- Kota Orde II — Sub-Pusat Pelayanan Regional
- Kota Orde III — Pusat Pelayanan Lokal
- Garis Hubung Pusat Pelayanan
- Garis Hubung Pusat Pelayanan-Wilayah Pengaruh

INSERT

SUMBER : RTRW PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PETA STRUKTUR RUANG KALIMANTAN TENGAH

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
3.2	85	1 : 2.750.000	

Keempat Wilayah Pembangunan tersebut membagi Barito Selatan berdasarkan kondisi geografis. Wilayah daerah aliran sungai adalah WP Selatan dan Barat, ditambah Kecamatan Gunung Bintang Awai. Wilayah daratan adalah WP Tengah dan Timur yang berada pada bentang transportasi darat.

WP Barat adalah WP terbesar yang mencakup 39,15 % luas wilayah Barito Selatan atau 3,23 % luas Kalimantan Tengah, sedangkan jumlah penduduknya 39,02 % dari total penduduk Barito Selatan atau 3,88 % total penduduk Kalimantan Tengah. WP Tengah adalah yang terkecil dari segi luasan, tetapi jumlah penduduknya terbesar kedua setelah WP Barat, yaitu 23,34 % dari penduduk Barito Selatan dan 2,32 % dari penduduk Kalimantan Tengah (Tabel III.8).

TABEL III.8
ADMINISTRASI DAN KEPENDUDUKAN MENURUT WILAYAH PENGEMBANGAN TAHUN 2001

WP	Luas (km2)	Administrasi dan Kependudukan				Distribusi (%)	Kepa-datan	Pertmb. (%)
		Kec.	Desa	Rumah Tangga	Penduduk (jiwa)			
WP Barat	4.958	3	54	17.664	70.750	39	14,27	1,26
WP Tengah	1.586	2	29	10.552	42.317	23	26,68	1,18
WP Timur	2.248	4	39	8.145	30.948	17	13,77	2,53
WP Selatan	3.278	3	24	10.761	40.795	21	12,45	1,91
Bar-Sel	12.664	12	146	46.464	181.330	100	14,32	0,32
Kal-Teng	153.564	85	1.328	475.631	1.823.355	9,94	11,87	1,21

Sumber : REPETADA Barito Selatan 2003, data tahun 2001 sebelum pemekaran

Dari pembagian struktur ruang Barito Selatan di atas, terlihat bahwa pemekaran daerah yang terjadi kemudian terbagi sesuai dengan keempat Wilayah Pembangunan, di mana WP Barat dan Timur sebagai wilayah DAS Barito masuk wilayah administratif Kabupaten Barito Selatan, sedangkan WP Tengah dan Timur sebagai wilayah daratan masuk wilayah administratif Kabupaten Barito Timur.

Secara spasial struktur ruang Barito Selatan sebelum pemekaran ditunjukkan dalam Gambar 3.3.

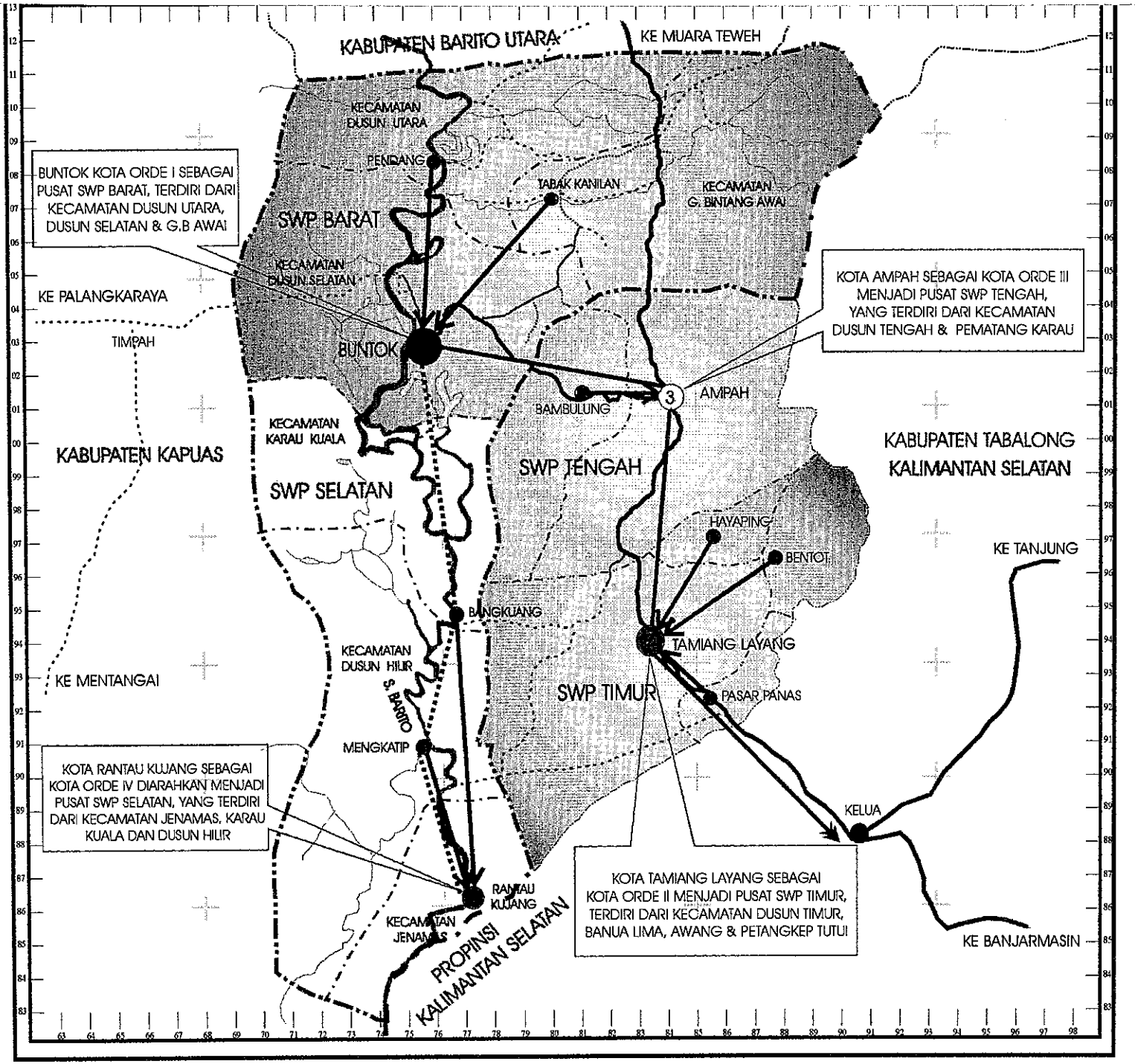

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

LEGENDA

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- KOTA ORDE I — PUSAT PELAYANAN REGIONAL
- KOTA ORDE II — SUB PUSAT PELAYANAN REGIONAL
- KOTA ORDE III — SUB PUSAT PELAYANAN REGIONAL
- KOTA ORDE IV — PUSAT PELAYANAN LOKAL
- JALAN NASIONAL
- JALAN PROVINSI
- JALAN ASPAL
- JALAN BATU
- JALAN TANAH
- DANAU
- SUNGAI
- JALUR DARAT
- JALUR SUNGAI

INSERT

SUMBER :
RTRW KAB. BARITO SELATAN

PETA STRUKTUR RUANG BARITO SELATAN

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
3.3	87	1 : 750.000	

3.2.3 Sistem Hirarki Kota Sebelum Pemekaran

Untuk menggambarkan kondisi struktur ruang, perlu dijelaskan sistem hirarki kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai arahan makro dan di Kabupaten Barito Selatan sebagai arahan mikro, yang disusun dalam konstelasi wilayah sebelum adanya pemekaran.

Menurut RTRWP Kalimantan Tengah, kota-kota dibagi menjadi 3 orde, yaitu :

1. Orde I untuk kota menengah dengan jumlah penduduk 100.000 – 500.000 jiwa
2. Orde II untuk kota kecil A, kota kecil, dan kota desa besar
3. Orde III untuk kota desa dan bukan kota.

Dalam konteks Barito Selatan terhadap Kalimantan Tengah, orde tertinggi adalah orde II Kota Desa Besar, yaitu Kota Buntok sebagai pusat pemerintahan. Sedangkan Kota Ampah dan Kota Tamiang Layang masuk dalam kategori orde III (kota desa). Ibukota kecamatan lainnya masuk ke dalam kategori bukan kota (desa). Hal tersebut dijelaskan dalam Tabel III.9.

TABEL III.9
HIRARKI KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hirarki Kota	Ukuran Kota (Jiwa Penduduk)	Skala Pelayanan	Nama Kota
Orde I	Kota Menengah 100.001 – 500.000	Regional	Palangka Raya
Orde II	Kota Kecil A 50.001 – 100.000	Sub Regional	Sampit
	Kota Kecil B 25.001 – 50.000	Sub Regional	↓ Kuala Kapuas ↓ Pangkalan Bun
	Kota Desa Besar 10.001 – 25.000	Sub Regional	↓ Buntok ↓ Muara Teweh
Orde III	Kota Desa 5.001 – 10.000	Lokal	↓ Ampah ↓ Samuda ↓ Kumai ↓ Pagatan ↓ Tangkiling ↓ Lupak dalam ↓ Serapat Barat ↓ Palingkau ↓ Mandomai

Bersambung ...

... Lanjutan

Hirarki Kota	Ukuran Kota (Jiwa Penduduk)	Skala Pelayanan	Nama Kota
			↓ Pulang Pisau ↓ Tamiang Layang ↓ Puruk Cahu ↓ Kasongan ↓ Tumbang Samba ↓ Parenggean ↓ Nanga Bulik ↓ Sukamara
	Bukan Kota (Desa) < 5.000	Lokal	Kota Kecamatan selain di atas

Sumber : Paduserasi RTRWP Kalimantan Tengah 1999

Data di atas menunjukkan jauhnya hirarki kota antara Buntok (orde II) dengan kota kecamatan lainnya. Kota Ampah dan Tamiang Layang yang sekarang masuk wilayah Barito Timur digolongkan ke dalam orde III, tetapi Kota Rantau Kujang sebagai sub-pusat WP Timur masih masuk kategori orde IV.

Kota yang dimaksud dalam sistem hirarki kota-kota dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan sebelum pemekaran ada dua jenis, yaitu ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan. Semuanya meliputi 12 belas kota, yaitu Kota Buntok, Ampah, Pendang, Bangkuang, Mengkatip, Rantau Kujang, Tabak Kanilan, Bambulung, Tamiang Layang, Hayaping, Buntok, serta Pasar Panas.

Berdasarkan evaluasi kebijaksanaan pengembangan orde kota dalam Revisi RTRW Kabupaten Barito Selatan Tahun 1998, diidentifikasi adanya 4 hirarki, yaitu :

1. Orde Kota I adalah Kota Buntok, mempunyai skala pelayanan regional
2. Orde Kota II adalah Kota Tamiang Layang, mempunyai skala pelayanan sub regional
3. Orde Kota III adalah Kota Ampah, mempunyai skala pelayanan sub regional
4. Orde Kota IV adalah kota kecamatan lainnya, mempunyai skala pelayanan lokal.

Selengkapnya sistem hirarki kota ditunjukkan dalam Tabel III.10.

TABEL III.10
ORDE DAN RANKING KOTA KABUPATEN BARITO SELATAN SEBELUM PEMEKARAN

Ibukota	Orde Kota Berdasarkan Kebijaksanaan Pengemb. Kota		Ranking Berdasarkan Kebijaksanaan Pengemb. Kota	Ranking Berdasarkan Jumlah Penduduk	Ranking Berdasarkan Kelengkapan Fasilitas	Ranking Berdasarkan Tingkat Aksesibilitas
	Provinsi	Kabupaten				
Rantau Kujang	IV	IV	4	9	11	9
Mengkatip	IV	IV	11	6	6	11
Bangkuang	IV	IV	10	7	8	10
Buntok	II	I	1	1	1	1
Pendang	IV	IV	12	5	4	12
Tabak Kanilan	IV	IV	6	3	5	6
Hayaping	IV	IV	8	11	9	7
Pasar Panas	IV	IV	7	12	10	4
Ampah	III	III	2	2	3	2
Tamiang Layang	III	II	3	4	2	3
Bambulung	IV	IV	5	8	7	5
Bentot	IV	IV	9	10	12	8

Sumber : Revisi RTRW Barito Selatan Tahun 1998, diolah

3.2.4 Pola Pemanfaatan Ruang

Pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Barito Selatan pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

1. Penggunaan tanah menetap terdiri dari permukiman, perkebunan, sawah dan kebun campuran
2. Penggunaan tanah tidak menetap, yaitu perladangan, semak dan alang-alang serta hutan belukar
3. Tanah yang belum diusahakan, yaitu hutan, sungai dan danau

Sebagai wilayah yang jumlah penduduknya masih sedikit, Kabupaten Barito Selatan memperlihatkan pola pemanfaatan ruang yang belum bervariasi. Hal itu juga ditunjukkan dengan masih disatukannya permukiman dengan kebun karet dan rotan. Selain itu luas tanah yang belum diusahakan yaitu hutan, danau dan rawa adalah yang terbesar, yaitu 51,24 %. Perkampungan menyebar secara linear di sepanjang sungai, dengan luas kampung sebesar 4.128 ha (0,65 %). Di sekitar kampung dan permukiman dijumpai ladang, kebun serta kebun campuran.

Selengkapnya pemanfaatan ruang Barito Selatan ditunjukkan dalam Tabel III.11 dan Gambar 3.4.

TABEL III.11
PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN

No	Jenis Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Perkampungan	4.128	0,65
2	Sawah	3.614	0,57
3	Ladang/ Tegalan	1.839	0,29
4	Perkebunan	72.875	11,49
5	Kebun Campuran	3.625	0,57
6	Semak Ilalang	18.825	2,97
7	Hutan belukar	204.269	32,21
8	Hutan	306.474	48,33
9	Danau/ Sungai	18.450	2,91

Sumber : Revisi RTRW Barito Selatan 1998

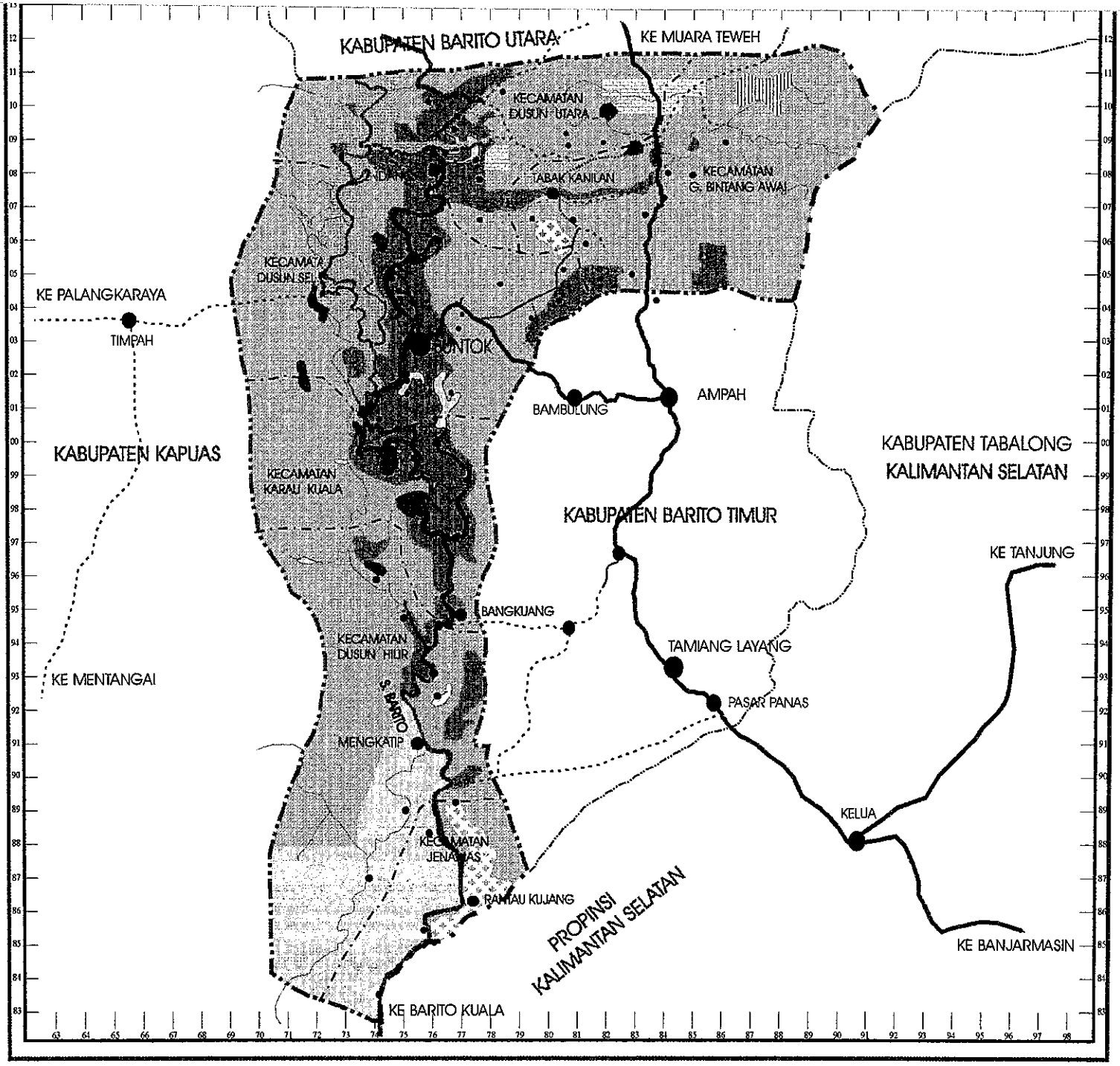

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN
PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

LEGENDA

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- IBUKOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KECAMATAN
- HUTAN
- KEBUN KARET-ROTAN PERMUKIMAN
- EKS LAHAN PLG
- KEBUN CAMPURAN
- SAWAH
- BELUKAR
- RUMPUT - SEMAK
- HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)
- TRANSMIGRASI

INSERT

SUMBER :
BAPPEDA KAB. BARITO SELATAN

PETA PEMANFAATAN RUANG

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
3.4	92	1 : 750.000	

3.2.5 Sebaran Fasilitas di Ibukota Kecamatan

Untuk menentukan sistem hirarki kota Kabupaten Barito Selatan pascapemekaran, diperlukan ketersediaan data terhadap sebaran fasilitas yang meliputi fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan yang direpresentasikan di ibukota kecamatan.

3.2.5.1 Fasilitas Ekonomi

Di seluruh ibukota kecamatan telah terdapat fasilitas pasar kecamatan dengan kelengkapan yang berbeda. Kota Buntok memiliki pasar kecamatan paling lengkap, terdiri atas 249 buah toko, 12 ruko dan 215 kios/ warung. Kota Rantau Kujang memiliki 8 buah toko dan 13 buah kios. Kota Pendang hanya memiliki 35 buah los di pasar kecamatan, dan tidak memiliki baik toko maupun kios.

Untuk penginapan, di wilayah Barito Selatan terdapat *non-classify hotel* (hotel melati). Di Buntok terdapat 17 hotel, 13 hotel melati II dan 4 hotel melati I. Sedangkan ibukota kecamatan lain kecuali Pendang dan Tabak Kanilan memiliki hotel melati kelas II Sedangkan untuk fasilitas restoran/ rumah makan, sepenuhnya berada di Kota Buntok dengan jumlah 39 buah rumah makan.

Jumlah perusahaan industri kecil yang ada di seluruh ibukota kecamatan adalah 57 buah, yang mampu menyerap 1.047 orang di tahun 2002. Dari ke-57 perusahaan tersebut, terbanyak ada di Rantau Kujang dengan 28 buah perusahaan sedang di Pendang tidak terdapat satupun perusahaan industri kecil.

Jumlah perusahaan yang terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan sebanyak 1 Perseroan Terbatas (PT), 22 koperasi, 21 perusahaan berbentuk CV dan 33 perusahaan berbentuk perorangan, sebagian besar terdapat di Kota Buntok. Sedangkan usaha koperasi tersebar merata di seluruh ibukota kecamatan.

Fasilitas PLN dan PDAM terdapat di semua ibukota kecamatan, sedangkan jaringan telepon hanya terlayani di Kota Buntok, termasuk fasilitas telepon seluler. Demikian juga fasilitas bank hanya ada di Kota Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, yaitu Cabang BRI, Cabang Pembantu BNI dan BPD.

Fasilitas dermaga terdapat di semua ibu kota kecamatan, kecuali Tabak Kanilan yang tidak berada di tepi Sungai Barito. Kota Buntok memiliki 3 buah dermaga kapal dan barang, baik sebagai dermaga utama maupun alternatif. Untuk fasilitas terminal, hanya Buntok yang memiliki terminal dalam dan luar kota. Sedangkan Tabak Kanilan yang terhubungkan jalur darat tidak memiliki terminal penumpang. Selain hal itu, Kota Buntok juga memiliki fasilitas penunjang berupa SPBU.

Dengan demikian untuk fasilitas ekonomi dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara Buntok dengan kota kecamatan lainnya. Hal ini disebabkan selain sebagai pusat pemerintahan, Buntok juga merupakan pusat aktivitas ekonomi Kabupaten Barito Selatan (lihat Gambar 3.5 dan Gambar 3.6).

3.2.5.2 Fasilitas Sosial

Di wilayah kabupaten Barito Selatan setiap kecamatan memiliki fasilitas pendidikan sampai ke tingkat SMU, kecuali Kota Rantau Kujang (Jenamas) yang tidak memiliki fasilitas pendidikan SMU. Untuk tingkat Taman Kanak-kanak (TK), terdapat 16 TK yang tersebar di 6 ibukota kecamatan. Di tingkat Sekolah Dasar (SD) terdapat 36 buah SD, terbanyak berada di Kota Buntok dengan 19 buah SD.

Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di ibukota kecamatan seluruhnya adalah 12 buah SMP dengan jumlah cukup merata, terbanyak di Kecamatan Dusun Selatan dengan 5 sekolah. Sementara pada tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU), terdapat 12 buah, 5 di antaranya berada di Kota Buntok sedangkan Rantau Kujang belum memiliki fasilitas ini. Kota Buntok juga memiliki fasilitas pendidikan sampai tingkat

GAMBAR 3.5 FASILITAS EKONOMI DI IBUKOTA KECAMATAN

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2004

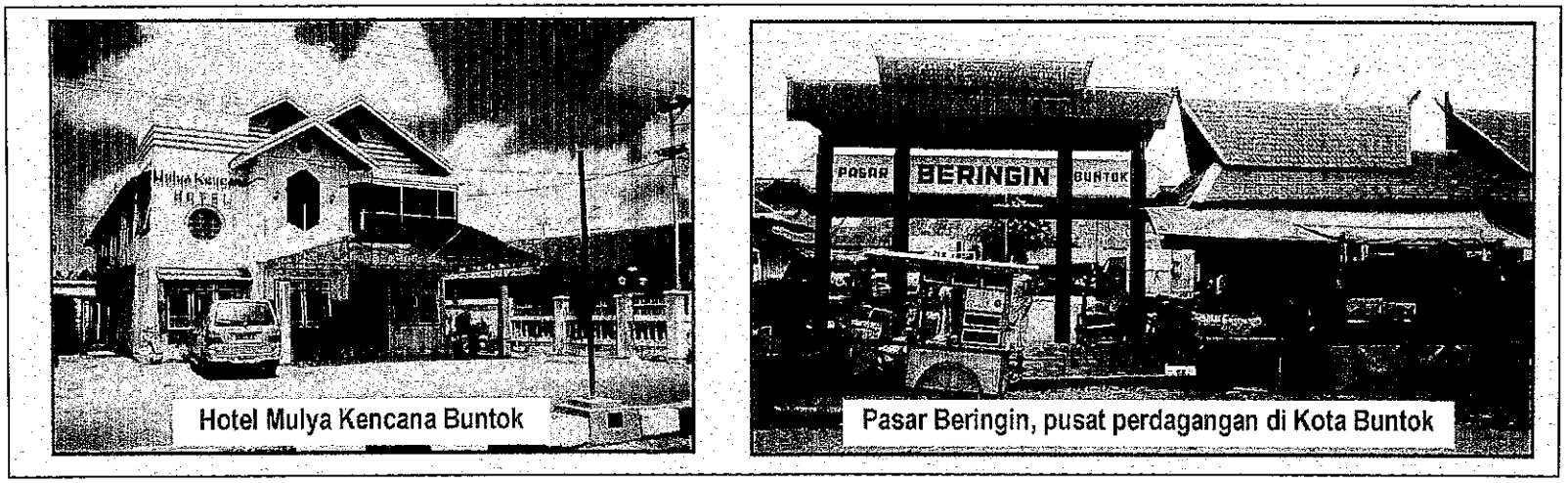

GAMBAR 3.6 FASILITAS EKONOMI DI KOTA BUNTOK

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2004

Perguruan Tinggi sebanyak 4 PTS dengan jumlah mahasiswa 543 orang pada tahun 2002.

Dalam hal agama dan kepercayaan, Kabupaten Barito Selatan relatif heterogen. Di seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan tercatat 78 mesjid dan 109 langgar bagi pemeluk agama Islam, sebagian besar terdapat di Kecamatan Dusun Selatan dengan 22 mesjid dan 30 langgar. Bagi pemeluk agama Kristen Protestan, terdapat 71 buah gereja dan 10 rumah pastori, terbanyak di Kecamatan Dusun Selatan dengan 24 gereja dan 5 rumah pastori. Pemeluk agama Kristen Katholik di seluruh wilayah beribadah di 2 gereja induk yang berada di Buntok dan Tabak Kanilan, serta 19 gereja pembantu. Sedangkan bagi pemeluk agama Hindu terdapat 30 pura/ Balai Kaharingan yang tersebar di 5 kecamatan.

Di bidang kesehatan, hanya ada satu rumah sakit umum, yaitu Rumah Sakit Umum Buntok yang berada di Kota Buntok (Kecamatan Dusun Selatan) dengan 50 kapasitas tempat rawat inap. Di seluruh kecamatan sudah tersebar 10 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 52 Puskesmas Pembantu. Sedangkan di ibukota kecamatan sudah dilengkapi masing-masing satu puskesmas kecamatan. Jumlah dokter umum yang melayani masyarakat sebanyak 19 orang, tersebar di 5 ibukota kecamatan selain Pendang, Kecamatan Dusun Utara (Barito Selatan dalam Angka, 2002).

Untuk fasilitas penunjang lainnya, yaitu gedung olah raga, semua ibukota kecamatan telah memiliki terkecuali Kota Tabak Kanilan. Sedangkan fasilitas lain seperti perpustakaan, apotek dan balai latihan kerja hanya dimiliki Kota Buntok.

Seperti halnya fasilitas ekonomi, fasilitas sosial juga menunjukkan posisi sentral yang dimiliki Kota Buntok. Walaupun demikian untuk kegiatan ibadah dan kesehatan, setiap ibukota kecamatan rata-rata telah mempunyai fasilitas yang layak. Dalam bidang pendidikan, rata-rata setiap ibukota kecamatan telah terlayani sampai jenjang pendidikan

menengah (SMU), kecuali Rantau Kujang. Fasilitas penunjang lain yang dimiliki ibukota kecamatan di luar Buntok masih tergolong kurang.

Keberadaan fasilitas sosial ini ditunjukkan dalam Gambar 3.7

3.2.5.3 Fasilitas Pemerintahan

Untuk fasilitas pemerintahan, kecuali Kota Buntok sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Barito Selatan, semua ibu kota kecamatan memiliki fasilitas dalam kondisi yang hampir seragam. Untuk kantor pos dan giro, hanya Kota Tabak Kanilan yang tidak memiliki fasilitas karena justru berada di Desa Patas I. Kota Buntok sendiri memiliki semua fasilitas utama dan fasilitas penunjang seperti stasiun radio.

Keberadaan fasilitas pemerintahan ini ditunjukkan dalam Gambar 3.8

3.2.6 Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi yang melayani aktivitas penduduk Barito Selatan terbagi atas transportasi sungai dan transportasi darat.

3.2.6.1 Transportasi Sungai

Terdapat 5 dermaga yang berfungsi melayani penumpang angkutan sungai di Barito Selatan, yaitu Dermaga Buntok, Pendang, Bangkuang, Mengkatip dan Rantau Kujang. Masing-masing melayani arus penumpang dan barang inter dan inter wilayah Barito Selatan. Adapun jenis kendaraan air yang digunakan adalah bis air, *long boat*, *speed boat*, motor getek, tangkalasa, *tug boat*, truk air dan tongkang. Mobilitas jenis angkutan sungai tersebut dapat dilihat pada Tabel III.12.

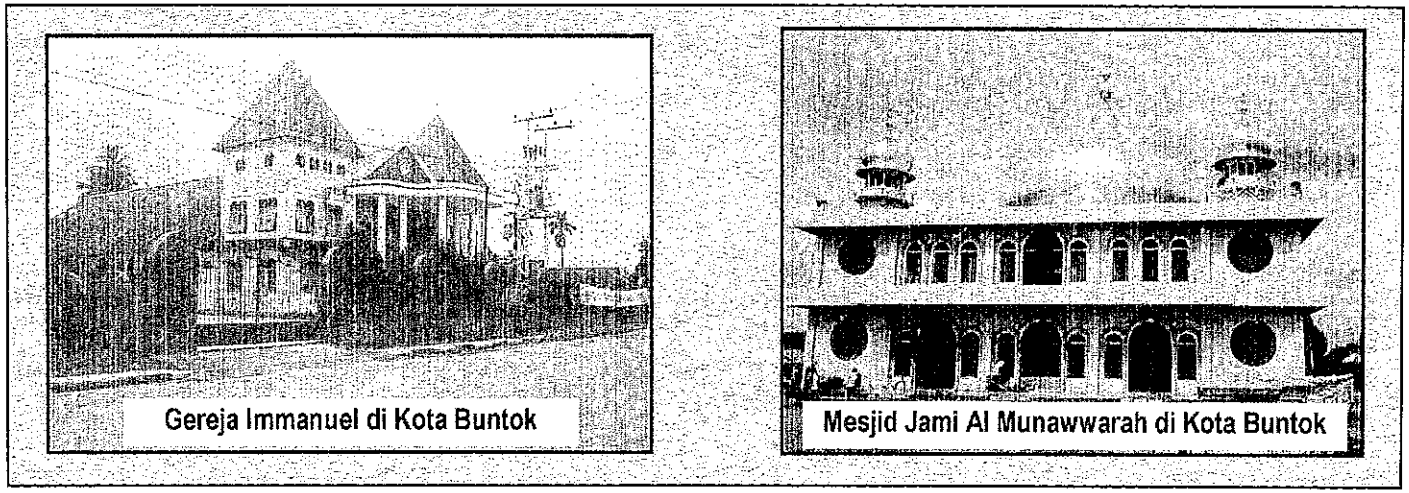

GAMBAR 3.7 FASILITAS SOSIAL IBUKOTA KECAMATAN

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2004

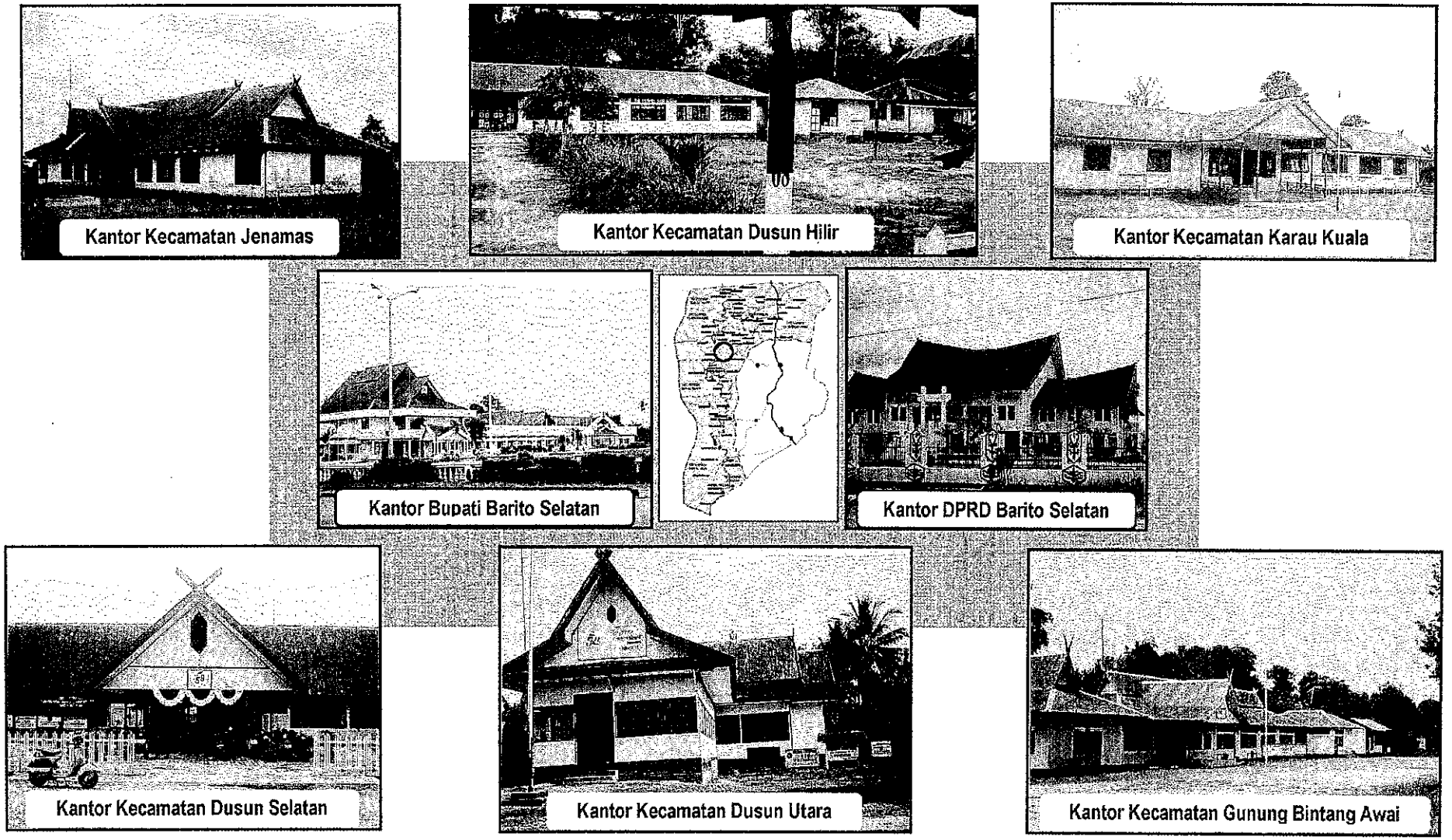

GAMBAR 3.8 FASILITAS PEMERINTAHAN

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2004

TABEL III.12
ARUS ANGKUTAN SUNGAI KELUAR-MASUK DERMAGA TAHUN 2002

UPTD	Masuk								Total Masuk
	BA	LB	SB	MG	T	TB	TA	TK	
Pendang	86	315	162	234	461	197	515	101	2071
Buntok	180	447	768	324	1125	1275	408	139	4219
Bangkuang	138	0	881	98	555	188	489	75	2424
Mengkatip	137	0	1438	131	230	289	104	127	2456
Jenamas	120	0	1954	574	0	776	464	260	4148
Total	**661**	**762**	**5203**	**1361**	**2371**	**2725**	**1980**	**702**	**15318**

UPTD	Keluar								Total Keluar
	BA	LB	SB	MG	T	TB	TA	TK	
Pendang	77	429	65	197	439	125	366	84	1782
Buntok	184	449	792	328	1279	252	375	111	3770
Bangkuang	138	0	792	59	698	216	428	42	2373
Mengkatip	128	0	1446	335	102	336	150	100	2597
Jenamas	122	0	1937	568	0	853	475	288	4243
Total	**649**	**878**	**5032**	**1487**	**2518**	**1782**	**1794**	**625**	**12983**

Sumber : Dinas Perhubungan Barito Selatan 2002
Keterangan :
BA = Bis Air
LB = Long Boat
SB = Speed Boat
MG = Motor getek
T = Tangkalasa
TB = Tug boat
TA = Truk air
TK = Tongkang

Dari tabel III.12 di atas, terlihat bahwa angkutan sungai yang masuk paling tinggi berada di Dermaga Buntok, sedangkan angkutan sungai keluar yang paling tinggi intensitasnya berasal dari Dermaga Rantau Kujang. Adapun jenis angkutan sungai yang paling tinggi mobilitasnya adalah jenis angkutan penumpang *speedboat*, yaitu masuk sebesar 33,97 % dan keluar sebesar 38,76 %. Angkutan ini memang dikenal paling praktis dan akrab dengan penumpang yang menggunakan sarana transportasi Sungai Barito.

Jika dirinci angkutan khusus penumpang, maka yang biasa digunakan adalah jenis bis air yang biasanya lintas kabupaten dan provinsi, *long boat* dan *speedboat* yang bisa melayani semua trayek, motor getek dan tangkalasa dengan kapasitas terbatas serta truk air yang juga membawa barang. Hal tersebut ditunjukkan dalam Tabel III.13.

UPT-PUSTAK-UNDIP

TABEL III.13
ARUS PENUMPANG KELUAR-MASUK DERMAGA TAHUN 2002

UPTD	Masuk						Total Masuk
	BA	LB	SB	MG	T	TA	
Pendang	3150	14738	3806	2928	8157	5612	38391
Buntok	5559	17075	15344	2027	35196	2587	77788
Bangkuang	6411	0	4698	0	13559	416	23804
Mengkatip	5131	0	17617	1643	3256	0	27647
Jenamas	8232	0	20300	4538	0	409	33479
Total	**28483**	**31813**	**61765**	**11136**	**60168**	**9024**	**201109**
UPTD	Keluar						Total Keluar
	BA	LB	SB	MG	T	TA	
Pendang	4004	17129	231	102	11246	1344	34056
Buntok	8191	16095	17175	3487	35624	925	81497
Bangkuang	5835	0	23937	0	14538	380	44690
Mengkatip	5504	0	17225	4082	1022	0	27833
Jenamas	8137	0	21226	4746	0	102	34211
Total	**31671**	**33224**	**79794**	**12417**	**62430**	**2751**	**222287**

Sumber : Dinas Perhubungan Barito Selatan 2002

Dari tabel III.13 di atas, terlihat bahwa arus keluar dan masuk tertinggi berada di Dermaga Buntok sebagai ibukota Barito Selatan, di mana jenis angkutan yang paling banyak digunakan adalah jenis tangkalasa dan *speed boat*. Dermaga yang paling sedikit arus penumpangnya adalah Bangkuang (masuk) dan Mengkatip (keluar).

Adapun untuk arus barang, jenis angkutan yang digunakan adalah bis air, motor getek, truk air untuk bobot barang terbatas dan jenis *tug boat* serta tongkang untuk barang-barang tidak terbatas. Jenis barang yang dibawa masuk dan umumnya berasal dari Kalimantan Selatan adalah sembako, bahan bangunan, bahan bakar dan barang campuran. Sisanya yang tidak terlalu signifikan adalah hasil hutan dan ternak. Sembako (15,55 %) dan barang campuran (14,95 %) adalah jumlah terbesar untuk barang masuk. Sedangkan barang yang keluar yang merupakan produksi masyarakat terdiri dari hasil hutan dan barang campuran serta kayu, baik log maupun masak. Hal tersebut ditunjukkan Tabel III.14 dan III.15 berikut :

TABEL III.14
ARUS BARANG MASUK DERMAGA TAHUN 2002

UPTD	Masuk (ton)					
	Sembako	Hasil Hutan	Bahan Bang.	Bahan Bakar	Barang Campuran	Ternak
Pendang	18836	0	20150	18743	15225	0
Buntok	1036	0	0	9243	3025	35
Bangkuang	1469	38	200	20477	3848	0
Mengkatip	266	0	54	6316	1164	0
Jenamas	6469	0	2171	48098	3742	0
Total	**28076**	**38**	**22575**	**102877**	**27004**	**35**

Sumber : Dinas Perhubungan Barito Selatan tahun 2002

TABEL III.15
ARUS BARANG KELUAR DERMAGA TAHUN 2002

UPTD	Keluar				
	Sembako	Hasil Hutan	Barang Campuran	Kayu Log (M3)	Kayu masak (M3)
Pendang	161	5477	0	69856,55	
Buntok	31	2984	739	38808,28	
Bangkuang	0	165	356	427082,18	
Mengkatip	0	24	240	358225,74	
Jenamas	0	4062	3990	598056,24	10206920,50
Total	**192**	**12712**	**5325**	**1492028,99**	

Sumber : Dinas Perhubungan Barito Selatan tahun 2002

Dari tabel III.14 dan III.15 di atas, terlihat arus barang keluar maupun masuk sangat dominan terjadi di Dermaga Pendang, Kecamatan Dusun Utara. Sedangkan untuk kayu yang keluar, terbesar berada di Dermaga Rantau Kujang sebagai dermaga perbatasan dengan Kalimantan Selatan yang juga merupakan kecamatan pusat industri pengolahan kayu di Barito Selatan.

3.2.6.2 Transportasi Darat

Di bidang prasarana jalan, sampai akhir tahun 2002 panjang jalan di Kabupaten Barito Selatan mencapai 1.011,5 km dengan klasifikasi 121,6 km merupakan jalan

nasional, 182,9 km jalan provinsi dan 707 km jalan kabupaten. Kondisi permukaan jalan juga relatif tidak berubah di mana 378,2 km dalam kondisi baik, 257,6 km sedang, 195,5 km rusak serta 180,2 km dalam kondisi rusak berat. Jalan negara hanya melalui Kecamatan Dusun Selatan, sedang jalan provinsi melalui Kecamatan Dusun Selatan dan Gunung Bintang Awai.

Jenis angkutan yang melayani perjalanan darat di Kabupaten Barito Selatan terbagi atas 5 jenis, yaitu angkutan kota, angkutan perdesaan, angkutan antar kota dan antar provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan antar kabupaten.

1. Angkutan Dalam Kota.

Rute Buntok Kota-Terminal Sanggu, Buntok Kota-Kalahien dan Penda Asam serta Buntok Kota-Desa Baru adalah rute yang eksis pada saat ini. Rute Buntok-Sanggu dilayani 13 unit angkutan kota, sedangkan Buntok-Desa Baru 3 unit.

2. Angkutan Perdesaan

Terdapat 4 unit angkutan perdesaan yang beroperasi, melayani rute Buntok –Tabak Kanilan. Rute Buntok-Bangkuang belum terealisasi, karena kondisi jalan yang buruk. Sedangkan rute lainnya masuk Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Timur terhitung sejak tahun 2002.

3. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi

Terdapat 8 perusahaan otobus dan 24 buah armada bus yang melayani angkutan pada pagi dan siang hari. Selain itu, 4 perusahaan otobus juga melayani angkutan pada malam hari dengan total bus 6 unit. Kota tujuan adalah Kota Banjarmasin dan kota-kota lainnya pada rute Buntok-Banjarmasin.

4. Angkutan Perkotaan

Angkutan perkotaan melayani Trayek Buntok–Palangka Raya yang melalui Provinsi Kalimantan Selatan. Perusahaan angkutan yang melayani trayek perkotaan tersebut sebanyak 3 PO dan 6 unit bus pada pagi hari, sedangkan trayek untuk malam hari dilayani satu PO dengan 2 unit bus.

5. Angkutan Antar Kota Antar Kabupaten

Pascapemekaran, trayek Buntok-Ampah dan Buntok-Pasar Panas merupakan trayek lintas kabupaten yang perijinannya diproses oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Trayek yang ada adalah melalui rute Buntok-Ampah, Buntok-Pasar Panas serta Buntok-Kandui-Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara).

Aliran angkutan, manusia dan barang yang berlangsung pada tahun 2002 di wilayah Barito Selatan dapat dilihat pada Tabel III.16 dan Tabel III.17. Aliran kendaraan dan penumpang dilihat di Terminal Sanggu, sedang aliran barang dilihat dari jembatan timbang yang ada di Pasar Panas (Barito Timur), tetapi Terminal Pasar Panas tidak merinci asal angkutan barang yang melayani wilayah Barito Selatan dan Barito Timur.

TABEL III.16
JUMLAH KENDARAAN DAN PENUMPANG MENURUT TRAYEK DI TERMINAL SANGGU TAHUN 2002

Trayek Angkutan	Kendaraan		Penumpang	
	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk
Sanggu-Banjarmasin	1182	1862	131109	19740
Sanggu-Ampah	1570	1883	18748	10139
Sanggu- Pasar Panas	1706	1839	20332	12557
Sanggu-Kandui-Muara Teweh	751	971	8239	4446
Sanggu-Tabak Kanilan	1108	1023	11716	10759
Sanggu-Buntok Kota	26097	25932	349546	338035
Sanggu-Palangka Raya	160	163	2468	22560
Total	**32574**	**33673**	**542158**	**418236**

Sumber : Dinas Perhubungan Barito Selatan tahun 2002

TABEL III.17
ARUS BARANG YANG MASUK JEMBATAN TIMBANG
DI PASAR PANAS TAHUN 2001-2002

No	Jenis Angkutan	2001		2002	
		Jumlah Unit (Buah)	Jumlah Muatan (Ton)	Jumlah Unit (Buah)	Jumlah Muatan (Ton)
1	Pick Up	7622,00	57563,20	3932,00	27085,90
2	Truk Ringan	1922,00	26481,30	1968,00	10424,50
3	Truk Sedang	15085,00	396033,40	7555,00	177571,30
4	Truk Berat	27,00	149,40	61,00	402,60
	Total	**24656,00**	**480227,30**	**13516,00**	**215484,30**

Sumber : Dinas Perhubungan Barito Selatan tahun 2002

Untuk sementara transportasi jalan raya mempunyai jangkauan lebih terbatas dibanding angkutan sungai yang telah mengakses 5 ibukota kecamatan. Angkutan jalan raya baru menjangkau 2 wilayah kecamatan dari target 3 kecamatan.

BAB IV
ANALISIS STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Analisis struktur ruang sebagai arahan pengembangan ekonomi wilayah dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan metode kuantitatif. Pertama, melihat kembali peran empiris kebijakan struktur ruang dan ekonomi wilayah. Kedua, mengidentifikasi struktur ruang fisik. Ketiga, mengidentifikasi struktur ruang ekonomi. Keempat, melihat hubungan struktur ruang dari aspek interaksi wilayah yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial budaya. Kelima, mengkaji keterkaitan struktur ruang fisik, struktur ruang ekonomi, interaksi wilayah serta peran empiris kebijakan eksisting sebagai arahan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pengembangan ekonomi wilayah.

4.1 Analisis Peran Kebijakan Struktur Ruang dan Ekonomi Wilayah

Identifikasi kebijakan pembangunan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengetahui dan memahami kebijakan pembangunan yang berlaku atau pernah berlaku sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah (Riyadi dan Bratakusumah, 2003 : 82). Analisis ini dimaksudkan untuk melihat kembali *(review)* dan mengetahui peran kebijakan struktur ruang dalam pembangunan Barito Selatan, kemudian mengetahui sejauh mana peran kebijakan ekonomi serta keterkaitannya dengan struktur ruang

4.1.1 Analisis Peran Kebijakan Struktur Ruang

Kebijakan tentang struktur ruang yang ditetapkan dalam Revisi RTRW Kabupaten Barito Selatan tahun 1998 adalah membagi wilayah administratif ke dalam 4 Wilayah Pembangunan. Berkaitan dengan terjadinya perubahan konstelasi wilayah pascapemekaran daerah tahun 2002 maka terlihat diskrepansi sebagai berikut :

TABEL IV.1
DISKREPANSI STRUKTUR RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN

No	Wilayah Pembangunan	Pusat Pengembangan	Orde Kota	Sub Pusat Pengembangan	Diskrepansi Kebijakan
1	WP Timur	Tamiang Layang	Orde II	Dusun Timur Banua Lima Petangkep Tutui Awang	Wilayah masuk Barito Timur
2	WP Tengah	Ampah	Orde III	Pematang Karau Dusun Tengah	Wilayah masuk Barito Timur
3	WP Barat	Buntok	Orde I	Dusun Utara G.B. Awai Dusun Selatan	
4	WP Selatan	Rantau Kujang	Orde IV	Jenamas Dusun Hilir Karau Kuala	

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dalam Renstra Barito Selatan 2001-2005 yang disusun sebelum pemekaran, kebijakan struktur ruang telah dikaitkan dengan strategi pembangunan ekonomi. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Ekonomi menyebutkan sebagai berikut :

> "Mempercepat pemerataan kegiatan pembangunan dengan membagi wilayah Kabupaten Barito Selatan secara spasial ke dalam 4 Satuan Wilayah Pembangunan (SWP), yaitu : SWP Bagian Barat, Tengah, Timur, dan Selatan."

Berdasarkan kebijakan struktur ruang lama, penyesuaian-penyesuaian yang seharusnya berkembang berdasarkan dinamika wilayah adalah :

1. Wilayah administratif Barito Selatan sesuai kebijakan struktur ruang yang ada terdiri atas Wilayah Pembangunan Barat dan Wilayah Pembangunan Selatan.
2. Pascapemekaran terjadi kesenjangan sistem hirarki kota dengan pembagian fungsi ibukota kecamatan yang tidak simetris, di mana Buntok merupakan Kota Orde I sedangkan kota kecamatan lain semuanya merupakan Kota Orde IV.

Berkaitan dengan peran kebijakan struktur ruang, Edi Kristianto, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Barito Selatan, menyatakan, *"kebijakan struktur ruang* ***belum berperan*** *sebelum maupun setelah pemekaran, walaupun telah diangkat dari kondisi riil yang dihadapi."* (Edi Kristianto,wawancara langsung, 19 Desember 2003). Hal itu dikarenakan Revisi RTRW Kabupaten Barito Selatan tahun 1998 tidak disahkan menjadi Peraturan Daerah sehingga tidak mempunyai legitimasi, dan berarti struktur ruang Barito Selatan secara hukum justru masih bersandar pada RTRWK 1993. Akibat tidak adanya dasar hukum, kebijakan struktur ruang tidak mempunyai kekuatan yuridis untuk diimplementasikan.

Dalam kaitan dengan permasalahan tersebut di atas, Irawansyah selaku Ketua Komisi Pembangunan DPRD Barito Selatan mengemukakan bahwa pihak legislatif sudah menyadari *"pentingnya kebijakan tentang struktur ruang sebagai acuan pembangunan Barito Selatan. Tetapi legislatif bersifat menunggu usulan dari eksekutif, karena keterbatasan sumber daya."* (Irawansyah, wawancara langsung, 10 Januari 2004).

Setelah pemekaran, pihak eksekutif menyadari bahwa *"wilayah Barito Selatan memiliki tantangan lebih berat dan perlu penanganan spesifik berkaitan dengan keberadaan wilayah sepanjang DAS Barito. Oleh karenanya sedang disusun Revisi RTRWK baru yang melihat sistem hirarki kota sesuai keunggulan fasilitas yang dimilikinya."* (Edi Kristianto, wawancara langsung, 19 Desember 2003).

Rakodi (2003 : 209-221) dalam konteks rencana tata ruang secara umum mengemukakan bahwa kegagalan kebijakan ruang disebabkan karena tidak memperhatikan ketersediaan sumber daya ataupun implementasi, arahan pemanfaatan ruang tidak fleksibel, kurangnya rasa memiliki *(sense of belonging)* aktor pembangunan, standard-standard acuan penyusunan kebijakan ruang mendapat resistensi dari para aktor pembangunan, serta para politisi yang membahas maupun yang mengesahkan rencana tata ruang tersebut memiliki perspektif jangka pendek. Sedangkan Balbo (1993 : 23) menyoroti faktor kegagalan kebijakan ruang karena lambatnya rencana dalam mengikuti perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari jangka waktu perencanaan yang biasanya untuk prediksi jangka menengah dan jangka panjang.

Berdasarkan kajian peran kebijakan struktur ruang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak berperannya kebijakan struktur ruang Kabupaten Barito Selatan selain karena kurangnya *sense of belonging* aktor pembangunan, juga karena kurangnya sosialisasi kebijakan. Akibatnya, kebijakan struktur ruang ini tidak mendapat perhatian untuk dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Padahal suatu perencanaan pembangunan daerah harus mengakomodasikan keadaan struktur ruang dari wilayah perencanaannya (Riyadi dan Bratakusumah, 2003 : 338).

Dengan demikian, kebijakan struktur ruang sampai saat ini belum berperan sebagai matra spasial dari kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Selatan pada umumnya. Kebijakan pembagian Wilayah Pembangunan sudah dicantumkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, tetapi belum dapat menjadi acuan karena **belum mempunyai dasar hukum berupa Peraturan Daerah.** Peran tersebut juga tidak dapat optimal karena ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan relevansi masalah yang

berubah pascapemekaran. *Political will* dari pemerintah sudah muncul berupa rencana menyusun kebijakan struktur ruang yang baru dengan melakukan revisi rencana tata ruang.

4.1.2 Analisis Peran Kebijakan Ekonomi Wilayah

Dikaji secara rinci dari Pola Dasar sebagai dokumen perencanaan induk, Renstra Barito Selatan 2001-2005 hingga Repetada 2002, ekonomi merupakan bidang yang menjadi prioritas dalam arahan pembangunan Barito Selatan.

Pola Dasar menyebutkan bahwa prioritas pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Barito Selatan untuk jangka pendek (1-2 tahun) adalah program-program untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama terjadinya krisis ekonomi nasional. Kemudian seiring dengan upaya pemulihan ekonomi, dilaksanakan program pembangunan ekonomi jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun yang dimaksudkan untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan berdasar ekonomi kerakyatan.

Renstra Barito Selatan 2001-2005 memuat program prioritas Kabupaten Barito Selatan, yaitu : (1) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (2) Peningkatan Ekonomi Rakyat (3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (4) Peningkatan Prasarana dan Sarana Ekonomi (5) Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam. Dari kelima program prioritas tersebut, terdapat 3 program yang langsung terkait nilai ekonomi : peningkatan ekonomi rakyat, peningkatan prasarana dan sarana ekonomi serta peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam. Program tersebut saling terkait erat, yaitu unsur sumber daya manusia, pendukung yakni prasarana dan sarananya serta penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam.

Repetada 2002 merinci kebijakan ekonomi ke dalam 12 sub bidang pembangunan, 27 program dan 53 proyek. Dalam APBD tahun 2002, belanja pembangunan Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 57 program dan 101 proyek yang berada di 12 kecamatan, karena saat APBD ditetapkan belum terjadi pemekaran. Dari 57 program dan 101 proyek pembangunan Barito Selatan tahun 2002 terdapat 47 proyek pembangunan yang terkait langsung dengan ekonomi dengan nilai sebesar Rp. 73.219,771 juta atau 71,81 % total belanja pembangunan. Ditinjau dari jumlah proyek pembangunan, pemerintah daerah sudah menganggarkan cukup besar untuk bidang ekonomi. Hal tersebut berarti bidang ekonomi menjadi prioritas pembangunan Barito Selatan. Tetapi dalam implementasinya, kebijakan ekonomi yang ada ini belum menjadi acuan yang sesungguhnya.

Berkaitan dengan peran kebijakan ekonomi, Supriadi A.S selaku Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyatakan bahwa *"dalam menghadapi kondisi riil Barito Selatan, pemerintah menghadapi dilema, yaitu di satu sisi mengejar pertumbuhan ekonomi sedangkan di sisi lain memperhatikan penyebaran pemerataan pendapatan. Peran kebijakan ekonomi belum optimal, karena belum ditemukannya formulasi kebijakan ekonomi yang tepat. Evaluasi kebijakan sulit dilakukan, karena kebijakan yang diangkat dari kondisi riil terkadang berbeda dengan yang dituangkan ke dalam APBD."* (Supriadi AS, wawancara langsung, 9 Januari 2004).

Dari pandangan pihak legislatif, Irawansyah selaku Ketua Komisi Pembangunan memberikan tanggapan bahwa *"kebijakan ekonomi selama ini peranannya masih bersifat normatif dan tidak terlalu menonjol sebagai acuan, di mana selama ini Barito Selatan masih sangat bergantung dengan dana pusat."* (Irawansyah, wawancara langsung, 10 Januari 2004).

Sebagai arahan pembangunan di bidang ekonomi yang cenderung normatif, dikaitkan dengan kebijakan struktur ruang sebagai matra spasial, menurut Supriadi A.S, *"belum terdapat sinkronisasi antara keduanya, karena di satu sisi kebijakan ruang belum di-Perdakan sehingga banyak kepentingan yang tidak dapat terwujud."* (Supriadi AS, wawancara langsung, 9 Januari 2004). Sedangkan menurut Irawansyah, *"antara kebijakan struktur ruang dan kebijakan ekonomi tidak terdapat relasi yang kuat."* (Irawansyah, wawancara langsung, 10 Januari 2004).

Menurut Arsyad (1999 : 133), perencanaan ekonomi daerah yang efektif harus bisa membedakan **apa yang seyogyanya dilakukan** dan **apa yang dapat dilakukan.** Hasil analisis memperlihatkan bahwa apa yang sudah digariskan dalam kebijakan ekonomi *(das sollens)* belum dapat dijalankan secara optimal dalam implementasinya *(das sein).* Dari hasil analisis terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan wawancara terhadap pihak legislatif dan eksekutif Barito Selatan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan ekonomi Barito Selatan telah dituangkan dalam bentuk arahan yang komprehensif dengan tujuan mengentaskan kemiskinan penduduk akibat krisis untuk jangka pendek dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi kerakyatan untuk jangka menengah. Tetapi kebijakan tersebut selama ini masih bersifat normatif, karena tidak selamanya menjadi acuan. Selain itu, Pemerintah juga sedang dalam proses untuk merumuskan formula kebijakan ekonomi yang tepat.
2. Keterbatasan yang dimiliki dan belum adanya dasar hukum RTRW Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tidak terdapat relasi antara kebijakan ekonomi dengan struktur ruang sebagai bentuk intervensi ruang dalam implementasi pembangunan di Kabupaten Barito Selatan.

4.2 Analisis Struktur Ruang Fisik

Analisis struktur ruang fisik dimaksudkan untuk mengidentifikasi bentuk struktur ruang Kabupaten Barito Selatan, yang terdiri dari ruang fisik, sistem hirarki kota serta deliniasi wilayah pengaruhnya.

4.2.1 Analisis Ruang Fisik

Struktur ruang fisik berkaitan dengan interaksi manusia dengan ruang, yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 5 komponen, yaitu : masyarakat, permukiman, jaringan fasilitas dan alam tempat tinggalnya (Doxiadis, 1968 : 5,35). Analisis ini bertujuan mendeskripsikan wujud ruang fisik tersebut yang merupakan dasar identifikasi struktur ruang fisik.

Sumber daya alam

Di wilayah Kabupaten Barito Selatan, potensi alam yang belum termanfaatkan terdiri dari sumber daya air, kehutanan, deposit tambang serta bahan galian. Sumber daya air terdiri dari Sungai Barito dan anak sungainya serta 82 buah danau yang tersebar di 6 kecamatan, meliputi 2,91 % luas Barito Selatan. Sedangkan potensi hutan yang tersedia terdiri dari Hutan Produksi Terbatas seluas 153.100 hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas 216.500 hektar dan Kawasan Pengembangan Produksi Terbatas seluas 123.350 hektar. Ditinjau dari pemanfaatan lahan, total luas tanah yang belum diusahakan (hutan, danau dan rawa) adalah 51,24 % atau yang terbesar di wilayah Barito Selatan.

Deposit tambang yang tersedia adalah batubara yang terukur sebesar 16 juta ton di Kecamatan Gunung Bintang Awai. Sedangkan untuk bahan galian yang termanfaatkan adalah pasir kuarsa, lempung, gamping, kaolin dan granit yang seluruhnya berada di Hilir Barito, yaitu Kecamatan Gunung Bintang Awai, juga Dusun Utara (lempung, pasir kuarsa) dan Dusun Selatan (kaolin).

Secara topografis, Barito Selatan berada pada wilayah dataran rendah. Titik terendah berada di Kecamatan Jenamas dan Mengkatip dengan ketinggian rata-rata 0-7 km di atas permukaan laut. Kecamatan Gunung Bintang Awai di sebelah Timur adalah wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 25 km hingga lebih dari 500 km di atas permukaan laut.

Manusia, Masyarakat dan Permukiman

Pola pemanfaatan ruang Kabupaten Barito Selatan adalah linier mengikuti aliran Sungai Barito dengan penggunaan tanah yang belum bervariasi, di mana permukiman disatukan dengan kebun karet dan rotan. Perkampungan menyebar secara linear di sepanjang sungai, dengan luas kampung sebesar 4.128 ha atau hanya 0,65 % wilayah Barito Selatan. Permukiman berorientasi pada Sungai Barito dan cabang-cabangnya. Lima ibukota kecamatan berada di tepi Sungai Barito, yaitu Rantau Kujang, Bangkuang, Mengkatip, Buntok dan Pendang. Jumlah penduduk di lima kota ini adalah sebesar 34,34 % dari total penduduk Barito Selatan.

Jaringan

Jaringan fasilitas listrik dan air minum telah mencapai seluruh wilayah, terkecuali untuk jaringan telepon baru menjangkau seputar Kota Buntok dan wilayah sekitarnya. Jaringan transportasi yang tersedia adalah transportasi sungai yang mengalir linier dari Utara ke Selatan serta transportasi darat yang hanya mampu melayani Kecamatan Dusun Selatan dan Gunung Bintang Awai.

Berdasarkan analisis terhadap ruang fisik Barito Selatan secara umum, diperoleh hasil bahwa pemanfaatan ruang terkonsentrasi di tepi Sungai Barito dan anak sungainya sehingga membentuk pola linier. Hal ini sesuai pendapat Wikantiyoso yang mengemukakan bahwa pola pemanfaatan ruang di sepanjang sungai mempunyai

kecenderungan pola linier dengan orientasi mengikuti pola aliran sungai tersebut (Wikantiyoso, **http://www. mintakat.unmer.ac.id/**, 10 Desember 2003).

Kondisi topografis dengan titik terendah berada di Wilayah Selatan (Hilir Barito) yang mempunyai ketinggian rata-rata 0-7 km di atas permukaan laut juga mempengaruhi pemanfaatan ruang. Permukiman di Wilayah Selatan kurang padat dibandingkan Wilayah Utara, begitu juga kawasan hutan semakin luas ke arah Selatan. Sedangkan sumber daya alam berupa potensi tambang dan bahan galian berada di Wilayah Utara, terutama Kecamatan Gunung Bintang Awai yang berada di dataran tinggi.

Selanjutnya, pola permukiman ini akan mempengaruhi penentuan struktur ruang fisik yang terkait erat dengan jarak antar pusat permukiman, jumlah penduduk dan gaya tarik antar pusat pertumbuhan dengan wilayah pengaruhnya.

Ruang secara fisik ditunjukkan dalam Gambar 4.1

4.2.2 Analisis Sistem Hirarki Kota

Dasar penentuan orde kota dalam penelitian ini adalah ketersediaan fasilitas pelayanan serta jumlah penduduk. Fasilitas pelayanan yang dimaksud adalah kesatuan fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan. Sedangkan jumlah penduduk sebagai ketersediaan sumber daya manusia ditentukan dari jumlah penduduk kota yang bersangkutan berdasar data tahun terakhir (2002) dan prediksi jumlah penduduk hingga 10 tahun mendatang.

Sebagai komparasi, dilakukan perbandingan dengan hasil scalogram fasilitas Kabupaten Barito Selatan sebelum pemekaran tahun 1998 yang terdiri dari 12 ibukota kecamatan. Gambar 4.2 menunjukkan fasilitas di Kota Buntok jauh lebih lengkap

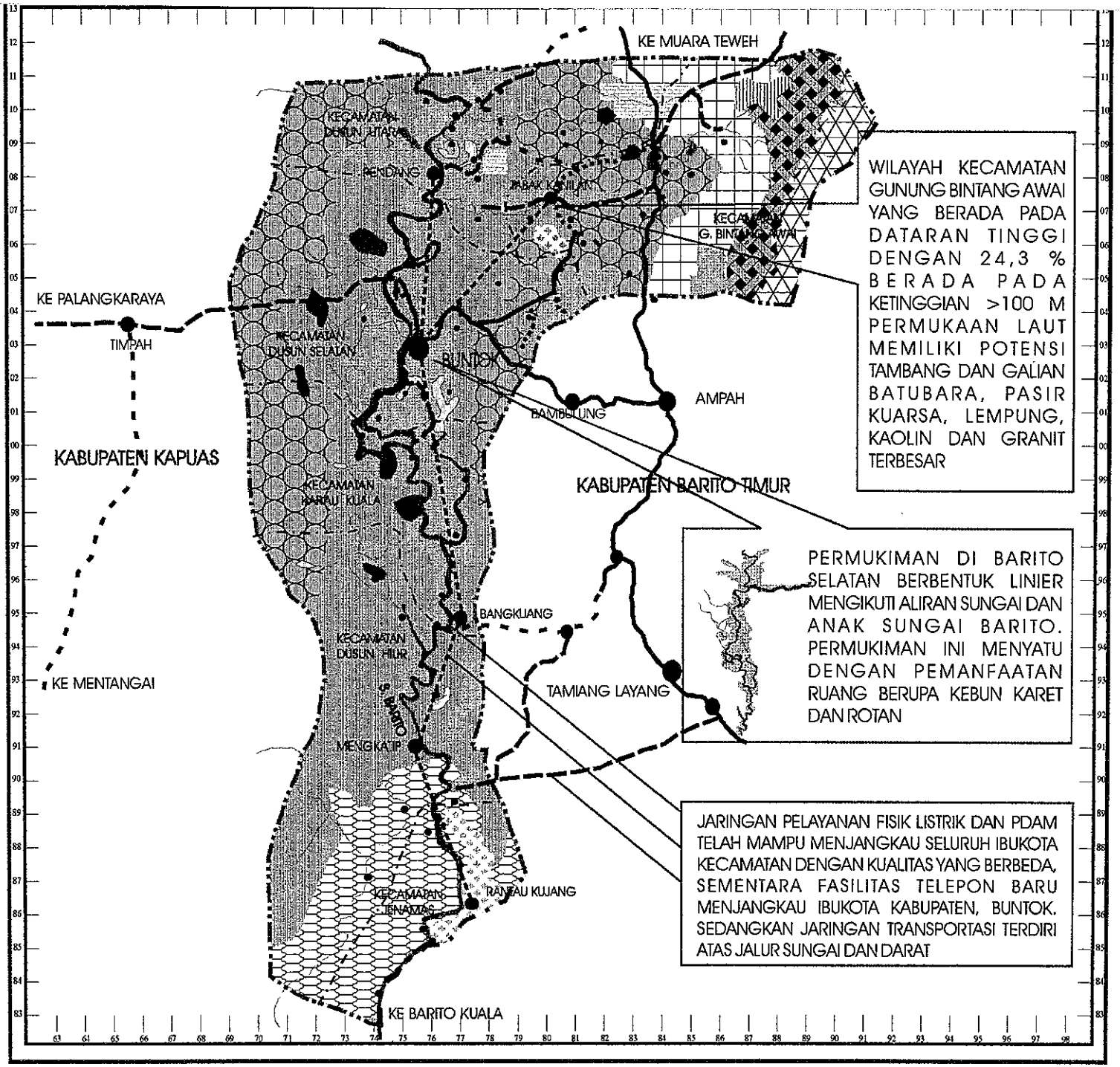

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

LEGENDA

- IBUKOTA KECAMATAN
- HUTAN
- KEBUN KARET - ROTAN PERMUKIMAN
- KEBUN CAMPURAN
- SAWAH
- RUMPUT - SEMAK
- HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)
- TRANSMIGRASI
- BELUKAR
- 0 - 7 M
- 25 - 50 M
- 50 - 100 M
- 100 - 500 M
- > 500 M
- JARINGAN LISTRIK DAN AIR BERSIH

INSERT

SUMBER :
BAPPEDA KAB. BARITO SELATAN

PETA ANALISIS RUANG FISIK

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
4.1	117	1 : 750.000	

dibanding ibu kota kecamatan lainnya, tetapi masih diimbangi keberadaan Kota Ampah sebagai Orde III yang memiliki keunggulan fasilitas ekonomi serta Kota Tamiang Layang sebagai Orde II yang memiliki keunggulan fasilitas sosial dan pemerintahan. Sedangkan kota kecamatan lainnya sebagai Orde IV tergolong merata, kecuali Bambulung sebagai wilayah *hinterland* Buntok memiliki fasilitas sosial lebih baik. Kota Ampah, Tamiang Layang dan Bambulung sejak tahun 2002 masuk wilayah Kabupaten Barito Timur.

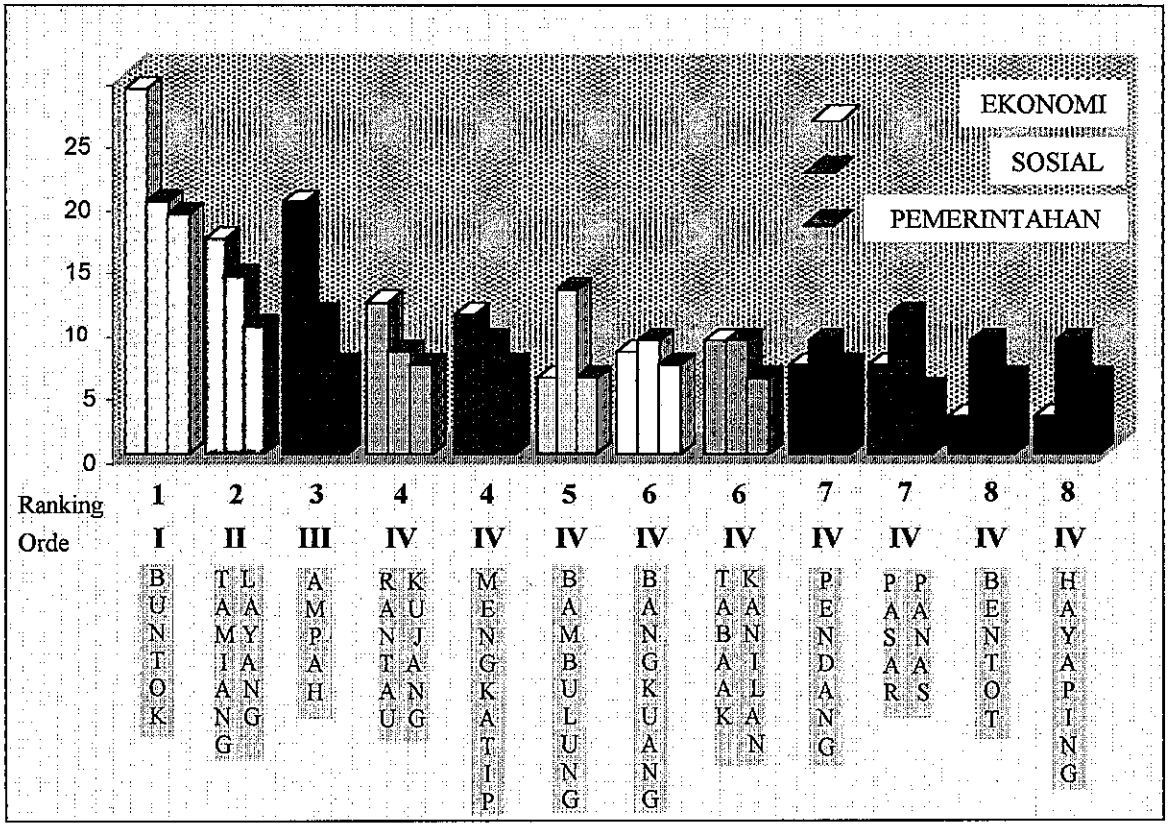

GAMBAR 4.2
SCALOGRAM MENURUT FASILITAS TAHUN 1998 SEBELUM PEMEKARAN

Sumber : Revisi RTRWK Barito Selatan Fakta dan Analisis, diolah

Setelah pemekaran, sistem hirarki kota Kabupaten Barito Selatan terbentuk dari hirarki 6 ibukota kecamatan, yaitu Kota Buntok, Rantau Kujang, Mengkatip, Bangkuang, Pendang dan Tabak Kanilan. Dari hasil analisis terhadap ketersediaan fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan sesuai Tabel B.1, Tabel B.2, dan Tabel B.3 terlampir, diperoleh hasil sebagai berikut :

TABEL IV.2
HASIL SCALOGRAM FASILITAS DAN JUMLAH PENDUDUK IKK

No	IKK	Fasilitas			Total	Pen-duduk 2002	Pen-duduk 2012
		Ekonomi	Sosial	Pemerintahan			
1.	Rantau Kujang	12	5	7	24	3.116	3.451
2.	Mengkatip	11	6	7	24	4.081	6.076
3.	Bangkuang	7	6	7	20	4.087	4.488
4.	Buntok	20	12	12	44	24.579	29.559
5.	Pendang	9	6	7	22	3.007	2.827
6.	Tabak Kanilan	7	5	6	18	1.541	1.787
Total		**66**	**40**	**46**	**152**	**41.986**	**48.188**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dari Tabel IV.1 dapat ditarik kesimpulan sementara sebagai berikut :

1. Di bidang ekonomi, Kota Buntok sebagai pusat perekonomian Barito Selatan memiliki fasilitas pelayanan yang jauh lebih baik. Sebelum pemekaran, fungsi tersebut terdistribusi ke Kota Ampah. Kota Rantau Kujang memiliki fasilitas ekonomi terbaik di antara kota kecamatan lain di luar Buntok, dan menjadi pusat kegiatan industri Barito Selatan, terutama pengolahan kayu. Kota Pendang selama ini tidak memiliki industri dan volume perdagangannya juga yang terkecil.
2. Dalam hal fasilitas sosial dan pemerintahan, Kota Buntok juga menjauhi kota-kota lainnya. Kedudukannya sebagai pusat pemerintahan membuat kelengkapan fisiknya sangat representatif. Untuk fasilitas pemerintahan, antara kota kecamatan lainnya memperoleh nilai yang tidak terlalu jauh perbedaannya. Kota Tabak Kanilan sebagai yang terendah kurang memiliki fasilitas yang memadai sebagai ibukota kecamatan, seperti fasilitas kantor pos. Di Kecamatan Gunung Bintang Awai, kantor pos justru berada di Desa Patas I yang selama ini membayangi keberadaan Tabak Kanilan sebagai kota utama. Begitu juga dalam hal fasilitas sosial, Tabak Kanilan walaupun telah memiliki sekolah sampai tingkat SMU dan terhubungkan jalur darat, namun belum

memiliki fasilitas terminal angkutan serta gedung olah raga seperti kota kecamatan lainnya.

3. Dari segi jumlah penduduk, Kota Buntok yang terdiri dari 2 desa dan 3 kelurahan jauh meninggalkan kota-kota lainnya. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kota Mengkatip dengan 4,06 % per tahun. Kota Pendang menunjukkan perkembangan wilayah yang tidak menguntungkan dengan perkembangan negatif (-0,61%). Sedangkan jumlah penduduk Tabak Kanilan sebagai ibukota kecamatan sangat rendah, karena pusat ekonomi Kecamatan Gunung Bintang Awai yang sebenarnya berada di Desa Patas I dan Ugang Sayu.

Posisi sentralistis Kota Buntok dalam hal fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan ditunjukkan dalam Gambar 4.3 berikut :

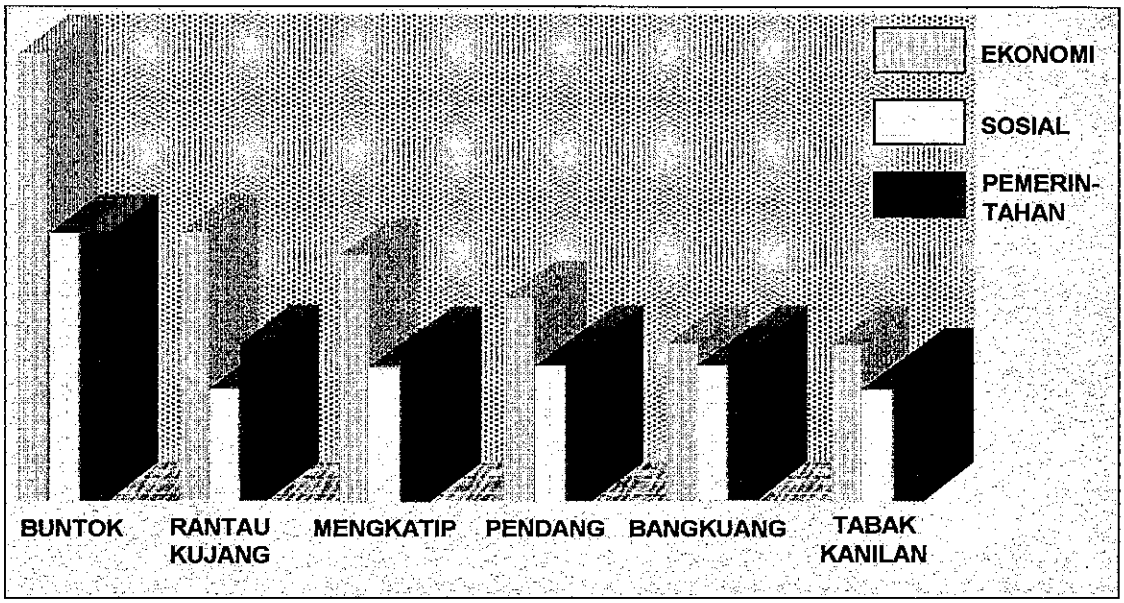

GAMBAR 4.3
HASIL ANALISIS SCALOGRAM
KABUPATEN BARITO SELATAN MENURUT FASILITAS
Sumber : Hasil Analisis, 2004

Sedangkan jumlah penduduk tahun 2002 dan prediksi jumlah penduduk tahun 2012 ditunjukkan dalam Gambar 4.4

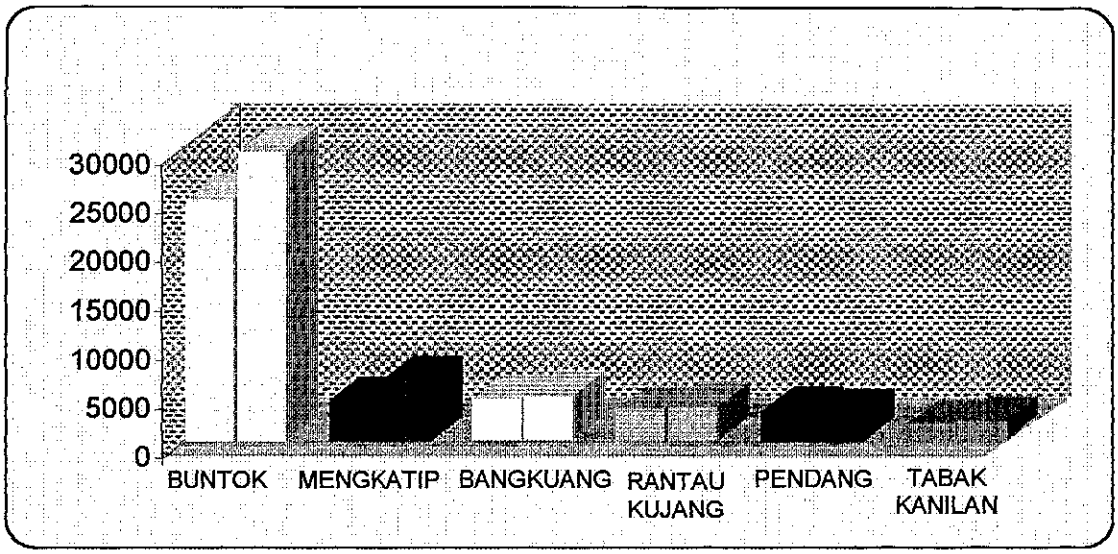

GAMBAR 4.4
JUMLAH PENDUDUK IBUKOTA KECAMATAN TAHUN 2002 DAN 2012
Sumber : Hasil Analisis, 2004

Berdasarkan jumlah fasilitas dan perkembangan penduduk tersebut, dilakukan ranking terhadap kota kecamatan. Diasumsikan bobot antara keseluruhan fasilitas dibanding jumlah penduduk adalah 3 : 2, di mana setiap fasilitas mendapatkan bobot 1. Nilai diberikan sesuai ranking kota yang bersangkutan, semakin tinggi ranking semakin besar nilai yang diperoleh.

Nilai dalam pembobotan ini adalah sebagai berikut :

Ranking 1, nilai = 6
Ranking 2, nilai = 5
Ranking 3, nilai = 4
Ranking 4, nilai = 3
Ranking 5, nilai = 2
Ranking 6, nilai = 1

Berdasarkan skoring tersebut, dilakukan penentuan ranking dan nilai masing-masing kota kecamatan yang ditunjukkan dalam Tabel IV.3.

TABEL IV.3
RANKING DAN NILAI IBUKOTA KECAMATAN BERDASARKAN FASILITAS DAN JUMLAH PENDUDUK

No	IKK	Ranking dan Nilai								Total Nilai
		Ekonomi	Nilai	Sosial	Nilai	Pemerintahan	Nilai	Penduduk	Nilai	
1	Rantau Kujang	II	5	III	4	II	5	IV	6	20
2	Mengkatip	III	4	II	5	II	5	II	10	24
3	Bangkuang	IV	2	II	5	II	5	III	8	20
4	Buntok	I	6	I	6	I	6	I	12	30
5	Pendang	IV	3	II	5	II	5	V	4	17
6	Tabak Kanilan	V	2	III	4	III	4	VI	2	12

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Selanjutnya berdasarkan Tabel IV.3 ditentukan orde kota. Untuk menentukan orde kota, dicari terlebih dahulu interval kelas, yaitu :

= Skor tertinggi-skor terendah/ jumlah kelas

= 30-12/ 4

= 4,5

Sehingga interval kelasnya adalah :

1. Kota Orde IV : $12 < x < 16,5$
2. Kota Orde III : $16,5 < x < 21$
3. Kota Orde II : $21 < x < 25,5$
4. Kota Orde I : $> 25,5$

Dengan mengacu pada Tabel IV.3, maka sistem hirarki kota-kota yang ada di Kabupaten Barito Selatan adalah :

1. Kota Orde I : Buntok
2. Kota Orde II : Mengkatip
3. Kota Orde III : Bangkuang, Rantau Kujang, Pendang
4. Kota Orde IV : Tabak Kanilan

Berkaitan dengan sistem hirarki kota dan penentuan orde kota tersebut, diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem hirarki kota ini diperlukan untuk membagi peran sentralistis Kota Buntok dengan kota kecamatan lainnya pascapemekaran. Sebagai Kota Orde I, Buntok menjadi pusat pelayanan Barito Selatan yang mendistribusikan peran kepada kota sekunder, yaitu Mengkatip sebagai pusat Wilayah Hilir Barito.
2. Kota Mengkatip walaupun dari segi fasilitas ekonomi berada di bawah Rantau Kujang, namun mempunyai fasilitas sosial dan pemerintahan yang lebih baik dan ditunjang

pertumbuhan penduduk yang paling pesat di antara seluruh kota selain Buntok.

3. Fasilitas di Kota Tabak Kanilan sangat tertinggal dibanding fasilitas ibukota kecamatan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena kedekatan fisik yang menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap Kota Buntok dan posisinya dalam internal kecamatan yang justru tertinggal dibanding Desa Ugang Sayu maupun Desa Patas I.

Sistem hirarki kota yang terbentuk dalam lingkup spasial ditunjukkan dalam Gambar 4.5.

4.2.3 Analisis Wilayah Pengaruh

Analisis wilayah pengaruh menggunakan Model Gravitasi yang berkaitan dengan analisis Scalogram Guttman. Analisis model gravitasi ini digunakan untuk: (1) mengukur kekuatan keterkaitan antara sentra komoditas dengan pusat pengembangan wilayah (2) menentukan kekuatan tempat kedudukan dari setiap pusat kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi (sentra-sentra komoditas) dalam sistem jaringan jasa, distribusi dan transportasi.

Kelemahan metode ini adalah karena pada kenyataannya bobot dan jarak tidak dapat berfungsi utuh sebagai faktor determinan besarnya interaksi. Jika muncul perubahan pada bobot atau jarak, daya tarik antara dua kota akan berubah (Daldjoeni, 1997 : 204). Oleh karena itu, penentuan wilayah pengaruh dengan menggunakan rumus Model Gravitasi dalam penelitian ini dibatasi hanya untuk memberikan suatu indikasi, yang ditindaklanjuti oleh analisis interaksi wilayah.

Formulasi rumus untuk menentukan indeks gravitasi (Warpani, 1984: 113) sebagai berikut:

$$I_{12} = \frac{P_1 P_2}{d_{12}^{\ 2}}$$

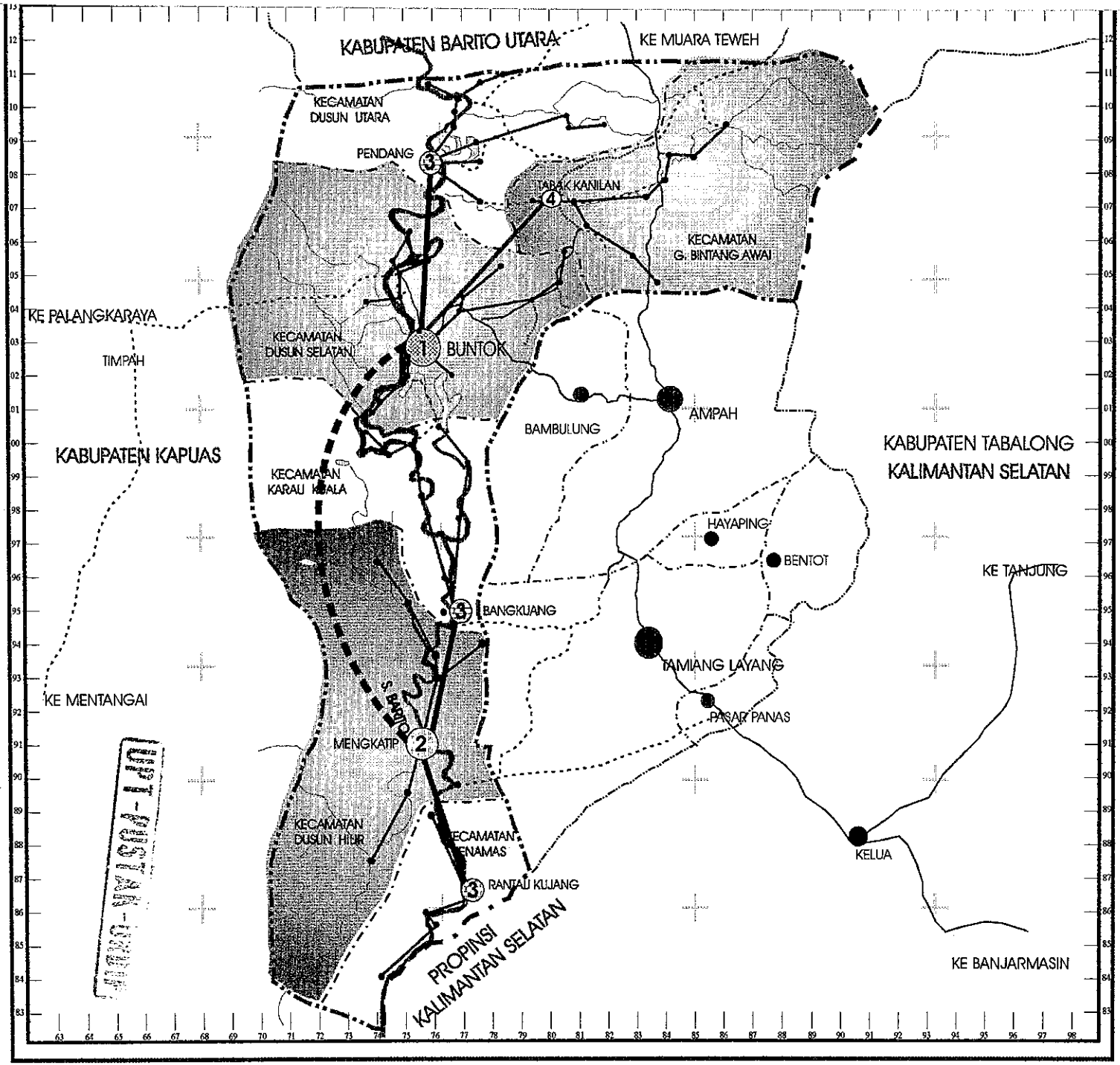

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN
PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

LEGENDA

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- KOTA ORDE I — PUSAT PELAYANAN REGIONAL
- KOTA ORDE II — SUB PUSAT PELAYANAN REGIONAL
- KOTA ORDE III — SUB PUSAT PELAYANAN REGIONAL
- KOTA ORDE IV — PUSAT PELAYANAN LOKAL
- DESA
- GARIS HIRARKI PRIMER
- GARIS HIRARKI SEKUNDER
- GARIS HIRARKI TERSIER
- GARIS PELAYANAN PERMUKIMAN

INSERT

SUMBER :
RTRW KAB. BARITO SELATAN

PETA ANALISIS SISTEM HIRARKI KOTA

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
4.5	125	1 : 750.000	

di mana:

I_{12} = Interaksi antara kecamatan 1 dengan kecamatan 2 (indeks gravitasi)
P_1 = Jumlah penduduk pada wilayah pertama (ribuan jiwa)
P_2 = Jumlah penduduk pada wilayah kedua (ribuan jiwa)
d_{12} = Jarak ibukota kecamatan 1 dengan kecamatan 2 (Km) dengan asumsi bahwa 1 km jarak darat equivalen dengan jarak 1 km jarak sungai.

Dalam hal ini digunakan data sebagai berikut :

TABEL IV. 4
JUMLAH PENDUDUK DAN JARAK ANTAR IBUKOTA KECAMATAN

No.	IKK	Pend. (jiwa)	Jarak (km) antar kota					
			RK	M	BK	BT	P	TB
1.	Rantau Kujang	3.116	0,0	30,0	71,0	148,0	195,5	183,0
2.	Mengkatip	4.081	30,0	0,0	41,0	118,0	165,5	153,0
3.	Bangkuang	4.087	71,0	41,0	0,0	77,0	124,5	112,0
4.	Buntok	24.579	148,0	118,0	77,0	0,0	47,5	35,0
5.	Pendang	3.007	195,5	165,5	124,5	47,5	0,0	82,5
6.	Tabak kanilan	1.541	183,0	153,0	112,0	35,0	82,5	0,0

Sumber : Dinas Perhubungan dan BPMD Barito Selatan, diolah

Dengan menggunakan rumus Gravitasi di atas, diperoleh hasil seperti ditunjukkan pada Tabel IV.5 berikut :

TABEL IV.5
INDEKS GRAVITASI ANTAR IBUKOTA KECAMATAN

No.	IKK	Indeks Gravitasi					
		RK	M	B	BT	P	TB
1.	Rantau Kujang	0,0000	0,1413	0,0253	0,0350	0,0025	0,0014
2.	**Mengkatip**	**0,1413**	**0,0000**	**0,0992**	**0,0720**	**0,0045**	**0,0027**
3.	Bangkuang	0,0253	0,0992	0,0000	0,1694	0,0079	0,0050
4.	**Buntok**	**0,0350**	**0,0720**	**0,1694**	**0,0000**	**0,3276**	**0,3092**
5.	Pendang	0,0025	0,0045	0,0079	0,3276	0,0000	0,0068
6.	Tabak kanilan	0,0014	0,0027	0,0050	0,3092	0,0068	0,0000

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Tabel IV.5 tersebut di atas memperlihatkan hubungan sebagai berikut :

1. Kota Buntok sebagai kota utama, pengaruhnya lebih kuat terhadap Kota Pendang, Tabak Kanilan dan Bangkuang. Pengaruh terhadap kota kecamatan di Hilir Sungai Barito, yaitu Mengkatip dan Rantau Kujang, relatif lemah.
2. Kota Bangkuang yang berada di tengah lebih kuat dipengaruhi oleh Kota Buntok dibanding Kota Mengkatip yang lebih dekat jaraknya. Walaupun demikian interaksi antara Kota Bangkuang dengan Kota Mengkatip cukup dekat, sedang dengan kota-kota lainnya sangat lemah.
3. Kota Pendang dan Tabak Kanilan hanya dipengaruhi Kota Buntok saja, sedangkan interaksi terhadap kota lainnya sangat lemah. Untuk Kota Tabak kanilan, hal itu terjadi karena sebenarnya kota ini juga berhubungan erat dengan Kota Ampah yang masuk wilayah Kabupaten Barito Timur. Sedangkan Kota Pendang yang seharusnya kuat hubungannya dengan Kota Tabak Kanilan tidak dihubungkan oleh aksesibilitas yang memadai, sehingga lemah interaksinya. Hubungan akan menjadi lebih kuat jika jalur darat Tabak Kanilan-Pendang telah terhubungkan dengan baik.
4. Kota Rantau Kujang sebagai kota paling Selatan hanya mempunyai hubungan yang kuat dengan Kota Mengkatip saja. Dengan demikian keberadaan Kota Mengkatip mempengaruhi Kota Bangkuang dan Kota Rantau Kujang.

Hubungan antara pusat pertumbuhan dan wilayah pengaruhnya dijelaskan dalam Gambar 4.6

4.2.4 Analisis Identifikasi Struktur Ruang Fisik

Berdasarkan sistem hirarki kota dan wilayah pengaruhnya, diperlukan penetapan pembagian wilayah dalam relasi struktur ruang fisik di Kabupaten Barito Selatan. Penetapan struktur ruang fisik mengacu pada 2 kota pusat pertumbuhan serta wilayah

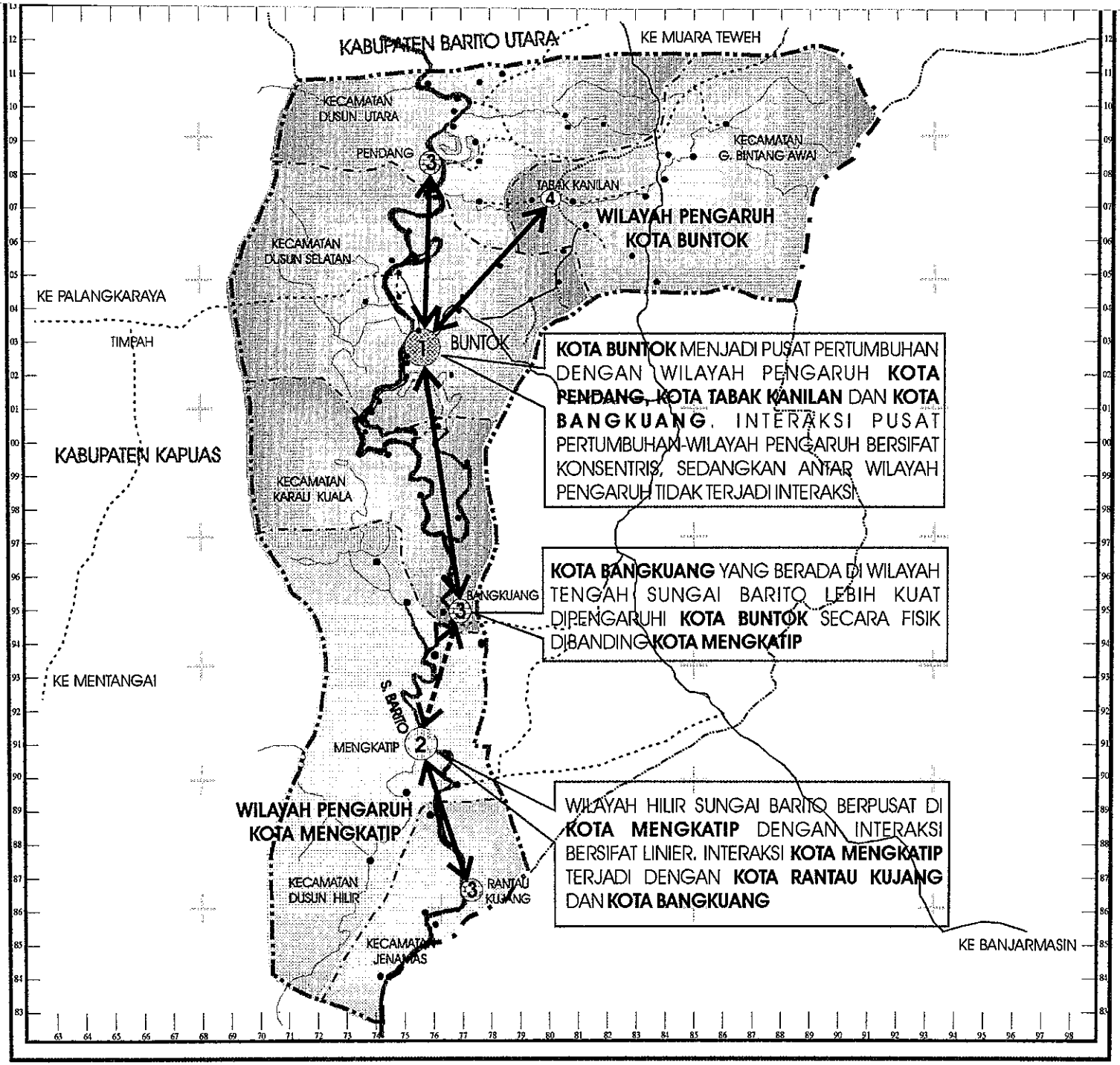

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

LEGENDA

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- KOTA ORDE I — PUSAT PELAYANAN REGIONAL
- KOTA ORDE II — SUB PUSAT PELAYANAN REGIONAL
- KOTA ORDE III — SUB PUSAT PELAYANAN REGIONAL
- KOTA ORDE IV — PUSAT PELAYANAN LOKAL
- DESA
- INTERAKSI PUSAT PERTUMBUHAN DAN WILAYAH PENGARUH

INSERT

SUMBER :
RTRW KAB. BARITO SELATAN

PETA ANALISIS WILAYAH PENGARUH

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
4.6	128	1 : 750.000	

pengaruhnya, sedangkan dasar dari organisasi ruang secara fisik adalah wujud ruang fisik yang dimiliki Barito Selatan sebagai kondisi eksisting.

Struktur ruang fisik yang terbentuk lebih mengacu pada kekuatan linier Sungai Barito untuk menjadi penghubung antar wilayah. Kedua pusat pertumbuhan berada di tepi Sungai Barito, yakni Kota Buntok dan Kota Mengkatip. Kota Buntok sebagai Kota Orde I secara fungsional membawahi Kota Pendang, Tabak Kanilan dan Bangkuang. Ketiga kota ini menjadikan Buntok sebagai magnitude, sedangkan sebagai wilayah *hinterland* ketiganya relatif tidak erat relasinya. Kota Bangkuang juga mempunyai interaksi dengan Kota Mengkatip. Sementara Kota Rantau Kujang hanya berinteraksi dengan Kota Mengkatip.

Berkaitan dengan hasil analisis tersebut, wilayah nodal yang terbentuk dari hubungan pusat pertumbuhan dan daerah belakang di kabupaten Barito Selatan secara riil terdiri dari :

1. Wilayah Pembangunan Utara, meliputi Wilayah Hulu Sungai Barito dan wilayah daratan. Pusat pertumbuhan adalah Kota Buntok, sedangkan wilayah pengaruhnya adalah Kota Pendang, Bangkuang dan Tabak Kanilan. Sistem hirarki yang terbentuk adalah Kota Orde I sebagai pusat pelayanan Kota Orde III dan IV. Bentuk keterhubungan konsentris dan interaksi terhubungkan berdasarkan jalur sungai dan darat, sedangkan kondisi topografis terdiri dari dataran rendah serta dataran tinggi.
2. Wilayah Pembangunan Selatan, meliputi Wilayah Hilir Sungai Barito. Pusat pertumbuhan adalah Kota Mengkatip, dengan wilayah pengaruh Kota Rantau Kujang. Sistem hirarki yang terbentuk adalah Kota Orde II sebagai pusat pelayanan Kota Orde III. Wilayah terkonsentrasi di sepanjang Sungai Barito dengan kondisi topografis

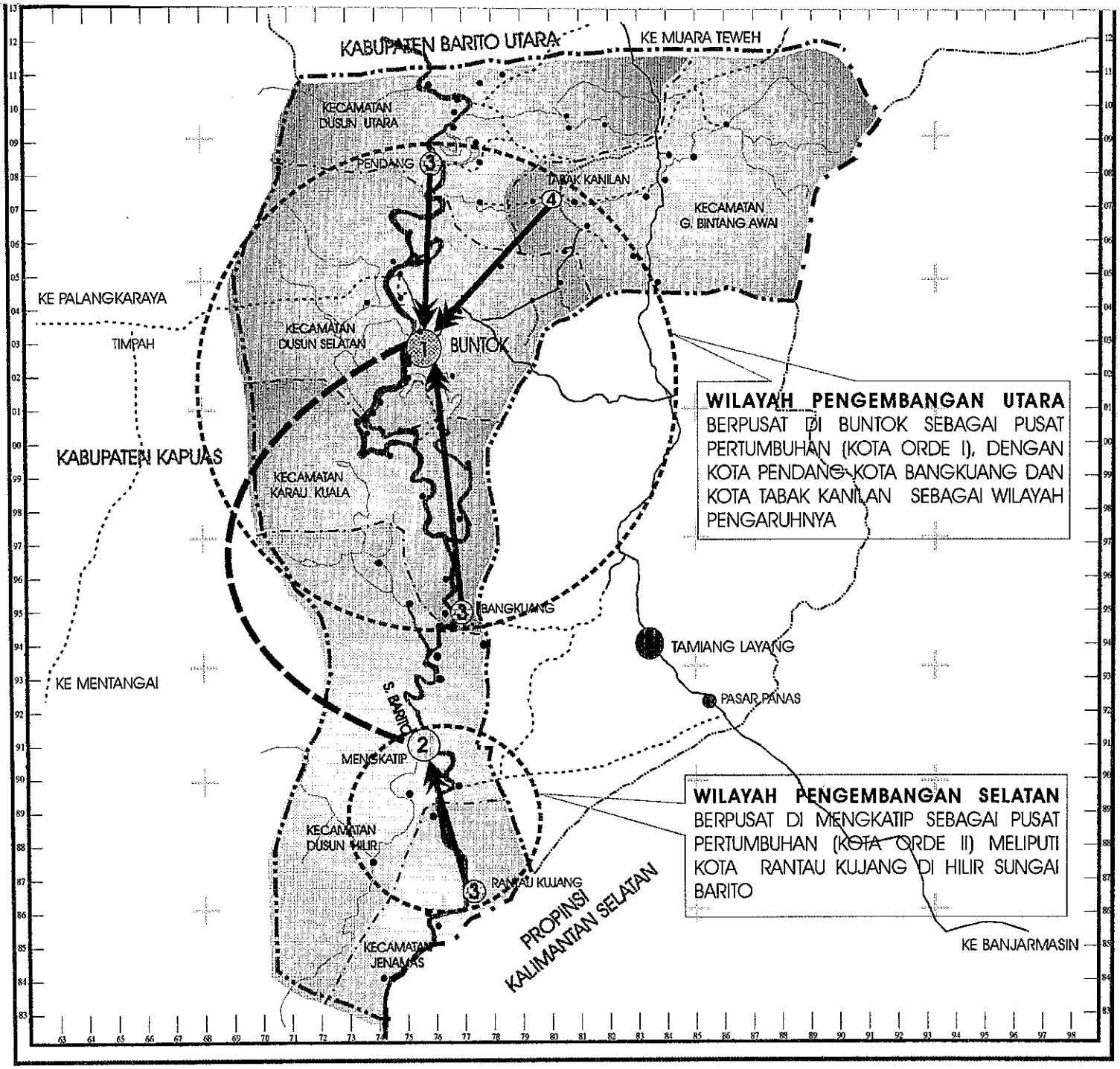

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

LEGENDA

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- KOTA ORDE I — PUSAT PELAYANAN REGIONAL
- KOTA ORDE II — SUB PUSAT PELAYANAN REGIONAL
- KOTA ORDE III — SUB PUSAT PELAYANAN REGIONAL
- KOTA ORDE IV — PUSAT PELAYANAN LOKAL
- DESA
- GARIS HIRARKI ANTAR PUSAT PERTUMBUHAN
- GARIS HIRARKI PUSAT PERTUMBUHAN-WILAYAH PENGARUH

INSERT

SUMBER :
RTRW KAB. BARITO SELATAN

PETA ANALISIS
IDENTIFIKASI STRUKTUR RUANG FISIK

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
4.7	131	1 : 750.000	

TABEL IV.6
DATA DAN PERHITUNGAN LQ SEKTOR/ SUB SEKTOR EKONOMI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2002

No	Sektor Ekonomi	PDRB Barito Selatan 2002 ADHK 1993 (jutaan rupiah)	PDRB Kalteng 2002 ADHK 1993 (jutaan rupiah)	LQ	Ket.
1	**Pertanian :**	103.766,66	1.807.303,53	0,9451	Non basis
	a. Tanaman Pangan & Hortikultura	9.212,79	258.501,50	0,5867	Non basis
	b. Perkebunan	19.081,89	671.045,04	0,4681	Non basis
	c. Peternakan	3.404,15	93.916,74	0,5967	Non basis
	d. Kehutanan	49.153,81	597.820,44	1,3535	Basis
	e. Perikanan	22.914,02	186.019,81	2,0277	Basis
2	**Pertambangan :**	1.073,73	75.132,45	0,2353	Non basis
	a. Non Migas	104,67	55.060,61	0,0313	Non basis
	b. Penggalian	969,06	20.071,84	0,7948	Non basis
3	**Industri Pengolahan :**	15.653,77	326.783,15	0,7886	Non basis
	a. Industri Tanpa Migas	15.653,77	326.783,15	0,7886	Non basis
4	**Listrik,Gas dan Air Bersih :**	1.389,25	22.957,58	0,9962	Non basis
	a. Listrik	899,58	18.595,64	0,7963	Non basis
	b. Air Bersih	489,67	4.361,94	1,8480	Basis
5	**Bangunan/ Konstruksi**	18.888,23	208.754,26	1,4895	Basis
6	**Perdagangan, Hotel dan Restoran :**	37.348,91	813.160,94	0,7561	Non basis
	a, Perdagangan Besar dan Eceran	33.042,96	737.674,98	0,7374	Non basis
	b. Hotel	2.080,57	13.321,43	2,5710	Basis
	c. Restoran	2.225,38	62.164,53	0,5893	Non basis
7	**Angkutan dan Komunikasi**	43.185,62	465.015,72	1,5288	Basis
	A. Angkutan	-	-	-	-
	a. Jalan Raya (Darat)	8.233,97	135.870,48	0,9976	Non basis
	b. Angk, Laut, Sungai & Penyb.	32.506,73	274.485,76	1,9495	Basis
	c. Angkutan Udara	17,18	2.933,81	0,0964	Non basis
	d Jasa Penunjang Angkutan	726,21	36.013,18	0,3319	Non basis
	B. Komunikasi	1.701,53	15.712,49	1,7826	Basis
8	**Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan :**	9.417,77	97.417,76	1,5914	Basis
	a. Bank	1.963,97	12.197,84	2,6505	Basis
	b. Lembaga Keuangan Non Bank	1.558,58	12.150,31	2,1116	Basis
	c. Sewa Bangunan	5.882,07	70.440,16	1,3746	Basis
	d. Jasa Perusahaan	13,15	2.629,45	0,0823	Non basis
9	Jasa-Jasa :	33.004,06	524.849,96	1,0352	Basis
	a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	26.084,99	445.711,13	0,9634	Non basis
	b. Swasta :	-	-	-	-

Bersambung ...

... Lanjutan

No	Sektor Ekonomi	PDRB Barito Selatan 2002 ADHK 1993 (jutaan rupiah)	PDRB Kalteng 2002 ADHK 1993 (jutaan rupiah)	LQ	Ket.
	1.Sosial Kemasyarakatan	2.185,67	40.365,00	0,8914	Non basis
	2.Hiburan dan Rekreasi	123,06	1.621,98	1,2489	Basis
	3.Perorangan & Rumah Tangga	4.610,34	37.160,85	2,0423	Basis
10	**Jumlah PDRB**	**263.728,00**	**4.341.375,35**		

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Berdasarkan hasil LQ di atas, terlihat adanya 4 sektor yang merupakan sektor basis, yaitu **sektor bangunan/ konstruksi, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan** serta **sektor jasa-jasa**. Untuk sektor angkutan ternyata hanya sub sektor angkutan sungai dan penyeberangan yang merupakan sub sektor basis. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan semua sub sektornya merupakan sub sektor basis, terkecuali jasa perusahaan yang memang kontribusinya mendekati nol. Sementara untuk sektor jasa-jasa, justru sub sektor hiburan serta sub sektor perorangan dan rumah tangga yang merupakan sub sektor basis meskipun kontribusinya rata-rata sangat kecil (0,03 sampai 1,61 %).

Sektor pertanian sebagai sektor primer yang kontribusinya per tahun rata-rata 46,41 % justru tidak tergolong sektor basis. Walaupun demikian, dua sub sektor yang signifikan pengaruhnya, yaitu sub sektor kehutanan (kontribusi rata-rata 21,63 %) dan sub sektor perikanan (kontribusi rata-rata 9,65 %) termasuk dalam kategori basis. Sektor primer lainnya, yaitu pertambangan dan penggalian, tidak termasuk ke dalam sektor basis.

Dengan demikian, pada umumnya sektor dan sub sektor yang masuk kategori basis di Kabupaten Barito Selatan didominasi dari sektor tersier. Artinya adalah kebanyakan sektor/ sub sektor tersebut tergolong baik secara lokal karena kondisi wilayah acuan kinerjanya masih belum optimal.

4.3.2 Analisis Prospek Ekonomi

Analisis prospek ekonomi dilakukan dengan metode *Shift and Share Analysis.* Hasilnya adalah mengukur tingkat pergeseran struktur perekonomian Barito Selatan, posisi relatif sektor dan sub-sektor ekonomi serta identifikasi sektor-sektor unggulan. Dengan demikian dapat diidentifikasi sektor dan sub sektor ekonomi yang unggul, agak unggul, agak mundur hingga mundur.

Dari data perkembangan PDRB Kabupaten Barito Selatan sebagai wilayah studi dan PDRB Kalimantan Tengah sebagai wilayah acuan dengan dimensi waktu 2000-2002, dilakukan penghitungan Komponen Pertumbuhan Wilayah (KPW), Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP) dan Komponen Pergeseran atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPK). Hasil perhitungan ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL IV.7
HASIL PERHITUNGAN SHIFT AND SHARE TERHADAP PDRB 2000-2002 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 MENURUT LAPANGAN USAHA

No	Sektor Ekonomi	KPW	KPP	KPK	PN	Representasi
1	**Pertanian :**	0,0608	0,0358	-0,0876	-0,0518	Agak mundur
	a. Tanaman Pangan & Hortikultura	0,0608	-0,0755	0,1020	0,0265	Agak unggul
	b. Perkebunan	0,0608	0,5536	-0,5623	-0,0087	Agak mundur
	c. Peternakan	0,0608	0,0926	-0,0130	0,0796	Agak mundur
	d. Kehutanan	0,0608	-0,2301	0,1021	-0,1280	Agak unggul
	e. Perikanan	0,0608	0,0403	0,0138	0,0541	Unggul
2	**Pertambangan :**	0,0608	-0,4447	0,8012	0,3565	Agak unggul
	a. Non Migas	0,0608	-0,5277	0,6845	0,1567	Agak unggul
	b. Penggalian	0,0608	0,0151	0,3670	0,3821	Unggul
3	**Industri Pengolahan :**	0,0608	-0,0433	0,1157	0,0723	Agak unggul
	a. Industri Tanpa Migas	0,0608	-0,0433	0,1157	0,0723	Agak unggul
4	**Listrik, Gas dan Air Bersih :**	0,0608	0,0022	0,1908	0,1930	Unggul
	a. Listrik	0,0608	-0,0388	0,2666	0,2278	Agak unggul
	b. Air Bersih	0,0608	0,2216	-0,0879	0,1338	Agak mundur
5	**Bangunan/ Konstruksi**	0,0608	0,0991	-0,0511	0,0481	Agak mundur
6	**Perdagangan, Hotel dan Restoran :**	0,0608	0,0064	0,0172	0,0236	Unggul
	a. Perdagangan Besar dan Eceran	0,0608	0,0044	0,0312	0,0356	Unggul

Bersambung ...

... Lanjutan

No	Sektor Ekonomi	KPW	KPP	KPK	PN	Representasi
	b. Hotel	0,0608	-0,2049	0,0951	-0,1098	Agak unggul
	c. Restoran	0,0608	0,0931	-0,1024	-0,0093	Agak mundur
7	**Angkutan dan Komunikasi**	0,0608	-0,1118	0,1014	-0,0104	Agak unggul
	A. Angkutan	-	-	-	-	-
	a. Jalan Raya (Darat)	0,0608	0,0366	0,1810	0,2176	Unggul
	b. Angkutan Laut, Sungai & Penyeberangan	0,0608	-0,1841	0,1276	-0,0565	Agak unggul
	c. Angkutan Udara	0,0608	-0,4204	-0,5136	-0,9340	Mundur
	d. Jasa Penunjang Angkutan	0,0608	-0,0002	-0,1533	-0,1536	Mundur
	B. Komunikasi	0,0608	0,0184	0,1643	0,1827	Unggul
8	**Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan :**	0,0608	-0,0192	1,7850	1,7658	Agak unggul
	a. Bank	0,0608	-0,0359	3,1070	3,0710	Agak unggul
	b. Lembaga Keuangan Non Bank	0,0608	-0,0530	2,5041	2,4511	Agak unggul
	c. Sewa Bangunan	0,0608	-0,0144	1,3194	1,3051	Agak unggul
	d. Jasa Perusahaan	0,0608	0,1058	2,4571	2,5629	Unggul
9	**Jasa-Jasa**	0,0608	0,0946	1,4037	1,4982	Unggul
	a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	0,0608	0,0987	1,4321	1,5308	Unggul
	b. Swasta :	-	-	-	-	-
	1. Sosial Kemasyarakatan	0,0608	0,0776	1,2068	1,2844	Unggul
	2. Hiburan dan Rekreasi	0,0608	0,1297	2,3625	2,4923	Unggul
	3. Perorangan dan Rumah Tangga	0,0608	0,0636	1,3096	1,3732	Unggul

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Hasil analisis *Shift and Share* menggambarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai KPW adalah positif, yaitu sebesar 0,0608. Ini merepresentasikan bahwa pengaruh kebijakan wilayah acuan (Provinsi Kalimantan Tengah) adalah signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan. Seperti halnya Barito Selatan, Kalimantan Tengah juga bertumpu pada sektor pertanian secara umum. Sektor yang memberikan kontribusi paling besar bagi Kalimantan Tengah adalah sektor pertanian, khususnya sub sektor kehutanan, serta perdagangan, hotel dan restoran, khususnya sub sektor perdagangan besar dan eceran. Hal ini identik dengan PDRB Barito Selatan, sehingga pengaruh kebijakan wilayah acuan adalah positif terhadap wilayah studi.

2. Nilai KPP positif berarti sektor/ sub sektor tersebut pertumbuhannya relatif pesat dan pengaruhnya signifikan dalam struktur ekonomi wilayah Kalimantan Tengah. Sektor yang bernilai positif adalah **sektor pertanian** (primer; 0,0358), **sektor listrik, gas dan air bersih** (sekunder; 0,0022), **sektor bangunan /konstruksi** (sekunder; 0,0991), **sektor perdagangan, hotel dan restoran** (tersier; 0,0044), **sektor jasa-jasa** (tersier; 0,0946). Dua di antara kelima sektor tersebut, yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, adalah penyumbang PDRB Barito Selatan yang terbesar. Jika dirinci ke sub sektor, yang menarik adalah sub sektor kehutanan walaupun kontribusinya selama ini adalah yang terbesar, tetapi justru bernilai negatif (-0,0231). Hal ini disebabkan jumlah hutan produksi kian berkurang, juga ketatnya perlindungan terhadap pemanfaatan hasil hutan.
3. Nilai KPK yang mengukur peran sektor/ sub sektor lokal dibandingkan dengan sektor/ sub sektor yang sama dalam konteks regional. Sektor ekonomi yang nilai KPK-nya positif adalah **sektor pertambangan** (0,8012), **industri pengolahan** (0,1157), **listrik, gas dan air bersih** (0,1908), **angkutan dan komunikasi** (0,1014), **perdagangan, hotel dan restoran** (0,0172), **keuangan, persewaan dan jasa perusahaan** (1,7850) serta **jasa-jasa** (1,4037). Terdapat 1 sektor primer, 2 sektor sekunder dan 4 sektor tersier. Sektor-sektor tersebut mengalami keunggulan komparatif *(comparative advantages)* dibandingkan daerah-daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Nilai PN yang mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang maju dan kurang maju. Terdapat 7 sektor yang memperoleh nilai PN positif, yaitu **sektor pertambangan** (0,3565), **industri pengolahan** (0,0723), **listrik, gas dan air bersih** (0,1930), **bangunan/ konstruksi** (0,0481), **perdagangan, hotel dan restoran** (0,0236), **keuangan, persewaan dan jasa keuangan** (1,7658), serta **jasa-jasa** (1,4982). Adalah

menarik karena 2 sektor yang memperoleh nilai PN negatif adalah sektor yang besar kontribusinya selama ini, yaitu sektor pertanian serta angkutan dan komunikasi. Ini berarti Pemerintah Barito Selatan harus mulai meningkatkan peran sektor lainnya di luar kedua sektor andalan tersebut dalam jangka panjang.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi kategori sektor unggul, agak unggul, agak mundur dan mundur, maka digunakan kriteria penilaian sebagai berikut :

TABEL IV.8
KRITERIA SEKTOR/ SUB SEKTOR BERDASAR NILAI KPP DAN KPK

Representasi	Nilai KPP	Nilai KPK
Unggul	+	+
Agak Unggul	-	+
Mundur	-	-
Agak Mundur	+	-

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dari kriteria pada tabel di atas, dapat diidentifikasi sektor yang masuk kategori unggul, agak unggul, agak mundur dan mundur sebagai berikut :

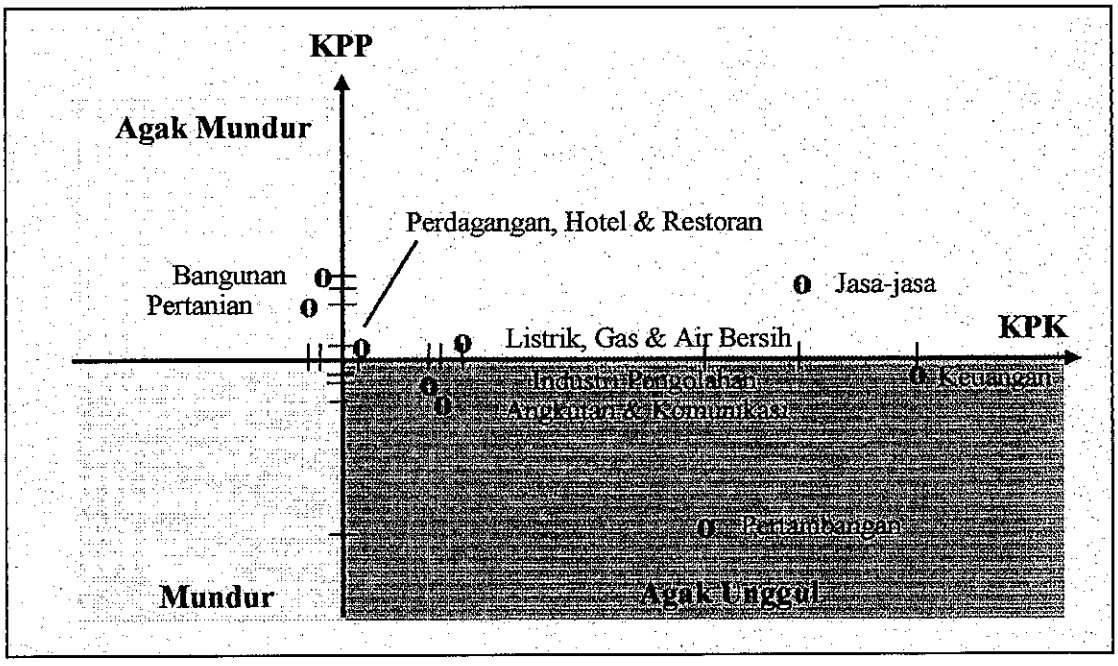

GAMBAR 4.8
KUADRAN SEKTOR MENURUT KATEGORI
DARI HASIL ANALISIS SHIFT AND SHARE
Sumber : Hasil Analisis, 2004

Hasil analisis LQ dan Shift Share kemudian ditabulasikan untuk mengidentifikasi kategori sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Barito Selatan sebagai output analisis prospek ekonomi. Analisis Location Quotient memberikan nilai sektor basis dan non basis. Analisis Shift and Share memberikan nilai unggul, agak unggul, agak mundur dan mundur. Nilai tertinggi dari kedua hasil analisis dianggap sama tingkat signifikansinya, sehingga mendapat nilai 3. Nilai kategori non basis dan kategori agak mundur diberikan bobot 1. Selengkapnya metode pembobotan berdasarkan kategori sektor/ sub sektor adalah sebagai berikut :

Sektor/ sub sektor

- Basis = 3
- Non Basis = 1
- Unggul = 3
- Agak Unggul = 2
- Agak Mundur = 1
- Mundur = 0

Kategori :

Strategis = 5-6
Kurang Strategis = 3-4
Mundur = 1-2

Sebagai output dari analisis prospek ekonomi ini adalah penentuan sektor dan sub sektor yang termasuk dalam kategori strategis, kurang strategis dan mundur. Hasil lengkap tabulasi sektor/ sub sektor ekonomi tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL IV.9
KATEGORI SEKTOR/ SUB SEKTOR BERDASAR NILAI LQ DAN SHIFT-SHARE

Sektor/ Sub Sektor	LQ		SHIFT-SHARE				Jumlah	Keterangan
	Basis	Non Basis	Unggul	Agak Unggul	Agak Mundur	Mundur		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pertanian :		1.00			1.00		2.00	Mundur
a. Tanaman Pangan & Hortikultura		1.00		2.00			3.00	Kurang Strategis
b. Perkebunan		1.00			1.00		2.00	Mundur
c. Peternakan		1.00			1.00		2.00	Mundur
d. Kehutanan	3.00			2.00			5.00	Strategis
e. Perikanan	3.00		3.00				6.00	Strategis
Pertambangan :		1.00		2.00			3.00	Kurang Strategis

... Lanjutan

Sektor/ Sub Sektor	LQ		SHIFT-SHARE				Jumlah	Kete-rangan
	Basis	Non Basis	Unggul	Agak Unggul	Agak Mundur	Mundur		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a. Non Migas		1.00		2.00			3.00	Kurang Strategis
b. Penggalian		1.00	3.00				4.00	Kurang Strategis
Industri Pengolahan :		1.00		2.00			3.00	Kurang Strategis
a. Industri Tanpa Migas		1.00		2.00			3.00	Kurang Strategis
Listrik, Gas dan Air Bersih :		1.00	3.00				4.00	Kurang Strategis
a. Listrik		1.00		2.00			3.00	Kurang Strategis
b. Air Bersih	3.00				1.00		4.00	Kurang Strategis
Bangunan/ Konstruksi	3.00				1.00		4.00	Kurang Strategis
Perdagangan, Hotel dan Restoran :		1.00	3.00				4.00	Kurang Strategis
a. Perdagangan Besar dan Eceran		1.00	3.00				4.00	Kurang Strategis
b. Hotel	3.00			2.00			5.00	Strategis
c. Restoran		1.00			1.00		2.00	Mundur
Angkutan dan Komunikasi	3.00			2.00			5.00	Strategis
A. Angkutan	3.00			2.00			5.00	Strategis
a. Jalan Raya		1.00	3.00				4.00	Kurang Strategis
b. Angkutan Laut, Sungai & Penyeberangan	3.00			2.00			5.00	Strategis
c. Angkutan Udara		1.00					1.00	Mundur
d. Jasa Penunjang		1.00					1.00	Mundur
B. Komunikasi	3.00		3.00				6.00	Strategis
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan :	3.00			2.00			5.00	Strategis
a. Bank	3.00			2.00			5.00	Strategis
b. Lembaga Keuangan Non Bank	3.00			2.00			5.00	Strategis
c. Sewa Bangunan	3.00			2.00			5.00	Strategis
d. Jasa Perusahaan		1.00	3.00				4.00	Kurang Strategis
Jasa-Jasa	3.00		3.00				6.00	Strategis
a. Pemerintahan Umum		1.00	3.00				4.00	Kurang Strategis
b. Swasta :	3.00		3.00				6.00	Strategis

Bersambung ...

... Lanjutan

Sektor/ Sub Sektor	LQ		SHIFT-SHARE				Jumlah	Keterangan
	Basis	Non Basis	Unggul	Agak Unggul	Agak Mundur	Mundur		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Sosial Kemasyarakatan		1.00	3.00				4.00	Kurang Strategis
2. Hiburan dan Rekreasi	3.00		3.00				6.00	Strategis
3. Perorangan dan Rumah Tangga	3.00		3.00				6.00	Strategis

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Analisis prospek ekonomi ini menyusun hirarki sektor/ sub sektor ekonomi dilihat dari prospeknya sebagai berikut :

TABEL IV.10
HIRARKI SEKTOR/ SUB SEKTOR MENURUT KATEGORI

No	Kategori	Nilai	Sektor	Sub Sektor
1	Strategis	6,00	1. Jasa-jasa	1. Perikanan 2. Komunikasi 3. Swasta
	Strategis	5,00	1. Angkutan dan Komunikasi 2. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1. Kehutanan 2. Hotel 3. Angkutan 4. Bank 5. Lemb. Keu.Non Bank 6. Sewa bangunan
2	Kurang Strategis	4,00	1. Listrik, Gas dan Air Bersih 2. Bangunan/ Konstr. 3. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1. Penggalian 2. Air Bersih 3. Perdagangan Besar & Eceran 4. Jasa Perusahaan 5. Pemerintahan Umum
	Kurang Strategis	3,00	1. Pertambangan 2. Indust. Pengolahan	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Non Migas 3. Industri Non Migas 4. Listrik
3	Mundur	2,00	1. Pertanian	1. Perkebunan 2. Peternakan 3. Restoran
	Mundur	1,00		1. Jasa penunjang

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dari tabel tersebut, terlihat hal yang menarik di mana sektor pertanian dengan kontribusi terbesar bagi PDRB Barito Selatan (rata-rata 46,413 % per tahun) merupakan sektor yang masuk kategori mundur. Hal ini cukup relevan, karena sejak 2000 sektor ini terus mengalami penurunan kontribusi, yaitu 47,73 % (2000), 46,69 % (2001) dan 44,82 % (2002). Jika PDRB dilihat sebelum pemekaran, sektor ini cukup menjanjikan di mana antara tahun 1997 hingga 2000 terdapat kenaikan, yaitu 6,53 % dengan rata-rata tiap tahun 1,63 %. Tahun 2001 memang ada penurunan sebesar 0,39 %, tetapi kontribusi masih sangat dominan, yaitu 50,18 %. Kontribusi tertinggi terjadi pada masa krisis 1998, yaitu sebesar 51,51 %.

Dilihat dari sub sektor pendukung, terdapat dua sub sektor pertanian yang masuk kategori strategis, yaitu perikanan dan kehutanan. Perikanan memang sesuai karakteristik wilayah pascapemekaran yang dominan berada di DAS Barito, sehingga kontribusinya mengalami kenaikan walaupun masih belum signifikan, yaitu hanya 0,1 %. Sektor kehutanan memang tidak terjadi perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pemekaran.

Pergeseran sektor ekonomi unggulan ini dan terjadinya kemunduran sektor pertanian setelah pemekaran terjadi karena sejumlah wilayah perkebunan potensial dan lokasi investasi masuk ke wilayah Barito Timur, seperti Pematang Karau dan Ampah. Hal ini belum dipacu dengan upaya meningkatkan komoditas andalan lain yang ada, seperti rotan (kehutanan) dan karet (perkebunan). Sementara kayu sebagai komoditas andalan mempunyai keterbatasan untuk diproduksi.

4.3.3. Analisis Identifikasi Struktur Ruang Ekonomi

Analisis ini menindaklanjuti hasil analisis ekonomi basis dan prospek ekonomi untuk menentukan hirarki unit spasial (kecamatan) menurut peran secara ekonomi. Hirarki ini memetakan alokasi peran sektor ekonomi tersebut dalam matra spasial, sehingga membentuk struktur ruang secara ekonomi.

Dalam penelitian ini, hirarki tidak dapat disusun langsung dari data sekunder. Pertama, karena belum terdapat data PDRB setiap kecamatan yang ada di Barito Selatan. Kedua, untuk lebih melihat hirarki ekonomi sebagai aspek fungsional struktur ruang diperlukan data potensi yang bukan sekedar bersifat nomina. Oleh karenanya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Menggunakan 9 sektor ekonomi dalam PDRB beserta sub sektornya sebagai komponen penyusun struktur ruang ekonomi.
2. Setiap sub sektor ekonomi mendapat bobot 10.
3. Melihat setiap sub sektor berdasarkan peran ekonomi dengan memisahkannya berdasarkan unit spasial. Setiap sub sektor berbeda-beda anasir penyusun peran ekonominya.
4. Mengalikan dengan rata-rata kontribusi setiap sub sektor berdasar data pascapemekaran (2000-2002) sebagai faktor pengali dari nilai eksisting.
5. Mengalikan dengan nilai kategori sektor/ sub sektor yang telah diidentifikasikan pada analisis ekonomi basis dan analisis prospek ekonomi. Ini adalah faktor pengali dari nilai prospek.
6. Mengurutkan unit spasial berdasarkan nilai peran ekonomi yang terukur.
7. Menentukan struktur ruang Kabupaten Barito Selatan secara ekonomi.

Secara matematis, pendekatan tersebut adalah :

Komponen Pembentuk Struktur Ruang Ekonomi setiap Unit Spasial :

$$= \frac{\text{Nilai peran ekonomi kec. A}}{10} \text{ x nilai kontribusi rata-rata x nilai kategori}$$

Adapun nilai kontribusi diambil dari data distribusi persentase PDRB atas harga berlaku dari tahun 2000-2002, yaitu data pascapemekaran. Nilai rata-rata kontribusi setiap sub sektor tersebut adalah adalah sebagai berikut :

TABEL IV.11
KONTRIBUSI SEKTOR/ SUB SEKTOR EKONOMI PDRB 2000-2002 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN)

Sektor/ Sub Sektor	Kontribusi 2000	Kontribusi 2001	Kontribusi 2002	Rata-rata 2000-2002
1 Pertanian	47,73	46,69	44,82	46,413
Tanaman Bahan Makanan	4,70	4,96	4,94	4,867
Perkebunan	8,19	8,90	8,84	8,643
Peternakan & Hasil-hasilnya	1,60	1,66	1,62	1,627
Kehutanan	23,62	21,55	19,71	21,627
Perikanan	9,62	9,62	9,72	9,653
2 Pertambangan & Penggalian	0,30	0,32	0,39	0,338
Pertambangan Non Migas	0,04	0,04	0,05	0,043
Penggalian	0,26	0,27	0,37	0,300
3 Industri Pengolahan	5,37	5,48	6,00	5,617
Industri Non Migas	5,37	5,48	6,00	5,617
4 Listrik dan Air Bersih	0,30	0,38	0,50	0,393
Listrik	0,18	0,24	0,35	0,257
Air Bersih	0,12	0,14	0,15	0,137
5 Bangunan/ Konstruksi	7,64	7,57	7,29	7,500
6 Perdag., Hotel dan Restoran	15,33	15,29	15,23	15,283
Perdag. Besar dan Eceran	13,91	13,85	13,87	13,877
Hotel	0,57	0,56	0,54	0,557
Restoran	0,85	0,87	0,82	0,847
7 Pengangkutan dan Komunikasi	11,05	11,85	12,26	11,720
Pengangkutan	-	-	-	
- Angkutan jalan raya	1,85	2,09	2,52	2,153
- Angkutan air	8,58	9,16	9,08	8,940
- Angkutan udara	0,03	0,03	0,00	0,020
- Jasa penunjang angkutan	0,21	0,22	0,20	0,210
Komunikasi	0,37	0,34	0,44	0,383
8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,66	2,67	3,07	2,800
Bank	0,61	0,67	0,74	0,673
Lembaga keuangan bukan bank & jasa penunjang	0,40	0,37	0,56	0,443

Bersambung...

... Lanjutan

Sektor/ Sub Sektor	Kontribusi 2000	Kontribusi 2001	Kontribusi 2002	Rata-rata 2000-2002
Sewa bangunan	1,65	1,62	1,77	1,680
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,000
9 Jasa – Jasa	9,63	9,76	10,45	9,947
Pemerintahan Umum	8,00	8,04	8,59	8,210
Swasta	0,55	0,57	0,62	0,580
- Sosial Kemasyrakatan	0,53	0,54	0,60	0,557
- Hiburan dan Rekreasi	0,02	0,02	0,03	0,023
- Perorangan dan RT	1,09	1,16	1,23	1,160
TOTAL	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,000**

Sumber : BPS Barito Selatan, 2002

Identifikasi struktur ruang ekonomi berdasar sektor/ sub sektor adalah sebagai berikut :

1. Sektor Pertanian

1.A Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Komponen potensi ekonomi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Barito Selatan adalah jumlah produksi tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan serta luas lahan produksi. Jumlah produksi tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan mendapat nilai 6, sedangkan jumlah luas lahan produksi sebagai nilai pengembangan mendapat nilai 4. Dari tabulasi terhadap kedua komponen sub sektor ini, diperoleh hasil sebagai berikut :

TABEL IV.12
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Kecamatan	Hasil Produksi	Lahan	Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	0,138	0,056	0,194	4,867	3,000	2,833
Dusun Hilir	0,068	0,013	0,081	4,867	3,000	1,183
Karau Kuala	0,049	0,582	0,631	4,867	3,000	9,213
Dusun Selatan	1,724	0,978	2,702	4,867	3,000	39,452
Dusun Utara	0,908	0,781	1,689	4,867	3,000	24,661
G.B. Awai	3,112	1,590	4,702	4,867	3,000	68,654
Total	**6,00**	**4,000**	**10,000**			**145,995**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

1.B Sub Sektor Perkebunan

Komponen sub sektor perkebunan adalah nilai produksi serta luas lahan yang tersedia di setiap kecamatan. Dalam hal ini bobot jumlah produksi : luas lahan adalah 6 : 4. Jumlah produksi adalah total nilai eksisting, sedangkan luas lahan adalah total nilai pengembangan. Jenis tanaman perkebunan yang ada di Barito Selatan adalah karet, kopi, lada, kelapa, aren, dan kakao. Sementara kelapa sawit hanya tersedia lahan dan belum ada produksi.

Dari tabulasi terhadap 2 komponen sub sektor ini, diperoleh hasil sebagai berikut :

TABEL IV.13
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR PERKEBUNAN

Kecamatan	Hasil Produksi	Lahan	Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	0,060	0,056	0,116	8,643	2,000	2,010
Dusun Hilir	0,070	0,058	0,128	8,643	2,000	2,211
Karau Kuala	0,193	0,104	0,297	8,643	2,000	5,136
Dusun Selatan	1,106	0,704	1,810	8,643	2,000	31,286
Dusun Utara	1,968	1,837	3,805	8,643	2,000	65,767
G.B. Awai	2,603	1,240	3,843	8,643	2,000	66,432
Total	**6,00**	**4,000**	**10,000**			**172,843**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

1.C Sub Sektor Peternakan dan hasil-hasilnya

Untuk sub sektor peternakan, komponen penyusun nilai potensi ekonomi adalah jumlah ternak yang dipotong sebagai nilai produksi serta jumlah populasi ternak sebagai nilai pengembangan. Jenis ternak yang ada adalah sapi, kerbau, kambing dan babi. Sedangkan unggas adalah ayam buras, ayam pedaging dan itik. Nilai produksi diberi bobot 6, sedangkan nilai pengembangan diberikan nilai 4. Dari tabulasi terhadap 2 komponen sub sektor ini, diperoleh hasil sebagai berikut :

TABEL IV.14
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR PETERNAKAN

Kecamatan	Hasil Produksi	Populasi	Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	0,479	0,320	0,799	1,627	2,000	2,600
Dusun Hilir	0,653	0,391	1,044	1,627	2,000	3,397
Karau Kuala	0,476	0,272	0,748	1,627	2,000	2,434
Dusun Selatan	2,950	2,077	5,027	1,627	2,000	16,358
Dusun Utara	0,760	0,467	1,227	1,627	2,000	3,993
G.B. Awai	0,682	0,473	1,155	1,627	2,000	3,758
Total	**6,000**	**4,000**	**10,000**			**32,540**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

1.D Sub Sektor Kehutanan

Untuk sub sektor kehutanan digunakan pendekatan khusus, karena hasil yang paling dominan adalah kayu dan rotan. Komposisi nilai terbagi atas nilai produksi, yaitu hasil kayu sebagai komoditas utama dan rotan sebagai hasil ikutan. Karena nilai *output* keduanya berbeda, total nilai produksi (6) dibagi 3,5 untuk kayu dan 2,5 untuk rotan (rotan irit maupun jenis lainnya). Sedangkan nilai pengembangan (4), terbagi atas bobot 2 bagi luas lahan yang dikelola pemegang HPH dan IPK aktif sebagai izin resmi pemanfaatan kayu, bobot 1 untuk seluruh luas lahan produksi hutan dan bobot 1 untuk luas kebun rotan. Pembobotan berdasarkan hal tersebut menghasilkan nilai sebagai berikut :

TABEL IV.15
NILAI HASIL DAN LAHAN PRODUKSI SUB SEKTOR KEHUTANAN

Kecamatan	Hasil Produksi		Lahan Produksi			Total
	Kayu	Rotan	HPH & IPK	Kebun Rotan	Hutan Produksi	
Jenamas	1,655	0,172	0,000	0,069	0,082	1,978
Dusun Hilir	0,000	0,819	0,000	0,328	0,314	1,461
Karau Kuala	0,000	0,664	0,000	0,266	0,118	1,048
Dusun Selatan	0,171	0,515	0,000	0,206	0,214	1,106
Dusun Utara	0,073	0,248	0,394	0,099	0,105	0,919
G.B. Awai	1,601	0,081	1,606	0,032	0,168	3,488
Total	**3,500**	**2,500**	**2,000**	**1,000**	**1,000**	**10,000**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dari tabulasi terhadap 2 komponen sub sektor ini, diperoleh hasil sebagai berikut :

TABEL IV.16
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR KEHUTANAN

Kecamatan	Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	1,978	21,627	5,000	213,922
Dusun Hilir	1,461	21,627	5,000	157,934
Karau Kuala	1,048	21,627	5,000	113,306
Dusun Selatan	1,106	21,627	5,000	119,643
Dusun Utara	0,919	21,627	5,000	99,381
G.B. Awai	3,488	21,627	5,000	377,164
Total	**10,000**			**1081,350**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

1.E Sub Sektor Perikanan

Untuk menganalisis potensi ekonomi perikanan, digunakan nilai produksi (bobot 6) yang terdiri kuantitas produksi ikan, terdiri dari ikan basah dan ikan olahan. Sedangkan nilai pengembangan (bobot 4) dirinci dari jumlah sarana produksi serta jumlah nelayan di setiap kecamatan.

TABEL IV.17
NILAI SUB SEKTOR PERIKANAN BERDASAR PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN

Kecamatan	Hasil Produksi		Pengembangan		Total
	Ikan basah	Ikan olahan	Nelayan	Sarana	
Jenamas	0,569	0,477	0,510	0,301	1,858
Dusun Hilir	0,567	0,529	0,397	0,238	1,732
Karau Kuala	0,511	0,531	0,538	0,317	1,897
Dusun Selatan	0,722	0,795	0,630	0,388	2,536
Dusun Utara	0,426	0,390	0,256	0,159	1,231
G.B. Awai	0,205	0,278	0,167	0,097	0,747
Total	**3,000**	**3,000**	**2,500**	**1,500**	**10,000**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Berdasarkan Tabel IV.17 tersebut, diperoleh nilai peran ekonomi sub sektor perikanan sebagai berikut :

TABEL IV.18
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR PERIKANAN

Kecamatan	Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	1,858	9,653	6,000	107,590
Dusun Hilir	1,732	9,653	6,000	100,327
Karau Kuala	1,897	9,653	6,000	109,875
Dusun Selatan	2,536	9,653	6,000	146,855
Dusun Utara	1,231	9,653	6,000	71,283
G.B. Awai	0,747	9,653	6,000	43,256
Total	**10,000**			**579,185**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dari ke-5 sub sektor tersebut, didapatkan hirarki peran ekonomi kecamatan berdasarkan sektor pertanian :

TABEL IV.19
HIRARKI KECAMATAN BERDASAR
PERAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN

Hirarki Kecamatan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Kehutanan	Perikanan	Total
G.B. Awai	68,654	66,432	3,758	377,164	43,256	559,264
Dusun Selatan	39,452	31,286	16,358	119,643	146,855	353,594
Jenamas	2,833	2,010	2,600	213,922	107,59	328,955
Dusun Utara	24,661	65,767	3,993	99,381	71,283	265,085
Dusun Hilir	1,183	2,211	3,397	157,934	100,327	265,052
Karau Kuala	9,213	5,136	2,434	113,306	109,875	239,964
Total	**145,995**	**172,843**	**32,54**	**1081,35**	**579,185**	**2011,913**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

2.A Sub Sektor Pertambangan Non Migas

Untuk mengidentifikasi peran ekonomi setiap kecamatan dalam sub sektor ini, dilakukan analisis berdasarkan jumlah tenaga kerja sebagai nilai produksi dan luas area perusahaan pertambangan serta cadangan deposit sebagai nilai pengembangan. Sektor pertambangan di Barito Selatan hanya batubara yang saat ini belum menghasilkan produksi

dan masih tahap eksplorasi. Tenaga kerja (produksi) mendapat nilai 6, sedang nilai pengembangan 4, terbagi nilai 2,5 untuk luas areal perusahaan berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan nilai 1,5 untuk jumlah cadangan yang terukur.

Berdasarkan data eksisting yang terlampir dan tabulasi nilai produksi dan pengembangan, didapatkan peran ekonomi sub sektor pertambangan sebagai berikut :

TABEL IV.20
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR PERTAMBANGAN

Kecamatan	Tenaga Kerja	Pengembangan		Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
		Luas Area	Deposit				
Jenamas	0,260	0,00	0,00	0,260	0,043	3,000	0,033
Dusun Hilir	0,548	0,00	0,00	0,548	0,043	3,000	0,071
Karau Kuala	0,115	0,00	0,00	0,115	0,043	3,000	0,015
Dusun Selatan	4,096	0,00	0,00	4,096	0,043	3,000	0,528
Dusun Utara	0,606	0,00	0,00	0,606	0,043	3,000	0,078
G.B. Awai	0,375	2,50	1,50	4,375	0,043	3,000	0,564
Total	**6,000**	**2,50**	**1,50**	**10,000**			**1,290**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

2.B Sub Sektor Penggalian

Sub sektor penggalian merupakan sub sektor prospektif, karena banyaknya potensi alam Barito Selatan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Nilai peran ekonomi dilihat dari nilai produksi (6) dan nilai pengembangan (4) yang dilihat dari luas area izin penggalian (2,5) dan deposit (1,5). Dari tabulasi terhadap 2 komponen sub sektor ini, diperoleh hasil sebagai berikut :

TABEL IV.21
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR PENGGALIAN

Kecamatan	Hasil Produksi	Pengembangan		Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
		Luas Area	Deposit				
Jenamas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	4,000	0,000
Dusun Hilir	0,201	0,133	0,000	0,334	0,300	4,000	0,400
Karau Kuala	0,090	0,059	0,000	0,149	0,300	4,000	0,179
Dusun Selatan	5,685	0,415	0,012	6,112	0,300	4,000	7,335
Dusun Utara	0,000	0,000	0,040	0,040	0,300	4,000	0,048
G.B. Awai	0,024	1,893	1,448	3,365	0,300	4,000	4,038
Total	**6,000**	**2,500**	**1,500**	**10,000**			**12,000**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Berdasarkan kedua analisis sub sektor tersebut, didapatkan hirarki sektor pertambangan dan penggalian sebagai berikut :

TABEL IV.22
HIRARKI KECAMATAN BERDASAR PERAN EKONOMI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

No	Hirarki Kecamatan	Pertambangan	Penggalian	Total
1	Dusun Selatan	0,528	7,336	7,864
2	G.B. Awai	0,564	4,038	4,603
3	Dusun Hilir	0,071	0,400	0,471
4	Karau Kuala	0,015	0,179	0,194
5	Dusun Utara	0,078	0,047	0,125
6	Jenamas	0,033	0,000	0,033
	Total	**1,290**	**12,000**	**13,290**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

3. Industri Pengolahan

Di Kabupaten Barito Selatan hanya terdapat industri kecil menengah yang tersebar di 5 kecamatan, kecuali di Dusun Utara. Pendekatan yang dilakukan di sini adalah nilai produksi, yang direpresentasikan oleh jumlah tenaga kerja dan total produksi. Dalam hal ini nilai produksi mendapat bobot 6, dan jumlah tenaga kerja mendapat nilai 4.

TABEL IV.23
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR INDUSTRI NON MIGAS

Kecamatan	Nilai Produksi	Tenaga Kerja	Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	2,705	1,082	3,786	5,617	3,000	63,806
Dusun Hilir	1,492	0,723	2,215	5,617	3,000	37,329
Karau Kuala	0,683	0,918	1,601	5,617	3,000	26,981
Dusun Selatan	1,100	1,230	2,329	5,617	3,000	39,251
Dusun Utara	0,000	0,000	0,000	5,617	3,000	0,000
G.B Awai	0,020	0,047	0,068	5,617	3,000	1,143
Total	**6,000**	**4,000**	**10,000**			**168,510**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dari Tabel IV.23 di atas, dapat ditentukan hirarki kecamatan dalam sektor industri pengolahan sebagai berikut :

TABEL IV.24
HIRARKI KECAMATAN BERDASARKAN PERAN EKONOMI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

No	Hirarki Kecamatan	Total
1	Jenamas	63,806
2	Dusun Selatan	39,251
3	Dusun Hilir	37,329
4	Karau Kuala	26,981
5	Gunung Bintang Awai	1,143
6	Dusun Utara	0,000
Total		**168,510**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

4.A Sub Sektor Listrik

Sub sektor listrik terbagi dua, yaitu listrik PLN dan non PLN. Jumlah rumah tangga yang menjadi pelanggan PLN tahun 2002 adalah 10.328 rumah tangga, sedangkan yang dilayani listrik non PLN adalah 2.595 rumah tangga, sebagian besar berada di Dusun Hilir. Dengan demikian baru 12.923 rumah tangga atau hanya sekitar 27,42 % yang dapat

UPT - PUSTAK - UNDIP

menikmati listrik dari 47.135 rumah tangga di Barito Selatan. Nilai peran ekonomi adalah 6 untuk sumber listrik PLN dan 4 untuk sumber listrik Non PLN.

TABEL IV.25
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR LISTRIK

Kecamatan	PLN	Non PLN	Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	0,508	0,867	1,375	0,257	3,000	1,060
Dusun Hilir	0,385	1,515	1,900	0,257	3,000	1,465
Karau Kuala	0,403	0,154	0,558	0,257	3,000	0,430
Dusun Selatan	4,106	0,399	4,505	0,257	3,000	3,474
Dusun Utara	0,349	0,529	0,878	0,257	3,000	0,677
G.B. Awai	0,249	0,535	0,784	0,257	3,000	0,604
Total	**6,000**	**4,000**	**10,000**			**7,710**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

4.B Sub Sektor Air Bersih

Peran sub sektor air bersih dilakukan terhadap jumlah pelanggan yang tercatat di 6 kecamatan, baik untuk pelayanan rumah tangga, instansi pemerintah, hidran umum, sosial khusus, niaga, dan industri. Hasil analisis peran ekonominya adalah sebagai berikut :

TABEL IV.26
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR AIR BERSIH

Kecamatan	Pelanggan	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	0,384	0,137	4,000	0,210
Dusun Hilir	0,408	0,137	4,000	0,223
Karau Kuala	0,894	0,137	4,000	0,490
Dusun Selatan	7,492	0,137	4,000	4,105
Dusun Utara	0,719	0,137	4,000	0,394
G.B. Awai	0,104	0,137	4,000	0,057
Total	**10,000**			**5,480**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Berdasarkan kedua sub sektor pendukungnya, maka hirarki sektor listrik, gas dan air bersih adalah sebagai berikut :

TABEL IV.27
HIRARKI KECAMATAN BERDASAR PERAN EKONOMI
SEKTOR LISTRIK,GAS DAN AIR BERSIH

No	Hirarki Kecamatan	Listrik	Air Bersih	Total
1	Dusun Selatan	3,474	4,105	7,579
2	Dusun Hilir	1,465	0,223	1,688
3	Jenamas	1,060	0,210	1,270
4	Dusun Utara	0,677	0,394	1,071
5	Karau Kuala	0,430	0,490	0,920
6	GB Awai	0,604	0,057	0,661
Total		**7,710**	**5,480**	**13,190**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

5. Sektor Bangunan/ Konstruksi

Untuk menganalisis peran ekonomi sektor bangunan/ konstruksi, dilihat dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di setiap kecamatan. Peran ekonomi yang didapatkan adalah sebagai berikut :

TABEL IV.28
PERAN EKONOMI SEKTOR BANGUNAN/ KONSTRUKSI

Kecamatan	Tenaga Kerja	Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	18	0,139	7,500	4,000	4,167
Dusun Hilir	122	0,941	7,500	4,000	28,241
Karau Kuala	16	0,123	7,500	4,000	3,704
Dusun Selatan	940	7,253	7,500	4,000	217,593
Dusun Utara	77	0,594	7,500	4,000	17,824
G.B. Awai	123	0,949	7,500	4,000	28,472
Total	**1296**	**10,000**			**300,000**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

6.A Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Untuk menghitung peran ekonomi sub sektor perdagangan besar dan eceran, dilihat berdasarkan jumlah tenaga kerja pada perdagangan besar serta perdagangan eceran. Perdagangan besar mendapat bobot 6, sedangkan perdagangan eceran mendapat nilai 4.

Hasil perhitungan peran ekonomi sub sektor perdagangan besar dan eceran adalah sebagi berikut :

TABEL IV.29
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

Kecamatan	Pedagang Besar	Pedagang Eceran	Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	0,188	0,706	0,894	13,877	4,000	49,613
Dusun Hilir	0,063	0,787	0,849	13,877	4,000	47,142
Karau Kuala	0,125	0,576	0,701	13,877	4,000	38,925
Dusun Selatan	5,438	1,452	6,890	13,877	4,000	382,430
Dusun Utara	0,125	0,124	0,249	13,877	4,000	13,838
G.B. Awai	0,063	0,354	0,417	13,877	4,000	23,132
Total	**6,000**	**4,000**	**10,000**			**555,080**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

6. B Sub Sektor Hotel

Sub sektor ini mengalami kemunduran dengan masuknya Kota Ampah yang memiliki 6 hotel kelas Melati II serta Kota Tamiang Layang yang memiliki 5 hotel kelas Melati II menjadi wilayah Kabupaten Barito Timur. Setelah pemekaran, yang menonjol adalah Kecamatan Dusun Selatan dengan 17 *non-classify hotel*, terdiri dari 4 kelas Melati I dan 13 Kelas Melati II. Untuk menentukan hirarki peran ekonomi, dihitung dari rata-rata malam kamar dalam setahun di mana bobot Melati I adalah 6 dan Melati II 4. Hasil perhitungan peran ekonomi per kecamatan dalam sub sektor hotel adalah sebagai berikut :

TABEL IV.30
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR HOTEL

Kecamatan	Melati I	Melati II	Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	0,000	0,180	0,180	0,557	5,000	0,501
Dusun Hilir	0,000	0,216	0,216	0,557	5,000	0,601
Karau Kuala	0,000	0,168	0,168	0,557	5,000	0,467
Dusun Selatan	6,000	3,285	9,285	0,557	5,000	25,858

Bersambung ...

... Lanjutan

Kecamatan	Melati I	Melati II	Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
Dusun Utara	0,000	0,000	0,000	0,557	5,000	0,000
G.B. Awai	0,000	0,152	0,152	0,557	5,000	0,423
Total	**6,000**	**4,000**	**10,000**			**27,850**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

6.C Sub Sektor Restoran

Seperti halnya hotel, pascapemekaran terdapat kemunduran untuk sub sektor restoran karena kota yang memiliki restoran/ rumah makan hanya Kota Buntok. Kota Ampah yang memiliki 9 restoran dan Kota Tamiang Layang yang memiliki 6 restoran masuk wilayah Barito Timur. Dengan demikian Kecamatan Dusun Selatan menjadi satu-satunya unit spasial penyumbang potensi ekonomi untuk sub sektor restoran. Besarnya peran ekonomi di Barito Selatan adalah sebagai berikut :

TABEL IV.31
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR RESTORAN

Kecamatan	Jumlah	Nilai/ Tahun (Rp)	Total	Nilai Kontribusi	Nilai kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	0,00	0,00	0,00	0,847	4,000	0,000
Dusun Hilir	0,00	0,00	0,00	0,847	4,000	0,000
Karau Kuala	0,00	0,00	0,00	0,847	4,000	0,000
Dusun Selatan	39,00	7.494.000,00	10,00	0,847	4,000	33,880
Dusun Utara	0,00	0,00	0,00	0,847	4,000	0,000
G.B. Awai	0,00	0,00	0,00	0,847	4,000	0,000
Total	**39,00**	**7.494.000,00**	**10,000**			**33,880**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dari ketiga sub sektor pada sektor perdagangan besar dan eceran, hotel serta restoran maka hirarki peran ekonomi adalah sebagai berikut :

TABEL IV.32
HIRARKI KECAMATAN BERDASAR PERAN EKONOMI
SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

No	Kecamatan	Perdagangan	Hotel	Restoran	Total
1	Dusun Selatan	382,430	25,858	33,880	442,167
2	Jenamas	49,613	0,501	0,000	50,114
3	Dusun Hilir	47,142	0,601	0,000	47,743
4	Karau Kuala	38,925	0,467	0,000	39,393
5	G.B. Awai	23,132	0,423	0,000	23,555
6	Dusun Utara	13,838	0,000	0,000	13,838
Total		**555,080**	**25,858**	**33,880**	**616,810**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

7.A Sub Sektor Pengangkutan

Sub sektor ini terdiri atas angkutan jalan raya, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta jasa perangkutan. Angkutan udara di Barito Selatan tidak termasuk dalam analisis karena sejak akhir tahun 2001 Bandara Perintis Sanggu tidak lagi dioperasikan. Untuk memperoleh potensi ekonomi, sub sektor pengangkutan dibagi dalam 4 bagian dengan bobot 2,5. Masing-masing pembobotan sebagai berikut :

1. Angkutan jalan raya = Kendaraan angkutan 1 : Penumpang 1,5
2. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan = Kapal 0,5 : Penumpang 1 : Barang 1
3. Angkutan udara : 0
4. Jasa Perangkutan :
   - Tambat kapal = 0,5
   - Parkir kendaraan angkutan = 0,5
   - Bongkar barang = 0,75
   - Jasa Ekspedisi = 0,75

Untuk angkutan jalan raya, hanya terdapat 2 kecamatan yang memiliki armada angkutan yang eksis melayani penumpang, yaitu Kecamatan Dusun Selatan dan Gunung Bintang Awai. Analisis dilakukan berdasarkan jumlah kendaraan dan penumpang yang keluar di Terminal Luar Kota Sanggu tahun 1992, sedangkan barang tidak dapat dirinci

karena terminal barang berada di Pasar Panas, Barito Timur. Hasil analisis atas angkutan jalan raya adalah sebagai berikut :

TABEL IV.33
PERAN EKONOMI SUB SUB-SEKTOR ANGKUTAN JALAN RAYA

Kecamatan	Kendaraan	Penumpang	Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	0,000	0,000	0,000	2,153	4,000	0,000
Dusun Hilir	0,000	0,000	0,000	2,153	4,000	0,000
Karau Kuala	0,000	0,000	0,000	2,153	4,000	0,000
Dusun Selatan	0,970	1,463	2,432	2,153	4,000	20,948
Dusun Utara	0,000	0,000	0,000	2,153	4,000	0,000
G.B. Awai	0,030	0,037	0,068	2,153	4,000	0,582
Total	**1,000**	**1,500**	**2,500**			**21,530**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan, terdapat 5 dermaga penumpang yang dioperasikan di Buntok meliputi 5 kecamatan, terkecuali Kecamatan Gunung Bintang Awai. Analisis dilakukan terhadap arus kapal, barang dan penumpang yang berangkat dari setiap dermaga kecamatan. Hasil analisis atas angkutan sungai, danau dan penyeberangan adalah sebagai berikut :

TABEL IV.34
PERAN EKONOMI SUB SUB-SEKTOR
ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

Kecamatan	Kapal	Penumpang	Barang	Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	0,144	0,154	0,442	0,739	8,940	5,000	33,049
Dusun Hilir	0,088	0,125	0,014	0,228	8,940	5,000	10,176
Karau Kuala	0,080	0,201	0,029	0,310	8,940	5,000	13,857
Dusun Selatan	0,128	0,367	0,206	0,700	8,940	5,000	31,301
Dusun Utara	0,060	0,153	0,309	0,523	8,940	5,000	23,368
G.B. Awai	0,000	0,000	0,000	0,000	8,940	5,000	0,000
Total	**0,500**	**1,000**	**1,000**	**2,500**			**111,750**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Sub sub-sektor jasa perangkutan dilihat dari nilai kapal yang melakukan tambat di dermaga untuk angkutan sungai, jumlah kendaraan angkutan yang parkir di terminal untuk angkutan jalan raya, jumlah bongkar barang di dermaga serta jumlah jasa ekspedisi angkutan. Hasil analisis jasa perangkutan adalah sebagai berikut :

TABEL IV.35
PERAN EKONOMI SUB SUB-SEKTOR JASA PERANGKUTAN

Kecamatan	Tambat kapal	Parkir kend.	Bongkar barang	Ekspe-disi	Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	0,135	0,000	0,251	0,000	0,387	0,210	1,000	0,081
Dus. Hilir	0,080	0,000	0,032	0,000	0,113	0,210	1,000	0,024
K.Kuala	0,079	0,000	0,108	0,000	0,187	0,210	1,000	0,039
Dus.Selatan	0,138	0,500	0,055	0,750	1,443	0,210	1,000	0,303
Dus. Utara	0,068	0,000	0,303	0,000	0,371	0,210	1,000	0,078
G.B. Awai	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,210	1,000	0,000
Total	**0,500**	**0,500**	**0,750**	**0,750**	**2,500**			**0,525**

Sumber : Hasil Analisis. 2004

Berdasarkan keempat sub sub sektor pengangkutan, maka nilai potensi total sub sektor pengangkutan ditunjukkan dalam Tabel IV.33.

TABEL IV.36
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR PENGANGKUTAN

Kecamatan	Jalan Raya	ASDP	Udara	Jasa Perangkutan	Total
Jenamas	0,000	33,049	0,000	0,081	33,130
Dusun Hilir	0,000	10,176	0,000	0,024	10,199
Karau Kuala	0,000	13,857	0,000	0,039	13,896
Dusun Selatan	20,948	31,301	0,000	0,303	52,553
Dusun Utara	0,000	23,368	0,000	0,078	23,445
G.B. Awai	0,582	0,000	0,000	0,000	0,582
Total	**21,530**	**111,750**	**0,000**	**0,525**	**133,805**

Sumber : Hasil Analisis. 2004

7. B Sub Sektor Komunikasi

Sub sektor komunikasi dirinci dari jaringan telepon dan lalu-lintas pos dan giro. Pembagian bobot untuk sub sektor ini adalah sebagai berikut :

1. Jaringan telepon nilai = 5, terdiri dari :
   - Fungsi Bisnis = nilai 2
   - Fungsi Sosial = nilai 1
   - Rumah Tangga = nilai 1
   - Wartel = nilai 1
2. Pos dan Giro nilai = 5, terdiri dari :
   - Surat biasa dan tercatat, nilai = 0,4
   - Surat kilat, nilai = 0,6
   - Surat kilat khusus = 1,0
   - Luar negeri = 1,4
   - Wesel pos = 1,6

Berdasarkan pembobotan tersebut, maka nilai peran ekonomi sub sektor komunikasi adalah sebagai berikut :

TABEL IV.37
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR KOMUNIKASI

Kecamatan	Samb Telepon	Pos dan Giro	Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	0,059	0,068	0,127	0,383	6,000	0,291
Dusun Hilir	0,059	0,097	0,155	0,383	6,000	0,357
Karau Kuala	0,059	0,046	0,105	0,383	6,000	0,241
Dusun Selatan	4,647	4,627	9,274	0,383	6,000	21,311
Dusun Utara	0,059	0,081	0,140	0,383	6,000	0,322
G.B. Awai	0,118	0,081	0,199	0,383	6,000	0,458
Total	**5,000**	**5,000**	**10,000**			**22,980**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Hasil analisis atas sektor pengangkutan dan komunikasi menyatakan hirarki peran ekonomi sebagai berikut :

TABEL IV.38
HIRARKI KECAMATAN BERDASAR PERAN EKONOMI
SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

No	Hirarki Kecamatan	Pengangkutan	Komunikasi	Total
1	Dusun Selatan	52,553	21,311	73,864
2	Jenamas	33,130	0,291	33,421
3	Dusun Utara	23,445	0,322	23,768
4	Karau Kuala	13,896	0,241	14,137
5	Dusun Hilir	10,199	0,357	10,556
6	G.B. Awai	0,582	0,458	1,039
Total		**133,805**	**22,980**	**156,785**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

8. Sektor Keuangan

Dalam sektor keuangan, jasa perusahaan yang terdiri dari jasa pengacara, iklan, notaris dan sewa alat sejauh ini sumbangannya mendekati 0 % dan tergolong sub sektor kurang strategis, sehingga tidak dianalisis dalam studi ini.

8. A Sub Sektor Bank

Di Barito Selatan terdapat tiga bank, yaitu BRI, Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (BPK) serta BNI. Ketiganya berada di Kota Buntok, Kecamatan Dusun Selatan. Sebelum pemekaran, Bank Pembantu BPD dan BRI terdapat di Kota Ampah dan Tamiang Layang. Dengan demikian untuk sub sektor bank, nilai dana masyarakat yang dikerahkan oleh bank berupa deposito, giro dan tabungan maupun kredit usaha direpresentasikan oleh Kecamatan Dusun Selatan sendiri.

8. B Sub Sektor Lembaga Keuangan Non Bank

Di Barito Selatan, sub sektor ini mempunyai dua lembaga, yaitu lembaga asuransi dan koperasi. Lembaga asuransi yang ada terdapat di Kota Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, yakni Asuransi Bumiputera dan Asuransi Jiwasraya. Sedangkan koperasi simpan pinjam tersebar di 6 kecamatan, yakni Jenamas (2), Dusun Hilir (2), Karau Kuala (3), Dusun Selatan (2) serta Gunung Bintang Awai (3). Dengan pembagian bobot masing-masing 5, maka diperoleh :

TABEL IV.39
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

Kecamatan	Asuransi	Koperasi	Total	Nilai Kontribusi	Nilai kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	0,000	0,714	0,714	0,443	5,000	1,582
Dusun Hilir	0,000	0,714	0,714	0,443	5,000	1,582
Karau Kuala	0,000	1,071	1,071	0,443	5,000	2,373
Dusun Selatan	5,000	0,714	5,714	0,443	5,000	12,657
Dusun Utara	0,000	0,714	0,714	0,443	5,000	1,582

Bersambung ...

... Lanjutan

Kecamatan	Asuransi	Koperasi	Total	Nilai Kontribusi	Nilai kategori	Peran Ekonomi
G.B. Awai	0,000	1,071	1,071	0,443	5,000	2,373
Total	**5,000**	**5,000**	**10,000**			**22,150**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

8. C Sub Sektor Sewa Bangunan

Analisis terhadap sub sektor ini dilihat dari banyaknya perumahan dinas serta jumlah pertokoan yang disewakan di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan data tahun 2002. Pembobotan diasumsikan sama, yaitu perumahan dinas bernilai 5 dan rumah toko juga bernilai 5. Hasil analisis peran ekonomi sub sektor sewa bangunan adalah sebagai berikut :

TABEL IV.40
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR SEWA BANGUNAN

Kecamatan	Perumahan Dinas	Rumah Toko	Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	0,264	0,156	0,419	1,680	5,000	3,524
Dusun Hilir	0,369	0,000	0,369	1,680	5,000	3,103
Karau Kuala	0,396	0,000	0,396	1,680	5,000	3,325
Dusun Selatan	3,364	4,844	8,208	1,680	5,000	68,951
Dusun Utara	0,330	0,000	0,330	1,680	5,000	2,770
G.B. Awai	0,277	0,000	0,277	1,680	5,000	2,327
Total	**5,000**	**5,000**	**10,000**			**84,000**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dari ketiga sub sektor tersebut, maka hirarki peran ekonomi sektor keuangan adalah sebagai berikut :

TABEL IV.41
HIRARKI KECAMATAN BERDASAR
PERAN EKONOMI SEKTOR KEUANGAN

No	Kecamatan	Bank	Non Bank	Sewa Bangunan	Total
1	Dusun Selatan	33,650	12,657	68,951	115,258
2	Karau Kuala	0,000	2,373	3,325	5,698
3	Jenamas	0,000	1,582	3,524	5,106

Bersambung ...

No	Kecamatan	Bank	Non Bank	Sewa Bangunan	Total
4	G.B. Awai	0,000	2,373	2,327	4,700
5	Dusun Hilir	0,000	1,582	3,103	4,685
6	Dusun Utara	0,000	1,582	2,770	4,353
Total		**33,650**	**22,150**	**84,000**	**139,800**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

9. Sektor Jasa-jasa

9.A Sub Sektor Pemerintahan Umum

Untuk melihat peran ekonomi setiap kecamatan, yang digunakan sebagai alat analisis adalah jumlah pegawai negeri dari dinas, kantor kecamatan, guru dan tata usaha di setiap kecamatan. Pembobotan didasarkan pada golongan kepangkatan, yaitu : Golongan IV nilai 4, golongan III nilai 3, golongan II nilai 2 serta golongan I nilai 1. Hasil analisis sub sektor pemerintahan umum adalah sebagai berikut :

TABEL IV.42
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR PEMERINTAHAN UMUM

Kecamatan	Pegawai				Total	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
	I	II	III	IV				
Jenamas	0,047	0,059	0,114	0,155	0,375	8,210	4,000	12,321
Dusun Hilir	0,059	0,063	0,179	0,252	0,553	8,210	4,000	18,151
Karau Kuala	0,094	0,085	0,240	0,350	0,769	8,210	4,000	25,242
Dusun Selatan	0,600	1,623	1,974	2,544	6,741	8,210	4,000	221,371
Dusun Utara	0,082	0,077	0,223	0,311	0,693	8,210	4,000	22,755
G.B. Awai	0,118	0,093	0,270	0,388	0,870	8,210	4,000	28,561
Total	**1,000**	**2,000**	**3,000**	**4,000**	**10,000**			**328,400**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

9.B Sub Sektor Swasta

Sub sektor ini terdiri dari jasa sosial dan kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi serta perorangan dan rumah tangga. Untuk menganalisis potensi ekonomi, digunakan alat ukur tenaga kerja. Jasa sosial dan kemasyarakatan bidang pendidikan dilihat dari jumlah murid sekolah swasta, di bidang kesehatan dilihat dari jumlah tenaga medis yang memberikan

pelayanan, sedangkan di bidang sosial dilihat dari jumlah anak asuh di panti asuhan dan jumlah pekerja di rumah ibadah. Jasa hiburan dan rekreasi di Barito Selatan perannya belum signifikan, hanya dilihat dari tenaga kerja bidang hiburan. Sedangkan perorangan dan rumah tangga dilihat dari jumlah tenaga kerja yang menawarkan jasa perorangan bagi masyarakat. Jumlah jasa sub sektor swasta di Barito Selatan adalah sebagai berikut :

TABEL IV.43
JUMLAH JASA SUB SEKTOR SWASTA MENURUT KECAMATAN

Kecamatan	Jasa Sosial	Hiburan	Perorangan	Total
Jenamas	266	0	7	273
Dusun Hilir	329	0	12	341
Karau Kuala	463	0	3	466
Dusun Selatan	2313	12	177	2502
Dusun Utara	489	0	2	491
G.B. Awai	195	0	11	206
Total	**4055**	**12**	**212**	**4279**

Sumber : Hasil survai primer, hasil SUSENAS 2002, diolah

Berdasarkan data tersebut, maka nilai peran ekonomi adalah sebagai berikut :

TABEL IV.44
PERAN EKONOMI SUB SEKTOR SWASTA

Kecamatan	Swasta	Nilai Kontribusi	Nilai Kategori	Peran Ekonomi
Jenamas	0,638	0,580	6,000	2,220
Dusun Hilir	0,797	0,580	6,000	2,773
Karau Kuala	1,089	0,580	6,000	3,790
Dusun Selatan	5,847	0,580	6,000	20,348
Dusun Utara	1,147	0,580	6,000	3,993
G.B. Awai	0,481	0,580	6,000	1,675
Total	**10,000**			**34,800**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dari sub sektor pemerintahan umum dan swasta, dapat ditentukan hirarki potensi sektor jasa-jasa sebagai berikut :

TABEL IV.45
HIRARKI KECAMATAN BERDASAR
PERAN EKONOMI SEKTOR JASA-JASA

No	Hirarki Kecamatan	Pemerintahan Umum	Swasta	Total
1	Dusun Selatan	221,371	20,348	241,719
2	G.B. Awai	28,561	1,675	30,237
3	Karau Kuala	25,242	3,790	29,031
4	Dusun Utara	22,755	3,993	26,748
5	Dusun Hilir	18,151	2,773	20,924
6	Jenamas	12,321	2,220	14,541
Total		**328,400**	**34,800**	**363,200**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dari hasil analisis peran ekonomi setiap sektor/ sub sektor di Kabupaten Barito Selatan, maka nilai peran ekonomi seluruhnya adalah sebagai berikut :

TABEL IV.46
PERAN EKONOMI SEKTOR/ SUB SEKTOR EKONOMI
MENURUT KECAMATAN

Sektor/ Sub Sektor	Jenamas	Dusun Hilir	Karau Kuala	Dusun Selatan	Dusun Utara	G.B. Awai	Total
Pertanian	328,95	265,05	239,96	353,59	265,09	559,26	2011,91
Tanaman Pangan	2,83	1,18	9,21	39,45	24,66	68,65	146,00
Perkebunan	2,01	2,21	5,14	31,29	65,77	66,43	172,84
Peternakan	2,60	3,40	2,43	16,36	3,99	3,76	32,54
Kehutanan	213,92	157,93	113,31	119,64	99,38	377,16	1081,35
Perikanan	107,59	100,33	109,88	146,86	71,28	43,26	579,19
Pertambangan	0,03	0,47	0,19	7,86	0,13	4,60	13,29
Non Migas	0,03	0,07	0,02	0,53	0,08	0,56	1,29
Penggalian	0,00	0,40	0,18	7,34	0,05	4,04	12,00
Industri Pengolahan	63,81	37,33	26,98	39,25	0,00	1,14	168,51
Industri Non Migas	63,81	37,33	26,98	39,25	0,00	1,14	168,51
Listrik,Gas & Air Bersih	1,27	1,69	0,92	7,58	1,07	0,66	13,19
Listrik	1,06	1,47	0,43	3,47	0,68	0,60	7,71
Air Bersih	0,21	0,22	0,49	4,11	0,39	0,06	5,48
Bangunan/ Konstruksi	4,17	28,24	3,70	217,59	17,82	28,47	300,00
Perdag, Hotel & Restoran	50,11	47,74	39,39	442,17	13,84	23,56	616,81
Perdagangan Besar & Eceran	49,61	47,14	38,93	382,43	13,84	23,13	555,08
Hotel	0,50	0,60	0,47	25,86	0,00	0,42	27,85
Restoran	0,00	0,00	0,00	33,88	0,00	0,00	33,88

Bersambung ...

... Lanjutan

Sektor/ Sub Sektor	Jenamas	Dusun Hilir	Karau Kuala	Dusun Selatan	Dusun Utara	G.B. Awai	Total
Angkutan & Komunikasi	33,42	10,56	14,14	73,86	23,77	1,04	156,79
Jalan Raya	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	0,58	21,53
Laut,Sungai & Penyeberangan	33,05	10,18	13,86	31,30	23,37	0,00	111,75
Jasa Penunjang angkutan	0,08	0,02	0,04	0,30	0,08	0,00	0,53
Komunikasi	0,29	0,36	0,24	21,31	0,32	0,46	22,98
Keuangan,Persewaan & Jasa Perusahaan	5,11	4,69	5,70	115,26	4,35	4,70	139,80
Bank	0,00	0,00	0,00	33,65	0,00	0,00	33,65
Non Bank	1,58	1,58	2,37	12,66	1,58	2,37	22,15
Sewa Bangunan	3,52	3,10	3,33	68,95	2,77	2,33	84,00
Jasa-Jasa	14,54	20,92	29,03	241,72	26,75	30,24	363,20
Pemerintahan Umum	12,32	18,15	25,24	221,37	22,76	28,56	328,40
Swasta	2,22	2,77	3,79	20,35	3,99	1,68	34,80
Total	**501,41**	**416,69**	**360,02**	**1498,89**	**352,81**	**653,67**	**3783,50**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Peran ekonomi menurut kecamatan secara spasial ditunjukkan dalam Gambar 4.9

Berdasarkan peran ekonomi yang membentuk struktur ruang ekonomi Kabupaten Barito Selatan, terlihat hirarki secara fungsional sebagai berikut :

1. Ranking I Kecamatan Dusun Selatan, yang memiliki peran ekonomi sebesar 1.498,89 atau sebesar 39,62 % total Barito Selatan. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Dusun Selatan mempunyai keunggulan terutama sektor tersier serta sektor sekunder. Sektor tersier, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran (71,69 %); sektor keuangan (82,45 %); dan sektor jasa-jasa (66,55 %). Sedangkan sektor sekunder adalah sektor listrik, gas dan air bersih (57,46 %) dan sektor bangunan/ konstruksi (72,53 %). Untuk sektor pertanian, Dusun Selatan merupakan basis sub sektor peternakan dan perikanan.
2. Ranking II Kecamatan Gunung Bintang Awai, yang memiliki nilai peran ekonomi 653,67 atau 17,35 % dari total Barito Selatan. Kecamatan ini sangat menonjol pada

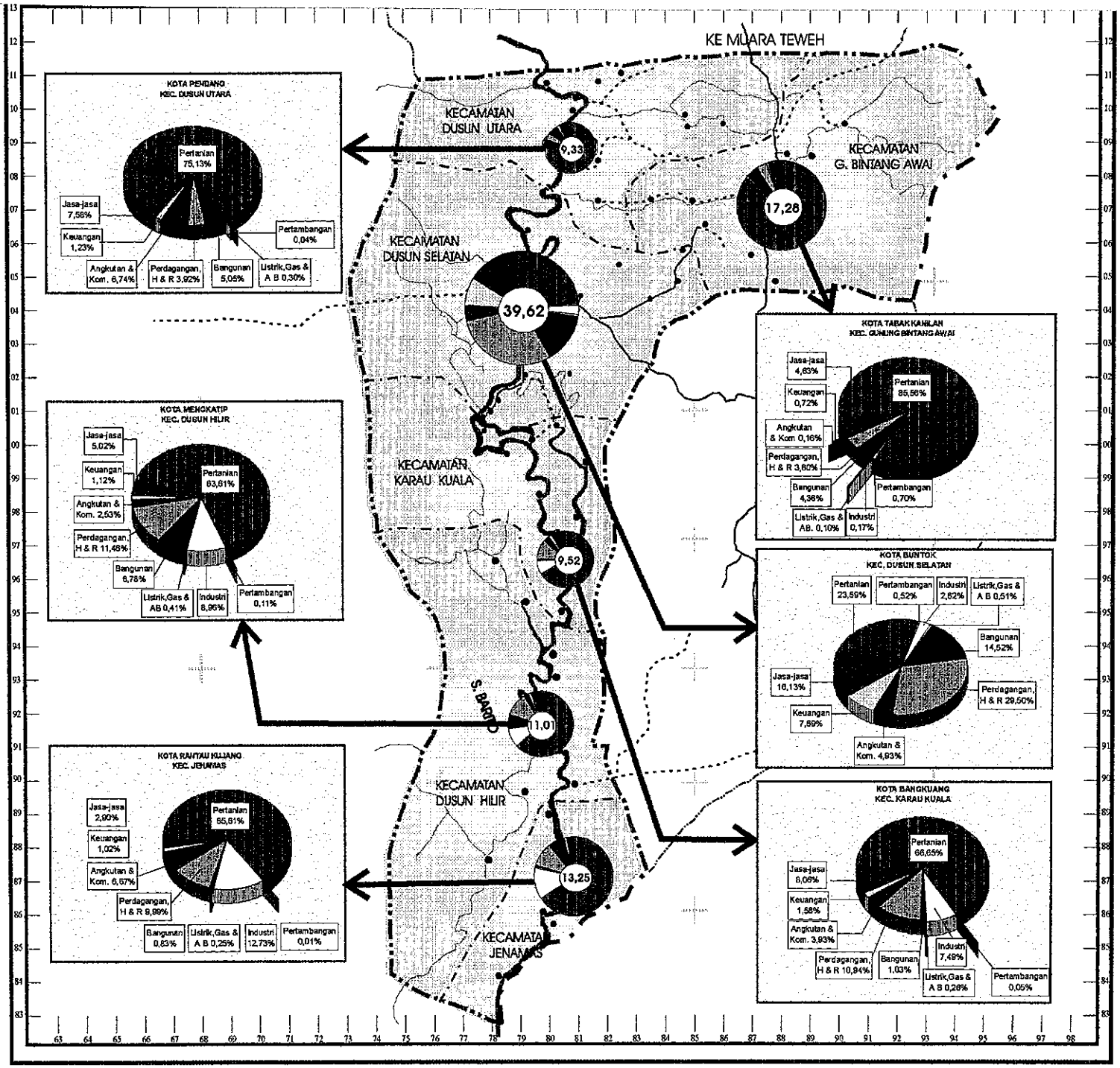

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

LEGENDA

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- PERTANIAN
- PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
- INDUSTRI
- LISTRIK, GAS DAN AIR
- KEUANGAN
- KONSTRUKSI
- PERDAGANGAN
- ANGKUTAN & KOMUNIKASI
- JASA-JASA

INSERT

SUMBER : RTRW KAB. BARITO SELATAN

PETA ANALISIS PERAN EKONOMI

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
4.9	166	1 : 750.000	

sektor primer, yaitu pertanian (27,80 %) dan pertambangan (34,63%). Pada sektor pertanian, kondisi geografis yang karakternya berbeda dengan kecamatan lainnya menyebabkan Gunung Bintang Awai memperoleh nilai terbesar pada sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan. Pertanian tanaman pangan dan perkebunan bertumpu pada sistem pertanian lahan kering, sedangkan kehutanan disebabkan karena luas hutan produksinya dan keberadaan perusahaan pemegang HPH dan IPK. Untuk sektor pertambangan, hampir semua cadangan bahan tambang dan galian potensial berada di Gunung Bintang Awai. Potensi alam Gunung Bintang Awai berbanding terbalik dengan sektor tersier dan sekunder, di mana untuk sektor listrik, gas dan air bersih; angkutan dan komunikasi; serta keuangan, Gunung Bintang Awai adalah yang terendah.

3. Ranking III Kecamatan Jenamas yang memiliki nilai peran ekonomi sebesar 501,41 atau 13,31 % dari total Barito Selatan. Rantau Kujang, Tampulang serta Rangga Ilung adalah pusat industri Barito Selatan. Di desa/ kelurahan tersebut berdiri sentra industri kayu olahan yang membuat Jenamas tertinggi di bidang industri pengolahan (37,87 %). Keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) dengan sub sektor kehutanan menyebabkan Jenamas adalah yang terbesar setelah Gunung Bintang Awai dengan kontribusi 19,78 %. Wilayah Jenamas yang relatif tergenang membuatnya tidak menonjol pada sub sektor pertanian lainnya, selain perikanan (18,58 %). Selain itu, Jenamas berada di bawah Dusun Selatan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran (8,35 %) serta angkutan dan komunikasi (21,32%). Jenamas sangat lemah pada sektor pertambangan (2,60 %), sektor bangunan/ konstruksi (1,39%) serta sektor jasa-jasa (4,00 %). Lemahnya sektor bangunan/konstruksi dan jasa-jasa menunjukkan bahwa

posisi Jenamas sebagai pusat industri pengolahan belum dapat menggerakkan kegiatan ikutan.

4. Ranking IV Kecamatan Dusun Hilir yang mendapatkan nilai peran ekonomi sebesar 416,69 atau 11,06 % total Barito Selatan. Kecamatan Dusun Hilir rata-rata mendapat nilai yang cukup baik untuk semua sektor, walaupun tidak terlalu menonjol. Untuk sub sektor kehutanan yang merupakan pemberi nilai ekonomi terbesar bagi Barito Selatan, Dusun Hilir berada di bawah Gunung Bintang Awai dan Jenamas dengan nilai potensi 157,93 atau 14,61 % yang disebabkan karena kedudukannya sebagai penghasil rotan terbesar di Barito Selatan. Untuk sektor listrik, gas dan air bersih Dusun Hilir berada di bawah Dusun Selatan dengan kontribusi 12,80 %.
5. Ranking V Kecamatan Karau Kuala yang mendapatkan nilai peran ekonomi sebesar 360,02 atau sebesar 9,56 %. Pada sektor pertanian sebagai andalan Barito Selatan, kecamatan ini memberikan kontribusi yang terendah, yakni sebesar 13,17 %, sebagian besar berasal dari sub sektor kehutanan dengan hasil andalannya rotan yang berpusat di Desa Babai. Untuk sub sektor perikanan, Karau Kuala merupakan potensi utama Wilayah Hilir Barito dengan kontribusi sebesar 18,97 % yang berpusat di Bangkuang. Nilai peran ekonomi Karau Kuala relatif lemah, terutama pada sektor pertambangan (1,46 %) dan bangunan/ konstruksi (1,24 %).
6. Ranking VI adalah Kecamatan Dusun Utara yang mendapatkan nilai peran ekonomi sebesar 352,81 atau sebesar 9,37 %. Kecamatan ini tidak mempunyai nilai sama sekali pada sub sektor industri non migas dan hotel. Dusun Utara mendapat peringkat terendah pada sektor industri pengolahan (0 %), perdagangan, hotel dan restoran (2,31 %), keuangan (3,11 %). Untuk sektor pertanian, Dusun Utara hanya menonjol di sub sektor perkebunan dengan kontribusi 38,05 % serta peternakan sebesar 12,27 %.

Peran ekonomi Kecamatan Dusun Selatan terpaut cukup jauh dengan kecamatan lainnya. Dengan demikian dalam penentuan orde struktur ruang ekonomi, Kecamatan Dusun Selatan langsung ditetapkan sebagai kecamatan Orde I. Sedangkan orde kecamatan lainnya dianalisis secara matematis dari peran ekonomi masing-masing. Untuk menetapkan organisasi ruang berdasarkan fungsi ekonomi, dicari interval kelas dengan cara :

= Skor tertinggi - skor terendah / jumlah kelas

= 653,67 - 352,81 / 3

= 100,29

Sehingga interval kelasnya adalah :

Orde IV : 352,81 < x < 453,10

Orde III : 453,10 < x < 553,39

Orde II : > 553,39

Dengan kriteria kelas tersebut, dapat ditentukan :

1. Orde I : Dusun Selatan
2. Orde II : Gunung Bintang Awai
3. Orde III : Jenamas
4. Orde IV : Dusun Hilir, Karau Kuala dan Dusun Utara

Dari hasil analisis penentuan struktur ruang ekonomi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terjadinya sentralitas peran ekonomi Kecamatan Dusun Selatan menyebabkan secara struktur ruang, terdapat kesenjangan antara Dusun Selatan dibanding kecamatan lainnya. Kecamatan Dusun Selatan sebagai Orde I mempunyai peran ekonomi dua kali lebih besar dibanding Gunung Bintang Awai sebagai Orde II. Hal tersebut disebabkan

dukungan infrastruktur untuk kecamatan lainnya belum menunjang sumber daya alam yang dimiliki.

2. Kecamatan Gunung Bintang Awai secara geografis adalah wilayah belakang Dusun Selatan, tetapi secara ekonomi merupakan Kecamatan Orde II yang memberikan peran paling signifikan setelah Dusun Selatan. Dalam hal ini keunggulan Gunung Bintang Awai adalah nilai sumber daya alam, sedangkan kelemahannya adalah dalam hal ketersediaan prasarana.
3. Orde III adalah Kecamatan Jenamas dengan peran ekonomi 13,31 %, sedangkan Orde IV adalah Kecamatan Dusun Hilir, Karau Kuala dan Dusun Utara dengan peran ekonomi berkisar 9,37 % sampai 11,06 %. Keempat kecamatan ini mempunyai sumber daya alam yang cukup homogen dengan prasarana yang relatif kurang. Kecamatan Jenamas adalah pusat aktivitas ekonomi Wilayah Hilir Sungai Barito, sedangkan Kecamatan Dusun Utara sebagai wilayah paling hulu Sungai Barito adalah yang paling rendah peran ekonominya.

Secara spasial struktur ruang ekonomi yang terbentuk di Kabupaten Barito Selatan ditunjukkan dalam Gambar 4.10

4.4 Analisis Interaksi Wilayah

Analisis interaksi wilayah bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara kecamatan sebagai unit-unit spasial di Kabupaten Barito Selatan. Analisis ini terdiri atas analisis jaringan transportasi sebagai interaksi fisik, analisis interaksi ekonomi dan analisis interaksi sosial budaya.

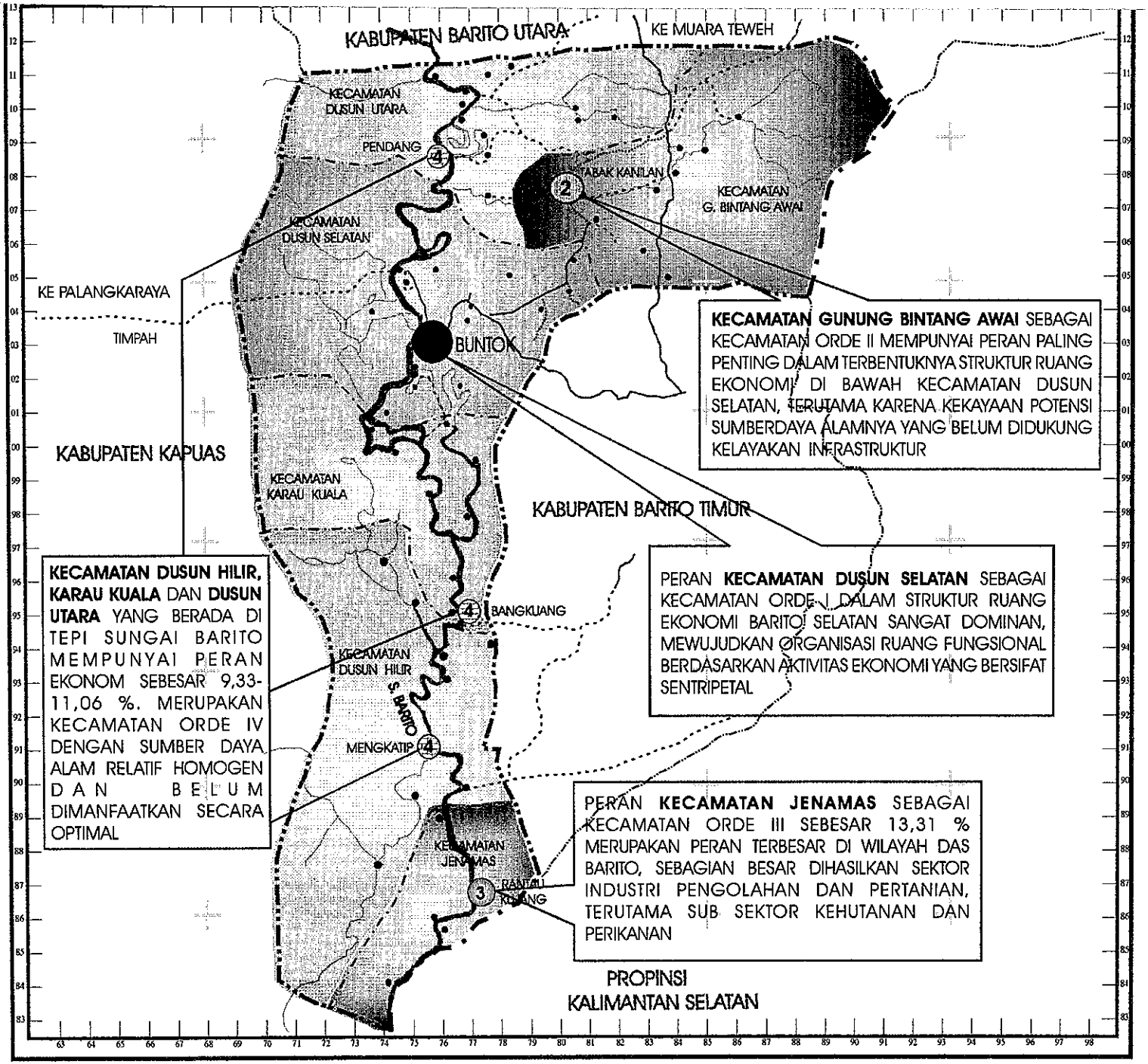

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

LEGENDA

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- KECAMATAN ORDE I PUSAT PELAYANAN EKONOMI REGIONAL
- KECAMATAN ORDE II SUB PUSAT PELAYANAN EKONOMI REGIONAL
- KECAMATAN ORDE III SUB PUSAT PELAYANAN EKONOMI REGIONAL
- KECAMATAN ORDE IV PUSAT PELAYANAN EKONOMI LOKAL
- DESA
- WILAYAH PERAN EKONOMI ORDE I
- WILAYAH PERAN EKONOMI ORDE II
- WILAYAH PERAN EKONOMI ORDE III
- WILAYAH PERAN EKONOMI ORDE IV

INSERT

SUMBER : RTRW KAB. BARITO SELATAN

PETA ANALISIS STRUKTUR RUANG EKONOMI

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
4.10	171	1 : 750.000	

4.4.1 Analisis Jaringan Transportasi

4.4.1.1 Transportasi Sungai

Transportasi sungai sangat besar peranannya, di mana 5 dari 6 ibu kota kecamatan mempunyai keterikatan sangat kuat melalui jalur sungai. Bahkan akses langsung ke Kota Pendang, Mengkatip dan Jenamas adalah lewat transportasi sungai. Transportasi sungai ini menggunakan bermacam moda angkutan, baik untuk barang, penumpang atau kombinasi keduanya. Saat ini ada 5 *node* transportasi sungai, yaitu dermaga di Buntok, Pendang, Bangkuang, Mengkatip dan Jenamas. Secara detail dibahas interaksi setiap kecamatan melalui transportasi sungai ini.

1. Kecamatan Jenamas

Kecamatan Jenamas mempunyai dermaga utama yang berkedudukan di Kota Rantau Kujang. Kecamatan ini dikelilingi sungai, sehingga semua akses dari dan menuju kecamatan dilayani oleh moda transportasi sungai. Jalan darat dari Pasar Panas (Barito Timur) menuju Rantau Kujang masih sebatas Desa Kelanis, dan masih harus dilanjutkan dengan sarana *speed boat* atau motor getek.

Sebagai wilayah perbatasan dengan Kalimantan Selatan, Dermaga Jenamas memegang posisi strategis yang merupakan pintu gerbang aliran barang dan penumpang dari maupun menuju Kalimantan Selatan. Selain itu, Desa Rangga Ilung merupakan pusat penjualan bahan bakar lalu-lintas Puruk Cahu-Muara Teweh-Banjarmasin-Palangka Raya.

Arus penumpang dilayani oleh sarana angkutan bis air antar provinsi yang lewat dari Muara Teweh (Barito Utara) dan Puruk Cahu (Murung Raya) di Hulu Barito menuju Banjarmasin dan Palangka Raya. Angkutan lain adalah *speedboat* yang menghubungkan kota kecamatan lainnya maupun antar kabupaten dan antar provinsi, yaitu Jenamas-Kuala Kapuas, Jenamas-Danau Panggang dan Jenamas-Banjarmasin. Selanjutnya angkutan motor

getek yang biasanya membawa para pedagang dan barang dari Danau Panggang (Kalimantan Selatan) dan Palingkau (Kapuas) untuk berjualan pada hari pasar.

Sementara arus barang dibawa oleh pedagang dengan sarana motor getek, *tug boat* dan tongkang. Jenis barang yang dibawa masuk ke Jenamas menurut data tahun 2002 adalah bahan bakar (79,53%) untuk menyuplai para pedagang bahan bakar yang berpusat di Desa Rangga Ilung, sisanya 10,70 % sembako yang dibawa pedagang luar, kemudian 6,19 % bahan bangunan dan 3,59 % barang campuran kebutuhan hidup masyarakat lokal. Barang yang keluar dan dibeli masyarakat Kalimantan Selatan adalah hasil hutan serta barang campuran.

Berdasarkan kondisi tersebut, secara umum Dermaga Jenamas di Rantau Kujang adalah dermaga yang paling tinggi aktivitasnya setelah Dermaga Buntok. Kedudukan Jenamas sebagai kecamatan yang tergantung sepenuhnya pada jalur Sungai Barito dan posisinya di perbatasan Barito Selatan-Kalimantan Selatan memperkuat kekuatan interaksi wilayah Jenamas secara fisik melalui Sungai Barito.

2. Kecamatan Dusun Hilir

Kota Mengkatip sebagai pusat kegiatan Kecamatan Dusun Hilir sampai saat ini masih belum terhubungkan dengan jalur transportasi darat. Posisinya yang berada di seberang Sungai Barito dilihat dari ketersediaan infrastruktur jalan eksisting, menjadikan kota ini masih bertumpu pada jalur sungai untuk jangka panjang. Sementara wilayah yang telah terhubungkan jalur darat adalah Desa Kelanis melalui jalan perusahaan batu bara dari Pasar Panas (Barito Timur), yang juga merupakan jalur alternatif darat-sungai menuju Buntok.

Arus penumpang di Mengkatip memang yang paling rendah di antara 5 kota kecamatan lainnya, tetapi arus kapal yang keluar masuk adalah tertinggi setelah Buntok

dan Jenamas. Sarana penumpang adalah bis air, *speed boat* dan motor getek. Selain rute antar kabupaten dan antar provinsi yang transit di Mengkatip, juga rute Mengkatip-Kuala Kapuas dengan *speed boat* dan motor getek ke Danau Panggang (Kalimantan Selatan). Untuk rute dalam kecamatan, terdapat sarana motor getek menuju Desa Kelanis dan Desa Batampang.

Arus barang hampir semuanya berasal dari Banjarmasin yang dibawa melalui *tug boat* dan tongkang. Jumlah dan jenis barang yang masuk ke Mengkatip adalah yang paling rendah di antara 5 kecamatan. Berdasarkan data tahun 2002, jumlah yang terbanyak adalah bahan bakar (6.316 ton) atau 80,97 % dari total jenis barang yang masuk Mengkatip. Sisanya adalah barang campuran kebutuhan sehari-hari (14,92 %), sembako (3,41 %) dan bahan bangunan (0,69 %). Sedangkan barang yang dibawa keluar tercatat hanya 24 ton hasil hutan dan 240 ton barang campuran, serta kayu *log* yang transit.

Dengan demikian, Mengkatip telah dilayani trayek-trayek sungai intra dan inter wilayah yang baik. Arus penumpang dan barang di Dermaga Mengkatip adalah yang terendah sementara jenis transportasi darat belum berjalan. Hal ini menunjukkan interaksi fisik di wilayah Dusun Hilir tergolong masih rendah.

3. Kecamatan Karau Kuala

Keterhubungan fisik Kecamatan Karau Kuala lewat sungai lebih rendah kebutuhannya dibanding Jenamas, Dusun Hilir dan Dusun Utara. Hal itu disebabkan sebagian wilayah Karau Kuala dapat diakses melalui jalur darat. Arus kendaraan air yang keluar-masuk wilayah Karau Kuala adalah 15,95 % dari total lalu-lintas air Barito Selatan atau yang terendah dibanding 4 kecamatan tepi Sungai Barito lainnya. Dengan posisinya di tengah Kota Buntok dengan Mengkatip-Jenamas, menjadikan Bangkuang sebagai wilayah transit lalu-lintas sungai Barito Selatan.

Mobilitas penduduk lewat jalur sungai memang cukup tinggi, terutama arus keluar yaitu 44.690 orang tahun 2002 atau rata-rata 3.724,17 orang setiap bulan. Arus penumpang masuk adalah yang terendah di Barito Selatan, yaitu 27.647 orang atau rata-rata 2.880 orang/ bulan di tahun 2002. Sementara arus barang yang masuk didominasi bahan bakar (78,66 %), diikuti barang campuran (14,78 %), sembako (5,64 %) serta sedikit hasil hutan dan bahan bangunan. Barang yang keluar sebagai hasil produksi masyarakat adalah hasil hutan, terutama rotan (86,13 %). Sisanya adalah barang campuran (9,48 %) dan bahan bakar (4,39 %).

Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa angkutan sungai di Kecamatan Karau Kuala yang berpusat di Kota Bangkuang masih sangat diandalkan penduduk karena terbatasnya daya jangkau dan kemampuan pelayanan transportasi darat. Selain itu jalur sungai tetap diandalkan untuk mendistribusikan hasil hutan dan bahan bakar. Dilihat dari jalur utama dari Palangka Raya-Banjarmasin menuju Buntok-Muara Teweh-Puruk Cahu, Bangkuang berada di tengah-tengah sehingga pelayanan transportasi sungai yang tersedia cukup optimal bagi masyarakat.

4. Kecamatan Dusun Selatan

Di Kota Buntok, terdapat 3 dermaga yang semuanya difungsikan. Dermaga Pasar Lama adalah dermaga utama penumpang dan juga barang. Di pusat Kota Buntok, terdapat Dermaga Pasar Beringin yang merupakan dermaga barang, terutama pada saat datangnya pedagang di hari pasar dan sebagai dermaga alternatif di saat air Sungai Barito surut. Dermaga Jelapat yang paling hilir semula disiapkan sebagai dermaga utama, namun sekarang merupakan tempat dermaga khusus bahan bakar dan kantor Sub Dinas Angkutan Sungai,Danau dan Penyeberangan Barito Selatan.

UPT-PUSTAK-UNSP

Kecamatan Dusun Selatan adalah tempat arus lalu-lintas paling padat di Barito Selatan. Arus penumpang yang keluar-masuk Buntok adalah sebanyak 159.285 orang atau mencapai 37,26 % dari keseluruhan Barito Selatan. Terdapat bis air, *speed boat, long boat*, motor getek, tangkalasa dan truk air yang merupakan sarana angkutan penumpang. Sekitar 90 % berangkat dari Buntok, sisanya adalah rute transit Puruk Cahu-Muara Teweh-Banjarmasin-Palangka Raya. Dari segi barang, orang memilih jalur sungai sebagai alternatif untuk rute yang sulit diakses dan barang-barang tertentu saja. Sehingga dilihat dari lalu-lintas barang, Buntok berada di bawah Pendang, Jenamas dan Bangkuang. Seperti halnya kecamatan lain, barang terbanyak yang masuk adalah bahan bakar (69,48 %) sementara barang yang keluar adalah hasil hutan (79,49%).

5. Kecamatan Dusun Utara

Kecamatan Dusun Utara adalah kecamatan sepanjang Sungai Barito yang paling hulu, merupakan pintu gerbang aliran penumpang dan barang dari maupun menuju wilayah Kabupaten Barito Utara serta Murung Raya. Kota Pendang sebagai ibukota Dusun Utara sendiri seperti halnya Kota Mengkatip berada di seberang Sungai Barito, sehingga jalan darat dari Buntok tidak dapat mencapai Pendang dan berhenti di tepi Sungai Barito. Beberapa wilayah Dusun Utara justru dapat dicapai melalui jalur darat seperti Desa Bundar, Maruga, Hingan, Panarukan dan Danau Bamure, yang secara fisik lebih berinteraksi dengan wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai. Desa yang berada di tepi Sungai Barito adalah Desa Marawan Baru, Marawan Lama, Reong dan Tarusan.

Dengan kondisi tersebut, ketergantungan Dusun Utara terhadap jalur sungai masih sangat besar. Walaupun arus kapal yang keluar maupun masuk wilayah Dusun Utara adalah yang terendah intensitasnya di Barito Selatan, tetapi arus penumpang adalah yang tertinggi setelah Dusun Selatan, yaitu 17,11 % atau rata-rata 3.119,25 orang menurut data

tahun 2002. Begitu juga arus barang masuk adalah yang terbesar intensitasnya di Barito Selatan, sedangkan arus barang keluar berada di bawah Jenamas. Barang yang masuk Dusun Utara terbagi antara bahan bangunan (27,62 %), sembako (25,82 %), bahan bakar (25,69 %) dan barang campuran (20,87 %). Sedangkan barang yang keluar 97,14 % adalah hasil hutan, sisanya sembako dan kayu *log*. Kayu *log* dari Pendang adalah yang terbesar, karena anak desa Gunung Rantau adalah pelabuhan kayu bulat yang berasal dari Gunung Bintang Awai.

Hasil analisis tersebut menunjukkan Kecamatan Dusun Utara dengan pusat lalu-lintasnya Dermaga Pendang adalah wilayah dengan intensitas yang tinggi. Masyarakat sangat bergantung pada jalur sungai, demikian juga distribusi barang yang berasal dari Kalimantan Selatan. Interaksi wilayah Dusun Utara cenderung mendekat ke hilir, yaitu ke arah Banjarmasin dibandingkan ke arah Muara Teweh maupun Puruk Cahu.

Berdasarkan analisis keterhubungan fisik melalui transportasi sungai, terlihat dalam jangka panjang peranan moda transportasi sungai masih akan dominan di wilayah Barito Selatan. **Kota Pendang, Mengkatip** dan **Rantau Kujang** mempunyai keterikatan yang sangat kuat dengan aliran Sungai Barito karena kendala aksesibilitas dan posisi geografis. **Kota Buntok** adalah pusat pergerakan transportasi sungai berkaitan dengan mobilitas penumpang, dan transit barang. Hal itu dikarenakan letaknya sebagai jalur penghubung sungai dan darat dan keberadaannya sebagai pusat kegiatan ekonomi serta pemerintahan.

Kota dengan lalu lintas yang tinggi intensitasnya di luar Kota Buntok adalah **Kota Rantau Kujang** dan **Kota Pendang**. Hal tersebut disebabkan peran strategis kedua kota kecamatan ini. Kota Pendang berbatasan langsung dengan Kabupaten Barito Utara, sedang Rantau Kujang berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan). Rantau Kujang juga merupakan pintu masuk lalu-lintas sungai dari Kabupaten Kapuas maupun

Danau Panggang (Hulu Sungai Utara). Arus kapal yang masuk lebih tinggi intensitasnya di Rantau Kujang, sementara arus barang lebih tinggi di Pendang.

Kota Mengkatip sebagai ibukota Kecamatan Dusun Hilir adalah kota dengan tingkat interaksi yang rendah, dilihat dari kebutuhan wilayah ini yang belum terhubungkan dengan baik melalui jalur darat. Kecamatan Karau Kuala pada umumnya lebih kuat berinteraksi melalui jalur Sungai Barito, tetapi **Kota Bangkuang** sendiri cenderung dekat secara fisik dengan Kota Ampah di wilayah Barito Timur karena akses jalur darat menuju kota tersebut.

Adapun arus barang yang masuk umumnya adalah bahan bakar, sembako, bahan bangunan dan barang campuran yang dibawa pedagang dari wilayah Kalimantan Selatan. Sedangkan barang yang keluar merupakan hasil produksi masyarakat, terdiri atas hasil hutan, barang campuran serta kayu log dan kayu masak. Barang hasil hutan umumnya berupa rotan dan getah karet, sedangkan barang campuran adalah hasil industri kecil masyarakat.

Analisis keterhubungan fisik melalui jalur Sungai Barito ditunjukkan dalam Gambar 4.11.

4.4.1.2 Transportasi Darat

Dari enam kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan, hanya dua kecamatan yang berada pada bentang transportasi darat, yaitu Kecamatan Dusun Selatan dan Gunung Bintang Awai. Kecamatan Dusun Selatan menduduki posisi strategis karena keberadaan Kota Buntok sebagai ibukota kabupaten yang juga merupakan pintu gerbang jalur darat. Sedangkan Kecamatan Gunung Bintang Awai dilewati jalan provinsi Puruk Cahu (Murung Raya)-Muara Teweh (Barito Utara)-Ampah (Barito Timur) menuju

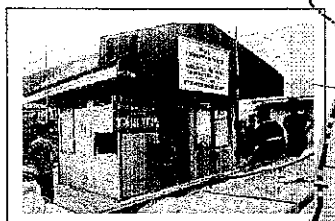

DERMAGA PENDANG
DERMAGA DI WILAYAH HULU YANG BERBATASAN DENGAN KAB. BARITO UTARA

DERMAGA PASAR LAMA
DERMAGA BARANG DAN PENUMPANG UTAMA DI KOTA BUNTOK

DERMAGA PASAR BERINGIN
MERUPAKAN DERMAGA BARANG PADA SAAT HARI PASAR DAN MERUPAKAN DERMAGA ALTERNATIF PADA SAAT AIR SUNGAI BARITO SURUT

DERMAGA JELAPAT
DERMAGA KHUSUS BAHAN BAKAR YANG JUGA MERUPAKAN LOKASI KANTOR SUBDIN ASDP BARITO SELATAN

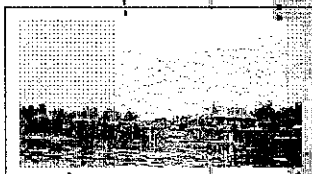

DERMAGA BANGKUANG

KOTA MENGKATIP
KOTA YANG PALING RENDAH TINGKAT INTERAKSI LEWAT JALUR SUNGAI DILIHAT DARI LALU-LINTAS BARANG & PENUMPANG

DERMAGA JENAMAS DI RANTAU KUJANG
BERADA DI PERBATASAN DENGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. BERSAMA DERMAGA PENDANG MERUPAKAN YANG TERTINGGI INTERAKSI NYA LEWAT JALUR SUNGAI

KE MUARA TEWEH
KE PALANGKARAYA
KE TANJUNG
KE BANJARMASIN
KE BARITO KUALA

KECAMATAN DUSUN UTARA
KECAMATAN DUSUN SELATAN
KECAMATAN KARAU KUALA
KECAMATAN DUSUN HILIR
KECAMATAN G. BINTANG AWAI
KECAMATAN JENAMAS

PENDANG
TIMPAH
BUNTOK
BANGKUANG
MENGKATIP
TARAK KANILAN
KELUA
RANTAU KUJANG

S. BARITO

TARUSAN
PANARUKAN
MARAWAN BARU
MARAWAN LAMA
SUNDAR
TELEKOI
HULU TAMPANG
MARUGA
HINGAN
DANAU BANGIRE
MALINGAI
PATAS II
BINTANG ARA
PATAS I
MAJUNDRE
JAYAMBAN
MUARA SUNGAI
MUKA HAJI
SARIMBUAH
TELUK MAMPUN
PARARAPAK
PENDA ASAM
KALAHEI
TELANG ANDRAU
TETELANAN
DANGKA
GAGUTUR
MADARA
MABU IN
SANGGU
SABABILAH
PANANGKU
LEMBENG
HILIR SPER
JELAPAT
DANAU SADAR
DANAU GANTING
BARU
TELUK TELAGA
MUARA TALANG
MUARA ARAU
TELUK SAMPUDAU
TAMPUAK
MALITIN
BABAI
BATAMPANG
TELUK BETUNG
BATULAR
SUKAT BARU
TELUK TIMBAI
DAMPARAN
MAHAJANDAU
KALANIS
RANGGA ILUNG
SUNGAI JAYA
TAMPULANG
RANTAU BARUANG
TABALAN

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

LEGENDA

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- IBUKOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KECAMATAN
- DESA
- JALAN NASIONAL
- JALAN PROVINSI
- JALAN ASPAL
- JALAN BATU
- JALAN TANAH
- DANAU
- SUNGAI
- JALUR ANGKUTAN SUNGAI ANTAR KABUPATEN DAN ANTAR PROVINSI
- JALUR ANGKUTAN SUNGAI ANTAR KECAMATAN
- FASILITAS DERMAGA

INSERT

SUMBER :
RTRW KAB. BARITO SELATAN

PETA ANALISIS
JARINGAN TRANSPORTASI SUNGAI

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
4.11	179	1 : 750.000	

Banjarmasin-Palangka Raya. Fasilitas terminal yang tersedia di Kabupaten Barito Selatan adalah Terminal Sanggu yang merupakan terminal luar kota serta Terminal Uria Mapas yang merupakan terminal dalam kota.

Untuk pelayanan angkutan selain Dusun Selatan, hanya Kecamatan Gunung Bintang Awai yang dilayani angkutan perdesaan, yaitu sebanyak 4 unit. Sedangkan Kota Bangkuang, ibu kota Kecamatan Karau Kuala belum terealisasi karena buruknya kondisi jalan. Terminal dalam kota Uria Mapas melayani rute angkutan dalam kota, yaitu rute Buntok Kota-Terminal Sanggu, Buntok-Kalahien dan Penda Asam serta Buntok-Desa Baru.

Kota Buntok adalah pusat mobilitas angkutan jalur darat ini. Terminal Sanggu melayani rute angkutan antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi. Antar kota dalam provinsi adalah menuju Kota Ampah dan Pasar Panas (Barito Timur) yang dulu masih masuk wilayah Barito Selatan, kemudian juga menuju Kandui-Muara Teweh (Barito Utara). Angkutan yang paling penting adalah menuju Banjarmasin dan Palangka Raya. Angkutan menuju Banjarmasin dilayani 8 perusahaan otobus dengan 24 unit bus pada siang hari serta 4 perusahaan otobus dengan 6 unit bus pada malam hari Selain Kota Banjarmasin, banyak juga penumpang menuju kota-kota yang dilewati, seperti Martapura dan Banjarbaru. Sementara sarana angkutan yang melalui rute Buntok-Banjarmasin-Palangka Raya dilayani 4 perusahaan otobus dengan jumlah 7 unit bus berangkat pagi hari dan 2 unit bus pada malam hari.

Dari data arus penumpang yang keluar dan masuk di Terminal Sanggu, terlihat bahwa interaksi wilayah jauh lebih kuat terhadap Kota Banjarmasin, di mana terdapat 131.109 penumpang ke Banjarmasin atau 10.925,75 orang/ bulan dibanding 2.468 orang ke Palangka Raya atau 205,67 orang/ bulan. Jumlah kendaraan dari dan menuju Banjarmasin

sangat padat. Tetapi arus penumpang dari Palangka Raya juga cukup besar, yaitu 22.560 orang atau 1.880 orang/ bulan.

Sedangkan dari 3 trayek antar kota antar kabupaten, arus terpadat adalah menuju Pasar Panas, baik penumpang maupun kendaraan. Kota Ampah di urutan kedua, dan yang paling kecil intensitasnya adalah Kandui serta Muara Teweh. Hal ini tidak berarti Pasar Panas lebih kuat berinteraksi terhadap Kota Buntok, tetapi sebagian penumpang trayek Buntok-Pasar Panas juga turun di Ampah ataupun melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin. Jadi Kota Pasar Panas merupakan terminal terakhir wilayah Timur Kalimantan Tengah menuju Kota Banjarmasin.

Dengan demikian, pada umumnya interaksi wilayah melalui moda transportasi darat di Barito Selatan hanya melibatkan wilayah Dusun Selatan dan Gunung Bintang Awai. Akses menuju Kota Bangkuang melalui trayek Buntok-Siong-Bangkuang masih belum terealisasi hingga saat ini karena kondisi jalan. Sedangkan interaksi wilayah antar provinsi sangat kuat dengan Kota Banjarmasin, dilihat dari arus penumpang dan barang. Sebaliknya, penambahan armada bus menuju Palangka Raya selama beberapa waktu terakhir menunjukkan interaksi dengan Kota Palangka Raya juga semakin menguat.

Interaksi wilayah dalam provinsi yang paling kuat adalah dengan Kota Ampah. Arus kendaraan dan penumpang juga menunjukkan interaksi terhadap Kota Kandui dan Muara Teweh relatif rendah dibanding Ampah dan Pasar Panas. Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat orientasi fisik Kota Buntok yang mengarah kepada Kota Banjarmasin, sehingga interaksi lebih terjadi dengan kota-kota di sepanjang koridor Buntok-Ampah-Tamiang Layang menuju Banjarmasin.

Secara spasial, interaksi wilayah melalui jaringan transportasi darat ditunjukkan pada Gambar 4.12

TERMINAL LUAR KOTA DI SANGGU.
MERUPAKAN TERMINAL ANGKUTAN PERDESAAN, ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DAN ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI

TERMINAL URIA MAPAS
TERMINAL DALAM KOTA YANG MELAYANI RUTE BUNTOK-SANGGU, BUNTOK-KALAHIEN, BUNTOK-PENDA ASAM DAN BUNTOK-DESA BARU

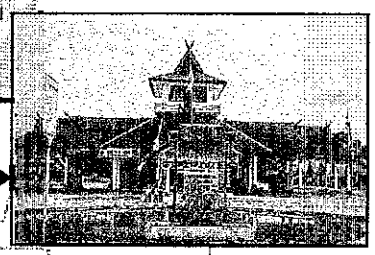

TERMINAL AMPAH
TERMINAL LUAR KOTA KAB. BARITO TIMUR YANG MELAYANI PENUMPANG DARI BUNTOK DAN MUARA TEWEH MENUJU BANJARMASIN-PALANGKA RAYA

TERM. JARI JANANG KALALAWAH
TERMINAL DALAM KOTA TAMIANG LAYANG YANG BARU DIBANGUN SETELAH PEMEKARAN, MELAYANI INTERNAL KABUPATEN BARITO TIMUR.

TERMINAL PASAR PANAS
TERMINAL LUAR KOTA SEBAGAI TEMPAT JEMBATAN TIMBANG BARANG DARI DAN MENUJU KALIMANTAN SELATAN. MERUPAKAN PINTU MASUK JALUR DARAT KE BARITO TIMUR, BARITO SELATAN, BARITO UTARA DAN MURUNG RAYA DARI KALIMANTAN SELATAN

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

LEGENDA

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- IBUKOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KECAMATAN
- DESA
- JALAN NASIONAL
- JALAN PROVINSI
- JALAN ASPAL
- JALAN BATU
- JALAN TANAH
- DANAU
- SUNGAI
- WILAYAH LAYANAN ANGKUTAN UMUM
- ANGKUTAN PERDESAAN
- ANGKUTAN ANTAR KABUPATENSUNGAI
- ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI
- FASILITAS TERMINAL

INSERT

SUMBER :
RTRW KAB. BARITO SELATAN

PETA ANALISIS
JARINGAN TRANSPORTASI DARAT

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
4.12	182	1 : 750.000	

4.4.2 Analisis Interaksi Ekonomi

Analisis interaksi ekonomi dimaksudkan untuk melihat keterkaitan intra dan inter wilayah di Kabupaten Barito Selatan melalui aktivitas-aktivitas ekonomi. Ada 2 komponen yang saling terkait di sini, yaitu masyarakat dan pedagang. Pedagang sendiri terbagi menjadi pedagang lokal maupun pedagang keliling yang mempunyai pola tersendiri, khususnya di wilayah tepi Sungai Barito.

Kecamatan Jenamas

Aktivitas ekonomi masyarakat Jenamas yang berpusat di Kota Rantau Kujang relatif dilakukan di wilayah Jenamas sendiri. Aktivitas berbelanja dilakukan pada dua pasar, yaitu pasar kecamatan di Rantau Kujang dan pasar Desa Rangga Ilung. Mata pencaharian penduduk Jenamas sebagian besar adalah buruh industri pengolahan kayu, nelayan dan tani, serta peternak. Desa Rangga Ilung adalah tempat pedagang bahan bakar bagi kendaraan Sungai Barito. Berdirinya sejumlah *bandsaw* di seberang Kota Rantau Kujang menyebabkan penduduk menggantungkan hidupnya pada industri pengolahan kayu yang bersifat temporer dan musiman. Ketika pasokan kayu masak berhenti, masyarakat beralih untuk bertani dan beternak.

Dari hasil survai primer, 100 % penduduk Rantau Kujang yang merupakan representasi Jenamas memilih berbelanja barang-barang sehari di pasar kecamatan setiap Jumat. Sedangkan untuk barang-barang khusus, sebesar 76 % responden menyatakan berbelanja di Banjarmasin yang lebih dekat dibanding Kota Buntok dan 24 % menyatakan cukup berbelanja di Rantau Kujang saja.

Interaksi ekonomi secara lebih kuat muncul dari pedagang keliling. Penduduk asli yang berdagang di Rantau Kujang hanya berada pada 8 toko dan 13 kios, sedangkan beberapa diantaranya mengisi los pasar secara non permanen. Pola interaksi perdagangan

mempunyai kemiripan dengan Pasar Bangkuang dan Mengkatip yang berada di jalur perdagangan Sungai Barito. Tetapi berdasar observasi di lapangan, terlihat bahwa Pasar Rantau Kujang adalah pusat perdagangan di tiga kecamatan Hilir Barito, di mana interaksi ekonominya sangat kuat ke arah Banjarmasin dan Danau Panggang. Hal ini tidak mengherankan karena posisi Jenamas yang berada di perbatasan Barito Selatan dengan Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan).

Hari pasar didominasi pedagang dari Danau Panggang dan Nagara (Kalimantan Selatan) serta Palingkau (Kapuas) dengan komposisi sekitar 75 % : 25 %. Pedagang ini adalah pedagang yang sama dengan pedagang keliling di Mengkatip dan Bangkuang. Mereka sangat jarang berdagang sampai ke Buntok. Pedagang dari Amuntai dan Danau Panggang datang dengan truk air yang berisi sekitar 50-an pedagang. Mereka menyewa truk air secara berkelompok. Sisanya datang dengan motor getek dan tangkalasa. Sedangkan pedagang dari Palingkau relatif individual, datang umumnya dengan motor getek. Jumlah pedagang dari Amuntai dan Danau Panggang mencapai 150-200 orang setiap minggu, sedangkan dari Palingkau sekitar 50 orang.

Aktivitas ekonomi di Kota Rantau Kujang ditunjukkan dalam Gambar 4.13.

Kecamatan Dusun Hilir

Mata pencaharian utama masyarakat Dusun Hilir sebagian besar adalah bertani dan nelayan. Hasil utama yang diandalkan adalah karet dan rotan, yang terbentang sepanjang permukiman tepi Sungai Barito hingga anak Sungai Mahajandau. Untuk berbelanja, masyarakat cenderung memenuhinya dalam lingkup spasial Dusun Hilir sendiri. Tingkat interaksi lebih terjadi dengan Kota Buntok dibanding dengan Banjarmasin. Dari hasil survai, untuk barang-barang khusus 28 % penduduk memilih pergi ke Buntok sejauh 116 km perjalanan lewat sungai dan hanya 6 % yang berbelanja ke Banjarmasin.

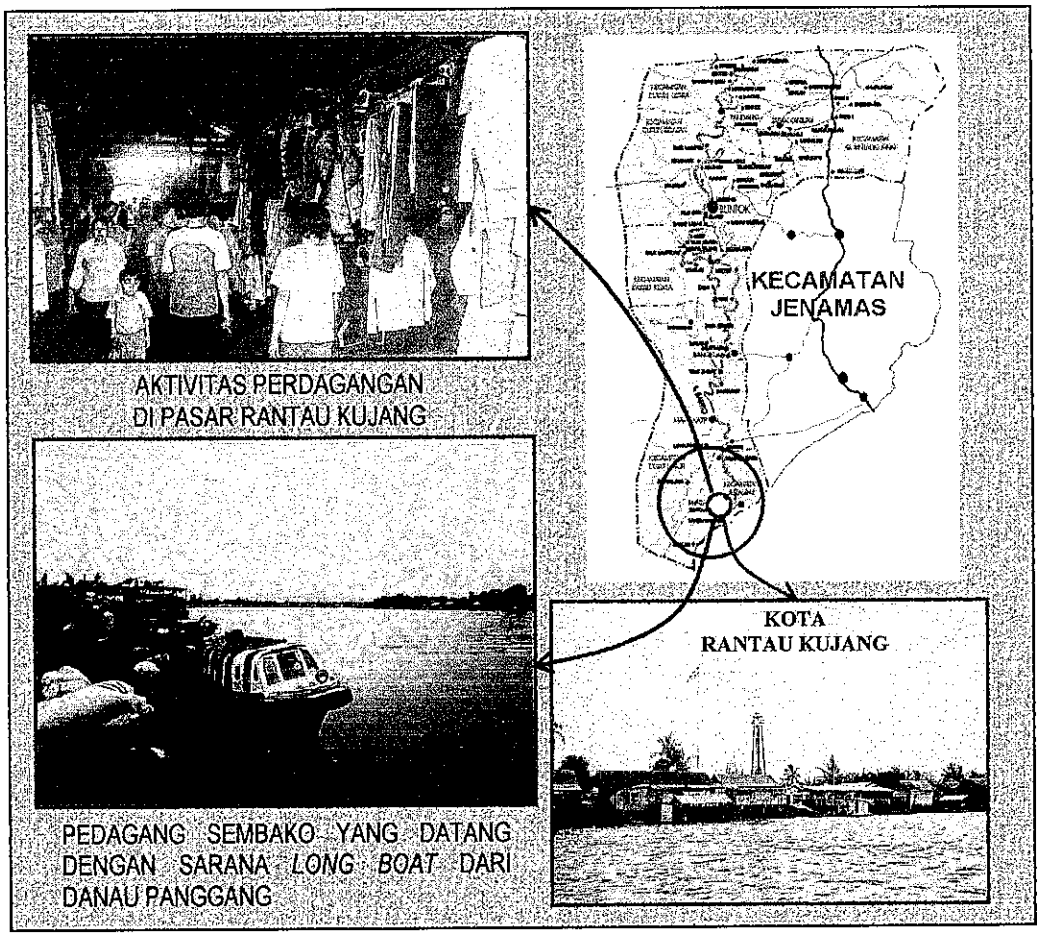

GAMBAR 4.13
AKTIVITAS EKONOMI DI KOTA RANTAU KUJANG, JENAMAS

Sumber : Dokumentasi Penelitian 2004

Pola interaksi ekonomi secara aktif lebih dilakukan oleh pedagang keliling Sungai Barito. Wilayah Jenamas-Dusun Hilir-Karau Kuala adalah jarak pencapaian pasar oleh pedagang keliling dari Palingkau (Kapuas) serta Danau Panggang dan Nagara (Kalimantan Selatan). Sebagai wilayah yang hampir seluruhnya mengandalkan transportasi air, pasar kecamatan dan desa di Dusun Hilir didatangi oleh pedagang keliling yang datang berkelompok dengan menggunakan motor getek dan truk air. Hanya Pasar Kelanis yang terjangkau jalur darat dan didatangi pedagang dari Ampah maupun Kelua.

Pedagang asli di Kota Mengkatip sebagai pusat perdagangan Dusun Hilir seperti kecamatan lainnya, hanya menjual sembako, kelontongan dan alat-alat elektronik.

Penduduk menunggu hari pasar kecamatan setiap Selasa untuk memenuhi kebutuhannya selama sepekan. Dengan demikian untuk Kecamatan Dusun Hilir yang memusat di Mengkatip, interaksi ekonomi antara penduduk lokal dilakukan dengan pedagang luar yang sama dengan di Jenamas dan Karau Kuala. Akan tetapi untuk membeli barang-barang khusus dan tertentu, penduduk lebih banyak memilih ke Buntok dibanding Banjarmasin. Interaksi ekonomi di Dusun Hilir dikuasai pedagang asal Kalimantan Selatan dan Kapuas, tetapi tingkat interaksi ekonomi ke arah Selatan kurang kuat dibanding Jenamas.

Aktivitas ekonomi di Kota Mengkatip ditunjukkan pada Gambar 4.14

Kecamatan Karau Kuala

Aktivitas ekonomi masyarakat Kecamatan Karau Kuala bersifat tradisional, pada umumnya sebagai petani dan nelayan. Terdapat 2.414 orang nelayan atau 659 rumah tangga nelayan berdasarkan data Dinas Perikanan tahun 2002, terutama berada di Bangkuang, Salat Baru, Bintang Kurung, Janggi, Malitin dan Muara Arai. Sementara petani lebih banyak tergantung pada kebun rotan dengan total luas lahan 2.352 hektar.

Penduduk Kota Bangkuang sebagai ibukota kecamatan sebagian besar adalah nelayan, yang bergantung pada komoditas ikan air tawar. Setiap hari berdasarkan observasi, sedikitnya 5-10 mobil *pick up* yang berisi ikan dibeli tengkulak untuk dibawa ke Amuntai dan Barabai (Kalimantan Selatan) serta Muara Teweh (Barito Utara). Keterhubungan jalan darat dari Bangkuang yang melewati wilayah Barito Timur menuju Kota Buntok sejauh 169,5 km menyebabkan kedekatan kota kecamatan ini terhadap Buntok lebih bersifat formal administratif.

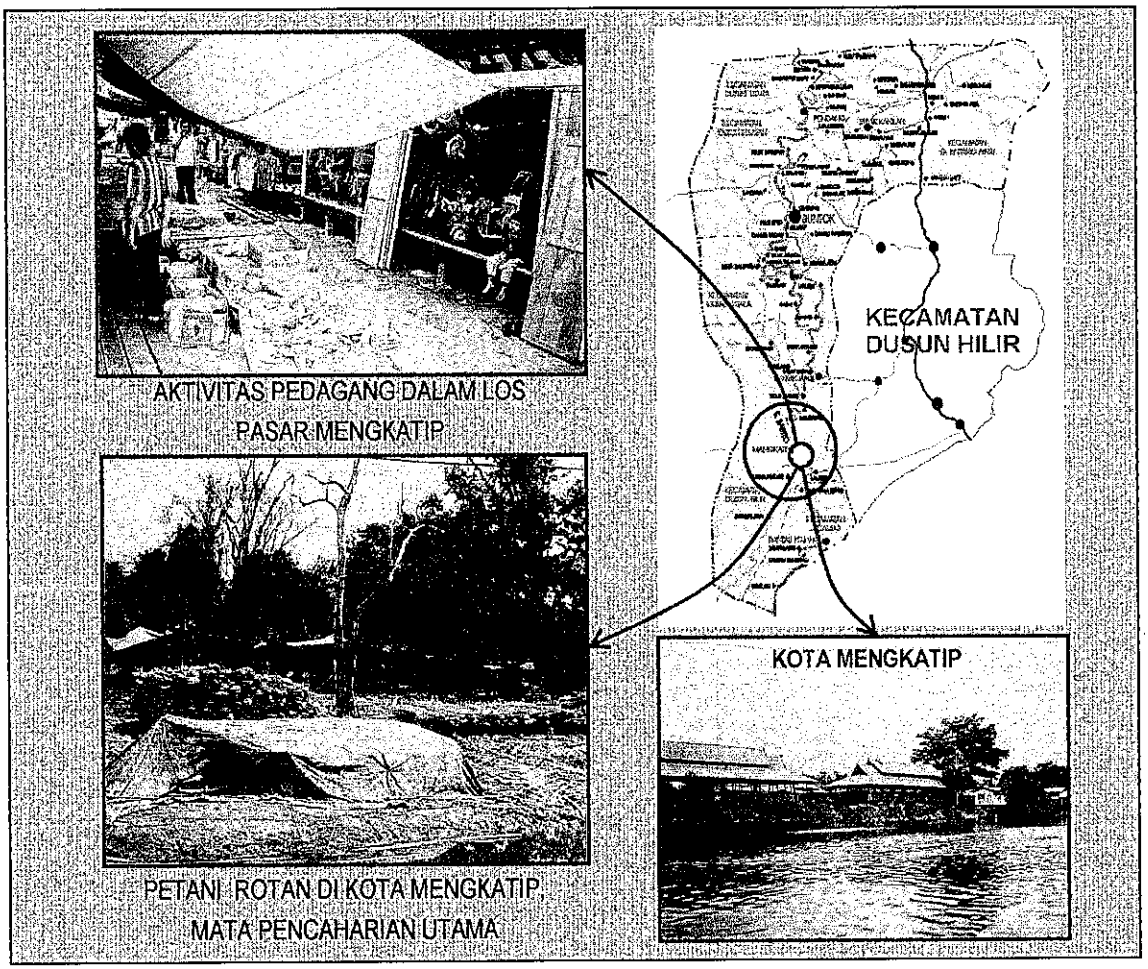

GAMBAR 4.14
AKTIVITAS EKONOMI DI KOTA MENGKATIP, DUSUN HILIR

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2004

Penduduk Bangkuang umumnya berbelanja cukup di pasar kecamatan. Kalaupun harus membeli keluar, mereka menuju Pasar Tamiang Layang yang berjarak 38,7 km jalan darat. Berdasarkan survai terhadap penduduk Bangkuang, tidak banyak masyarakat yang berdagang. Fasilitas pasar seluruhnya terdiri dari 6 buah kios dan 70 buah los.

Para pedagang yang memadati Pasar Bangkuang pada hari Rabu berasal dari Kelua, Amuntai, Danau Panggang dan Nagara yang mencapai 75 %, sisanya adalah pedagang dari Buntok, Ampah dan Palingkau. Pedagang barang umumnya menggunakan moda angkutan darat. Sedang pedagang sembako dan hasil bumi cenderung menggunakan angkutan sungai

seperti motor getek dan truk air yang disewa oleh sekitar 20-50 pedagang eceran. Pedagang lokal adalah pedagang hasil bumi seperti buah dan sayuran yang bersifat periodik

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa interaksi ekonomi di Kecamatan Karau Kuala lebih tinggi dibandingkan Dusun Hilir, dan lebih tersebar asal pedagangnya dibanding Jenamas. Hal tersebut disebabkan adanya jalur darat, sehingga distribusi barang dari Kelua, Amuntai, Buntok dan Ampah juga berlangsung untuk bersaing dengan pedagang keliling Sungai Barito. Secara ekonomi, masyarakat Kota Bangkuang lebih berinteraksi dengan Kota Ampah dan Tamiang Layang (Barito Timur) dibanding Kota Buntok. Tetapi penduduk desa-desa di Hulu Karau Kuala seperti Talio, Babai, Tampijak atau Teluk Sampudau lebih berinteraksi dengan Kota Buntok. Hal ini dikarenakan Kota Bangkuang merupakan daerah yang paling hilir dari Kecamatan Karau Kuala serta dapat diakses langsung lewat Ampah dan Tamiang Layang.

Aktivitas ekonomi di Kota Bangkuang ditunjukkan pada Gambar 4.15.

Kecamatan Dusun Selatan

Di seluruh Kecamatan Dusun Selatan terdapat 7 pasar umum, terdiri dari satu pasar kecamatan di Kota Buntok dan enam pasar desa, yaitu di Desa Baru, Sababilah, Kalahien, Sanggu, Penda Asam dan Tanjung Jawa. Fasilitas pasar di Dusun Selatan terdiri dari 269 buah toko dan 494 kios/ warung pada tahun 2002.

Di Kota Buntok sebagai pusat ekonomi Barito Selatan, tempat aktivitas utama perdagangan adalah Pasar Beringin. Pasar Beringin terdiri atas 88 los pasar, 168 toko, 10 toko tipe A, 111 kios, 16 warung dan 12 ruko yang ditempati kurang lebih 399 orang pedagang.

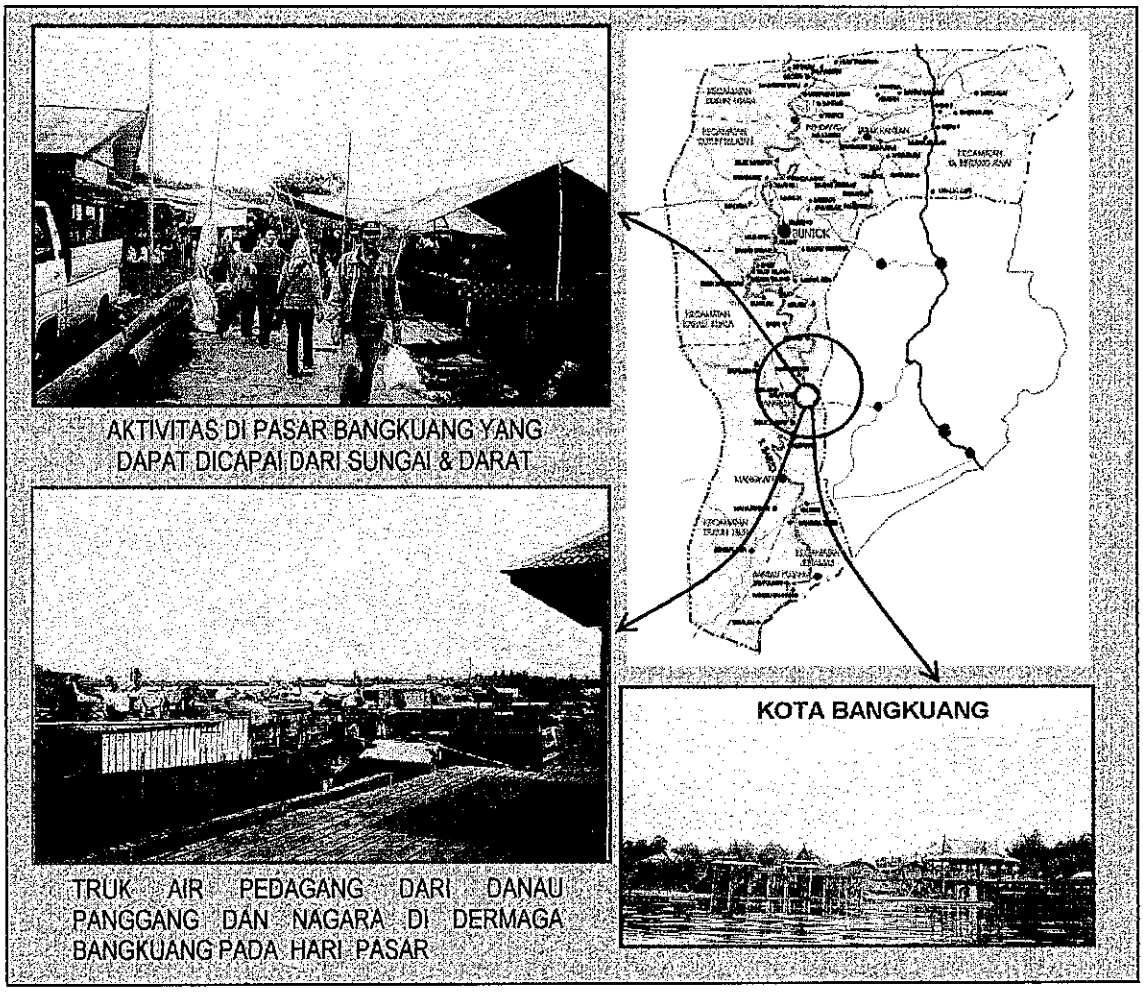

GAMBAR 4.15
AKTIVITAS EKONOMI DI KOTA BANGKUANG, KARAU KUALA

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2004

Puncak aktivitas perdagangan adalah hari Jumat dan Sabtu. Pada hari tersebut, rata-rata 300 orang pedagang keliling datang dari luar Barito Selatan, terutama pedagang dari Amuntai dan Banjarmasin. Pedagang tersebut umumnya menggunakan transportasi sungai, yang berlabuh di Dermaga Pasar Beringin sebagai tempat bongkar muat khusus di hari pasar. Sisanya kurang lebih 20 % menggunakan transportasi darat. Tidak ada perbedaan karakteristik barang dagangan antara pedagang keliling dengan pedagang tetap, selain harga yang relatif lebih murah dan masa berdagang yang lebih singkat.

Aktivitas perdagangan hari Jumat dan Sabtu juga diramaikan oleh kehadiran penduduk dari desa-desa sekitar Dusun Selatan yang datang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mereka datang dengan angkutan sungai (motor getek atau tangkalasa) ataupun angkutan pedesaan. Asalnya bervariasi, tetapi umumnya dari Desa Baru, Teluk Telaga, Danau Sadar, Mabuan hingga Bintang Kurung dan Tampijak. Penduduk Kota Buntok sendiri sudah menjalani pola belanja modern yang tidak mengenal pasar mingguan.

Pasar Beringin sendiri menurut 89 % warga sudah dapat memenuhi barang-barang yang mereka butuhkan. Kurang dari 11 % warga yang mengaku harus belanja ke Banjarmasin untuk mencari barang kebutuhan khusus. Dari hasil observasi, hal tersebut dilakukan biasanya bukan merupakan tujuan utama, melainkan sampingan di samping rekreasi, pekerjaan ataupun bisnis yang dilakukan.

Aktivitas perdagangan di Kota Buntok ditunjukkan pada Gambar 4.16

Kecamatan Dusun Utara

Wilayah Dusun Utara berbeda dengan kecamatan lainnya. Kecamatan ini terbagi dua, yaitu wilayah tepi Sungai Barito yang berpusat di ibukota kecamatan Pendang, meliputi Desa Marawan Lama, Marawan Baru, Reong, Tarusan. Sedangkan Desa Bundar, Panarukan, Hingan, Maruga, Danau Bamure dan Majundre adalah wilayah perbukitan yang interaksi wilayahnya cenderung lebih dekat Kecamatan Gunung Bintang Awai.

Pusat aktivitas ekonomi di Kota Pendang bergantung pada jalur transportasi Sungai Barito, yang didominasi pedagang keliling. Pedagang lokal hanya tercatat 2 yang berskala menengah, yaitu di Pendang dan Desa Maruga yang menjual BBM dan kayu olahan. Pasar Pendang dilengkapi 35 buah los yang dipenuhi pedagang setiap Kamis.

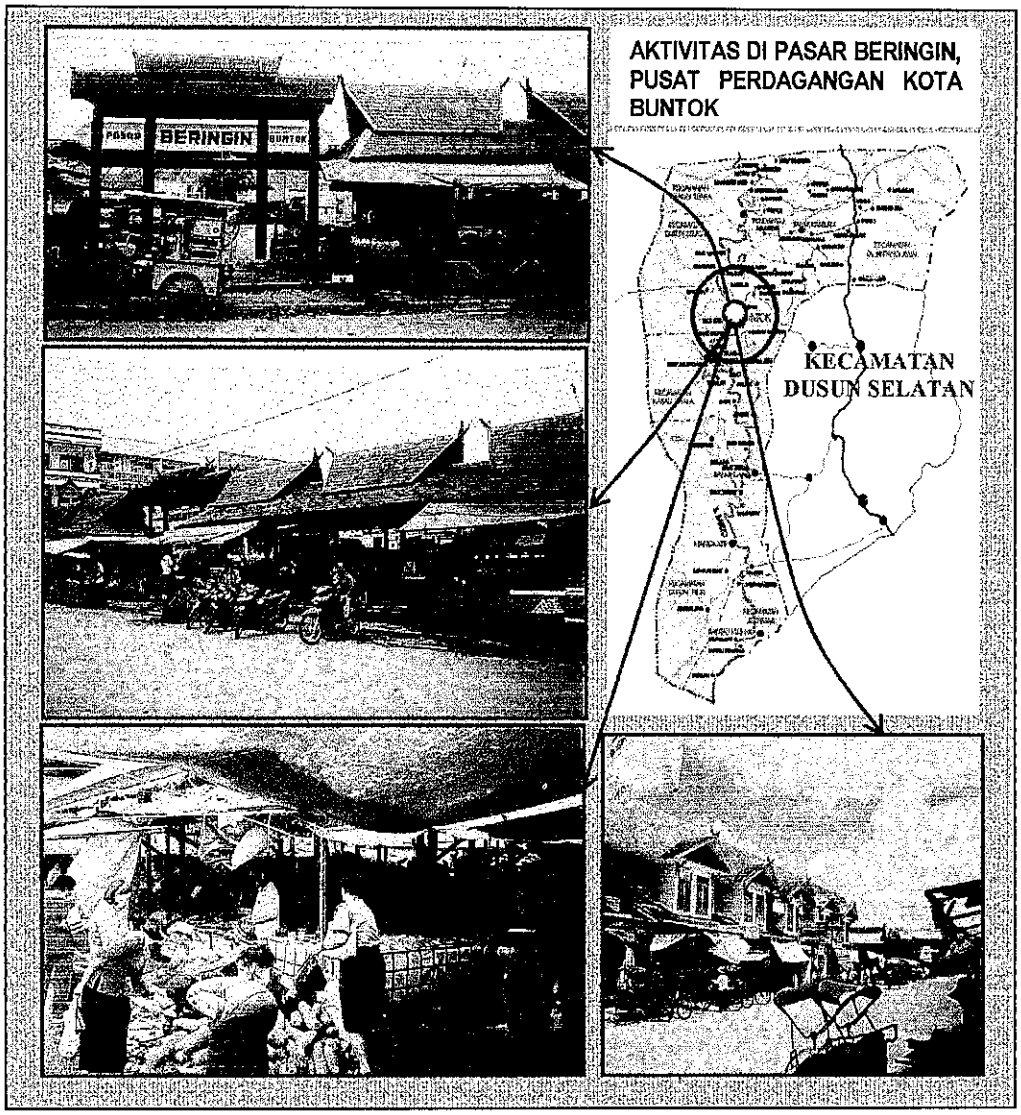

GAMBAR 4.16
AKTIVITAS EKONOMI KOTA BUNTOK, DUSUN SELATAN

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2004

Pedagang keliling yang datang lewat Sungai Barito ini bukan merupakan pedagang dari Rantau Kujang-Mengkatip-Bangkuang. Jatuhnya hari pasar setiap Kamis, merupakan bagian dari perjalanan keliling para pedagang asal Hulu Sungai Utara yang mengakhiri aktivitasnya di Buntok pada hari Jumat dan Sabtu. Rute tempat mereka berdagang adalah wilayah Hulu Barito, meliputi Kecamatan Dusun Selatan-Dusun Utara sampai Montallat (Barito Utara).

Sementara wilayah daratan Dusun Utara relatif tidak tergantung dengan Pasar Pendang. Mereka mempunyai pasar desa sendiri yang bergantung pada jalur darat, dan didatangi pedagang kecil dari Patas I (Gunung Bintang Awai), Amuntai dan Kelua (Kalimantan Selatan). Sementara sebagian desa di wilayah perbatasan Kecamatan Gunung Bintang Awai memilih berbelanja ke Pasar Patas I.

Oleh karenanya, interaksi ekonomi penduduk Dusun Utara sebagai wilayah paling Hulu Sungai Barito mempunyai karakter yang berbeda dengan wilayah hilir. Pola interaksi pedagang keliling di wilayah tepi Sungai Barito mempunyai keterkaitan dengan pedagang keliling Kota Buntok dan wilayah perbatasan Barito Utara yang didominasi penduduk Amuntai (Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan). Sedangkan wilayah darat yang berbukit lebih berinteraksi dengan pedagang jalur darat dari Amuntai dan Kelua, yang lebih kuat hubungannya dengan Desa Patas I dan juga Tabak Kanilan.

Aktivitas perdagangan di Kota Pendang ditunjukkan pada Gambar 4.17.

Kecamatan Gunung Bintang Awai

Di wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai terdapat dua tempat sebagai pusat aktivitas, yaitu Tabak Kanilan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan Patas I sebagai pusat aktivitas ekonomi. Karena letaknya di jalan provinsi, justru dalam hal kependudukan dan perekonomian Patas I lebih dinamis dibanding Tabak Kanilan. Patas I merupakan lokasi perusahaan pemegang HPH dan IPK Barito Selatan.

Pasar umum yang ada di Gunung Bintang Awai berjumlah 8 buah, yang terbesar ada di Tabak Kanilan, Patas I dan Ugang Sayu. Sedangkan fasilitas terlengkap ada di Patas I, yaitu 6 buah toko dan 50 los pasar, kemudian Ugang Sayu 3 toko dan 35 kios sedangkan di Tabak Kanilan hanya berjumlah 14 los pasar.

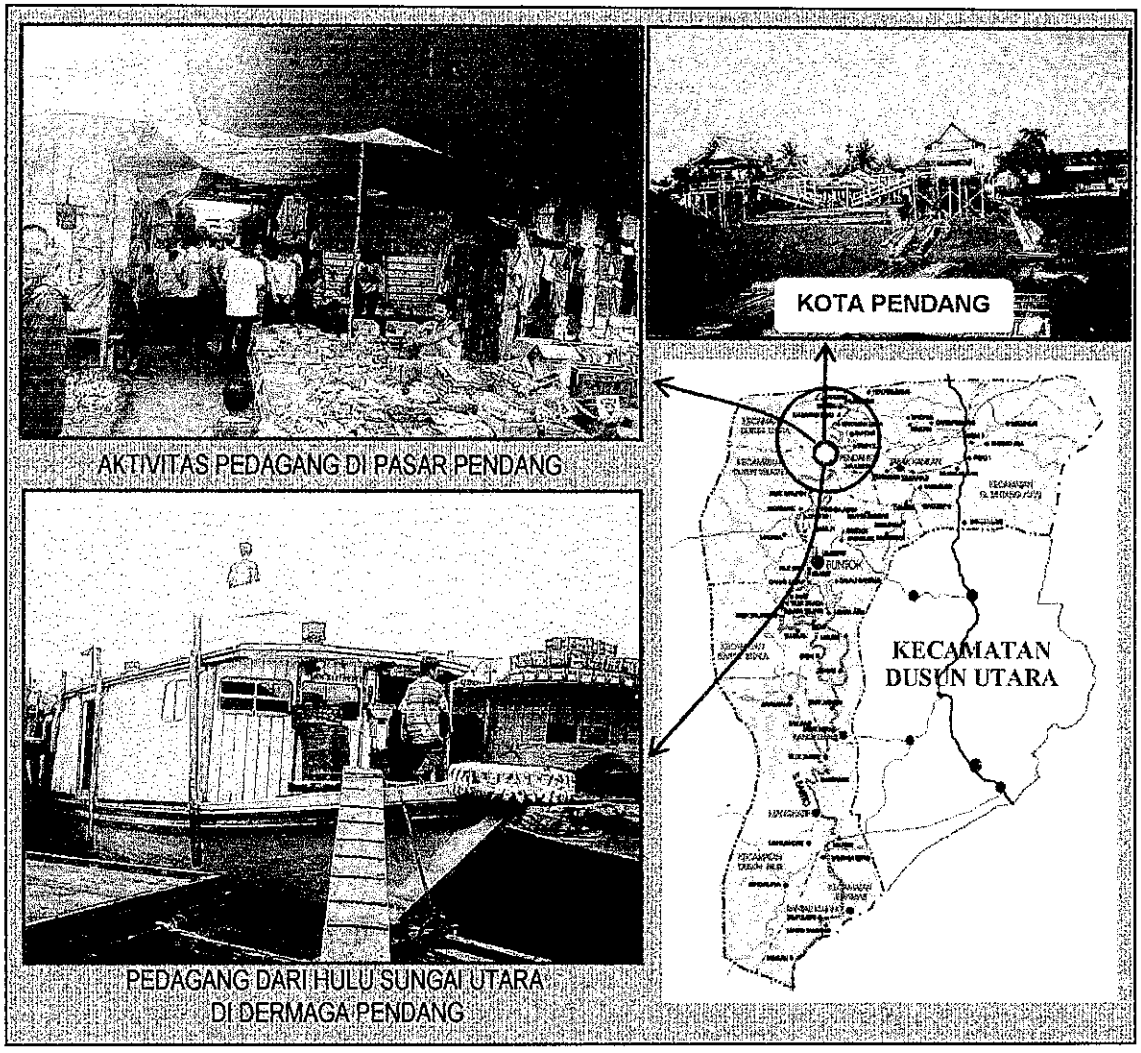

GAMBAR 4.17
AKTIVITAS EKONOMI KOTA PENDANG, DUSUN UTARA

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2004

Dari hasil survai terhadap penduduk Tabak Kanilan dan komparasi data di lapangan, terlihat bahwa 100 % masyarakat berbelanja sehari-hari di pasar kecamatan, sedangkan untuk barang khusus 95 % dari mereka berbelanja ke Kota Buntok yang berjarak tempuh 45 km dan sisanya mengaku cukup di pasar kecamatan saja. Penduduk desa lain yang datang ke Tabak Kanilan pada hari pasar berasal dari Desa Sire, Kayumban, Muka Haji dan Sarimbuah.

Berdasarkan hasil survai lapangan, rata-rata terdapat 135-150 orang pedagang setiap hari pasar di Tabak Kanilan. Dari jumlah tersebut, ¾ merupakan pedagang dari Provinsi Kalimantan Selatan, yakni dari Kota Kelua dan Amuntai. Dari jumlah tersebut, komposisi pedagang dari Kelua dan Amuntai cukup berimbang atau mendekati 50 %. Mereka datang dengan menumpang angkutan yang disewa perorangan atau berkelompok.

Sisanya sebanyak 25 % terbagi atas pedagang barang jadi dari Ampah dan Buntok, serta pedagang buah dan sayur-sayuran dari Tabak Kanilan dan desa di sekitarnya seperti Kayumban, Sire, Muka Haji dan Sarimbuah. Pedagang buah dan sayur lokal ini biasanya menggelar dagangan tidak dalam los, dan hanya menjual dari kelebihan hasil yang dikonsumsi. Penjualan barang hasil bumi ini tidak menentu, karena bersifat musiman.

Berdasarkan analisis terhadap pola interaksi ekonomi antara warga masyarakat, terlihat bahwa wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai didatangi pedagang dengan pola tertentu. Mereka datang melalui jalur darat dengan simpul utama di Kota Ampah. Rute pedagang ini adalah Ampah-Patas I-Tabak Kanilan-Tamiang Layang, sebagian ke Gunung Rantau dan Kandui (Muara Teweh). Dengan demikian, wilayah Gunung Bintang Awai memiliki pola interaksi lebih spesifik dibanding daerah lainnya.

Karakteristik interaksi ekonomi lainnya di Kecamatan Gunung Bintang Awai adalah pusat aktivitas ekonomi tidak berada di ibukota kecamatan, tetapi di jalur jalan provinsi Muara Teweh-Buntok, yaitu di Desa Patas I dan Ugang Sayu. Kedua, kelompok pedagang utama yang datang dari jalur darat adalah pedagang yang sama dengan Kota Ampah dan Tamiang Layang, yaitu dari Kelua dan Amuntai (Kalimantan Selatan). Dengan demikian interaksi ekonomi Gunung Bintang Awai lebih kuat ke arah Kabupaten Barito Timur.

Aktivitas perdagangan di Kota Tabak Kanilan ditunjukkan dalam Gambar 4.18.

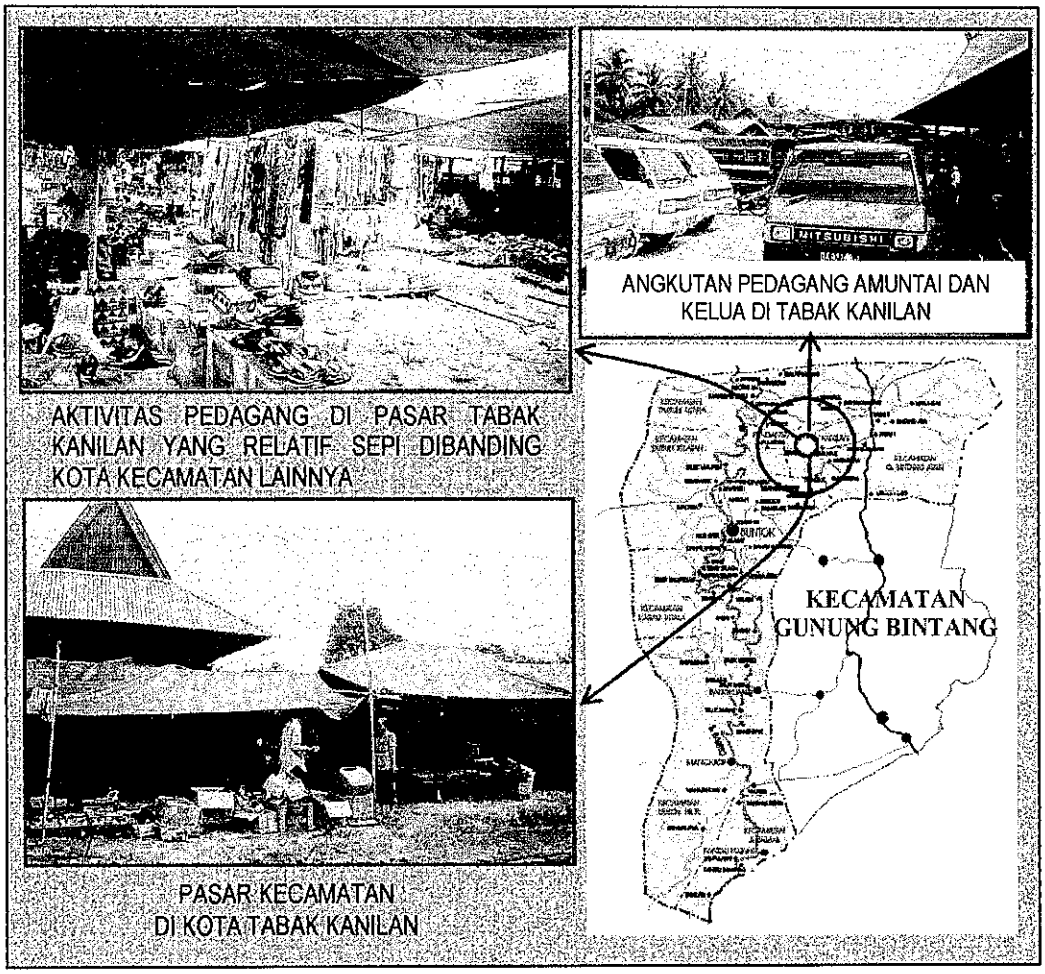

GAMBAR 4.18
AKTIVITAS EKONOMI DI KOTA TABAK KANILAN, GUNUNG BINTANG AWAI

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2004

Berdasarkan aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat dan metode berjualan para pedagang, dapat disimpulkan bahwa interaksi ekonomi yang terjadi di wilayah Barito Selatan telah menimbulkan sejumlah pola sebagai berikut :

1. Wilayah Hilir Sungai Barito terdiri atas Kecamatan Jenamas, Dusun Hilir dan sebagian Karau Kuala, yaitu Kota Bangkuang, lebih berinteraksi dengan pedagang keliling Sungai Barito dari Danau Panggang dan Nagara (Kalimantan Selatan) serta Palingkau (Kapuas). Aktivitas ekonomi paling tinggi berpusat di Kota Rantau Kujang, Jenamas.

Wilayah Karau Kuala terbagi dua pola interaksi masyarakat-pedagang. Kota Bangkuang dan sekitarnya dipengaruhi oleh pedagang keliling Sungai Barito yang sama dengan Mengkatip dan Rantau Kujang, sedang dari darat oleh pedagang Kelua dan Amuntai yang lebih dekat ke arah pola aktivitas Kota Ampah dan Kota Tamiang Layang (Barito Timur). Wilayah Hulu (Utara) Karau Kuala, yaitu Desa Babai, Talio, Tampijak, Muara Arai dan sekitarnya lebih berinteraksi dengan Kota Buntok.

2. Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, wilayah bagian Utara Kecamatan Karau Kuala serta wilayah tepi sungai Kecamatan Dusun Utara cenderung berinteraksi secara ekonomi dengan Kota Buntok berdasar aliran Sungai Barito. Pedagang yang ada di wilayah ini adalah pedagang keliling dari Hulu Sungai Utara (Danau Panggang dan Amuntai) yang berbeda dari pedagang wilayah Hilir Barito.
3. Wilayah Kecamatan Dusun Utara terbagi 2, wilayah tepi Sungai Barito terdiri atas Pendang, Tarusan, Marawan Lama, Marawan Baru dan sekitarnya lebih berinteraksi kuat dengan Kota Buntok. Wilayah daratan yang berbukit-bukit dan terhubungkan jalan darat seperti Desa Maruga, Hingan, Panarukan dan sebagainya cenderung berinteraksi secara ekonomi dengan Kecamatan Gunung Bintang Awai, berpusat di Patas I dan Ugang Sayu.
4. Wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai berpusat di Ugang Sayu dan Patas I serta Tabak Kanilan, tergantung pada pedagang keliling yang menggunakan transportasi darat. Rute perdagangan ini meliputi Amuntai-Kelua-Tamiang Layang-Ampah-Patas I-Tabak Kanilan. Dengan demikian wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai cenderung berinteraksi lebih kuat dengan wilayah Barito Timur, dengan pusatnya Kota Ampah.

Ditinjau dari intensitas perdagangan dan mobilitas perdagangan, interaksi ekonomi di Dusun Selatan adalah yang tertinggi, interaksi tinggi di Jenamas, intensitas sedang di Dusun Utara, Karau Kuala, Dusun Hilir serta Gunung Bintang Awai.

Secara spasial pola interaksi ekonomi wilayah Kabupaten Barito Selatan ditunjukkan pada Gambar 4.19

4.4.3 Analisis Interaksi Sosial Budaya

Analisis ini bertujuan untuk melihat terjadinya interaksi masyarakat inter dan intra wilayah dalam aktivitas sosial budaya, yang dibatasi pada aktivitas peribadatan, pendidikan dan kesehatan. Analisis dilakukan dengan mengkaji fasilitas yang ada di setiap kecamatan yang dibantu dengan survai primer di setiap ibukota kecamatan.

1. Aktivitas Peribadatan

Data komposisi penduduk Barito Selatan berdasarkan agama yang dianut memperlihatkan Barito Selatan cukup heterogen. Komposisi agama yang dipeluk penduduk menurut data Barito Selatan dalam Angka tahun 2002 adalah agama Islam (65,41 %), kemudian Kristen Protestan (19,95 %), Kristen Katholik (8,50 %), Hindu (6,12 %) serta Buddha (0,02%). Selain Jenamas yang sekitar 99,28 % penduduknya menganut Islam, kecamatan lainnya terbagi dalam komposisi yang relatif terbuka. Hasil survai primer terhadap responden di enam ibukota kecamatan menunjukkan 100 % warga telah dapat beribadah di tempatnya masing-masing. Sedangkan dari data, jumlah penduduk yang belum mempunyai tempat ibadah belum signifikan dibanding jumlah keseluruhan kecamatan. Hal tersebut ditunjukkan sebagai berikut :

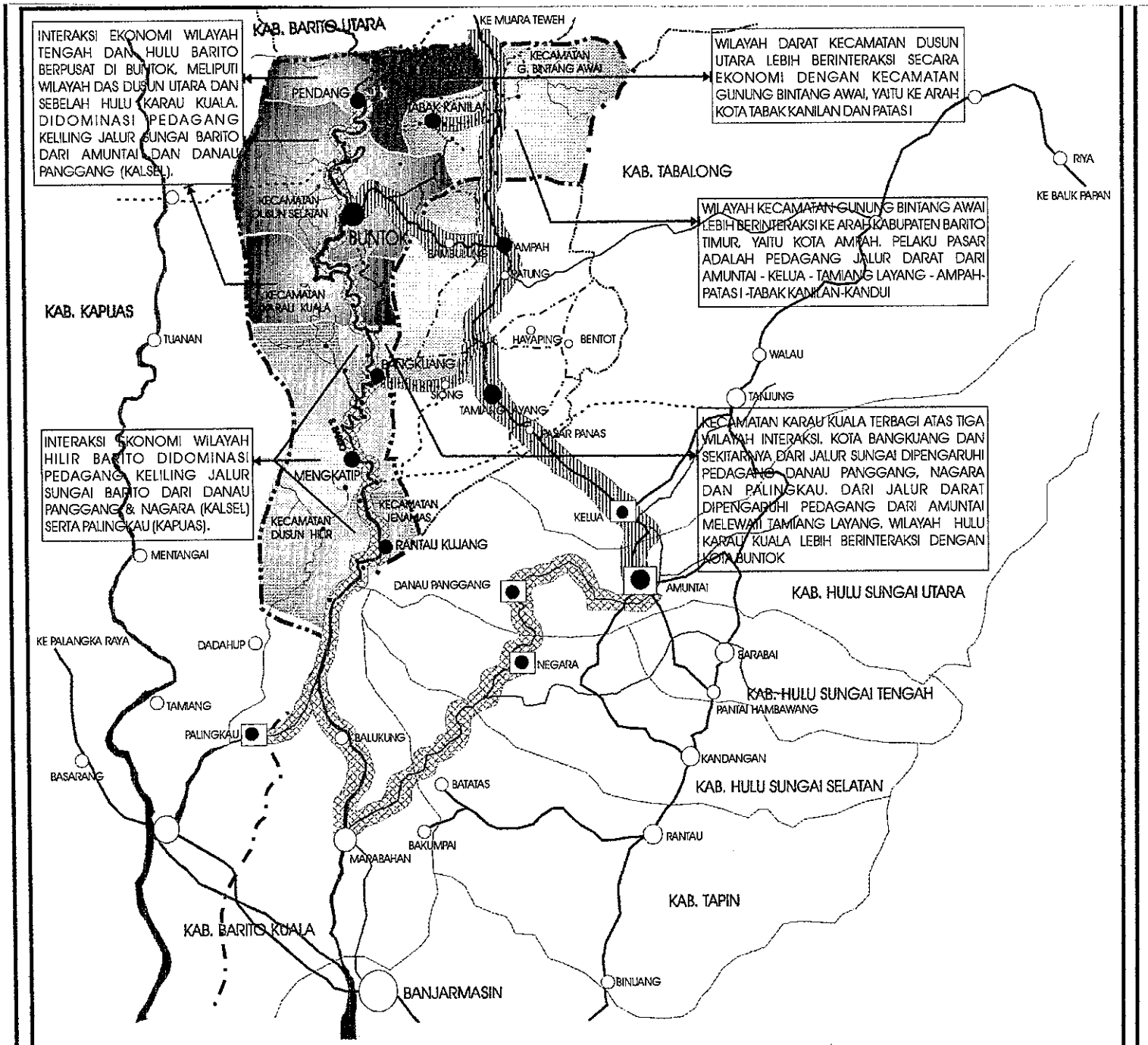

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

LEGENDA

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- IBUKOTA KECAMATAN
- KOTA ASAL PEDAGANG
- JALUR PEDAGANG SUNGAI
- JALUR PEDAGANG DARAT
- INTERAKSI DENGAN PEDAGANG D.PANGGANG, NAGARA, PALINGKAU
- INTERAKSI DENGAN PEDAGANG AMUNTAI
- INTERAKSI DENGAN WILAYAH BARITO TIMUR
- INTERAKSI DENGAN WILAYAH KECAMATAN G.B. AWAI

INSERT

SUMBER :
RTRW KAB. BARITO SELATAN

PETA ANALISIS INTERAKSI EKONOMI

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
4.19	198	1 : 1.250.000	

1. Kecamatan Jenamas, jumlah penduduk yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katholik adalah 0,73 % dari total penduduk Jenamas.
2. Kecamatan Karau Kuala, jumlah penduduk yang beragama Kristen Katholik adalah 3,15 % dari total penduduk Karau Kuala.
3. Kecamatan Dusun Selatan, jumlah penduduk yang beragama Buddha adalah 0,054 % dari total penduduk Dusun Selatan.

Berdasarkan hasil survai primer, 68 responden menyatakan fasilitas ibadah yang ada sudah **Baik,** sedangkan 32 responden menyatakan fasilitas ibadah tersebut **Cukup Baik.** Dengan demikian, dalam hal aktivitas peribadatan setiap kecamatan di Kabupaten Barito Selatan telah memiliki fasilitas yang representatif.

2. Aktivitas Pendidikan

Berdasarkan survai primer dan analisis terhadap fasilitas pendidikan, terlihat bahwa kemampuan penyediaan fasilitas untuk setiap kecamatan rata-rata mencapai kategori baik hingga tingkat pendidikan dasar (SD sampai SMP). Sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Umum, hanya Kecamatan Dusun Selatan sebagai pusat pemerintahan yang memiliki fasilitas representatif. Untuk tingkat universitas, Kota Buntok telah memiliki 4 perguruan tinggi swasta.

Sedangkan interaksi akibat ketidakmampuan wilayah menyediakan fasilitas pendidikan dapat dilihat dalam Tabel IV.47 berikut ini :

TABEL IV.47
AKTIVITAS MASYARAKAT DALAM
MEMENUHI KEBUTUHAN PENDIDIKAN

No	Kecamatan	Pendidikan Menengah		Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Jenamas	Jenamas	Luar Jenamas	Luar Jenamas	9 100 %
		0 (0,00 %)	B. Masin 8 (88,90%) Amuntai 1 (11,10%)	B.Masin 9 (100,00%)	
2	Dusun Hilir	Dusun Hilir	Luar Dusun Hilir	Luar Dusun Hilir	16 100 %
		7 (43,75 %)	Buntok 6 (37,50 %) P.Raya 2 (12,50 %) P.Pisau 1 (6,25 %)	P.Raya 11 (68,92 %) B. Masin 3 (18,75 %) Tdk sklh. 2 (12,50 %)	
3	Karau Kuala	Karau Kuala	Luar Karau Kuala	Luar Karau Kuala	11 100 %
		9 (81,82 %)	Buntok 1 (9,09 %) T.Layang 1 (9,09 %) P. Raya	B.Masin 7 (63,64 %) P.Raya 4 (36,36 %)	
4	Dusun Selatan	Dusun Selatan	Luar Dusun Selatan	Luar Dusun Selatan	37 100 %
		37 (100,00 %)	Tdk ada 0 (0,00%)	P.Raya 17 (45,95 %) B. Masin 13 (35,14 %) P. Jawa 7 (18,92 %)	
5	Dusun Utara	Dusun Utara	Luar Dusun Utara	Luar Dusun Utara	16 100 %
		12 (75,00 %)	Buntok 4 (25,00 %)	B.Masin 13 (81,25 %) P.Raya 2 (12,50 %) P.Jawa 1 (6,25 %)	
6	G.B Awai	G.B Awai	Luar G.B Awai	Luar G.B Awai	11 100 %
		7 (63,64 %)	Buntok 4 (36,36 %)	P.Raya 10 (90,91 %) B.Masin 1 (9,09 %)	
Jumlah		**72**	**28**	**100**	**100**
Persentase		**72 %**	**28 %**	**100 %**	**100 %**

Sumber :Isian kuesioener, diolah

Dari hasil survai primer, terlihat bahwa untuk semua kecamatan selain Dusun Selatan interaksi wilayah dalam aktivitas pendidikan adalah karena belum representatifnya fasilitas pendidikan mulai dari tingkat menengah, yang mencakup 78 % total Barito Selatan. Untuk Jenamas yang belum memiliki SMU, interaksi tersebut mencapai nilai 100 %. Sebaliknya Dusun Selatan dari 37 responden (100 %) memilih menyekolahkan anaknya di wilayah sendiri, di mana terdapat 3 SMU Negeri dan 2 Swasta. Dari eksplorasi

lebih lanjut diketahui bahwa warga Dusun Selatan menyekolahkan anaknya ke kota lain hanya dengan alasan khusus, seperti untuk pendidikan kejuruan.

Untuk tingkat SMU juga diperoleh hasil bahwa walaupun kota kecamatan selain Jenamas telah memiliki fasilitas tersebut, namun jumlah pelajar yang sekolah ke luar wilayahnya masih sangat signifikan. Hal itu terlihat di Kecamatan Dusun Hilir (56,25 %), Gunung Bintang Awai (36,36 %), Dusun Utara (25,00 %) dan Karau Kuala (18,18 %). Hal itu tampaknya disebabkan terbatasnya daya tampung, kuantitas pengajar dan pilihan jurusan. Adapun kota yang menjadi pilihan masyarakat terutama Kota Buntok (53,57 %), sedangkan masyarakat Jenamas seluruhnya menyekolahkan ke Kalimantan Selatan (Amuntai dan Banjarmasin).

Interaksi penduduk dalam memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi di luar wilayah mencapai nilai total 100 %, walaupun di Kota Buntok terdapat 4 PTS dan 125 dosen. Hal ini dapat dimengerti karena PTS tersebut dianggap kurang representatif dan kebanyakan mahasiswanya berasal dari kalangan PNS ataupun karyawan swasta. Bahkan penduduk Dusun Selatan sendiri menurut hasil survai primer memilih menyekolahkan anaknya tidak di wilayah setempat.

Dari tabel IV.47 di atas terlihat bahwa Kota Banjarmasin dan Palangka Raya menjadi pilihan utama. Hal itu disebabkan kedua ibu kota provinsi tersebut telah memiliki PTN yang cukup representatif. Kota Palangka Raya dipilih oleh 44 % responden, terutama dari Kecamatan Gunung Bintang Awai (90,91 %), Dusun Hilir (68,92 %) dan Dusun Selatan (45,95 %). Sedangkan Banjarmasin dipilih oleh masyarakat sebesar 46 %, terutama dari Kecamatan Jenamas (100 %), Dusun Utara (81,25 %) dan Karau Kuala (63,64 %). Sisanya adalah kota-kota di Pulau Jawa serta yang belum menyekolahkan anaknya hingga tingkat perguruan tinggi.

UPT-PUSTAK-UNSYIAH

Berdasarkan analisis fasilitas pendidikan dan aktivitas penduduk tersebut di atas, dapat dikemukakan sejumlah kesimpulan :

1. Pada umumnya limit ketersediaan fasilitas pendidikan yang representatif di Barito Selatan adalah tingkat pendidikan dasar. Seluruh wilayah telah memiliki sekolah dasar dan menengah pertama dengan tenaga pendidik yang memadai.
2. Seluruh kecamatan di luar Kecamatan Jenamas telah memiliki Sekolah Menengah Umum (SMU), baik yang negeri maupun swasta. Semua SMU yang dimiliki Kecamatan Dusun Hilir, Karau Kuala, Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai masih belum bisa memenuhi kebutuhan sebagian besar masyarakat. Akibatnya masyarakat menyekolahkan anaknya di luar kecamatan yang bersangkutan. Faktor pemilihan lokasi didasarkan kedekatan wilayah, dan tidak menempatkan kota tertentu sebagai pilihan yang dominan.
3. Untuk tingkat perguruan tinggi, walaupun ada perguruan tinggi swasta di Buntok, tetapi lebih merupakan tempat kuliah para karyawan dan pegawai negeri. Terdapat dua kota yang menjadi pilihan masyarakat, yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Palangka Raya.

3. Aktivitas Kesehatan

Di Kabupaten Barito Selatan, setiap ibukota kecamatan telah memiliki fasilitas Puskesmas dan di sebagian besar desa terdapat Puskesmas Pembantu (Pustu). Sementara di ibukota Buntok terdapat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buntok yang bertipe C.

Berdasarkan hasil kuesioner yang dikomparasikan dengan data sekunder, penduduk Barito Selatan telah terlayani di wilayahnya masing-masing. Seluruh responden (100 %) di 6 ibukota kecamatan mengaku berobat di Puskesmas masing-masing. Hal itu sesuai dengan pandangan tentang fasilitas kesehatan, di mana 42 % responden memandang **Baik**, 57 %

memandang **Cukup Baik** dan hanya 1 % memandang **Tidak Baik**, yaitu di Kecamatan Dusun Utara. Hasil survai primer terhadap fasilitas kesehatan ditunjukkan pada Tabel IV.48.

TABEL IV.48
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP FASILITAS KESEHATAN

No	Kecamatan	Pandangan terhadap Fasilitas Kesehatan				Jumlah
		Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Jenamas		9 (100 %)			9 (100 %)
2	Dusun Hilir		5 (31,25 %)	11 (68,75 %)		16 (100 %)
3	Karau Kuala		6 (54,55 %)	5 (45,45 %)		11 (100 %)
4	Dusun Selatan		16 (43,24 %)	21 (56,76 %)		37 (100 %)
5	Dusun Utara		2 (12,50 %)	13 (81,25 %)	1 (6,25 %)	16 (100 %)
6	G.B Awai		4 (36,36 %)	7 (63,64 %)		11 (100 %)
Jumlah		**0**	**42**	**57**	**1**	**100**
Persentase		**0 %**	**42 %**	**57 %**	**1 %**	**100 %**

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dikaitkan dengan standard fasilitas kesehatan menurut KEPMEN PU No.20/ KPTS/ 1986 yang menyebutkan tersedianya 1 unit balai pengobatan setiap 3.000 jiwa, maka wilayah Barito Selatan telah memenuhi standard minimum fasilitas kesehatan. Kabupaten Barito Selatan memiliki 1 RSU tipe C, 10 Puskesmas dan 52 Puskesmas Pembantu. RSU Buntok sebagai pusat pelayanan dilengkapi tenaga dokter spesialis sebanyak 3 orang, yaitu spesialis anak, internist dan obstetri ginekologi. Dengan demikian secara umum aktivitas masyarakat sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan kesehatan telah dapat berjalan di wilayah masing-masing.

Interaksi berdasarkan aktivitas masyarakat di bidang peribadatan, pendidikan dan kesehatan ditunjukkan dalam Tabel IV.49 dan secara spasial pada Gambar 4.20.

TABEL IV.49
INTERAKSI SOSIAL BUDAYA

No	Kecamatan	Desa/ kelurahan	Interaksi Sosial Budaya											
			Pendidikan				Ibadah					Kesehatan		
			SD	SMP	SMU	PT	M	L	G	K	P/ BA	RSU	PUS	PST
1	Jenamas	4			BJM AMT	BJM								
2	Dusun Hilir	9			BTK PLK PLP	PLK BJM								
3	Karau Kuala	11			 BTK TML PLK	BJM PLK								
4	Dusun Selatan	25				PLK BJM J 								
5	Dusun Utara	16			 BTK	BJM PLK								
6	G.B. Awai	12			 BTK	PLK BJM								

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Keterangan :

M = Mesjid
L = Langgar
G = Gereja
K = Kapel
P/ BA = Pura/ Balai Adat
RSU = Rumah Sakit Umum
PUS = Puskesmas
PST = Puskesmas Pembantu
AMT = Amuntai
EJM = Banjarmasin
BTK = Buntok
J = Jawa
PLK = Palangka Raya
PLP = Pulang Pisau

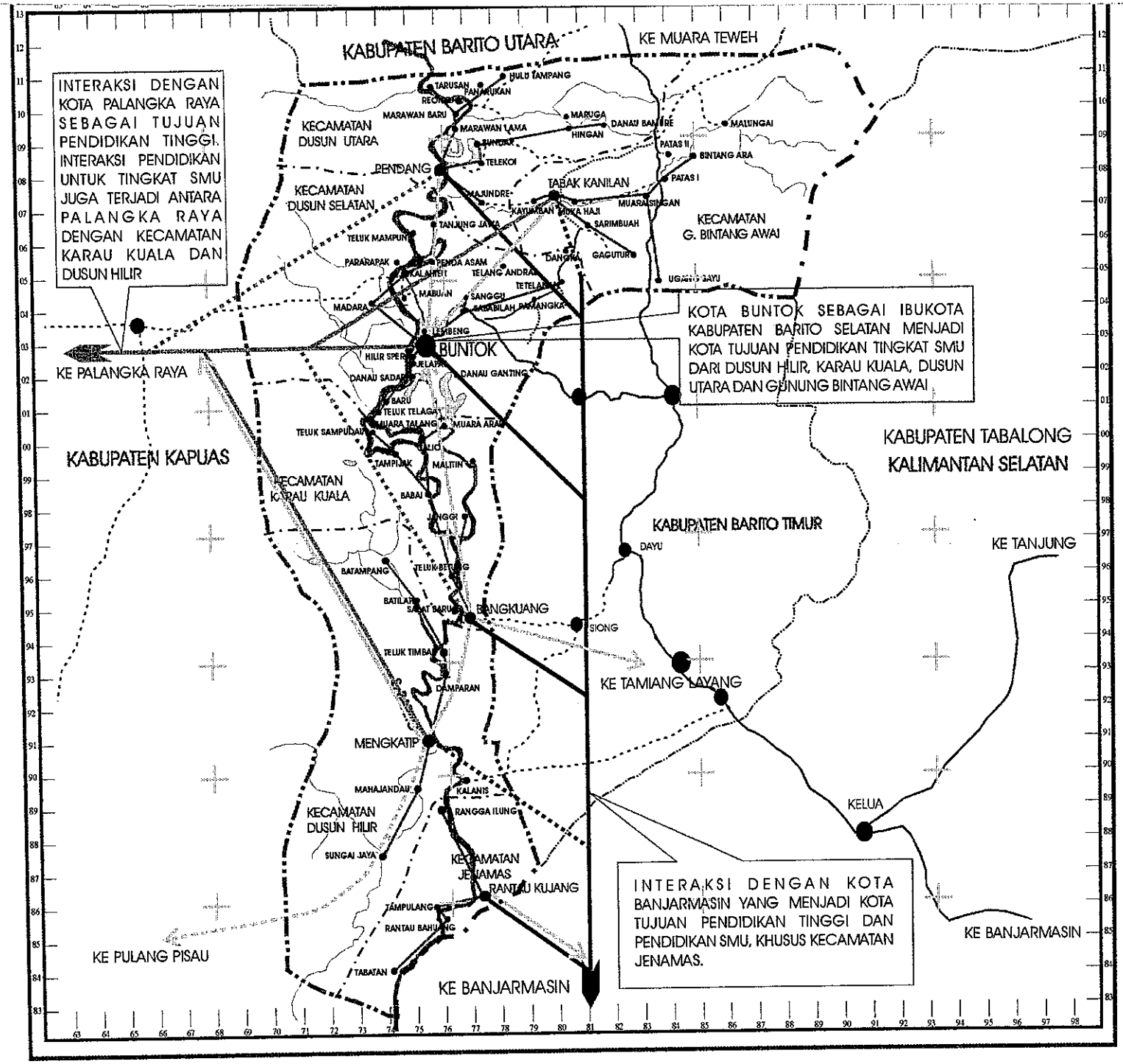

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

LEGENDA

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- IBUKOTA KABUPATEN
- DESA YANG MEMILIKI PUSKESMAS/ PUSTU
- DESA
- JALAN NASIONAL
- JALAN PROVINSI
- JALAN ASPAL
- JALAN BATU
- JALAN TANAH
- DANAU
- SUNGAI
- INTERAKSI KEBUTUHAN PT DENGAN BANJARMASIN
- INTERAKSI KEBUTUHAN PT DENGAN PALANGKA RAYA
- INTERAKSI KEBUTUHAN TINGKAT SMU KUAT
- INTERAKSI KEBUTUHAN TINGKAT SMU LEMAH
- INTERAKSI AKTIVITAS KESEHATAN

INSERT

SUMBER :
RTRW KAB. BARITO SELATAN

PETA ANALISIS INTERAKSI SOSIAL BUDAYA

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
4.20	205	1 : 750.000	

4.5 Analisis Struktur Ruang sebagai Arahan Pengembangan Ekonomi Wilayah

Pengertian **arahan** menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2001 : 64) adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu; atau perintah resmi dari pimpinan kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu. Dalam kaitannya dengan kebijakan, menurut Riyadi dan Bratakusumah (2003 : 94), penyusunan kebijakan meliputi unsur-unsur : (1) tinjauan keadaan atau analisis situasi, baik keadaan sebelumnya, saat sekarang maupun masa yang akan datang, serta mengidentifikasi kendala, tantangan, peluang serta prospek yang dapat dikembangkan (2) perkiraan masa rencana (3) penetapan dan pilihan cara mencapai tujuan (4) identifikasi kebijakan; dan (5) penetapan rencana.

Affendi Anwar dan Setia Hadi (1996 : 54) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan wilayah dari aspek ekonomi adalah penentuan peranan sektor-sektor pembangunan yang diharapkan dapat mewujudkan keserasian antar sektor pembangunan.

Dalam studi ini, arahan pengembangan ekonomi wilayah dibatasi pada langkah pertama, yaitu : mengkaji keadaan eksisting serta mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan. Analisis ini dilakukan dengan menentukan struktur ruang dalam pengembangan ekonomi wilayah, dan selanjutnya dengan melihat kembali peran kebijakan struktur ruang maupun ekonomi dilakukan kajian keunggulan dan kelemahan dalam struktur ruang serta kebutuhan sarana dan prasarana.

4.5.1 Analisis Struktur Ruang dalam Pengembangan Ekonomi Wilayah

Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi struktur ruang Kabupaten Barito Selatan secara komprehensif dengan mengintegrasikan antara struktur ruang fisik, struktur ruang ekonomi dan interaksi wilayah.

Dari hasil analisis sebelumnya, terdapat perbedaan antara struktur ruang secara fisik dan secara ekonomi. Dalam struktur ruang fisik, peran Kota Buntok didistribusikan

pada Kota Mengkatip (Orde II) sementara Kota Tabak Kanilan (Orde IV) berada di bawah pelayanan rata-rata kota kecamatan lainnya. Sedangkan pada struktur ruang ekonomi, Tabak Kanilan yang merepresentasikan Kecamatan Gunung Bintang Awai berada pada Orde II, sedangkan peran ekonomi Wilayah DAS Barito selain Kota Rantau Kujang tergolong kecil atau sebagai Orde IV yang hanya dapat berperan secara lokal. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 4.21 berikut.

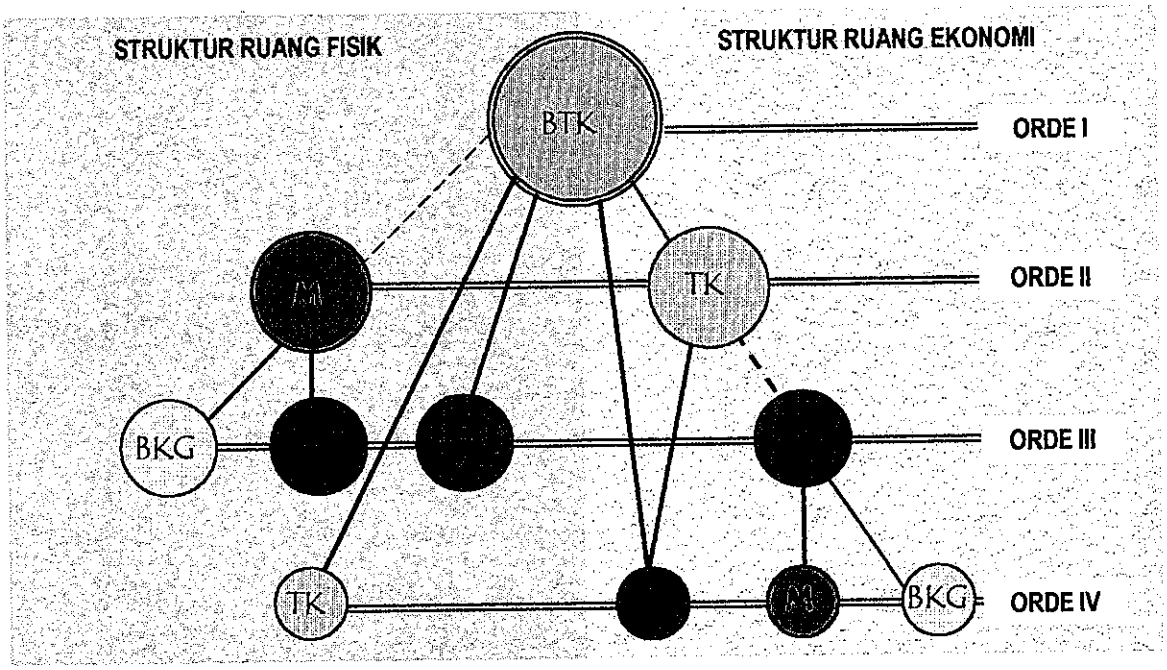

GAMBAR 4.21
KOMPARASI IDENTIFIKASI STRUKTUR RUANG FISIK DAN EKONOMI

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Keterangan :
BTK : Buntok
BKG : Bangkuang
M : Mengkatip
P : Pendang
RK : Rantau Kujang
TK : Tabak Kanilan

Untuk mengidentifikasi struktur ruang secara komprehensif yang mengintegrasikan perbedaan secara fisik dan ekonomi, juga digunakan input hasil analisis interaksi wilayah. Hal tersebut dapat ditabulasikan secara umum sebagai berikut :

TABEL IV.50
SINTESIS STRUKTUR RUANG SECARA FISIK, EKONOMI DAN INTERAKSI WILAYAH

Kecamatan	Struktur Rg Fisik	Struktur Rg Ekonomi	Interaksi Wilayah		
			Transportasi	Ekonomi	Sosial Budaya
Jenamas	Orde III	Orde III	Intensitas tinggi, jalur sungai	Intensitas perdagangan dan mobilitas pedagang tinggi	Interaksi pendidikan tingkat SMU dan PT
Dusun Hilir	Orde II	Orde IV	Intensitas rendah, jalur sungai	Interaksi perdagangan dan mobilitas pedagang sedang	Interaksi pendidikan tingkat PT dan sebagian tingkat SMU
Karau Kuala	Orde III	Orde IV	Intensitas sedang, jalur sungai dan darat	Intensitas perdagangan dan mobilitas pedagang sedang	Interaksi pendidikan tingkat PT dan sebagian tingkat SMU
Dusun Selatan	Orde I	Orde I	Intensitas sangat tinggi, jalur sungai dan darat	Intensitas perdagangan dan mobilitas pedagang sangat tinggi	Interaksi pendidikan tingkat PT
Dusun Utara	Orde III	Orde IV	Intensitas tinggi, jalur sungai	Intensitas perdagangan dan mobilitas pedagang sedang	Interaksi pendidikan tingkat PT dan sebagian tingkat SMU
G.B Awai	Orde IV	Orde II	Intensitas rendah, jalur darat	Interaksi perdagangan dan mobilitas pedagang sedang	Interaksi pendidikan tingkat PT dan sebagian tingkat SMU

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dikaitkan dengan organisasi ruang atas dasar aspek-aspek tersebut di atas, digunakan sejumlah kajian teoretis sebagai pertimbangan :

1. Hirarki daerah inti dalam sistem spasial ditetapkan atas dasar kedudukan fungsionalnya dalam suatu sistem ruang yang meliputi karakteristik dan prestasinya (Friedman dalam Adisasmita, 1993 : 47-48).

2. Hirarki setiap simpul ditentukan oleh kedudukannya dalam hubungan fungsional antar simpul berdasar mekanisme arus distribusi barang. Fungsi primer simpul adalah sebagai pusat pelayanan jasa distribusi bagi wilayah pengembangan (eksternal), sementara fungsi sekunder adalah bagi kehidupan masyarakat di dalam simpul yang bersifat internal (Hadjisarosa dalam Adisasmita, 1993 : 51-51).
3. Integrasi spasial dari masyarakat terutama dihasilkan melalui keterhubungan fisik melalui jaringan transportasi yang alami ataupun buatan. Kombinasi dari transportasi dan keterhubungan pasar dalam suatu wilayah dapat mendorong pertumbuhan jejaring dan integrasi pasar, memperluas pola pertukaran komoditas pertanian dan memperluas akses penduduk perdesaan kepada barang dan jasa (Rondinelli, 1985 : 142, 144).

Atas dasar keterkaitan hasil analisis dan kajian teoretis tersebut, untuk menentukan struktur ruang Kabupaten Barito Selatan secara komprehensif digunakan metode *Scoring* yang mencakup seluruh aspek dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberikan bobot 3 untuk aspek struktur ruang fisik dan ekonomi atas dasar orde kota. Semakin kecil orde, nilai akan mendekati 4. Semakin besar orde, nilai akan mendekati 1. Dasar penilaian ranking adalah :

   - Orde I : Nilai 4
   - Orde II : Nilai 3
   - Orde III : Nilai 2
   - Orde IV : Nilai 1

2. Memberikan bobot 2 untuk aspek interaksi fisik (jaringan transportasi). Aspek interaksi fisik dilihat dari masing-masing pelayanan transportasi, baik sungai maupun darat, yang mempunyai bobot 1. Penilaian aspek interaksi fisik adalah aksesibilitas dan kemudahan transportasi unit spasial karena ketersediaan sarana dan prasarana serta tingkat kualitas pelayanan. Semakin baik aksesibilitas dan pelayanan transportasi, nilai akan mendekati 4, dan sebaliknya.

3. Memberikan bobot 2 untuk aspek interaksi ekonomi dan bobot 1 untuk interaksi sosial budaya. Aspek interaksi ekonomi dilihat dari intensitas perdagangan di pasar kecamatan dan mobilitas pedagang. Semakin tinggi intensitas dan mobilitas pedagang, nilai akan mendekati 4, dan sebaliknya. Aspek interaksi sosial budaya dilihat dari kemampuan unit spasial melayani kebutuhan peribadatan, pendidikan dan kesehatan di wilayahnya sendiri. Semakin kurang ketergantungan terhadap wilayah luar atau semakin mampu melayani wilayah sendiri, nilai mendekati 4. Semakin tergantung terhadap wilayah luar, nilai mendekati 1.

Berdasarkan metode *Scoring* di atas, untuk struktur ruang secara fisik dan ekonomi diperoleh nilai setiap unit spasial sebagai berikut :

TABEL IV.51
PENENTUAN HIRARKI BERDASARKAN
STRUKTUR RUANG FISIK DAN EKONOMI

Kota	Kecamatan	Str.Ruang Fisik		Str.Ruang Ekonomi		Total
		Orde	Nilai	Orde	Nilai	
Rantau Kujang	Jenamas	III	6	III	6	12
Mengkatip	Dusun Hilir	II	9	IV	3	12
Bangkuang	Karau Kuala	III	6	IV	3	9
Buntok	Dusun Selatan	I	12	I	12	24
Pendang	Dusun Utara	III	6	IV	3	9
Tabak Kanilan	Gng.Bintang Awai	IV	3	II	9	12

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Ditinjau dari aspek penunjang, yaitu interaksi fisik, ekonomi dan sosial budaya diperoleh nilai setiap unit spasial sebagai berikut :

TABEL IV.52
PENENTUAN HIRARKI BERDASARKAN INTERAKSI WILAYAH

Kota	Kecamatan	Interaksi Fisik			Interaksi Ekonomi		Interaksi Sosial Budaya	Total
		Darat	Sungai	Nilai	Interaksi	Nilai		
Rantau Kujang	Jenamas	0	3	3	3	6	1	10
Mengkatip	Dusun Hilir	0	2	2	2	4	2	8

Bersambung ...

.... Lanjutan

Kota	Kecamatan	Interaksi Fisik			Interaksi Ekonomi		Interaksi Sosial Budaya	Total
		Darat	Sungai	Nilai	Interaksi	Nilai		
Bangkuang	Karau Kuala	1	2	3	2	4	2	9
Buntok	Dusun Selatan	4	4	8	4	8	3	19
Pendang	Dusun Utara	0	3	3	2	4	2	9
Tabak Kanilan	G.B. Awai	2	0	2	2	4	2	8

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Hasil Tabel IV.51 dan Tabel IV.52 ditabulasikan ke dalam tabel penentuan hirarki setiap unit spasial secara komprehensif untuk menentukan ranking sementara. Hasil tabulasi berdasarkan struktur ruang fisik dan ekonomi serta interaksi wilayah adalah sebagai berikut :

TABEL IV.53
HIRARKI UNIT SPASIAL BERDASARKAN STRUKTUR RUANG FISIK, STRUKTUR RUANG EKONOMI DAN INTERAKSI WILAYAH

No	Kota	Kecamatan	Total Nilai	Ranking
1	Buntok	Dusun Selatan	43	1
2	Rantau Kujang	Jenamas	22	2
3	Mengkatip	Dusun Hilir	20	3
4	Tabak Kanilan	Gunung Bintang Awai	20	3
5	Pendang	Dusun Utara	18	4
6	Bangkuang	Karau Kuala	18	4

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Berdasarkan ranking unit spasial di Kabupaten Barito Selatan ditinjau secara komprehensif dan keterkaitan teoretis yang ada, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek pelayanan (peran fisik) dan ekonomi (fungsional) yang ditunjang oleh interaksi wilayah, Kecamatan Dusun Selatan jauh lebih baik. Menurut pendapat Wibisono, et.al. (1993: 24), kota akan menjadi pusat pertumbuhan disebabkan dua macam proses : (1) Proses formal, yaitu peran suatu kota sebagai pusat pertumbuhan akibat dari struktur administrasi wilayah (2) Proses alamiah, yaitu kota menjadi pusat pertumbuhan karena

pelayanan komersial. Kota yang mempunyai efisiensi ekonomi yang lebih baik akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Kedua proses ini telah dipenuhi Dusun Selatan bahkan sebelum pemekaran. Oleh karenanya, Kecamatan Dusun Selatan dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan Kabupaten Barito Selatan.

Friedman dalam Adisasmita (1993 : 48) menyatakan, sampai pada suatu titik tertentu pertumbuhan daerah inti mungkin mempunyai pengaruh negatif jika penyebaran kepada daerah sekitarnya tidak berhasil ditingkatkan, sehingga ketergantungan dan keterhubungan daerah sekitarnya terhadap daerah inti menjadi berkurang. Oleh karena itu setelah menetapkan Kecamatan Dusun Selatan sebagai pusat pertumbuhan wilayah, diperlukan penetapan pusat pertumbuhan kedua dan wilayah belakang.

Tahap pertama adalah melakukan perhitungan interval kelas, yaitu :

= Skor tertinggi-skor terendah/ jumlah kelas

= 22-18/ 3

= 1,33

Sehingga interval kelasnya adalah :

1. Kota Orde IV : $16 < x < 17,33$
2. Kota Orde III : $17,33 < x < 18,66$
3. Kota Orde II : $x > 18,66$

Dengan mengacu pada Tabel IV.52 , maka sistem hirarki kota di Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari sub-pusat pertumbuhan wilayah dan pusat pelayanan lokal adalah sebagai berikut :

1. Kota Orde II : Rantau Kujang, ibukota Kecamatan Jenamas
2. Kota Orde III : Mengkatip, ibukota Kecamatan Dusun Hilir
   Tabak Kanilan, ibukota Kecamatan Gunung Bintang Awai
3. Kota Orde IV : Pendang, ibukota Kecamatan Dusun Utara
   Bangkuang, ibukota Kecamatan Karau Kuala

Struktur ruang dalam pengembangan wilayah ekonomi Barito Selatan di atas menjelaskan suatu organisasi ruang sebagai berikut :

1. Pusat pertumbuhan wilayah Barito Selatan adalah Kota Buntok sebagai Orde I yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi. Dilihat dari struktur ruang ekonomi, peran pusat ekonomi sekunder diemban Kecamatan Gunung Bintang Awai. Dilihat dari interaksi ekonomi, Buntok secara kuat mempengaruhi Kecamatan Dusun Utara dan wilayah Kecamatan Karau Kuala bagian Utara. Dilihat dari struktur ruang fisik, Buntok mempengaruhi Gunung Bintang Awai, Dusun Utara dan Karau Kuala. Dari sintesis terhadap pengaruh empiris Kota Buntok, terlihat bahwa wilayah pengaruh yang terbentuk meliputi Kecamatan Karau Kuala, Gunung Bintang Awai dan Dusun Utara.
2. Sub pusat pertumbuhan wilayah Barito Selatan adalah Kota Rantau Kujang sebagai Orde II yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi sub regional. Ditinjau dari struktur ruang fisik, Kota Rantau Kujang berinteraksi erat dengan Kota Mengkatip. Ditinjau dari interaksi ekonomi, Rantau Kujang lebih mempunyai similaritas pola interaksi dengan Mengkatip dan Bangkuang. Ditinjau dari struktur ruang ekonomi, peran Jenamas (13,31 %) hampir setara dengan Dusun Hilir (11,06 %) dan Karau Kuala (9,56%), sedangkan ditinjau dari interaksi fisik, Rantau Kujang adalah sentral lalu-lintas Hilir Sungai Barito.
3. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kota Bangkuang lebih kuat dipengaruhi Kota Buntok, tetapi pengaruh tersebut lebih disebabkan daya tarik fisik Sedangkan dilihat dari dimensi homogenitas struktur ekonomi dan keterhubungan transportasi sungai, Kota Bangkuang bersama dengan Kota Mengkatip dan Rantau Kujang mempunyai interaksi yang nyaris setara.

Dari organisasi ruang tersebut, dapat diidentifikasikan struktur ruang Kabupaten Barito Selatan dalam konteks pengembangan ekonomi wilayah sebagai berikut :

1. Kota Buntok sebagai pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Barito Selatan dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Dusun Selatan, Gunung Bintang Awai dan Dusun Utara. Sistem hirarki kota terdiri atas interaksi Kota Orde I dengan wilayah pengaruh Kota Orde III dan IV. Keterhubungan fisik melalui jalur darat dan sungai.
2. Kota Rantau Kujang sebagai sub pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Barito Selatan dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Jenamas, Dusun Hilir dan Karau Kuala. Sistem hirarki kota terdiri atas interaksi Kota Orde II dengan wilayah pengaruh Kota Orde III dan IV. Keterhubungan fisik melalui jalur sungai.

Secara spasial, struktur ruang dalam pengembangan ekonomi wilayah ini ditunjukkan dalam Gambar. 4.22

4.5.2 Analisis Keunggulan dan Kelemahan Struktur Ruang

Analisis ini dimaksudkan untuk mengkaji struktur ruang dalam pengembangan ekonomi wilayah ditinjau dari konteks peran kebijakan struktur ruang dan ekonomi yang sudah ada, sehingga dapat diidentifikasi kelebihan dan kelemahan struktur ruang yang dapat memberikan garis besar ke arah mana seyogyanya intervensi ruang dilakukan.

Ditinjau dari kebijakan mengenai struktur ruang Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Revisi RTRW 1998 dan Renstra 2001-2005, daerah yang masuk wilayah Barito Selatan pascapemekaran adalah :

- Wilayah Pembangunan Bagian Barat dengan pusat pengembangan Kota Buntok. Meliputi Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai.
- Wilayah Pembangunan Bagian Selatan dengan pusat pengembangan Kota Rantau Kujang. Meliputi Kecamatan Jenamas, Dusun Hilir, dan Karau Kuala.

Dengan demikian, antara kebijakan struktur ruang ternyata terdapat kesamaan dan perbedaan dengan struktur ruang hasil identifikasi penelitian. Kesamaan terletak pada pusat pertumbuhan dan wilayah pengaruh. Perbedaannya terletak pada sistem

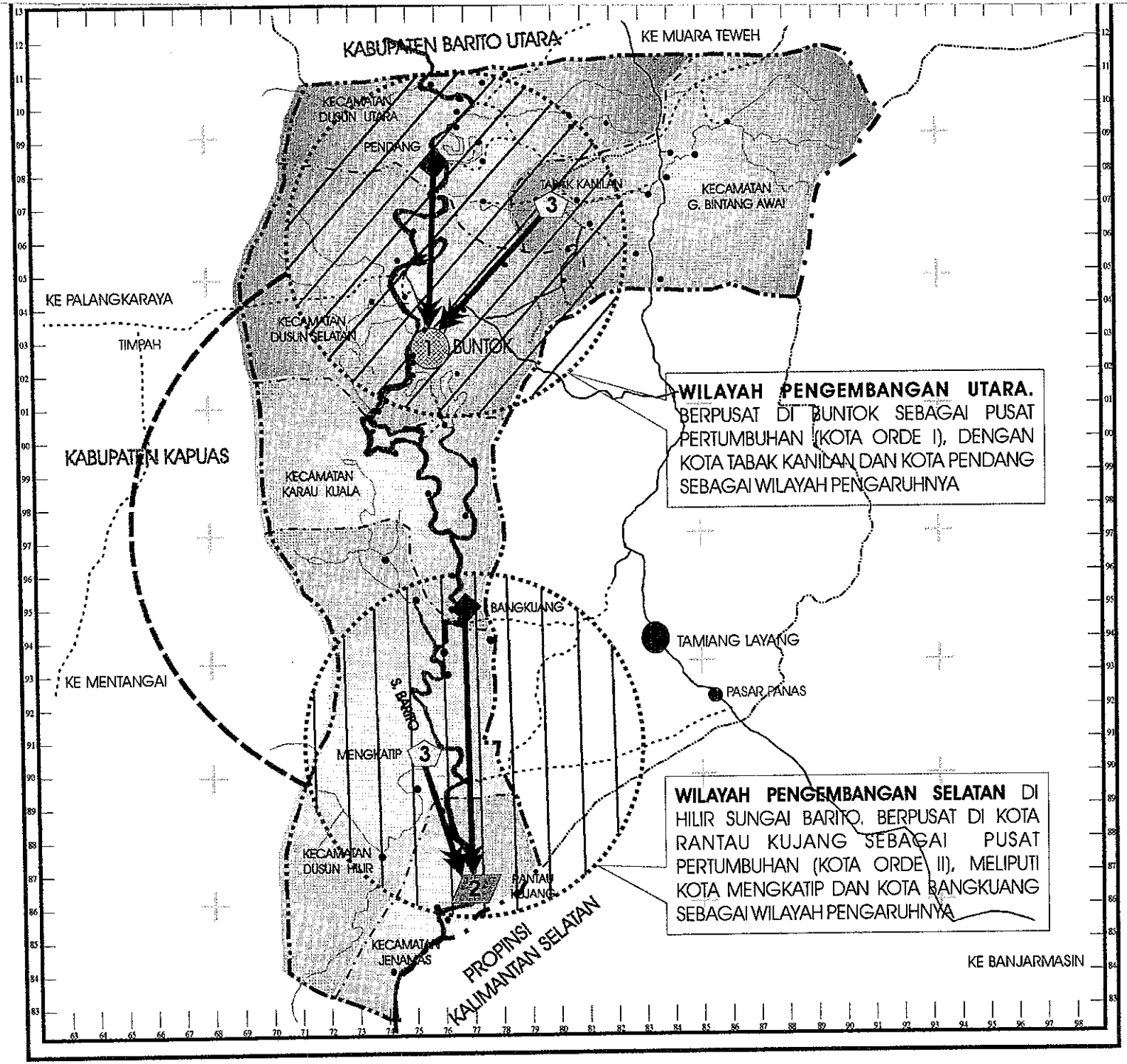

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN
PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

LEGENDA

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- KOTA ORDE I — PUSAT PELAYANAN REGIONAL
- KOTA ORDE II — SUB PUSAT PELAYANAN REGIONAL
- KOTA ORDE III — SUB PUSAT PELAYANAN REGIONAL
- KOTA ORDE IV — PUSAT PELAYANAN LOKAL
- DESA
- KETERKAITAN WILAYAH PENGEMBANGAN
- HIRARKI PUSAT PERTUMBUHAN-WILAYAH PENGARUH

INSERT

SUMBER :
RTRW KAB. BARITO SELATAN

PETA ANALISIS STRUKTUR RUANG DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
4.22	215	1 : 750.000	

hirarki kota. Perbedaan tersebut adalah bahwa dalam kebijakan struktur ruang eksisting, Kota Buntok merupakan Orde I sedangkan kota kecamatan lain Orde IV. Hal ini jika diimplementasikan akan mempertegas peran sentralistis Kota Buntok pascapemekaran dan menimbulkan disparitas wilayah.

Revisi RTRW 1998 yang tidak dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah membuat peran rencana tata ruang tidak memiliki konsekuensi hukum. Oleh karenanya kebijakan ekonomi yang diambil belum mengacu pada dimensi spasial, sehingga antara kebijakan struktur ruang dan kebijakan ekonomi berjalan sendiri-sendiri (hasil analisis 4.1). Untuk melihat kelebihan dan kelemahan dalam organisasi ruang Barito Selatan sebagai arahan pengembangan ekonomi wilayah, dilakukan analisis terhadap peran sektor ekonomi dalam pusat pertumbuhan dan wilayah pengaruhnya sebagai berikut :

1. Kecamatan Dusun Selatan dengan Kota Buntok sebagai pusat pertumbuhan (Orde I) Kabupaten Barito Selatan. Kota Buntok memiliki fasilitas pelayanan yang paling baik di antara kota kecamatan lainnya dalam kedudukannya sebagai pusat pemerintahan. Dilihat dari peran ekonomi, Kecamatan Dusun Selatan cukup merata untuk semua sektor. Peran ekonomi sangat baik pada sektor tersier, yaitu perdagangan, hotel dan restoran (28,71 %). Sektor pertanian memiliki peran 23,59 %, sektor jasa-jasa (16,27 %) dan sektor bangunan (14,52 %). Sektor pertanian yang menonjol adalah sub sektor peternakan dan perikanan, sedangkan kontribusi terhadap Barito Selatan untuk sektor ini adalah sebesar 17,58 %. Dilihat dari struktur ekonomi Barito Selatan, peran Kecamatan Dusun Selatan tergolong dominan, terutama pada sektor tersier.
2. Wilayah pengaruh Kota Buntok meliputi Kota Tabak Kanilan (Orde III) dan Kota Pendang (Orde IV), dengan keunggulan dan kelemahan sebagai berikut :

- Kecamatan Gunung Bintang Awai memiliki potensi ekonomi yang paling prospektif dan memegang peran sektor primer terbesar, yaitu pertanian (27,80 %) dan pertambangan (34,63 %). Pada sektor pertanian, dengan kondisi topografis yang berbeda dibanding kecamatan lainnya membuat Gunung Bintang Awai sangat menonjol untuk sub sektor kehutanan (34,88 %), pertanian tanaman pangan (47,02 %) dan perkebunan (38,44 %). Sedangkan di sektor pertambangan, hampir seluruh deposit tambang batubara dan bahan galian berada di kecamatan ini. Dilihat dari struktur ekonomi internal, dapat dikatakan kecamatan ini mengandalkan sektor pertanian saja, yaitu 85,56 %. Kota Tabak Kanilan sangat lemah dalam hal ketersediaan fasilitas pelayanan dan tertinggal dibanding ibukota kecamatan lainnya. Hal disebabkan peran kota ini cenderung sebatas pusat pemerintahan. Posisinya yang relatif di pedalaman menjadikan Desa Patas I dan Desa Ugang Sayu yang berada di jalur provinsi menjadi pusat ekonomi Kecamatan Gunung Bintang Awai.
- Kecamatan Dusun Utara mempunyai fasilitas yang lebih baik dibanding Gunung Bintang Awai, tetapi mempunyai peran ekonomi paling kecil dalam struktur ekonomi Barito Selatan. Kecamatan ini tidak mempunyai nilai sama sekali pada sub sektor industri non migas dan hotel. Untuk sektor pertanian, Dusun Utara hanya menonjol pada sub sektor perkebunan (38,05 %) dan peternakan (12,27 %). Kecamatan Dusun Utara dapat dikatakan sebagai wilayah yang paling lemah sumber daya alamnya, walaupun fasilitas lebih baik dibanding Kecamatan Gunung Bintang Awai.

3. Kecamatan Jenamas dengan ibukotanya Rantau Kujang sebagai sub pusat pertumbuhan (Orde II) Kabupaten Barito Selatan. Jenamas dapat dikatakan pusat industri Barito Selatan (kontribusi sebesar 37,87 %) Keterkaitan ke belakang

(*backward linkages*) dengan sub sektor kehutanan menyebabkan Jenamas adalah yang terbesar setelah Gunung Bintang Awai dengan kontribusi 19,78 %. Wilayah Jenamas yang relatif tergenang membuatnya tidak menonjol pada sub sektor pertanian lainnya, selain perikanan (18,58 %). Selain itu, Jenamas berada di bawah Dusun Selatan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran (8,35 %) serta angkutan dan komunikasi (21,32 %). Untuk sektor angkutan, Dermaga Rantau Kujang adalah pusat aktivitas ekonomi Wilayah Hilir Barito dengan interaksi ekonominya yang cukup tinggi. Berkaitan dengan interaksi sosial budaya, Jenamas belum dilengkapi fasilitas SMU. Infrastruktur jalan darat sedang dirintis ke Kota Rantau Kujang melawati Pasar Panas (Barito Timur), yang diperlukan untuk meretas isolasi wilayah Selatan Kabupaten Barito Selatan.

4. Wilayah pengaruh Kota Rantau Kujang meliputi Kota Mengkatip (Orde III) dan Bangkuang (Orde IV). Adapun keunggulan dan kelemahan wilayah pengaruh Kota Rantau Kujang ini adalah :

   - Kota Mengkatip memiliki fasilitas yang paling baik setelah Kota Buntok. Dalam struktur ekonomi, Kecamatan Dusun Hilir rata-rata mendapat nilai yang cukup baik untuk semua sektor, walaupun tidak terlalu menonjol. Untuk sub sektor kehutanan yang merupakan pemberi nilai ekonomi terbesar bagi Barito Selatan, Dusun Hilir berada di bawah Gunung Bintang Awai dan Jenamas dengan nilai peran ekonomi sebesar 14,61 % yang disebabkan karena kedudukannya sebagai penghasil rotan terbesar di Barito Selatan. Kelemahan Mengkatip adalah kota ini berada di seberang Sungai Barito dan posisi kecamatan secara umum yang terisolasi oleh aliran Sungai dan anak Sungai Barito, sehingga pengembangan kecamatan ini mengalami kendala pengembangan infrastruktur.

- Kecamatan Karau Kuala dengan ibukotanya Bangkuang sebenarnya lebih baik dalam hal aksesibilitas, karena kecamatan ini dapat dicapai melalui jalur darat dan sungai. Tetapi aksesibilitas tersebut rupanya belum memberikan nilai lebih bagi kecamatan ini. Dalam struktur ruang ekonomi, kecamatan ini memberikan kontribusi sektor pertanian yang terendah, yakni sebesar 13,17 %, sebagian besar dari sub sektor kehutanan dengan hasil andalan rotan yang berpusat di Desa Babai. Untuk sub sektor perikanan, Karau Kuala merupakan potensi utama Wilayah Hilir Barito dengan kontribusi sebesar 18,97 % yang berpusat di Bangkuang. Dalam konteks intra wilayah Barito Selatan, secara interaksi wilayah (fisik, ekonomi maupun sosial budaya), Karau Kuala cenderung berhubungan erat dengan Kota Buntok. Sementara dalam konteks inter wilayah, Karau Kuala lebih terkait erat dengan Kabupaten Barito Timur melalui akses transportasi darat.

Fungsi orde kota dan keunggulan sektor ekonomi setiap kecamatan dalam struktur ruang ditunjukkan pada Tabel IV.54

TABEL IV.54
FUNGSI ORDE KOTA DAN KEUNGGULAN EKONOMI

Struktur Ruang				Sektor Ekonomi Unggulan
Pusat Pertumbuhan	Wilayah Pengaruh	Kecamatan	Fungsi	
Buntok (Orde I)		Dusun Selatan	• Pusat Pemerintahan • Pusat Ekonomi Regional • Pusat Pelayanan Keuangan dan Perbankan	⊕ Sektor pertanian : perikanan, peternakan, pert. tanaman pangan ⊕ Sektor bangunan ⊕ Sektor perdagangan, hotel dan restoran ⊕ Sektor jasa-jasa ⊕ Sektor keuangan ⊕ Sektor angkutan dan komunikasi
	Tabak Kanilan (Orde III)	Gunung Bintang Awai	Pusat Pelayanan Lokal	⊕ Sektor pertanian : pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan

Bersambung ...

... Lanjutan

Struktur Ruang				Sektor Ekonomi Unggulan
Pusat Pertumbuhan	Wilayah Pengaruh	Kecamatan	Fungsi	
				↓ Sektor pertambangan dan penggalian
	Pendang (Orde IV)	Dusun Utara	Sub Pusat Pelayanan Wilayah Utara	↓ Sektor pertanian : perkebunan, peternakan
Rantau Kujang (Orde II)		Jenamas	Pusat Pelayanan Wilayah Selatan	↓ Sektor pertanian : perikanan, kehutanan ↓ Sektor industri pengolahan ↓ Sektor angkutan dan komunikasi
	Mengkatip (Orde III)	Dusun Hilir	Sub Pusat Pelayanan Wilayah Selatan	↓ Sektor pertanian : perikanan, kehutanan ↓ Sektor industri pengolahan
	Bangkuang (Orde IV)	Karau Kuala	Pusat Pelayanan Lokal	↓ Sektor pertanian : perikanan ↓ Sektor industri pengolahan

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Hasil identifikasi potensi komponen struktur ruang jika dikaitkan dengan kajian teoretis arahan pengembangan ekonomi wilayah dapat menjelaskan keunggulan ekonomi dalam struktur ruang Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

1. Wilayah pengembangan dengan pusat Kota Buntok meliputi Kecamatan Dusun Selatan, Utara dan Gunung Bintang Awai. Kecamatan Dusun Selatan menjadi pusat kegiatan ekonomi sekunder dan tersier Barito Selatan, yang memanfaatkan dan mengelola hasil sektor primer komponen struktur ruang lain. Dalam posisi intra wilayah pengembangan, Kecamatan Dusun Selatan memiliki keunggulan sub sektor perikanan, peternakan dan pertanian tanaman pangan. Kecamatan Gunung Bintang Awai memiliki keunggulan sub sektor kehutanan, pertanian tanaman pangan dan perkebunan, serta sub sektor penggalian. Gunung Bintang Awai adalah pusat aktivitas pertanian dalam organisasi ruang Barito Selatan. Sedangkan

Dusun Utara memperkuat Dusun Selatan dan Gunung Bintang Awai untuk sub sektor perkebunan dan peternakan.

2. Wilayah pengembangan dengan pusat Kota Rantau Kujang meliputi Wilayah Hilir Sungai Barito, yaitu Kecamatan Jenamas, Dusun Hilir dan Karau Kuala. Kecamatan Jenamas memiliki keunggulan sektor industri pengolahan, khususnya industri kayu olahan serta sub sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Jenamas juga memiliki potensi perikanan dan kehutanan yang cukup besar. Sementara Dusun Hilir memiliki keunggulan sub sektor perikanan dan kehutanan, yaitu komoditas rotan dan kegiatan ikutan berupa industri pengolahan rotan. Hal tersebut juga dimiliki Karau Kuala yang mengandalkan potensi hutan berupa rotan dengan kebun rotan yang tersebar di sepanjang Sungai Barito. Dengan demikian sektor/ sub sektor unggulan Wilayah Pengembangan Hilir Barito adalah industri pengolahan, perikanan, kehutanan serta angkutan dan komunikasi.

Selanjutnya, untuk mengembangkan keunggulan ekonomi dalam struktur ruang perlu diperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada. Dengan menganalisis keberadaan pusat pertumbuhan dan wilayah pengaruh, dapat diidentifikasi kelemahan-kelemahan struktur ruang yang terkait dengan kondisi fisik dan keberadaan prasarana. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL IV.55
KELEMAHAN DALAM STRUKTUR RUANG BARITO SELATAN

Pusat Pertumbuhan	Wilayah Pengaruh	Kecamatan	Kelemahan dalam Struktur Ruang
Buntok (Orde I)		Dus.Selatan	↓ Peran sebagai pusat pertumbuhan sangat sentralistis pascapemekaran ↓ Belum terhubungkan dengan Palangka Raya melalui jalur darat
	Tabak Kanilan (Orde III)	G.B Awai	↓ Sangat lemah dalam hal ketersediaan fasilitas pelayanan ↓ Pelayanan fisik transportasi darat tidak optimal

Bersambung ...

... Lanjutan

Pusat Pertumbuhan	Wilayah Pengaruh	Kecamatan	Kelemahan dalam Struktur Ruang
			↓ Jumlah penduduk Tabak Kanilan ↓ Kota Tabak Kanilan hanya merupakan pusat pemerintahan
	Pendang (Orde IV)	Dus.Utara	↓ Letak Kota Pendang kurang strategis ↓ Sangat lemah dalam ketersediaan sumber daya alam ↓ Tidak punya sektor ekonomi unggulan selain pertanian ↓ Pertumbuhan penduduk cenderung negatif ↓ Interaksi fisik memusat ke Kota Buntok saja
Rantau Kujang (Orde II)		Jenamas	↓ Wilayah relatif tergenang ↓ Fasilitas SMU belum ada ↓ Tergantung pada jenis industri kayu yang bersifat periodik dan tidak berkelanjutan
	Mengkatip (Orde III)	Dusun Hilir	↓ Letak Mengkatip kurang strategis ↓ Tergantung sepenuhnya pada transportasi sungai
	Bangkuang (Orde IV)	Karau Kuala	↓ Belum ada peran ekonomi yang menonjol ↓ Pelayanan jaringan darat tidak optimal

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Keunggulan dan kelemahan dalam struktur ruang ini menjadi dasar untuk menentukan arahan pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah.

Keunggulan ekonomi dalam struktur ruang ditunjukkan dalam Gambar 4.23.

4.5.3 Analisis Kebutuhan Pengembangan Sarana dan Prasarana berdasarkan Keunggulan dan Kelemahan Struktur Ruang

Setelah mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan dalam struktur ruang, dilakukan analisis kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana sebagai suatu arahan. Dari kelemahan struktur ruang sebelumnya, persoalan yang timbul dapat dikelompokkan dalam persoalan secara fisik, yaitu :

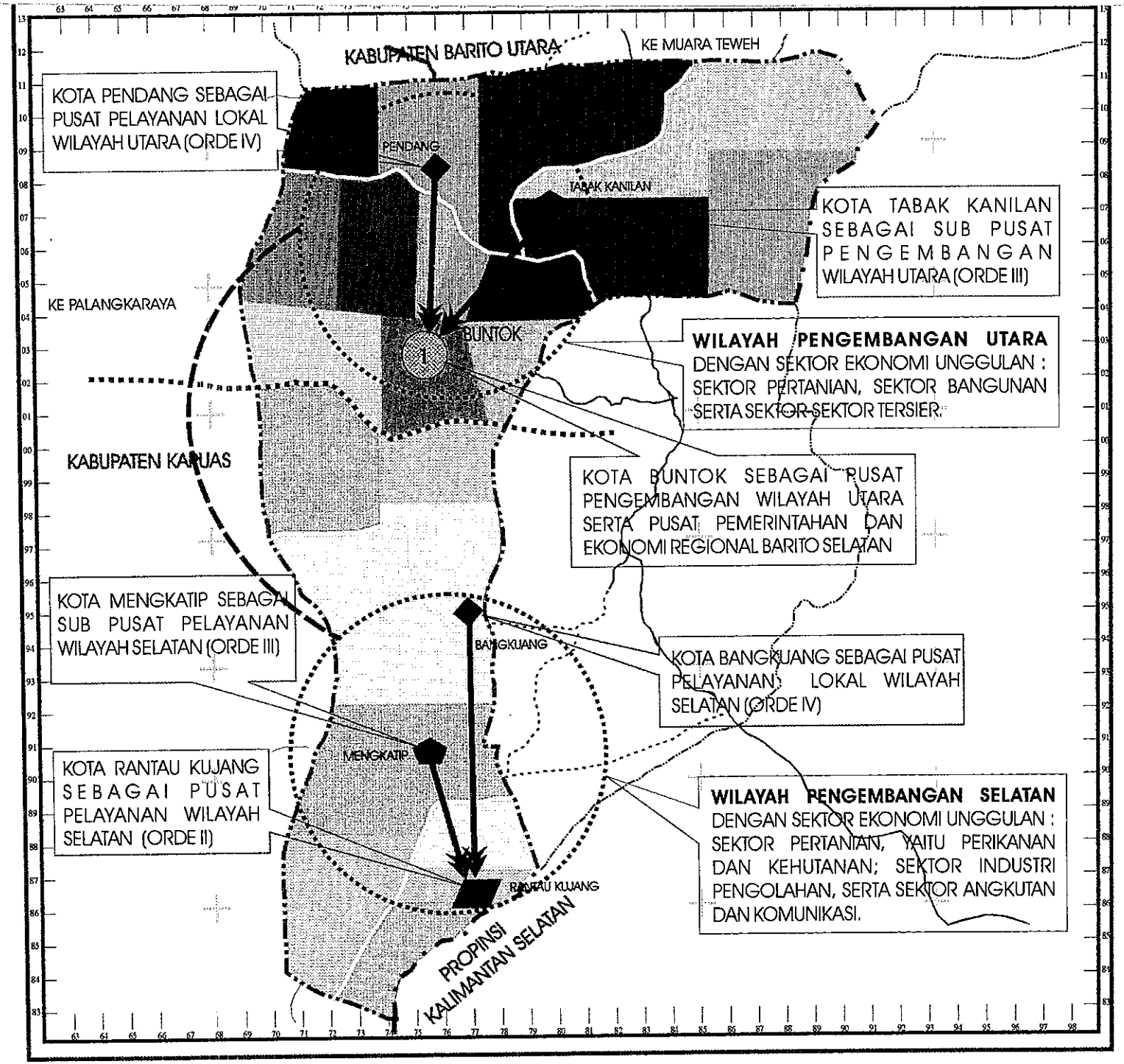

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

LEGENDA

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS WILAYAH PENGEMBANGAN
- SUB SEKTOR KEHUTANAN
- SUB SEKTOR PERKEBUNAN
- SUB SEKTOR PERTANIAN TAN.PANGAN
- SUB SEKTOR PETERNAKAN
- SUB SEKTOR PERIKANAN
- PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
- INDUSTRI PENGOLAHAN
- BANGUNAN
- ANGKUTAN & KOMUNIKASI
- PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN
- KEUANGAN
- JASA-JASA

INSERT

SUMBER :
RTRW KAB. BARITO SELATAN

PETA ANALISIS
KEUNGGULAN EKONOMI STRUKTUR RUANG

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
4.23	223	1 : 750.000	

1. Wilayah Utara
   - Interaksi fisik hanya terjadi antara Kota Pendang dan Kota Tabak Kanilan terhadap Kota Buntok, sedangkan antara Kota Pendang dengan Kota Tabak Kanilan tidak terjadi interaksi fisik
   - Dukungan fasilitas Kota Tabak Kanilan sebagai wilayah belakang Kota Buntok sangat kurang, walaupun mempunyai sumber daya alam yang prospektif. Fasilitas tersebut meliputi kantor pos dan terminal.
   - Akibat kurangnya dukungan wilayah pengaruh menyebabkan peran Kota Buntok pascapemekaran sebagai simpul yang berorientasi Banjarmasin relatif lemah.
2. Wilayah Selatan
   - Ketergantungan penuh pada jalur transportasi sungai, kecuali Kota Bangkuang
   - Fasilitas penunjang sangat kurang, terutama jasa perbankan
   - Industri kayu olahan yang menjadi andalan tergantung sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan tidak berdimensi jangka panjang
   - Keunggulan ekonomi relatif terbatas, karena kondisi topografis kurang menguntungkan.

Friedman dalam Rondinelli (1985 : 216) mengidentifikasi sejumlah cara terbatas sebagai intervensi untuk mengubah langkah dan tujuan pengembangan ekonomi wilayah. Salah satunya adalah mendirikan atau memperluas sarana dan prasarana yang relevan bagi aktivitas produktif serta pengembangan sumber daya lokal dan perbaikan keuntungan lokasional. Kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana tersebut jika dikaitkan dengan kelemahan-kelemahan dalam organisasi ruang Barito Selatan tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL IV.56
KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

Wilayah Pengembangan	Arahan Pengembangan	
	Sektor Ekonomi Unggulan	Kebutuhan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Wilayah Pengembangan Utara	↓ Sektor-sektor tersier : perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa; keuangan, angkutan dan komunikasi ↓ Sektor pertanian : kehutanan, perikanan, peternakan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan ↓ Sektor pertambangan dan penggalian ↓ Sektor bangunan	↓ Mengusahakan percepatan penyelesaian jalan darat Buntok-Palangka Raya ↓ Meningkatkan kualitas prasarana jalan Buntok-Tabak Kanilan-Patas I ↓ Meningkatkan kualitas prasarana jalan Tabak Kanilan-Pendang ↓ Meningkatkan fasilitas Kota Tabak Kanilan sejajar dengan kota kecamatan lain, terutama fasilitas kantor pos dan terminal ↓ Mengoptimalkan interaksi Buntok dengan Pendang dan Tabak Kanilan sebagai wilayah pengembangan pertanian dan pertambangan
Wilayah Pengembangan Selatan	↓ Sektor industri pengolahan ↓ Sektor pertanian : perikanan, kehutanan ↓ Sektor angkutan dan komunikasi	↓ Mengembangkan peran Rantau Kujang sebagai kota pelabuhan serta pusat industri Barito Selatan dan pertanian Hilir Barito ↓ Mengembangkan fasilitas perbankan untuk melayani Wilayah Selatan ↓ Membuka jalur darat ke Rantau Kujang melalui rute Buntok-Pasar Panas-Kelanis-Rantau Kujang ↓ Meningkatkan fasilitas sosial Kota Rantau Kujang, yaitu SMU ↓ Meningkatkan kualitas prasarana jalan dan sarana transportasi Buntok-Dayu-Bangkuang ↓ Meningkatkan kualitas jalan Bangkuang-Telang Baru ↓ Mengoptimalkan transportasi sungai intra Jenamas dan inter Jenamas-Dusun Selatan

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Mengenai penempatan fasilitas dalam struktur ruang, Poernomosidi berpendapat bahwa lokasi pusat di tengah-tengah hanya dapat dipertanggungjawabkan

UPT-PUSTAK-UNDIP

untuk kegiatan pelayanan yang orientasinya tidak luas dan bersifat ke dalam. Artinya penempatan fasilitas harus memperhatikan ciri-ciri dan orientasi pelayanan agar aktivitas ekonomi terlaksana secara efektif dan efisien (Adisasmita, 1993 : 54).

Dengan melihat keunggulan ekonomi dan kelemahan dalam struktur ruang dari analisis terdahulu, maka arahan berdasarkan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana harus mengupayakan terciptanya efektivitas dan efisiensi pelayanan aktivitas ekonomi. Untuk itu kebutuhan tersebut dikelompokkan berdasarkan arahan intra dan inter wilayah pengembangan , yaitu :

a. Arahan intra wilayah pengembangan, yaitu kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana untuk mendorong aktivitas ekonomi dalam satu unit struktur ruang
b. Arahan inter wilayah pengembangan, yaitu kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana untuk menghubungkan aktivitas ekonomi antara unit-unit struktur ruang kepada wilayah luar.

Berdasarkan pengelompokkan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana struktur ruang Barito Selatan sesuai keunggulan dan kelemahan dari analisis 4.5.2 adalah sebagai berikut :

1. Arahan Wilayah Pengembangan Utara :
   - Mengembangkan fasilitas penunjang produksi pertanian dan pertambangan di Kota Tabak Kanilan dan Pendang
   - Meningkatkan kualitas prasarana jalan Buntok-Tabak Kanilan-Patas I
   - Meningkatkan kualitas prasarana jalan Tabak Kanilan-Pendang
   - Meningkatkan fasilitas Kota Tabak Kanilan sejajar dengan kota kecamatan lain, terutama fasilitas kantor pos dan terminal.

2. Arahan Wilayah Pengembangan Selatan :

- Mengembangkan Kota Rantau Kujang sebagai pusat industri Barito Selatan, terutama pengolahan rotan yang lebih bersifat prospektif
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana transportasi sungai, yaitu dermaga dan moda transportasi intra Wilayah Selatan, dalam rangka mendukung Kota Rantau Kujang sebagai kota pelabuhan utama Hilir Barito
- Mengembangkan fasilitas jasa perbankan di Kota Rantau Kujang sebagai penunjang Wilayah Selatan
- Mengembangkan fasilitas penunjang sub sektor perikanan dan kehutanan, khususnya rotan, sebagai keunggulan ekonomi Wilayah Selatan
- Meningkatkan kualitas jalan Bangkuang-Telang Baru
- Meningkatkan fasilitas sosial di Kota Rantau Kujang, yaitu sarana SMU

3. Arahan antara Wilayah Pengembangan Utara dan Selatan :

- Mempercepat penyelesaian jalan darat Buntok-Palangka Raya melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
- Membuka jalur darat ke Rantau Kujang melalui rute Buntok-Pasar Panas-Kelanis-Rantau Kujang
- Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana transportasi jalan Buntok-Dayu-Bangkuang
- Mengoptimalkan transportasi sungai antara Jenamas-Dusun Selatan sebagai jalur utama antar unit struktur ruang

Kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana berdasar keunggulan dan kelemahan struktur ruang dijelaskan dalam Gambar 4.24

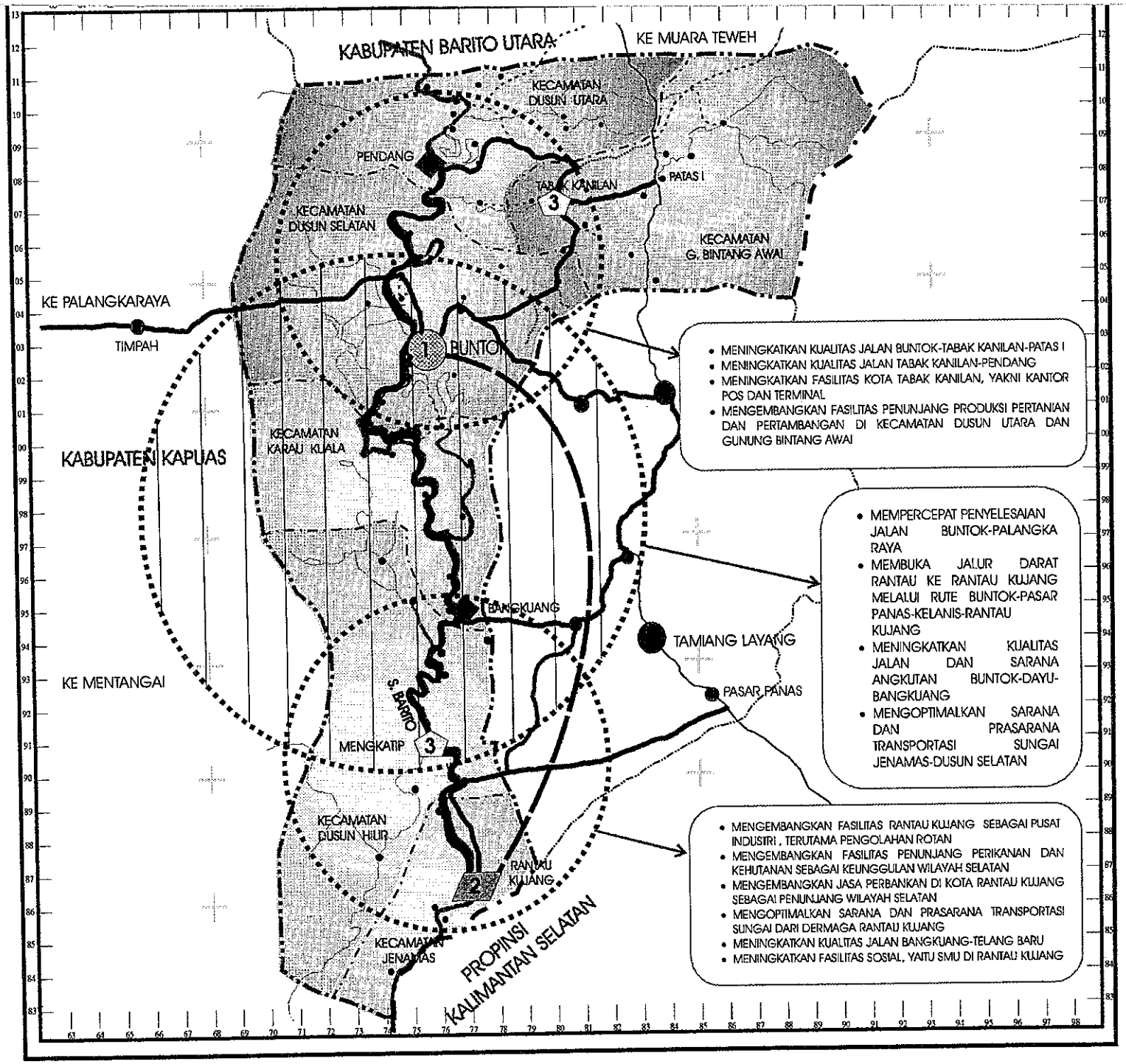

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STRUKTUR RUANG SEBAGAI ARAHAN
PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

LEGENDA

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- KOTA ORDE I
  PUSAT PELAYANAN REGIONAL
- KOTA ORDE II
  SUB PUSAT PELAYANAN REGIONAL
- KOTA ORDE III
  SUB PUSAT PELAYANAN REGIONAL
- KOTA ORDE IV
  PUSAT PELAYANAN LOKAL
- DESA
- KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI SUNGAI
- KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT

INSERT

SUMBER :
RTRW KAB. BARITO SELATAN

PETA ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

NO. GAMB.	NO. HAL.	SKALA	UTARA
4.24	228	1 : 750.000	

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Struktur ruang Kabupaten Barito Selatan dalam konteks pengembangan ekonomi wilayah berangkat dari ruang sebagai entitas aktivitas-aktivitas ekonomi. Hal itu berkaitan erat dengan efektivitas kebijakan, permasalahan spasial dan kemampuan pelayanan fisik untuk mewadahi aktivitas ekonomi tersebut. Sistem hirarki adalah suatu cara yang relatif efisien untuk pengadministrasian dan pengalokasian sumberdaya dalam suatu wilayah (Glasson, 1977 : 147).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, struktur ruang sebagai proses pengembangan wilayah dalam studi ini merupakan upaya mengorganisasikan ruang yang tidak saja berdimensi fisik, tetapi juga ekonomi keruangan dan menyangkut regulasi. Dikaitkan dengan konsep pengembangan kawasan agropolitan menurut Soenarno (2003), studi ini telah mengikuti dan mengkaji secara terbatas langkah-langkah pengembangan, yaitu : (1) Penetapan pusat (2) Penetapan unit-unit kawasan pengembangan (3) Penetapan sektor unggulan (4) Dukungan sistem infrastruktur (5) Dukungan sistem kelembagaan.

Hasil studi terhadap faktor yang mempengaruhi struktur ruang Barito Selatan adalah tidak efektifnya kebijakan struktur ruang sebagai matra spasial kebijakan ekonomi wilayah serta terjadinya perbedaan mendasar antara struktur ruang fisik dan ekonomi di satu sisi, sehingga mempengaruhi terbentuknya struktur ruang yang asimetris. Hal-hal ini merupakan kesimpulan studi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kebijakan struktur ruang Kabupaten Barito Selatan belum mempunyai peranan yang signifikan dalam kaitannya terhadap pembangunan ekonomi pada khususnya. Hal

itu disebabkan kebijakan struktur ruang yang dituangkan dalam Revisi RTRWK Barito Selatan tahun 1998 belum dilegalkan secara hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Aspek legalisasi sangat penting ketika hasil perencanaan pembangunan daerah dipandang sebagai keputusan dari suatu kebijakan yang harus dilaksanakan (Riyadi dan Bratakusumah, 2003 : 14). Tanpa kekuatan yuridis, menyebabkan kurangnya *sense of belonging* terhadap produk Revisi RTRW 1998. Kebijakan struktur ruang yang disosialisasikan kepada *stakeholders* dan dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah Barito Selatan akan lebih efektif dalam implementasinya.

2. Struktur ruang Barito Selatan hasil identifikasi studi bersifat asimetris, di mana Wilayah Selatan sangat jauh tertinggal secara fisik maupun ekonomi. Hal ini sesuai dengan pendapat Perroux yang dikutip John Glasson (1977 : 171) bahwa pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak, tetapi pada titik-titik atau kutub-kutub pertumbuhan tertentu. Poernomosidi dalam Adisasmita (1993 : 54) juga mengemukakan pendapat bahwa wilayah dapat saja terbagi habis secara administratif, tapi tidak otomatis sebagai wilayah pengembangan. Dalam kenyataannya beberapa bagian wilayah administrasi tidak terjangkau pelayanan distribusi, karena munculnya hambatan geografis atau tidak tersedianya prasarana.

   Peran Kota Rantau Kujang sebagai Kota Orde II dan pusat pertumbuhan Wilayah Selatan dengan demikian menjadi sangat berat, karena tidak sebandingnya kendala geografis dengan ketersediaan infrastruktur. Poernomosidi (Adisasmita, 1993 : 59) mengemukakan peranan transportasi adalah mendukung secara langsung hubungan fungsional dan orientasi jasa distribusi antar simpul. Oleh karena itu, pengembangan transportasi diperlukan untuk meretas isolasi terhadap pusat pertumbuhan Wilayah Selatan, yaitu dengan merealisasikan jalur Rantau Kujang-Buntok.

3. Struktur ruang Barito Selatan yang asimetris antara Wilayah Utara dan Selatan memerlukan arahan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana, baik intra maupun inter wilayah pengembangan. Dalam konteks ini Azis (1993 : 66) menyatakan bahwa alternatif kebijakan untuk mengembangkan daerah terbelakang adalah : investasi langsung ke sektor produktif atau penanaman modal pada aspek *social-overhead* seperti pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya. Menurut Friedman dalam Rondinelli (1985 : 216), salah satu cara terbatas sebagai intervensi untuk mengubah langkah pengembangan ekonomi wilayah adalah : mendirikan atau memperluas sarana dan prasarana yang relevan bagi aktivitas produktif; serta pengembangan sumber daya lokal dan perbaikan keuntungan lokasional. Prinsip utama pengembangan ekonomi lokal adalah menitiberatkan penggunaan penuh dari sumber daya alam dan sumber daya manusia eksisting untuk mewujudkan lapangan kerja dan menghasilkan kesejahteraan dalam lokalitas tertentu (Blakely, 1994 : 63). Dengan demikian arahan pengembangan prasarana dan sarana struktur ruang dalam studi ini adalah upaya mengoptimalkan pemanfaatan *local resources* dan mengurangi kesenjangan sebagai bagian dari pengembangan wilayah, yaitu arahan intra Wilayah Utara dan Selatan serta arahan inter Wilayah Utara-Selatan.

4. Perbedaan mendasar antara struktur ruang secara ekonomi dengan struktur ruang fisik Kabupaten Barito Selatan ditunjukkan oleh Kota Tabak Kanilan (Gunung Bintang Awai) yang menempati orde terendah (Orde IV) secara fisik, namun secara ekonomi berada pada Orde II di bawah Kota Buntok. Menurut Affendi Anwar dan Setia Hadi (1996 : 55), hal tersebut merupakan karakteristik wilayah yang belum berkembang, yaitu : tingkat pertumbuhan, kepadatan penduduk, tingkat pendapatan serta pendidikan relatif rendah, sedangkan potensi sumber daya alam belum dikelola dengan baik. Struktur ekonomi sangat didominasi sektor primer, hal ini terjadi pada

Kecamatan Gunung Bintang Awai di mana kontribusi sektor pertaniannya adalah 85,56 % dari total peran ekonomi. Peran ekonomi Gunung Bintang Awai yang cukup besar adalah relevan dengan teori Poernomosidi (Adisasmita, 1993 : 52) bahwa wilayah yang lebih dekat pada simpul (dalam hal ini Kota Buntok) berarti lebih banyak jenis barang yang terjangkau pelayanan pemasaran dan lebih besar kesempatan untuk perkembangan usaha.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, diperoleh sejumlah rekomendasi dalam studi ini. Rekomendasi tersebut berupa usulan bagaimana menindaklanjuti eksistensi struktur ruang sebagai arahan pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Barito Selatan dan juga rekomendasi terhadap pengembangan studi lanjutan.

Usulan terhadap tindaklanjut struktur ruang dalam studi ini adalah :

1. Meninjau dan merevisi kembali kebijakan tentang struktur ruang Barito Selatan sesuai dengan dinamika wilayah, karena terdapat diskrepansi setelah adanya pemekaran daerah. Selanjutnya melakukan sosialisasi dan melegalkan kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah yang mempunyai kekuatan yuridis serta menjadi matra spasial kebijakan pembangunan daerah Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah Barito Selatan memprioritaskan upaya mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana Kecamatan Gunung Bintang Awai sebagai fokus utama pengembangan Wilayah Utara. Dalam jangka pendek, sarana dan prasarana tersebut adalah jalan Buntok-Tabak Kanilan-Patas I serta terminal angkutan. Hal ini diperlukan untuk memperkuat wilayah pengaruh Kota Buntok dan memanfaatkan potensi sumber daya alam Gunung Bintang Awai yang sangat prospektif.
3. Melakukan kerjasama antar wilayah dengan Kabupaten Barito Timur dalam mengembangkan sarana dan prasarana, yakni jalan dan angkutan darat dengan rute

Buntok-Bangkuang dan Buntok-Rantau Kujang dalam membuka isolasi Wilayah Selatan yang tertinggal. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Barito Selatan lebih berkepentingan untuk menjalankan perananan aktif, termasuk pendanaan pembangunan. Jalan darat tersebut juga membuka potensi Kota Rantau Kujang sebagai kota pelabuhan Hilir Barito yang difungsikan sebagai pintu gerbang moda sungai dan menghubungkan wilayah tepi sungai Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur. Dengan demikian pembangunan infrastruktur jalan dapat sejalan dengan upaya menata Dermaga Rantau Kujang itu sendiri.

Usulan terhadap pengembangan studi lanjutan seyogyanya memperhatikan kelemahan-kelemahan dari studi ini :

1. Metode kuantitatif yang digunakan dalam studi ini mempunyai kelemahan, yaitu menghasilkan sesuatu dengan apa adanya yang seringkali tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan, sehingga tidak secara utuh dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.
2. Tidak tersedianya PDRB kecamatan dalam angka menjadikan penentuan struktur ekonomi dalam sub sektor dilakukan melalui pendekatan-pendekatan. Walaupun dalam studi ini yang dilihat mencakup nilai produksi dan nilai potensi, sangat mungkin terjadi ketidaksesuaian peran ekonomi setiap unit spasial.
3. Studi ini hanya mengidentifikasikan keadaan atau analisis situasi serta mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam kaitannya dengan struktur ruang. Tahap ini hanya merupakan langkah pertama dari penyusunan kebijakan. Untuk menyusun kebijakan struktur ruang secara komprehensif sebagai suatu arahan pengembangan ekonomi wilayah, diperlukan studi lanjutan yang mengkaji peluang dan tantangan berkaitan dengan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana, kemudian menetapkan alternatif pencapaian tujuan, identifikasi kebijakan atau kegiatan serta penetapan rencana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ambardi, Urbanus M. dan Socia Prihawantoro (eds.). 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah, Kajian Konsep dan Pengembangan.* Jakarta : Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah.* Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.

Azis, Iwan Jaya. 1993. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia.* Jakarta : LPFE UI.

Bendavid-Val, Avrom. 1991. *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners.* Fourth edition. Westport : Praeger Publishers.

Bingham, R and R. Mier (eds.). 1993. *Theories of Local Economic Development.* New York : Sage Publication.

Blakely, Edward J. 1994. *Planning Local Economic Development, Theory and Practice.* Second Edition. London : Sage Publications, Inc.

Budihardjo, Eko. 1997. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota.* Yogyakarta : Penerbit ANDI.

Budiharsono, Sugeng. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Daldjoeni, N. 1997. *Geografi Baru Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek.* Bandung : PT Alumni.

Dirjend Cipta Karya DPU bekerjasama dengan IAP. 1997. *Kamus Tata Ruang.* Jakarta : Dirjend Cipta Karya DPU.

Doxiadis, Constantinos A. 1971. *Ekistics : An Introduction To The Science of Human Settlements.* Third Edition. London : Hutchinson and Co.

Friedman, J. and C.Weaver. 1979. *Territorial and Function: The Evolution of Regional Planning.* London : Edward Arnold Ltd.

Glasson, John. 1978. *An Introduction to Regional Planning.* London : Hutchinson and Co.

Gore, C. (ed.). 1984. *Regions in Questions : Space, Development Theory and Regional Policy*. London : Methuen.

Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah.* Edisi Ketiga. Bandung : ITB Bandung.

Kadariah. 1985. *Ekonomi Perencanaan.* Jakarta : LPFE UI.

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.* Jakarta : CIDES.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2002. *Daya Tarik Investasi Kabupaten/ Kota di Indonesia : Persepsi Dunia Usaha.* Jakarta : The Asia Foundation.

Kusmayadi dan Endar Sugiarto. 2000. *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisataan.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Dalam Perspektif Otonomi Daerah.* Mataram : Badan Penerbit Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Richardson, Harry W. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional.* Terjemahan: Paul Sitohang. Jakarta : LPFE UI.

Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Riwut, Tjilik. 1979. *Kalimantan Memanggil.* Jakarta : PT Endang.

Rondinelli, D. 1985. *Applied Methods of Regional Analysis.* Colorado : Westview Press

Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey.* Jakarta : LP3ES.

Sugiarto et al. 2001. *Teknik Sampling.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Sukirno, Sadono. 1982. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah.* Jakarta : LPFE UI.

_____ . 1985. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan.* Jakarta : LPFE UI dengan Bina Grafika.

Tjahjati, Budhy dan BS Kusbiantoro (eds.). 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia.* Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tim Penyusun Prima. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Jakarta : Gita Press.

Todaro, Michael P. 1994. *Ekonomi untuk Negara Berkembang : Suatu Pengantar tentang Prinsip-Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan.* Edisi ketiga. Terjemahan Agustinus Subekti. Jakarta : Bumi Aksara.

Yunus, Hadi Sabari. 1978. *Konsep Perkembangan dan Pengembangan Daerah Perkotaan.* Yogyakarta : Fakultas Geografi, UGM.

_____ . 2001. *Struktur Tata Ruang Kota.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Warpani, Suwarjoko. 1984. *Analisis Kota dan Daerah.* Bandung : Penerbit ITB.

ARTIKEL

Anwar, Affendi dan Setia Hadi. 1996. *"Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan"*. Prisma, Nomor Khusus 25 Tahun Prisma 1971-1996, hal. 57.

Balbo, Marcello. 1993. *"Urban Planning and The Fragmented City of Developing Countries"*. TWPR 15 (1), p. 23.

Banjarmasin Post, 2003. *"Akses Jalan Darat belum Optimal."* Banjarmasin, 18 Juli 2003.

Djakapermana, Ruchyat Deni. 2003. *"Penataan Ruang Wilayah Pulau Kalimantan sebagai Suatu Konsepsi Pengembangan Wilayah dengan Mengoptimasikan Potensi Sumberdaya Alam dan Lingkungan."* Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPs 702) Program Pasca Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor. Tersedia di alamat : **http://rudyct.tripod.com**, 28 Juni 2003.

Kompas. 2002. Kolom Otonomi Daerah. Jakarta, 11 Oktober 2002

Kompas. 2003. *"Merangkul Alam Sebelum Terlambat."* Jakarta, 12 Agustus 2003.

Marwah, Sitti. 2001. *"Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai Satuan Unit Perencanaan Pembangunan Pertanian Lahan Kering Berkelanjutan."* Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPs 702) Program Pasca Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor. Tersedia di alamat : **http://rudyct.tripod.com**, 16 Januari 2004.

Rakodi, Carole. 2001. *"Forget Planning, Put Politics First? Priorities for Urban Management in Developing Countries"*. Journal of Applied Geoinformation Sciences, vol. 3, p. 209-221.

Rodrigue, Jean-Paul. 2003. *"Transport and Spatial Organization."* Tersedia di alamat : **http://people.hofstra.edu/html**, 10 Desember 2003.

Su-Ritohardoyo, dan R. Murtomo. 1992. *"Perubahan Hirarki Kota Menengah di Pulau Jawa."* Majalah Geografi Indonesia Tahun 4-6, No. 69 Fakultas Geografi UGM Yogya, hal. 28.

Wibisono, et al. 1993. *"Studi Sistem Kota-kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta"*. Forum Perencanaan Pembangunan Tahun I Volume 1. Yogyakarta : Pusat Perencanaan Pembangunan Nasional UGM.

Wikantiyoso, Respati. "*Morfologi Kampung Pedesaan : Suatu Abstraksi Fakta Empirik Kajian Kontekstual Lingkungan.*" Tersedia di alamat : **http://www.mintakat.unmer.ac.id/**, 10 Desember 2003.

MAKALAH DALAM SEMINAR

Akil, Sjarifuddin. 2002. *Konsep Pengembangan Wilayah di Indonesia.* Disampaikan dalam rangka Perkuliahan Kedinasan Program Magister. Bandung : 8 April 2002.

_____ . 2003. *Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia : Tinjauan Teoritis dan Praktis.* Disampaikan dalam Studium General Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS). Yogyakarta : 1 September 2003.

Friedman, J. and M. Douglass. 1975. *Agropolitan Development : Towards a New Strategy for Regional Planning in Asia.* Seminar on Industrialization Strategies and the Growth Pole Approach to Regional Planning and Development. Nagoya, 1975.

Soenarno. 2003. *Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam Rangka Pengembangan Wilayah.* Disampaikan dalam Seminar Nasional Agroindustri dan Pengembangan Wilayah. Februari 2003.

SKRIPSI/ TESIS

Chair, Miftahul. 2002. *Karakteristik dan Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Permukiman di Kawasan Sekitar Aliran Sungai Martapura Banjarmasin.* Tesis, Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.

Hastuti, Diana. 1999. *Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan Penentuan Sektor Unggulan Tahun 1995-1999.* Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

TERBITAN TERBATAS

Adisasmita, Rahardjo. 1993. *Teori-Teori Lokasi dan Pengembangan Wilayah.* Ujung Pandang : Universitas Muslim Indonesia.

Ma'arif, Samsul. 2000. *Pengertian Dasar dan Esensi Pengembangan Wilayah.* Diktat Kuliah. Semarang : Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

Usop, KMA et al. 1995. *Profil Kebudayaan Dayak di Kalimantan Tengah.* Palangka Raya : Kerjasama Universitas Palangka Raya – BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah.

BUKU DATA/ LAPORAN

Barito Selatan Dalam Angka Tahun 2001. BPS Kabupaten Barito Selatan, 2001.

Barito Selatan Dalam Angka Tahun 2002. BPS Kabupaten Barito Selatan, 2002.

Pendapatan Regional Kalimantan Tengah 1993-2002. BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2002.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2002. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2002.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2003. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2003.

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 1998. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan, 1998.

PERATURAN

Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan No. 4 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan No. 5 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Barito Selatan 2001-2005.

Surat Keputusan Gubernur No. 008/ 965/ IV/ Bapp tanggal 14 Mei 1999 tentang Padu Serasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1999.